



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

## TAHUN 2023

   ditjenperkeretaapian

 @ditjenperkeretaapian

 [djka.dephub.go.id](http://djka.dephub.go.id)

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi. LKIP disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 merupakan acuan pelaksanaan evaluasi kinerja dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Selain itu, diharapkan perencanaan kinerja yang telah disusun mendapatkan saran (*feedback*) guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembinaan administrasi dan dukungan manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 196507031991032001

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sasaran kegiatan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai simpul perumusan kebijakan perkeretaapian serta pelayanan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Mengacu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir), telah dilakukan evaluasi pencapaian target dan diperoleh capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian rata-rata sebesar 96,90% dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas yang telah ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
2	Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	Persentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	95,00	97,78	102,93
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian	%	55,00	56,74	103,16
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	70,00	70,37	100,53
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00	100,64	100,64
6	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	83,00	82,70	99,64

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	3	100,00
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00	63,79	63,79
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	92,00	88,10	95,76
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkantoran	Nilai	3,60	3,69	102,50

Pada Tahun 2023, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp157.802.911.000,- dan diperoleh realisasi anggaran sebesar Rp155.041.249.612,- atau sebesar 98,25%. Selain itu, telah dilaksanakan kegiatan dengan progres 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada pelaksanaan anggaran Tahun 2023 juga diperoleh efisiensi sesuai perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 1,30%, untuk itu Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah memenuhi tingkat efisiensi anggaran belanja.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI .....	2
1.3    STRUKTUR ORGANISASI .....	3
1.4    SUMBER DAYA MANUSIA .....	3
1.5    POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI .....	5
1.6    SISTEMATIKA LAPORAN .....	8
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA .....	10
2.1    RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024 .....	10
2.2    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	20
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA .....	25
3.1    TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA .....	25
3.2    PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	29
3.3    ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA .....	114
3.4    CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA TAHUN 2023 .....	118
3.5    REALISASI ANGGARAN .....	119
BAB 4 PENUTUP .....	125
4.1    TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA 125	
4.2    KESIMPULAN .....	130
4.3    REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA .....	132
<b>LAMPIRAN</b>	

# DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja .....	4
Tabel 1-2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan .....	4
Tabel 1-3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	4
Tabel 2-1	Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	12
Tabel 2-2	Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 .....	13
Tabel 2-3	Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.....	15
Tabel 2-4	Perubahan/Revisi Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 .....	21
Tabel 2-5	Target Kinerja Tahun 2023.....	22
Tabel 2-6	Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2023 .....	24
Tabel 3-1	Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian .....	26
Tabel 3-2	Rekomendasi Kebijakan terkait Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti Periode 2020-2024 .....	30
Tabel 3-3	Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2023 .....	31
Tabel 3-4	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti.....	32
Tabel 3-5	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....	33
Tabel 3-6	Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perkeretaapian yang Telah Ditetapkan Tahun 2020 s.d 2022.....	38
Tabel 3-7	Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2023 .....	42
Tabel 3-8	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian .....	43
Tabel 3-9	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....	44
Tabel 3-10	Rancangan Peraturan/Legislati Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses.....	45

Tabel 3-11	Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit Pada Tahun 2023.....	46
Tabel 3-12	Jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Keahlian/ Kompetensi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023....	49
Tabel 3-13	Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2023 .....	50
Tabel 3-14	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian.....	51
Tabel 3-15	Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 .....	52
Tabel 3-16	Kegiatan TIK Tahun 2023.....	56
Tabel 3-17	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2023 .....	57
Tabel 3-18	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian ....	58
Tabel 3-19	Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 .....	59
Tabel 3-20	Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2023.....	61
Tabel 3-21	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.....	65
Tabel 3-22	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	66
Tabel 3-23	Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....	67
Tabel 3-24	Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.....	71
Tabel 3-25	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian .....	73
Tabel 3-26	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....	74
Tabel 3-27	Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023.....	78
Tabel 3-28	Tingkat Maturitas SPIP.....	81
Tabel 3-29	Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023.....	83
Tabel 3-30	Hasil Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023 .....	83

Tabel 3-31	Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 .....	84
Tabel 3-32	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian .....	85
Tabel 3-33	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....	86
Tabel 3-34	Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 .....	91
Tabel 3-35	Capaian Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Tahun 2023 .....	92
Tabel 3-36	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	93
Tabel 3-37	Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....	94
Tabel 3-38	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2023.....	96
Tabel 3-39	Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 .....	99
Tabel 3-40	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian .....	100
Tabel 3-41	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ....	101
Tabel 3-42	Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Antar Unit Eselon I Tahun 2023 .....	105
Tabel 3-43	Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya Tahun 2023 .....	106
Tabel 3-44	Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Tahun 2023.....	107
Tabel 3-45	Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Triwulan IV Tahun 2023.....	110
Tabel 3-46	Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 .....	111
Tabel 3-47	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian .....	112
Tabel 3-48	Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ....	112
Tabel 3-49	Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 .....	116
Tabel 3-50	Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja dan Sumber Pembiayaan .....	120
Tabel 3-51	Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Output/Kegiatan .....	121



Tabel 3-52	Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 .....	123
Tabel 4-1	Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Sebelumnya .....	125
Tabel 4-2	Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 .....	131

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ...	3
Gambar 1-2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Kepangkatan dan Pendidikan.....	5
Gambar 3-1	Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2023 .....	31
Gambar 3-2	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti .....	32
Gambar 3-3	Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 .....	34
Gambar 3-4	Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2023.....	42
Gambar 3-5	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian.....	43
Gambar 3-6	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....	44
Gambar 3-7	Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2023 .....	50
Gambar 3-8	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian .....	51
Gambar 3-9	Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024.....	52
Gambar 3-10	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2023.....	57
Gambar 3-11	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian .....	58
Gambar 3-12	Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024..	59
Gambar 3-13	Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 .....	66

Gambar 3-14	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian .....	67
Gambar 3-15	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....	68
Gambar 3-16	Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 .....	72
Gambar 3-17	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	73
Gambar 3-18	Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....	74
Gambar 3-19	Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.....	84
Gambar 3-20	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	85
Gambar 3-21	Perbandingan Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024..	86
Gambar 3-22	Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.....	92
Gambar 3-23	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	93
Gambar 3-24	Perbandingan Target dan Realisasi PNBP Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	94
Gambar 3-25	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 .....	98
Gambar 3-26	Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.....	99
Gambar 3-27	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian .....	100
Gambar 3-28	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....	102
Gambar 3-29	Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.....	111
Gambar 3-30	Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian .....	112
Gambar 3-31	Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .....	113
Gambar 3-32	Capaian Keberhasilan Lainnya Tahun 2023 .....	118

Gambar 3-33 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Per Jenis Belanja / Pembiayaan.. 122

Gambar 3-34 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Per Output Kegiatan ..... 122

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Rencana Kinerja Tahunan 2023
Lampiran II.	Perjanjian Kinerja (Revisi Terakhir) Tahun 2023
Lampiran III.	Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja
Lampiran IV.	Monitoring Rencana Aksi Periode Januari – Desember 2023
Lampiran V.	Data Dukung Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja
Lampiran VI.	Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Laporan Kinerja

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih (*Clean Governance*) dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Direktorat Jenderal Perkeretaapian diberikan tanggung jawab untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan transportasi perkeretaapian kepada masyarakat umum/publik guna memenuhi aspek konektivitas, keselamatan dan pelayanan yang memadai dengan dilengkapi oleh aspek pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh Pemberi Mandat (atasan langsung) atas kinerja yang ditargetkan, serta memberikan informasi kinerja secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja dan disusun secara periodik sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban unit kerja yang disusun dengan berpedoman Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang memuat gambaran pencapaian kinerja secara transparan yang dikaitkan dengan upaya – upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan tujuan dan sasaran unit kerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur evaluasi kinerja guna pencapaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mandat yang diberikan.

## **1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan
4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum serta Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum serta dibantu beberapa kelompok fungsional tertentu.



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

### 1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2023 adalah sebanyak 129 orang, dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut.



**Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja**

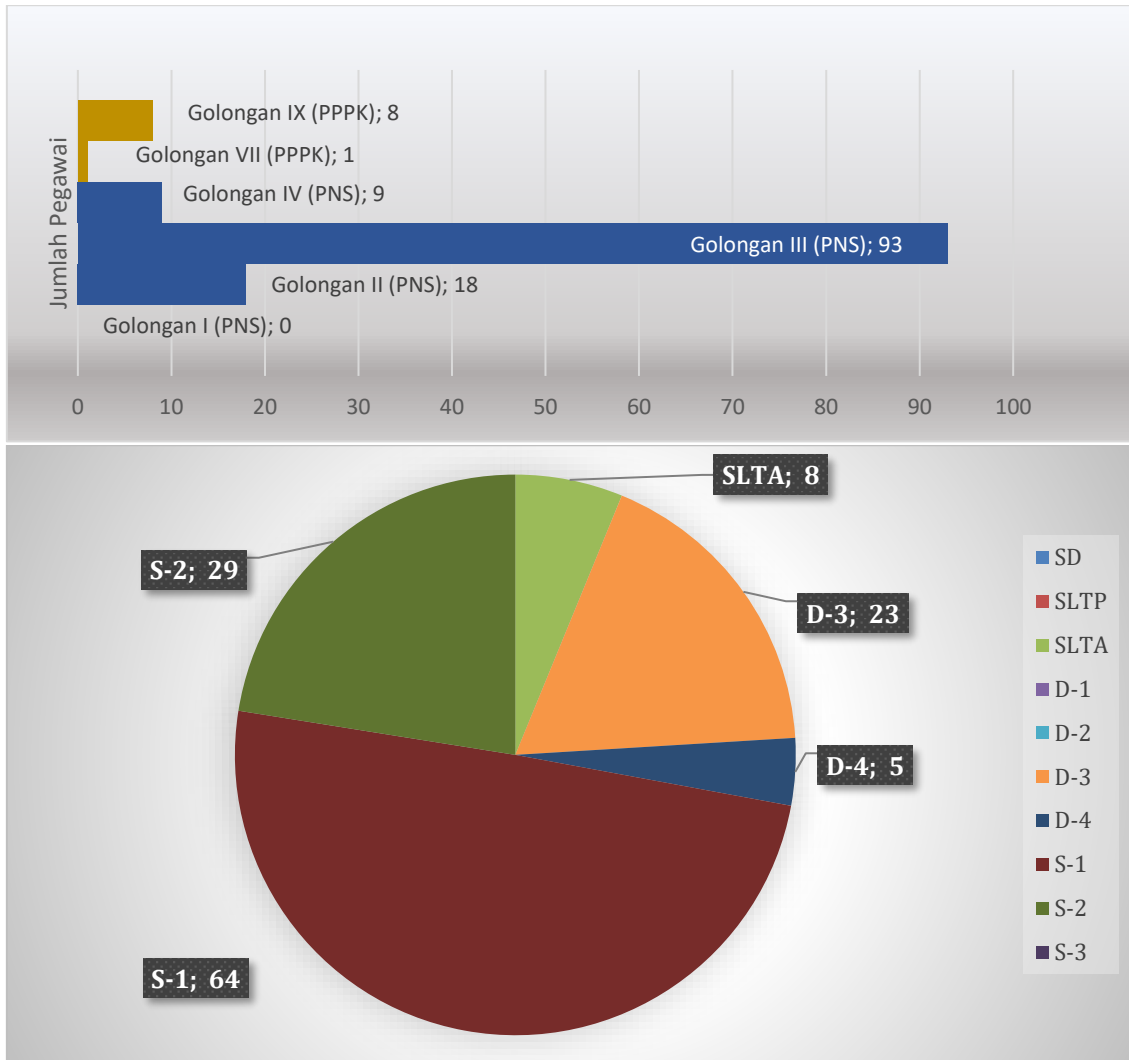
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Bagian Perencanaan	28
2	Bagian Keuangan	34
3	Bagian Hukum	26
4	Bagian Kepegawaian dan Umum	41
<b>Jumlah</b>		<b>129</b>

**Tabel 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan**

No	Golongan / Kepangkatan	Jumlah Pegawai
1	PNS Golongan I	0
2	PNS Golongan II	18
3	PNS Golongan III	93
4	PNS Golongan IV	9
5	PPPK Golongan VIII	1
6	PPPK Golongan IX	8
<b>Jumlah</b>		<b>129</b>

**Tabel 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	8
4	D-1	0
5	D-2	0
6	D-3	23
7	D-4	5
8	S-1	64
9	S-2	29
10	S-3	0
<b>Jumlah</b>		<b>129</b>



Gambar 1-2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Kepangkatan dan Pendidikan

## 1.5 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

### 1.5.1 Potensi dan Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perbaikan unit kerja di masa mendatang. Pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

1. **Aspek perencanaan**, yaitu integrasi rencana strategis, penganggaran/program dan pengukuran kinerja dalam sistem perencanaan pembangunan perkeretaapian dengan mempertimbangkan *outcome* kegiatan serta *cascading* indikator kinerja pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
2. **Aspek organisasi, tata laksana dan sumber daya manusia**, yaitu penataan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi pengembangan Badan Pelayanan Umum (BLU) dan perkuatan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian melalui pengoptimalan Satuan Pelayanan. Selain itu, isu kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga menjadi sangat penting untuk menjalankan fungsi sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian. Optimalisasi Pegawai dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) serta pemenuhan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) bidang perkeretaapian (penguji, inspektur, asesor, lainnya) juga menjadi salah satu upaya yang perlu ditingkatkan.
3. **Aspek keuangan** yaitu peningkatan monitoring dan evaluasi untuk percepatan pelaksanaan anggaran termasuk pertanggungjawaban anggaran yang transparan dan akuntabel. Kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) perlu dikaji lebih baik agar tidak mengganggu pencapaian kinerja unit kerja serta dukungan terhadap agenda prioritas nasional. Selain itu, aspek penerimaan negara melalui PNBP juga sangat perlu menjadi hal prioritas dimana pada beberapa tahun terakhir tidak dapat memenuhi target kinerja.
4. **Aspek Barang Milik Negara**, yaitu inventaris dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dibutuhkan dengan tata kelola yang baik sebagai bentuk akuntabilitas serta upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. **Aspek perundang-undangan dan legalitas hukum**, yaitu percepatan penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan diantaranya terkait peningkatan kinerja keselamatan dan pelayanan perkeretaapian,

pemenuhan NSPK penggunaan teknologi baru serta mendukung kemudahan investasi di bidang perkeretaapian.

6. **Aspek Pengendalian Intern**, yaitu peningkatan penerapan manajemen risiko berdasarkan KM 69 Tahun 2023 diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran unit kerja.
7. **Aspek administrasi dan pengelolaan pelayanan penunjang** yaitu tuntutan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam peningkatan layanan administrasi perkantoran, layanan perizinan serta pengelolaan data dan informasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian.

### 1.5.2 Permasalahan yang Dihadapi

Keberhasilan kinerja unit kerja sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkeretaapian antara lain:

1. Keterbatasan pendanaan pembangunan perkeretaapian melalui APBN sehingga diperlukan sumber pendanaan alternatif diantaranya melalui investasi swasta serta mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
2. Keterbatasan SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara kuantitas dan kualitas yang memenuhi standar kompetensi teknis termasuk untuk Unit Pelaksana Teknis/Balai dan Satuan Pelayanan dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan perkeretaapian;
3. Regulasi bidang perkeretaapian memerlukan penyempurnaan terutama NSPK terkait penerapan teknologi perkeretaapian yang baru serta dukungan kemudahan investasi sektor transportasi perkeretaapian.
4. Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk yang bersumber dari pengoperasian prasarana milik negara (*Track Access Charge/TAC*);

5. Belum optimalnya pengendalian intern dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam kegiatan pembangunan perkeretaapian yang dilaksanakan termasuk kebutuhan peningkatan integritas pegawai.
6. Gangguan keamanan siber untuk layanan regulator perkeretaapian berbasis teknologi informasi masih marak terjadi, termasuk kendala pengelolaan data bidang perkeretaapian yang belum valid dan terintegrasi.

## **1.6 SISTEMATIKA LAPORAN**

Pada dasarnya Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja. Capaian kinerja (*performance results*) diperbandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) termasuk membandingkan dengan tahun sebelumnya serta target pada dokumen Rencana Strategis. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya kegiatan yang mendukung kinerja (*performance gap*) guna perbaikan terhadap kinerja serta pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah serta memperhatikan rekomendasi dari Kementerian PANRB dan APIP terkait pelaporan kinerja. Adapun sistematika Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

### **1. BAB 1 PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang dan gambaran singkat mengenai unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta uraian aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi unit kerja.

## 2. **BAB 2 PERENCANAAN KINERJA**

Memuat ringkasan/ikhtisar dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai dasar pengukuran capaian kinerja Tahun 2023.

## 3. **BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA**

Memuat pengukuran dan analisis capaian kinerja unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Setiap sasaran dan indikator kinerja unit kerja dilakukan analisis capaian kinerja dengan perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2023, perbandingan target dan realisasi kinerja dengan beberapa tahun sebelumnya dan target dokumen jangka menengah (Renstra), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta upaya peningkatan kinerja (termasuk *benchmark* kinerja, uraian pengaruh terhadap penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, organisasi, jabatan/pegawai). Selain itu juga diuraikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM), capaian keberhasilan lainnya dan uraian pelaksanaan anggaran Tahun 2023.

## 4. **BAB 4 PENUTUP**

Memuat tindak lanjut rekomendasi pada laporan kinerja sebelumnya termasuk upaya perubahan budaya kinerja serta ringkasan laporan kinerja yang berupa kesimpulan umum atas pencapaian kinerja dan rekomendasi guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

## 5. **LAMPIRAN**

Terdiri dari dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) revisi terakhir, komitmen rekomendasi peningkatan kinerja, monitoring rencana aksi, uraian data dukung capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan serta dokumentasi dan laporan pembahasan kinerja di internal unit kerja.

# BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

## 2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

### 2.1.1 Tujuan

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan berdasarkan Visi dan Misi Presiden periode 2020-2024 serta melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Rencana Strategis tahun 2020-2024 adalah mewujudkan simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai Misi sebagai berikut:

1. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif;
2. Mewujudkan birokrasi yang *Good Governance* dan *Clean Government*;
3. Mewujudkan SDM regulator yang kompeten dan profesional;
4. Merumuskan regulasi perkeretaapian yang responsif dan berkelanjutan;

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, ditetapkan tujuan yang lebih terarah yaitu:

1. Penyediaan rekomendasi kebijakan yang mendukung konektivitas;
2. Pengelolaan birokrasi yang *agile*, efektif, dan efisien;
3. Peningkatan kualitas SDM perkeretaapian yang berkelanjutan;
4. Perumusan regulasi yang adaptif dengan perkembangan.

### 2.1.2 Sasaran

Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 - 2024 termasuk *cascading*

sasaran strategis, ditetapkan sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

1. Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian;
2. Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
3. Tersedianya SDM perkeretaapian yang berkompeten dan profesional;
4. Sistem informasi dan teknologi yang andal;
5. Dukungan publik terhadap penyelenggaraan perkeretaapian;
6. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditempuh strategi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan mendukung pengembangan konektivitas perkeretaapian melalui pelaksanaan kegiatan survey/studi kebijakan/*masterplan*/pedoman teknis pembinaan dan peningkatan perkeretaapian;
2. Melaksanakan penyusunan legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM perkeretaapian yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertifikat keahlian tertentu;
4. Melaksanakan pengembangan/pengelolaan sistem informasi berbasis IT dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian;
5. Melaksanakan publikasi penyelenggaraan perkeretaapian dalam rangka membangun dan mempertahankan sebuah reputasi citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat;
6. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, RKT, RKA, Perjanjian Kinerja) serta pelaksanaan evaluasi (LKIP);



7. Melaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran termasuk optimalisasi dan meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran;
8. Melaksanakan monitoring perolehan PNBP bidang perkeretaapian;
9. Melaksanakan implementasi pengendalian intern termasuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
10. Melaksanakan kegiatan layanan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perkeretaapian, layanan internal dan layanan perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

### 2.1.3 Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan sebagaimana pada Tabel berikut:

**Tabel 2-1 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja				
				2020	2022	2022	2023	2024
Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	a.	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian	Dokumen	-	4	5	5	6
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	b.	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	20	40	60	80	100
Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	c.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	%	25	35	45	55	65
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	d.	Persentase pemenuhan rencana induk TIK bidang perkeretaapian	%	35	50	65	80	100
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja				
				2020	2022	2022	2023	2024
Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	f.	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	85	86	87	88	90
	g.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	3	3	3	4
	i.	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	727 Milyar	841 Milyar	925 Milyar	1.018 Milyar	1.120 Milyar
	j.	Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	91	93	95	97	97
	k.	Persentase pemenuhan fasilitas dan layanan perkantoran	%	100	100	100	100	100

Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan reviu terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian PANRB dengan tetap mengacu *cascading* sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Reviu terhadap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Mengacu pada hal tersebut, Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2-2 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian**

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan
Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	a.	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	b.	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%
Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	c.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	%
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	d.	Persentase pemenuhan rencana induk TIK bidang perkeretaapian	%
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	%
Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	f.	Indeks RB Ditjen Perkeretaapian	Indeks
	g.	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai
	h.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level
	i.	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian	%
	j.	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%
	k.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai

Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* (SMART) dengan uraian analisa sebagai berikut:

Tabel 2-3 Analisa SMART Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	Merupakan parameter untuk mengukur pemanfaatan/tindak lanjut dari penyusunan rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang ditindaklanjuti/dilegalkan Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis 2020-2024.  $\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Ditindaklanjuti/Dilegalkan Pada Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun pada Periode Renstra 2020-2024}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program konektivitas	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase pencapaian target legislasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan legislasi berupa rancangan dan peraturan perundangan di bidang perkeretaapian dalam periode Rencana Strategis 2020-2024	Jumlah capaian legislasi periode Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah target legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.  $\text{Persentase Pencapaian Target Legisasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Capaian Legisasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Legisasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	Merupakan parameter untuk mengukur kondisi SDM/ASN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian mendukung fungsi regulator penyelenggaraan	Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	perkeretaapian	$\frac{\text{Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu}}{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu}} \times 100\%$	tersedia		
Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat pemenuhan Sistem Informasi dan Teknologi yang ada di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Rencana Induk	<p>Jumlah ketersediaan sistem TIK dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian dibandingkan dengan jumlah rencana sistem TIK mengacu pada Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian.</p> $\text{Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Rencana Sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kemenhub Bidang Perkeretaapian}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase Pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur pemenuhan informasi publik kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan perkeretaapian	Jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, online dan media sosial yang mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian dalam bentuk siaran pers dan konten media sosial pada tahun berjalan dibandingkan target pelaksanaan publikasi periode setahun (365 media sosial, 50 siaran pers/liputan).	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		$\text{Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Publikasi Ditjen Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Publikasi Ditjen Perkeretaapian Periode Setahun}} \times 100\%$			
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP (Nilai skala 1-100)	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Setditjen mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Merupakan Nilai Tingkat/Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai hasil penilaian APIP/BPKP (Level 1-5)	Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Program pada Sekretariat Jenderal Kemenhub serta selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta <i>Core Bussiness</i> Setditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
				mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	
Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Perkeretaapian	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian (Rupiah) sesuai target tahunan	<p>Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan.</p> $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan rumusan tertentu dan nilainya diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Kerja (skala 0-100%)	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian Output Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Eselon I. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik;</li> <li>• 80% - 90%: Kategori Baik;</li> <li>• 60% - 80%: Kategori Cukup;</li> <li>• 50% - 60%: Kategori Kurang;</li> </ul>	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / Tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.</li> </ul>			
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Merupakan parameter untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala <i>likert</i> 1-5) diperoleh dari hasil survei kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan <i>core business</i> / tugas dan fungsi Setditjen Perkeretaapian mendukung sasaran strategis dan program dukungan manajemen	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2024



#### **2.1.4 Program dan Kegiatan**

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan program yaitu Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dengan tolak ukur indikator kinerja kegiatan. Secara rinci uraian program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

1. Program Infrastruktur Konektivitas:
  - a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian;
  - b. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen:
  - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian;
  - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian;
  - c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian;
  - d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian;
  - e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Setiap Instansi Pemerintah memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja unit kerja, melaporkan capaian realisasi kinerja serta menilai keberhasilan unit kerja. Pada Tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja dikarenakan perubahan kebijakan, strategi dan alokasi anggaran Tahun 2023 termasuk perubahan pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berikut uraian perubahan/revisi target kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023.

**Tabel 2-4 Perubahan/Revisi Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Capaian			Target PK 2023 (Awal)	Target PK 2023 Revisi I	Target PK 2023 Revisi II	Keterangan
			2020	2021	2022				
SK 1 Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	IKK1 Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas yang telah ditindaklanjuti	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kegiatan pendukung Tahun 2023 mencakup 2 Kajian Kemanfaatan dan 1 Studi Kelayakan (target tidak berubah)
SK 2 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	IKK2 Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian)	%	31,11	48,89	62,22	80,00	80,00	95,00	Semula direncanakan penambahan sebanyak 8 peraturan menjadi 15 peraturan di tahun 2023 (target berubah/ meningkat)
SK 3 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang berkompeten dan profesional	IKK3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	%	29,19	55	39,64	55,00	55,00	55,00	Sertifikat keahlian teknis serta manajerial/ fungsional tertentu untuk SDM regulator/DJKA (target tidak berubah)
SK 4 Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	IKK4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	37,04	37,04	59,26	74,00	70,00	70,00	Semula direncanakan penambahan 4 sistem TIK pada Tahun 2023, namun terdapat 2 kegiatan TIK yang terdampak AA/blokir sehingga tidak dapat dilaksanakan (target berubah)
SK 5 Dukungan Publik Terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	IKK5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	104,95	108,93	127,10	100,00	100,00	100,00	Pemenuhan Pameran, Penerbitan <i>Newsletter</i> Ditjen Perkeretaapian, Penyusunan Publikasi Perkeretaapian Melalui Layanan Media Sosial dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (target tidak berubah)
SK 6 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	81,92	82,15	80,42	83,00	83,00	83,00	Target mengacu pada realisasi Tahun 2020-2022 (target tidak berubah)
	IKK7 Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Penilaian mandiri dengan penjaminan kualitas dari APIP dan evaluasi oleh BPKP (target tidak berubah)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Capaian			Target PK 2023 (Awal)	Target PK 2023 Revisi I	Target PK 2023 Revisi II	Keterangan
			2020	2021	2022				
	IKK8 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	-	54,18	31,52	100,00	100,00	100,00	Target PNBP Ditjen Perkeretaapian Tahun 2023 sebesar Rp. 1,19 triliun (target tidak berubah)
	IKK9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	-	98,03	98,54	92,00	92,00	92,00	Capaian kinerja mengacu pada Nilai Kinerja Anggaran (NKA) berdasarkan PMK No.22/PMK.02/2021 (target tidak berubah)
	IKK10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	3,0	3,0	3,60	Capaian kinerja mengacu pada hasil survey kepuasan dari pegawai Ditjen Perkeretaapian terkait pelayanan ketatausahaan, kerumahaan dan Kepegawaian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (target berubah/meningkat)

## 2.2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 (revisi terakhir), ditetapkan target kinerja Tahun 2023 per periode triwulan sebagai berikut:

Tabel 2-5 Target Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
SP1 Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian	IK 1 Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas	%	100	75	75	100	100
SP 2 Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IK 2 Persentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	95	66	72	95	95

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
SP 3 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK 3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian tertentu	%	55	39	45	50	55
SP 4 Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	IK 4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	70	62	62	62	70
SP 5 Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	IK 5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100	25	50	75	100
SP 6 Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK 6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83	-	-	-	83
	IK 7 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	-	-	-	3
	IK 8 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100	3	10	41	100
	IK 9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	92,00	26,70	40,70	56,30	92,00
	IK 10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,60	3,00	3,00	3,00	3,60

## 2.2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2023

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (revisi terakhir), alokasi anggaran unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 sebesar Rp157.802.911.000,- dengan rincian anggaran sebagai berikut:

**Tabel 2-6 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Tahun 2023**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Pagu Berdasarkan PK Revisi Terakhir (Rp)</b>
SP1 Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	IK 1 Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang ditindaklanjuti	4.442.381.000
SP 2 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	IK 2 Persentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	4.096.976.000
SP 3 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK 3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian tertentu	6.114.840.000
SP 4 Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	IK 4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	3.730.707.000
SP 5 Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	IK 5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	11.998.727.000
SP 6 Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK 6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	15.354.374.000
	IK 7 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	4.412.358.000
	IK 8 Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	6.071.708.000
	IK 9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	6.440.718.000
	IK 10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	95.140.122.000
<b>Jumlah</b>		<b>157.802.911.000</b>

# BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menginventarisir, menganalisis dan menggunakan informasi dalam menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi/organisasi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan serta pencapaian sasaran guna mempermudah interpretasi pencapaian kinerja.

Hasil pengukuran kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja selanjutnya disebut pencapaian kinerja. Pencapaian kinerja dipergunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan tujuan dan sasaran dalam kerangka pemenuhan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja setiap uraian sasaran ditunjukkan melalui pencapaian setiap indikator kinerja pada sasaran yang berorientasi *outcome*.

Pengukuran terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu dengan pencapaian hasil/*output* suatu kegiatan dalam kurun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Pengukuran terhadap pencapaian kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan antara variabel *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Variabel *input* dan *output* tersebut dapat berupa anggaran, sumber daya manusia maupun kegiatan itu sendiri.

Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui capaian

kinerja antara rencana dan realisasi suatu *output* dan *outcome* kegiatan digunakan formula sebagai berikut:

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \left[ \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun metode pengukuran/perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang ditindaklanjuti/dilegalkan Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun pada periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024.  $\text{Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang sudah Ditindaklanjuti/Dilegalkan Pada Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Disusun pada Periode Renstra 2020-2024}} \times 100\%$
2	Persentase Pencapaian Target Legalisasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	Jumlah capaian legislasi periode Tahun 2020 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan dengan jumlah target legislasi bidang perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai dokumen Rencana Strategis.  $\text{Persentase Pencapaian Target Legalisasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Capaian Legislasi Bidang Perkeretaapian Periode Tahun 2020 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Legalisasi Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 sesuai Dokumen Renstra}} \times 100\%$

No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
3	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu	%	<p>Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian.</p> $\text{Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu} = \frac{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian tertentu}}{\text{Jumlah ASN Ditjen Perkeretaapian}} \times 100\%$
4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	<p>Jumlah ketersediaan sistem TIK dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian dibandingkan dengan jumlah rencana sistem TIK mengacu pada Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian.</p> $\text{Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Sistem TIK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian}}{\text{Jumlah Rencana Sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kemenhub Bidang Perkeretaapian}} \times 100\%$
5	Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	<p>Jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, <i>online</i> dan media sosial yang mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian dalam bentuk siaran pers dan konten media sosial pada tahun berjalan dibandingkan target pelaksanaan publikasi periode setahun (365 media sosial, 50 siaran pers/liputan).</p> $\text{Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Jumlah Publikasi Ditjen Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Target Publikasi Ditjen Perkeretaapian Periode Setahun}} \times 100\%$
6	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	<p>Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Perkeretaapian.</p>
7	Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level	<p>Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian (Level 1-5) diperoleh berdasarkan hasil penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan evaluasi penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP.</p>



No	Indikator kinerja Kegiatan	Satuan	Tata Cara perhitungan
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	<p>Realisasi penerimaan PNBP bidang perkeretaapian dibandingkan dengan target perolehan PNBP bidang perkeretaapian pada tahun berjalan.</p> $\text{Persentase Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}}{\text{Target Perolehan PNBP Bidang Perkeretaapian pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
9	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian merupakan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I (skala 0-100%) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian Output Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi, yang nilainya dapat diperoleh pada <i>Dashboard</i> Aplikasi SMART Unit Eselon I. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik;</li> <li>• 80% - 90%: Kategori Baik;</li> <li>• 60% - 80%: Kategori Cukup;</li> <li>• 50% - 60%: Kategori Kurang;</li> <li>• Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.</li> </ul>
10	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	<p>Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran (skala 1-5) diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Ditjen Perkeretaapian yang memperoleh layanan ketatausahaan, SDM dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.</p>

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja termasuk analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi/upaya peningkatan kinerja yang perlu dilakukan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis unit kerja;

4. *Benchmarking* kinerja dengan tingkat nasional/internasional pada beberapa Indikator Kinerja Kegiatan;
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Capaian lainnya.

## **3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA**

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian sasaran dituangkan melalui program/kegiatan yang saling berkaitan dan bersinergi membentuk *output* dan *outcome* dalam mencapai suatu sasaran tertentu. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan 6 (enam) sasaran dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berikut pengukuran kinerja untuk masing-masing Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan tersebut:

### **3.2.1 Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian**

#### **Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir), persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100% dengan pemenuhan sebanyak 12 peraturan/legislasi pada Tahun 2020-2023. Realisasi sampai dengan Tahun 2023, telah dilaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan terkait pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian sebanyak 12 dokumen yang telah ditindaklanjuti melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian sebagaimana pada Tabel berikut.

**Tabel 3-2 Rekomendasi Kebijakan terkait Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Periode 2020-2024**

No	Rekomendasi Kebijakan	Tahun Pelaksanaan	Penetapan
1	Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024	2020	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.005/SK.89/DJKA/2020 tanggal 18 Desember 2020
2.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Minangkabau	2021	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK.209/3/24/DJKA/2021 tanggal 27 Desember 2021
3.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian mendukung Kereta Api Bandara Internasional Soekarno-Hatta	2021	
4.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Kualanamu	2021	
5.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pengoperasian Kereta Api Perintis Lintas Kertapati-Indralaya	2021	
6.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian kereta api Bandara Internasional Minangkabau	2022	
7.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian mendukung kereta api Bandara Internasional Soekarno Hatta	2022	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP DJKA 60 Tahun 2022 Tanggal 31 Oktober 2022
8.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Kualanamu	2022	
9.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pengoperasian Kereta Api Perintis Lintas Kertapati-Indralaya	2022	
10.	Kajian Dukungan Pengembangan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang	2023	
11.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Kereta Api Bandara Internasional Adi Sumarmo	2023	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP DJKA 185 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023
12.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Kereta Api Bandara Internasional Yogyakarta	2023	

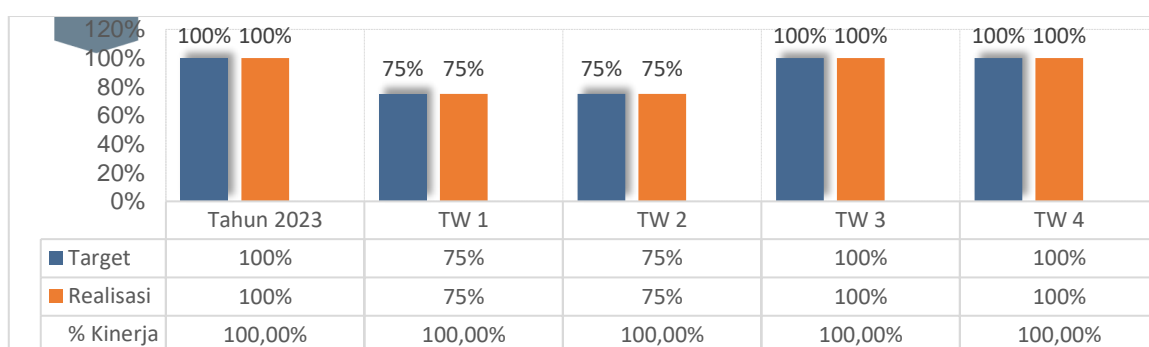
## 1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Pada Tahun 2023, rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang disusun sebanyak 3 dokumen dan telah selesai dilaksanakan seluruhnya sesuai target waktu serta telah ditindaklanjuti melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian. Untuk itu, rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang disusun dari Tahun 2020-2023 dengan total sebanyak 12 rekomendasi kebijakan seluruhnya telah ditindaklanjuti sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Dengan realisasi persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti pada Tahun 2023 sebesar 100% dan target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 100%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 3-3 Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan (%)	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	100	75	75	100	100	75	75	100	100	100	100	100	100	100



**Gambar 3-1 Capaian Kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Tahun 2023**

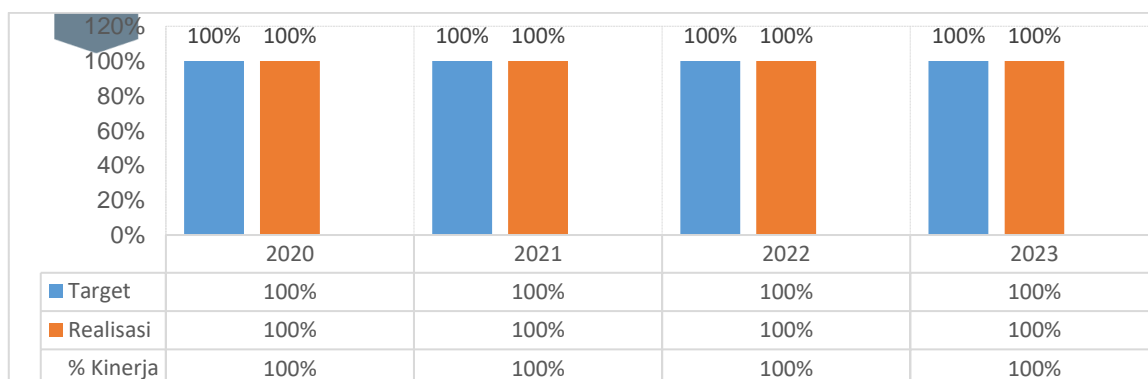
## 2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang disusun pada Tahun 2020 s.d 2023 telah seluruhnya ditindaklanjuti untuk dimanfaatkan oleh unit kerja terkait dengan pengesahan/penetapan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian baik berupa rencana strategis, studi kelayakan, evaluasi kemanfaatan dan kajian kebijakan lainnya. Secara keseluruhan *trend* pencapaian indikator kinerja tersebut dapat memenuhi target setiap tahun yaitu mencapai 100%.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dari Tahun 2020 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3-4 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100 (Kinerja 100%)	100 (Kinerja 100%)	100 (Kinerja 100%)	100 (Kinerja 100%)



**Gambar 3-2 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti**

### 3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024, target Indikator Kinerja Kegiatan masih berupa *output* yaitu jumlah rekomendasi kebijakan dan dilakukan revisi sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Kementerian PANRB terkait Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar IKK yang masih bersifat *output/kerja* diubah menjadi IKK yang bersifat *outcome/kinerja* dengan tetap mengacu *cascading* Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Pada Tahun 2023, realisasi rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sebanyak 3 rekomendasi kebijakan atau kumulatif dari Tahun 2020-2023 sebanyak 12 rekomendasi kebijakan dengan pengesahan/penetapan. Apabila dibandingkan dengan target pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 5 rekomendasi kebijakan pada Tahun 2023 atau kumulatif dari Tahun 2020-2023 sebanyak 14 rekomendasi kebijakan, maka diperoleh kinerja pada Tahun 2023 sebesar 85,71% (perhitungan kumulatif). Sedangkan jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024 yang menargetkan secara kumulatif sebanyak 20 rekomendasi kebijakan, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 60,00%.

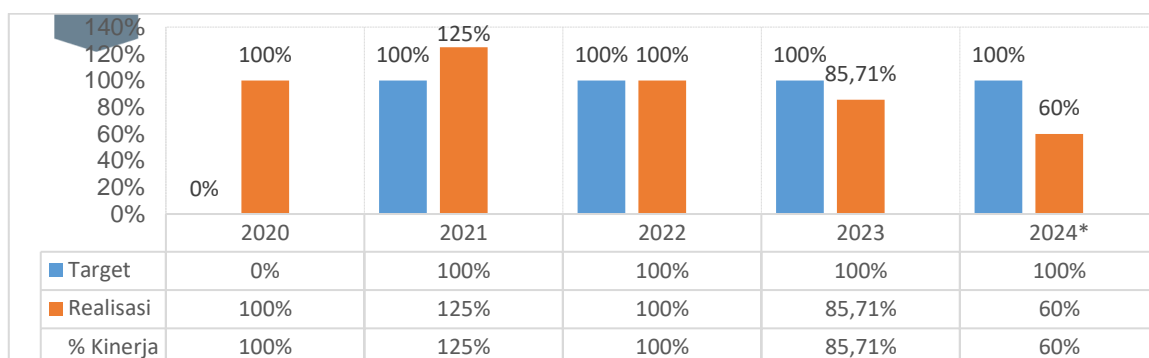
Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis (konversi dalam bentuk persentase) dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3-5 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas	Target (%)	- (tidak ada target Renstra)	100 (target Renstra 4 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 4)	100 (target Renstra 5 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 9)	100 (target Renstra 5 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 14)	100 (target Renstra 6 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 20)

Indikator Kinerja	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	Realisasi (%)	100 (realisasi 1 rekomendasi kebijakan)	125 (realisasi Tahun 2021 sebanyak 4 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 2020-2021 sebanyak 5 rekomendasi kebijakan)	100 (realisasi Tahun 2022 sebanyak 4 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 2020-2022 sebanyak 9 rekomendasi kebijakan)	85,71 (realisasi Tahun 2023 sebanyak 3 rekomendasi kebijakan/ kumulatif 2020-2023 sebanyak 12 rekomendasi kebijakan)	-
	Capaian Kinerja (%)	100,00	125,00	100,00	85,71	60,00 (perbandingan dengan target kumulatif Renstra s.d Tahun 2024)

\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024

**Gambar 3-3 Perbandingan Realisasi dan Target Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

#### 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan studi/kajian pendukung untuk penyusunan rekomendasi kebijakan setiap tahunnya dan ditindaklanjuti dengan proses penetapan/pengesahan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan mengacu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri tersebut mengamankan bahwa dokumen perencanaan (diantaranya

studi kelayakan, evaluasi manfaat) perlu pengesahan/penetapan oleh Pejabat yang berwenang untuk proses selanjutnya.

Dalam pelaksanaan studi/kajian pendukung tersebut, telah dilakukan pendampingan dan pemantauan pada setiap tahapan mulai dari persiapan/pendahuluan, pengumpulan dan analisa data hingga tahap penyusunan rekomendasi kebijakan, diantaranya meliputi:

1. Penyiapan dokumen pengadaan barang dan jasa;
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Biro LPPBMN sampai dengan kontrak kegiatan;
3. Penetapan Tim Pengarah dan Tim Pendamping yang kompeten melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian;
4. Koordinasi awal dan *kick off meeting* oleh penanggungjawab kegiatan;
5. Survey pendahuluan termasuk pendampingan dari tim pendamping kegiatan;
6. Asistensi/pengarahan dan pembahasan Laporan Pendahuluan;
7. Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan pengumpulan data/survey, baik survey primer dan survey sekunder dalam rangka penyusunan Laporan Antara;
8. Asistensi/pengarahan dan pembahasan Laporan Antara;
9. Asistensi/pengarahan dalam rangka persiapan pembahasan konsep Laporan Akhir;
10. Pembahasan/FGD Laporan Akhir yang melibatkan instansi/stakeholder baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga sektor lain terkait serta Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian terkait;
11. Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait penetapan/pengesahan hasil studi/kajian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Proses pendampingan dan pemantauan dilaksanakan agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akurat/valid dan tepat sasaran serta terealisasi dengan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian. Pendampingan dan



pemantauan juga dilakukan melalui pembahasan/FGD dan konsultasi dengan Tim Pengarah dan Tim Pendamping yang kompeten yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan juga melibatkan instansi/*stakeholder* baik Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait serta Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Sarana Perkeretaapian guna sinergisitas dalam penyusunan rekomendasi kebijakan.

Hasil pengesahan/penetapan selanjutnya dijadikan acuan dalam rangka pemanfaatan hasil rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf b) serta jenis informasi yang ditetapkan oleh PPID Utama Kementerian Perhubungan, kajian/studi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 merupakan jenis informasi publik yang dikecualikan.

Guna melakukan optimalisasi hasil pembangunan serta peningkatan pelayanan operasional kereta api, Setditjen Perkeretaapian telah menyampaikan rangkuman/*summary* hasil kajian kepada *stakeholder* terkait untuk dijadikan acuan/referensi dan ditindaklanjuti. Adapun hasil kajian/studi yang telah disampaikan kepada *stakeholder* yaitu:

1. Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Kereta Api Bandara Internasional Adi Sumarmo melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor LT.204/I/1/KI/DJKA/2023 tanggal 3 Oktober 2023 kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Direktur Utama PT. KAI (persero);
2. Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Yogyakarta melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor LT.204/I/2/KI/DJKA/2023 tanggal 3 Oktober 2023 kepada Kepala Bappeda Provinsi DI

Yogyakarta, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DI Yogyakarta dan Direktur Utama PT. KAI (persero).

## 5. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan studi/kajian pendukung Tahun 2024 khususnya pada tahapan pengadaan barang dan jasa dengan penyiapan dokumen dan koordinasi dengan Biro LPPBMN.
2. Antisipasi kegiatan studi/kajian pendukung yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan pengusulan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.
3. Koordinasi terkait usulan penetapan Tim Pengarah dan Tim Pendamping melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk persiapan pelaksanaan kegiatan studi/kajian pendukung.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja dan optimalisasi hasil kajian/studi mendukung konektivitas perkeretaapian, diantaranya:

1. **Penyesuaian strategi/kebijakan:** Penyiapan Rencana Strategis bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 pada Tahun 2024 yang akan mempengaruhi usulan kegiatan prioritas terkait rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian.
2. **Penyesuaian aktivitas dan anggaran:**
  - a. Evaluasi prioritas kegiatan studi/kajian pendukung Tahun 2024 untuk pemenuhan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA).
  - b. Pemanfaatan rencana aksi sebagai tindak lanjut hasil studi/kajian evaluasi kemanfaatan guna pertimbangan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat teknis dan Balai terkait pada Tahun 2025.

### 3.2.2 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian

#### Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir), persentase pencapaian legislasi berupa rancangan dan peraturan perundangan bidang perkeretaapian ditargetkan sebesar 95% dengan kumulatif pemenuhan sebanyak 43 peraturan/legislasi dari target 45 peraturan/legislasi untuk periode Tahun 2020-2024.

Sampai dengan Tahun 2023, diperoleh realisasi persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian kumulatif sebanyak 44 peraturan/legislasi dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut.

**Tabel 3-6 Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perkeretaapian yang telah Ditetapkan Tahun 2020 s.d 2023**

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
1.	HK.205/SK.10/DJKA/20	Peraturan Dirjen KA tentang Tata Cara Layanan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian Secara Elektronik	7 Februari 2020
2.	PM 18 Tahun 2020	Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	9 April 2020
3.	HK.205/A.107/DJKA/20	Peraturan Dirjen KA tentang Pedoman Pembatasan Penumpang di Sarana Perkeretaapian Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID	9 April 2020
4.	PM 21 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik	23 April 2020
5.	PM 22 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis	23 April 2020
6.	PM 25 Tahun 2020	Pengendalian Transportasi Selama Masa mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	23 April 2020
7.	KP.651 Tahun 2020	Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 1790 Tahun 2019 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian Pada Grafik Perjalanan Kereta Api 2019	9 Mei 2020

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
8.	PM 41 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	8 Juni 2020
9.	HK.205/SK.52/DJKA/2020	Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Petunjuk dan Tata Cara Pengawasan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara oleh Balai Teknik Perkeretaapian	20 Juli 2020
10.	PM 60 Tahun 2020	Pengawasan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi Informasi	18 Agustus 2020
11.	Pasal 54 UU Nomor 11 Tahun 2020	Cipta Kerja (perubahan pasal dan ketentuan di dalam UU 23 Tahun 2007)	5 Oktober 2020
12.	KM 347 Tahun 2020	Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian	28 Desember 2020
13.	KM 348 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik	29 Desember 2020
14.	KM 349 Tahun 2020	Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perintis	29 Desember 2020
15.	PP 33 Tahun 2021	Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian	2 Februari 2021
16.	PP 5 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2 Februari 2021
17.	PM 12 Tahun 2021	Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi	1 Mei 2021
18.	PM 20 Tahun 2021	Perubahan Atas PM. 31 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum	4 Juni 2021
19.	PM 21 Tahun 2021	Perubahan Atas PM. 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	4 Juni 2021
20.	PM 22 Tahun 2021	Perubahan Atas PM. 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	4 Juni 2021
21.	PM 38 Tahun 2021	Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	7 Juni 2021
22.	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	10 Agustus 2021

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
23.	PM 80 Tahun 2021	Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2018 Tentang Peta Jabatan Dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelaksana Tennis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	30 September 2021
24.	PM 1 Tahun 2022	Perubahan Kedua PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	11 Januari 2022
25.	PM 7 Tahun 2022	Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi	20 April 2022
26.	PM 16 Tahun 2022	Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rancang Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian	22 Agustus 2022
27.	PM 21 Tahun 2022	Tata Cara Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	16 September 2022
28.	PM 36 Tahun 2022	Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian	2 Desember 2022
29.	PM 18 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
30.	PM 19 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Kecakapan Pengatur Perjalanan dan Pengendali Perjalanan Kereta Api	9 Juni 2023
31.	PM 20 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
32.	PM 21 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
33.	PM 22 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
34.	PM 23 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian	9 Juni 2023
35.	PM 24 Tahun 2023	Perubahan Atas PM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api	9 Juni 2023
36.	PM 25 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	15 Juni 2023
37.	PM 26 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
38.	PM 27 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian	27 Juni 2023

No	Nomor	Peraturan Tentang	Tanggal Terbit
39	PM 28 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
40	PM 29 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
41	PM 30 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian	27 Juni 2023
42	PM 31 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
43	PM 32 Tahun 2023	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	27 Juni 2023
44	PM 49 Tahun 2023	Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri	6 November 2023

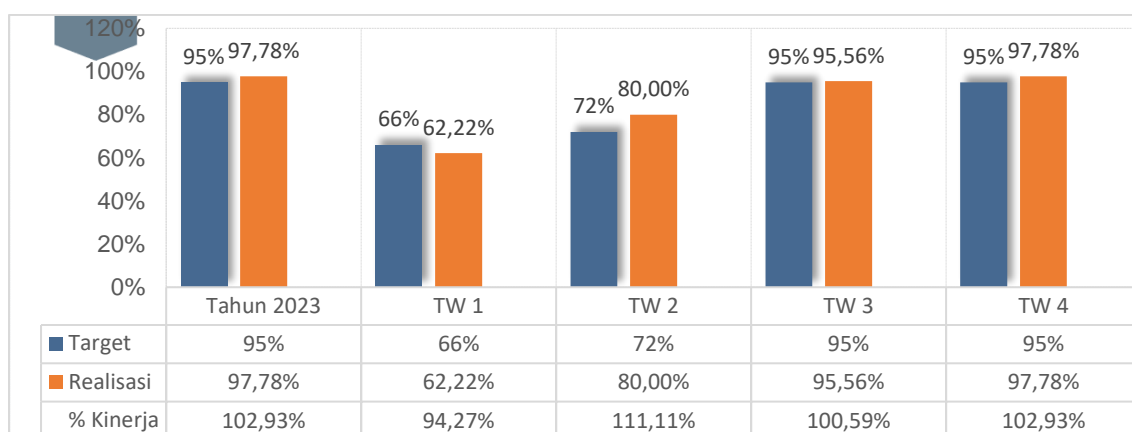
#### 1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Realisasi capaian kinerja pada periode Tahun 2020 - 2023 terdiri dari pencapaian Tahun 2020 sebanyak 14 peraturan/legislasi, Tahun 2021 sebanyak 9 peraturan/legislasi, Tahun 2022 sebanyak 5 peraturan/legislasi dan Tahun 2023 sebanyak 16 peraturan/legislasi yang ditetapkan sehingga secara kumulatif yang dicapai sebanyak 44 peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang diterbitkan atau ditetapkan.

Dengan jumlah penyelesaian peraturan/legislasi tersebut, maka realisasi persentase pencapaian legislasi bidang perkeretaapian pada Tahun 2023 sebesar 97,78% (realisasi 44 peraturan/legislasi dari target Renstra sebanyak 45 peraturan/legislasi s.d Tahun 2024). Dengan target Tahun 2023 sebesar 95% dan realisasi 97,78% tersebut, maka diperoleh capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 102,93%. Realisasi kumulatif sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 3-7 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan (%)	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	95	66	72	95	95	62,22	80,00	95,56	97,78	94,27	111,11	100,59	102,93	102,93



**Gambar 3-4 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2023**

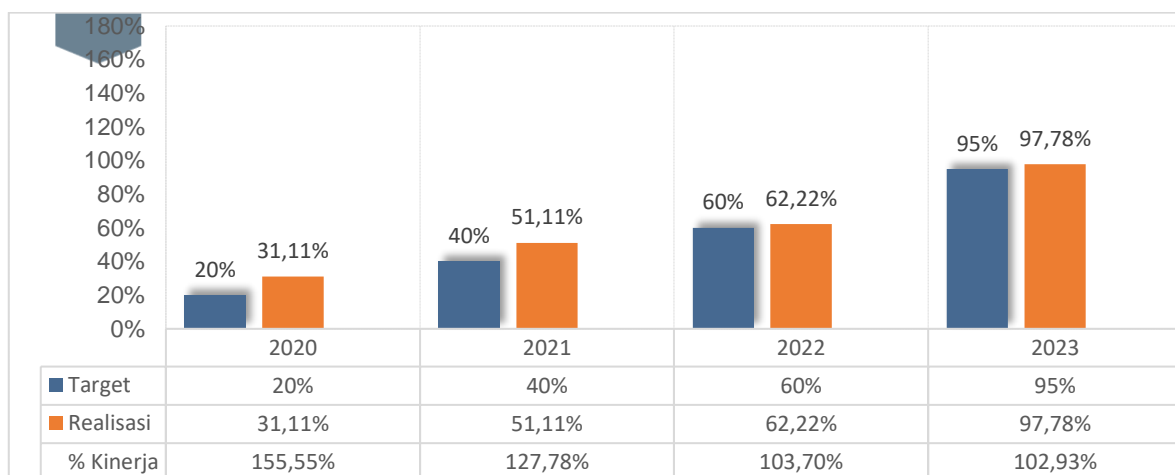
## 2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Pencapaian target kinerja pada periode Tahun 2020-2023 rata-rata telah melampaui target (kinerja > 100%) setiap tahunnya yang mayoritas berupa perubahan/revisi Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri, atau ketentuan teknis bidang perkeretaapian.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja 3 tahun terakhir yaitu Tahun 2020, 2021, 2022 dan juga Tahun 2023 untuk indikator Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian sebagai berikut.

**Tabel 3-8 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023  
Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan)  
di Bidang Perkeretaapian**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	%	20	40	60	95	31,11 (Realisasi Tahun 2020 sebanyak 14 peraturan/legislasi, dengan capaian kinerja 155,55%)	51,11 (Realisasi Tahun 2020-2021 sebanyak 23 peraturan/legislasi, dengan capaian kinerja 127,78%)	62,22 (Realisasi Tahun 2020-2022 sebanyak 28 peraturan/legislasi, dengan capaian kinerja 103,70%)	97,78 (Realisasi Tahun 2020-2023 sebanyak 44 peraturan/legislasi, dengan capaian kinerja 102,93%)



**Gambar 3-5 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian**

### 3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Persentase Pencapaian Target Legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) Bidang Perkeretaapian Tahun 2023 sebesar 97,78% (kumulatif 44 peraturan/legislasi), sedangkan target Tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Strategis sebesar 80% (kumulatif 36 peraturan/legislasi) sehingga pencapaian kinerja 122,23%. Secara keseluruhan dengan perbandingan target pada dokumen Renstra pada



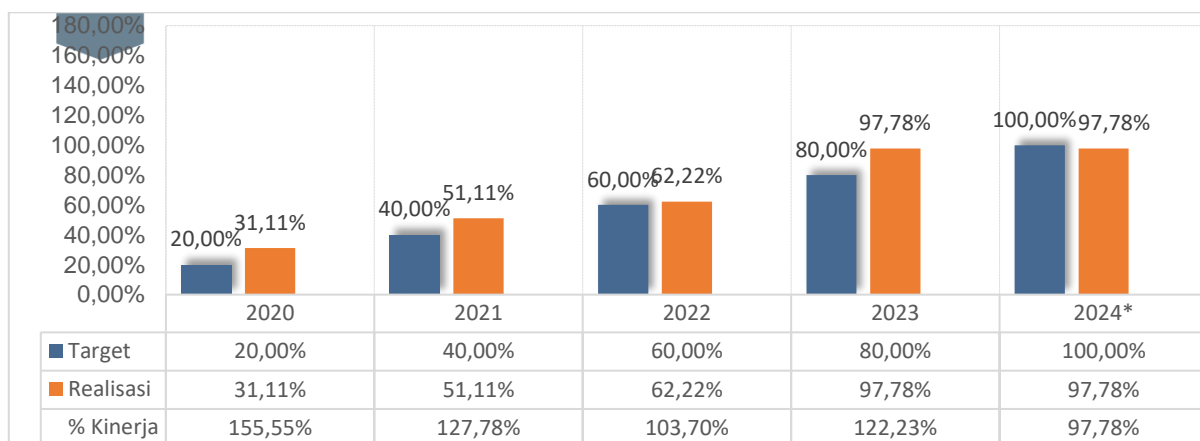
Tahun 2020-2023, setiap tahun dapat melampaui target yang ditetapkan (kinerja <100%).

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target di akhir periode Rencana Strategis pada Tahun 2024 dengan target 100%, diperoleh capaian kinerja sebesar 97,78%. Untuk itu, masih diperlukan upaya pemenuhan penyelesaian peraturan/legislasi pada Tahun 2024 guna mencapai target Rencana Strategis. Perbandingan capaian kinerja dengan target Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 3-9 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian	Target (%)	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	Realisasi (%)	31,11	51,11	62,22	97,78	-
	Capaian Kinerja (%)	155,55	127,78	103,70	122,23	97,78

\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024

**Gambar 3-6 Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

#### 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Penyusunan peraturan perundangan bidang perkeretaapian (baru, revisi) dilaksanakan untuk memenuhi amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta dalam upaya penyelesaian permasalahan dan

peningkatan kinerja pembangunan perkeretaapian. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan peraturan perundang-undangan bidang perkeretaapian tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berkoordinasi dan memfasilitasi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk kegiatan penyusunan dan/atau revisi terhadap peraturan/legislasi sesuai kebutuhan.

Penyusunan dilaksanakan secara bertahap melalui pembahasan secara intensif dengan seluruh pihak terkait (Biro Hukum, Direktorat Teknis, Kemenkumham, Sekretariat Negara, operator, dan lainnya), termasuk dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya. Capaian pada Tahun 2023 didorong dengan kebutuhan perubahan ketentuan terkait sertifikasi kecakapan SDM perkeretaapian dan kebutuhan percepatan implementasi jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian dengan penerbitan pedoman penyusunan formasi (penguji, asisten penguji, auditor, inpektur). Selain itu, juga terdapat kebutuhan untuk mendukung pengoperasian LRT Jabodebek dengan penerbitan PM 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi serta pemenuhan standar, tata cara pengujian dan sertifikasi kelaikan kereta api kecepatan normal dengan penggerak sendiri.

Sampai dengan akhir Tahun 2023, juga terdapat beberapa rancangan peraturan/legislasi yang masih berproses diantaranya:

**Tabel 3-10 Rancangan Peraturan/Legislati Bidang Perkeretaapian yang Masih Berproses**

No	Judul Regulasi	Posisi Saat Ini	PIC
1.	Revisi PM 156 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah diberikan penomoran yakni PM 59 Tahun 2023.</li> <li>Posisi saat ini sedang menunggu pengundangan di Kemenkumham.</li> </ul>	Direktorat Prasarana
2.	Rancangan Revisi PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah diberikan penomoran yakni PM 60 Tahun 2023.</li> </ul>	Direktorat LLAKA

No	Judul Regulasi	Posisi Saat Ini	PIC
	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian	• Posisi saat ini sedang menunggu pengundangan di Kemenkumham.	
3.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PM 122 Tahun 2015 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian	• Telah diberikan penomoran yakni PM 61 Tahun 2023. • Posisi saat ini sedang menunggu pengundangan di Kemenkumham.	Direktorat LLAKA
4.	Revisi PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan PSO dengan Kereta api Kelas Ekonomi	• Telah dilaksanakan Rapat di Biro Hukum. • Posisi saat ini sedang menunggu jadwal Harmonisasi dengan Kemenkumham.	Direktorat LLAKA

## 5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap capaian kinerja, diperoleh data bahwa pada Tahun 2023 telah terbit sebanyak 57 legislasi berupa Peraturan Menteri Perhubungan di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3-11 Legislasi/Peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang Terbit pada Tahun 2023**

No	Unit Eselon I	Jumlah Peraturan
1.	Sekretariat Jenderal	9 Peraturan Menteri Perhubungan
2.	Inspektorat Jenderal	1 Peraturan Menteri Perhubungan
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	8 Peraturan Menteri Perhubungan
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	8 Peraturan Menteri Perhubungan
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	12 Peraturan Menteri Perhubungan
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	16 Peraturan Menteri Perhubungan
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3 Peraturan Menteri Perhubungan
8.	Badan Kebijakan Transportasi	-
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	-

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan unit kerja terbanyak yang melakukan penerbitan peraturan/legislasi dibandingkan unit kerja Eselon I lainnya dengan jumlah sebanyak 16 peraturan/legislasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perkeretaapian lebih

baik dan produktif, walaupun tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan terhadap legislasi di masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan tersebut.

## 6. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, diperlukan koordinasi yang baik dengan Direktorat teknis dan Biro Hukum Setjen Kementerian Perhubungan yang mengusulkan rancangan peraturan baru maupun perubahan/revisi yang didukung dengan kajian akademis yang memadai. Apabila dibutuhkan, dapat bekerjasama dengan tenaga *expert/ahli* hukum untuk membantu percepatan penyelesaian peraturan perundangan bidang perkeretaapian sesuai amanah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, diperlukan percepatan penyelesaian peraturan/legislasi khususnya peraturan perundangan bidang perkeretaapian yang strategis/mendesak dan telah berproses baik di Kementerian Hukum dan HAM serta Biro Hukum, diantaranya revisi PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan PSO dengan Kereta api Kelas Ekonomi. Hal lain yang perlu diantisipasi adalah kebutuhan peraturan/legislasi untuk mendukung penerapan teknologi perkeretaapian baru diantaranya *Autonomous Rail Rapid Transit (ART)* yang direncanakan di IKN baru.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. **Penyesuaian strategi/kebijakan:** Penyiapan Rencana Strategis bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 pada Tahun 2024 khususnya kerangka regulasi yang memuat kebutuhan peraturan/legislasi perundangan bidang perkeretaapian.

## 2. **Penyesuaian aktivitas dan anggaran:**

- a. Antisipasi kegiatan pendukung penyusunan peraturan/legislasi yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.
- b. Usulan penyusunan naskah akademis untuk mendukung kebutuhan kerangka regulasi pada rancangan Rencana Strategis melalui usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

### 3.2.3 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional

#### **Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditargetkan persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian teknis termasuk fungsional tertentu sebesar 55% dari jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada Tahun 2023, jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian semula sebanyak 1.263 pegawai bertambah menjadi 1.588 pegawai pada akhir Tahun 2023 karena adanya penambahan CPNS Pola Pembibitan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya diidentifikasi jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian teknis termasuk fungsional tertentu sebanyak 901 pegawai. Adapun rincian jenis kompetensi/keahlian teknis dan fungsional tertentu sebagai berikut:

1. **Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)** meliputi jabatan fungsional kepegawaian, pegawai hasil penyetaraan jabatan fungsional tertentu, PNS Tahun 2020-2023 serta PPPK Tahun 2023 dengan jabatan formasi yang langsung ditetapkan sebagai jabatan fungsional tertentu.
2. **Keahlian/Kompetensi Teknis** meliputi Auditor, Inspektur Sarana, Inspektur Prasarana, Penguji Prasarana (Jalur dan Bangunan,

Fasilitas Operasi), Penguji Sarana, Assesor, PPNS, PPKA, Ahli K3, Ahli Teknologi GoA 3 dan Ahli Kereta Cepat.

3. ***Keahlian/kompetensi manajerial tertentu*** meliputi kompetensi Manajemen Risiko yang dilaksanakan beberapa tingkat (*Officer, Analyst, Professional*), ahli KPBU, PPK Tipe C dan kompetensi lainnya.

**Tabel 3-12 Jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Keahlian/ Kompetensi Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Setditjen Perkeretaapian	94
2	Direktorat LLAKA	70
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	98
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	90
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	89
6	BTP Medan	56
7	BTP Padang	32
8	BTP Palembang	39
9	BTP Jakarta	52
10	BTP Bandung	40
11	BTP Semarang	43
12	BTP Surabaya	45
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	56
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	48
15	BPKAR Sumatera Selatan	29
16	BPKA Sulawesi Selatan	20
<b>Total</b>		<b>901</b>

### 1. **Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja**

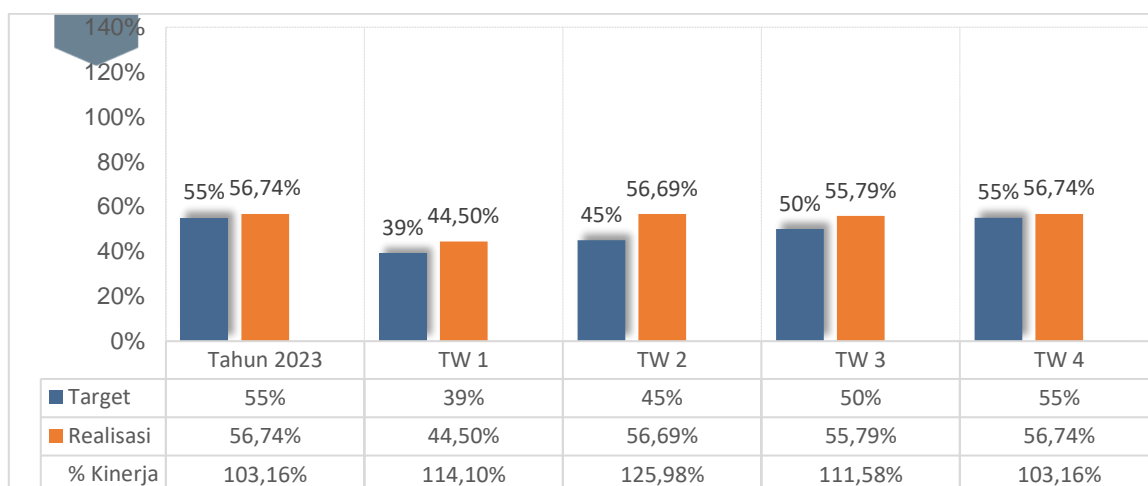
Berdasarkan uraian jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian teknis dan fungsional/keahlian tertentu sebanyak 901 pegawai dengan jumlah ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian keseluruhan sebanyak 1.588 pegawai, maka diperoleh realisasi persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian sebesar 56,74%.

Dengan target persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian pada Tahun 2023 sebesar 55,00%

dan capaian sebesar 56,74%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 103,16%. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 3-13 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	55%	39	45	50	55	44,50	56,69	55,79	56,74	114,10	125,98	111,58	103,16	103,16



**Gambar 3-7 Capaian Kinerja Per Triwulan Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tahun 2023**

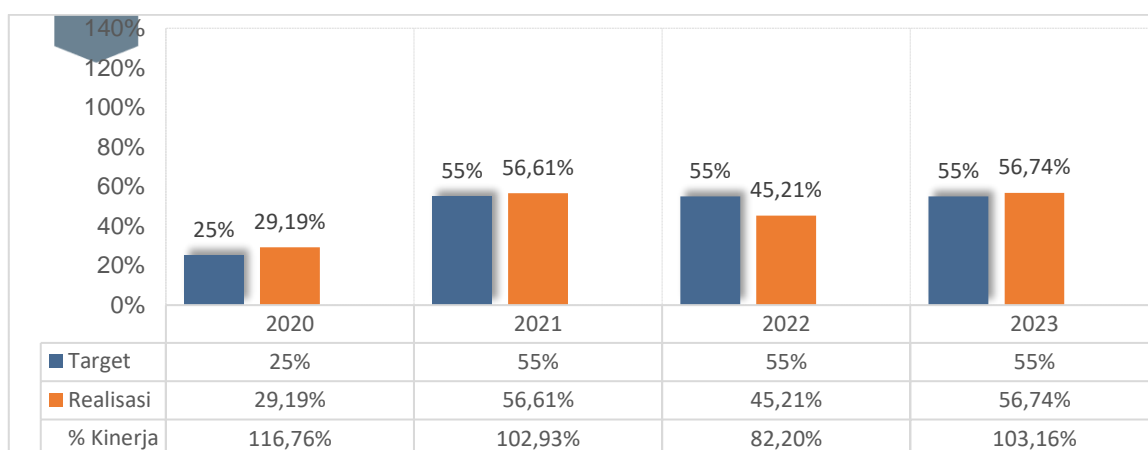
## 2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Realisasi kinerja dengan target kinerja pada 3 tahun terakhir untuk indikator persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian diidentifikasi mengalami peningkatan dimana pada Tahun 2020 diperoleh sebesar 29,19% dan pada Tahun 2023 mencapai 56,74%. Salah satu faktor pendorong peningkatan persentase tersebut diantaranya dengan dukungan penambahan pegawai yang signifikan hasil pengadaan pegawai CPNS dan PPPK dengan dilengkapi jabatan

fungsional/kompetensi tertentu. Uraian realisasi kinerja dengan target kinerja 3 tahun terakhir diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 3-14 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	%	25	55	55	55	29,19 (Kinerja 116,76%)	56,61 (Kinerja 102,93%)	45,21 (Kinerja 82,20%)	56,74 (Kinerja 103,16%)



**Gambar 3-8 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/ Keahlian**

### 3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

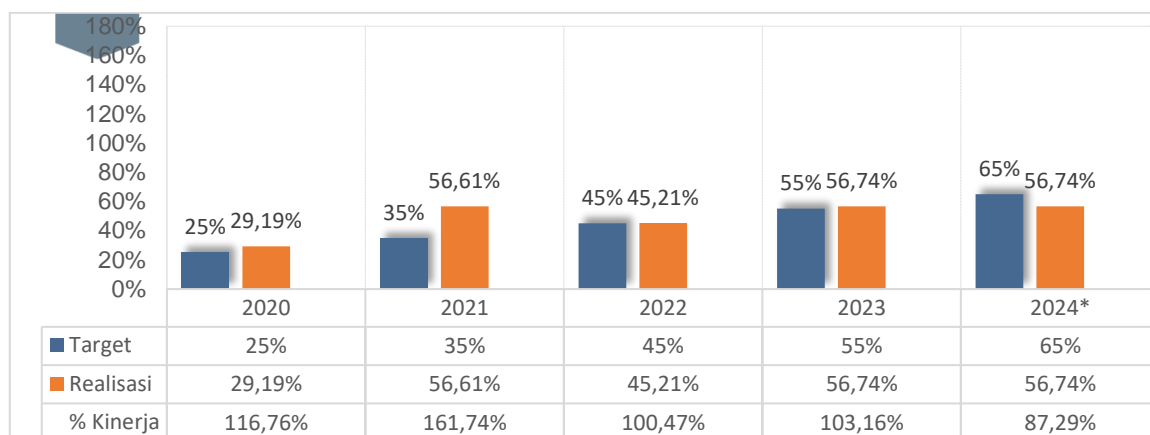
Realisasi persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian pada Tahun 2023 sebesar 56,74% dari jumlah seluruh ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sedangkan target Tahun 2023 berdasarkan dokumen Rencana Strategis sebesar 55% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103,16%. Secara keseluruhan target kinerja pada Rencana Strategis dapat terpenuhi untuk periode Tahun 2020-2023.



Namun apabila dibandingkan dengan target di akhir periode Rencana Strategis pada Tahun 2024 dengan target 65,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 87,29%. Untuk itu, masih diperlukan upaya peningkatan kompetensi/keahlian ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 guna mencapai target Rencana Strategis. Perbandingan capaian kinerja dengan target Rencana Strategis diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 3-15 Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian	Target (%)	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00
	Realisasi (%)	29,19	56,61	45,21	56,74	-
	Capaian Kinerja (%)	116,76	161,74	100,47	103,16	87,29



\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024

**Gambar 3-9 Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

#### 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Faktor keberhasilan dalam pencapaian target kinerja adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis perkeretaapian secara masif selama Tahun 2023, diantaranya terkait pendidikan kompetensi inspektur

perkeretaapian (inspektur sarana dan inspektur prasarana perkeretaapian), asesor, serta penguji prasarana dan sarana perkeretaapian guna mendukung pelaksanaan tugas regulator penyelenggaraan perkeretaapian termasuk untuk operasional Satuan Pelayanan di berbagai wilayah Balai Teknik Perkeretaapian. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan tersebut juga didorong dengan penyediaan jabatan fungsional tertentu bidang perkeretaapian diantaranya penguji, inspektur, asesor, dan lainnya.

Selain itu, juga dilaksanakan beberapa kegiatan peningkatan kompetensi SDM di bidang manajerial/umum di Tahun 2023 diantaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen risiko (Tahap III dan IV), pengadaan barang/jasa, manajemen proyek serta pelatihan okupasi PPK.

Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan secara masif tersebut didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai serta didorong oleh komitmen pimpinan dalam rangka penguatan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku regulator bidang perkeretaapian yang perlu didukung oleh SDM yang memadai tidak hanya dari sisi kuantitas namun juga kualitas yang diukur dengan kemampuan/kompetensi yang dimiliki.

## **5. Upaya Peningkatan Kinerja**

Peningkatan jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu perlu dipertahankan di periode berikutnya. Beberapa upaya/rekomendasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja antara lain:

1. Percepatan penyesuaian/*inpassing* jabatan ASN ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu bidang perkeretaapian termasuk koordinasi dengan Kementerian PANRB dan Pusbin Jabatan Fungsional Transportasi untuk penetapan kelas jabatan.
2. Lanjutan program magang ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 dengan bekerjasama operator/badan usaha/industri bidang perkeretaapian.

3. Lanjutan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan termasuk bimbingan teknis terkait manajerial/umum dan teknis perkeretaapian kepada ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. **Penyesuaian strategi/kebijakan:** Penyiapan Rencana Strategis Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029 pada Tahun 2024 khususnya terkait kebutuhan SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menjalankan tugas sebagai regulator secara optimal, efektif dan efisien.
2. **Penyesuaian aktivitas dan anggaran:** Antisipasi kegiatan pendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.
3. **Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai:** Diusulkan penyesuaian penempatan SDM setelah *inpassing* Jabatan Fungsional Tertentu bidang perkeretaapian sesuai kompetensi (misalnya untuk penguji dan asisten penguji di Balai Pengujian Perkeretaapian), termasuk penempatan SDM kompeten untuk menjalankan tugas dan fungsi Satuan Pelayanan di Balai Teknik Perkeretaapian.

### 3.2.4 Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal

#### Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir), diperoleh target persentase pemenuhan Rencana Induk TIK bidang perkeretaapian ditetapkan sebesar 70% atau pemenuhan sebanyak 19 sistem TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari rencana 27 sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 222 Tahun 2020).

Pada Tahun 2023, realisasi capaian secara kumulatif dari Tahun 2020 s.d 2023 adalah 19 sistem TIK yang telah terbangun sesuai bidang tugas meliputi LLAKA, prasarana, sarana, keselamatan dan dukungan manajemen/sekretariat termasuk 2 sistem TIK yang baru terbangun pada Tahun 2023 yaitu aplikasi penetapan identitas sarana perkeretaapian dan aplikasi layanan BLU Balai Pengujian Perkeretaapian.

Secara rinci 19 sistem TIK yang telah terbangun adalah sebagai berikut:

1. **Bidang LLAKA** sebanyak 6 sistem TIK meliputi: aplikasi perijinan *online*, aplikasi *streaming* CCTV, aplikasi posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru, aplikasi motis (angkutan motor gratis), aplikasi *open track* lalu lintas kereta api, data *warehouse* angkutan kereta api.
2. **Bidang prasarana perkeretaapian** sebanyak 4 sistem TIK meliputi: aplikasi perizinan perpotongan dan persinggungan jalur KA dengan bangunan lain, aplikasi sertifikasi prasarana perkeretaapian, pemetaan program pengelolaan dan pengembangan informasi kelaikan fasilitas operasi, MOP5 (master data jalur KA, jembatan kereta api).
3. **Bidang sarana perkeretaapian** sebanyak 2 sistem TIK yaitu aplikasi sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian dan aplikasi penetapan identitas sarana perkeretaapian.
4. **Bidang keselamatan perkeretaapian** sebanyak 1 sistem TIK yaitu: aplikasi sertifikasi SDM perkeretaapian.
5. **Bidang dukungan manajemen/sekretariat** sebanyak 6 sistem TIK yaitu: *Website*, Portal Aplikasi, *Database Studi (DJKA Docs)*, *Database Barang Milik Negara (BMN)*, *Enterprise Service Bus (ESB)* dan aplikasi layanan BLU Balai Pengujian Perkeretaapian.

Pada Tahun 2023, juga dilaksanakan beberapa kegiatan TIK oleh beberapa unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mendukung pencapaian kinerja pemenuhan Rencana Induk TIK bidang perkeretaapian baik kegiatan pengembangan maupun pengelolaan/pemeliharaan sistem TIK. Berikut uraian kegiatan TIK yang dilaksanakan pada Tahun 2023:

Tabel 3-16 Kegiatan TIK Tahun 2023

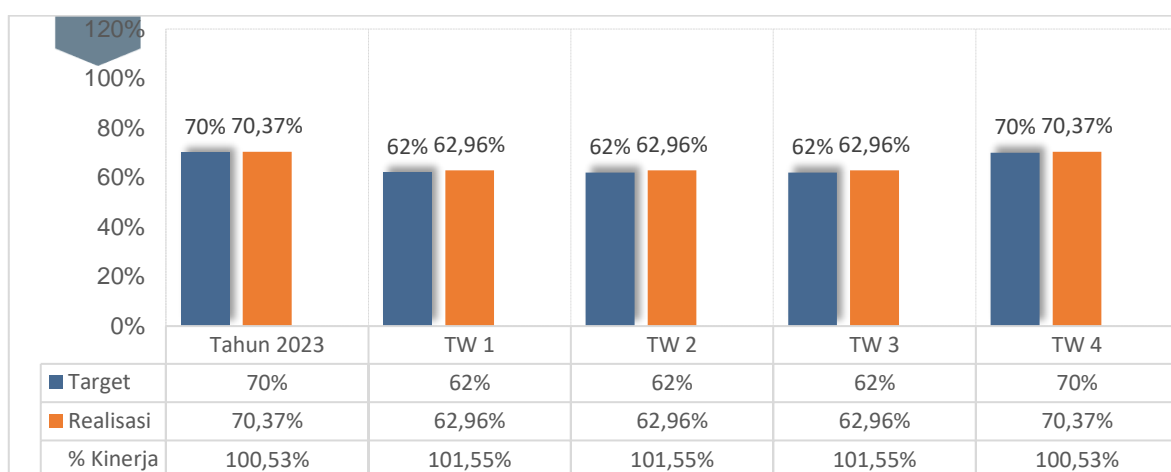
Unit Kerja	Nama Kegiatan	Keterangan
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Pengembangan Aplikasi Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian <i>Online</i>	Selesai, berprogres UAT dan VA
	<i>Bandwidth</i> dan Jaringan Pemantauan Perjalanan Kereta Api	Selesai, dilaksanakan diantaranya untuk mendukung pemantauan penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
	Studi Perencanaan Sistem Informasi Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/ <i>Track Access Charge</i> (TAC)	Selesai
Direktorat Sarana Perkeretaapian	Pembangunan Sistem Aplikasi Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian Berbasis Digital	Selesai, berprogres UAT dan VA
Setditjen Perkeretaapian	Pengembangan <i>Website</i> Ditjen Perkeretaapian	Selesai
	Pengelolaan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	Selesai
	Pengembangan Aplikasi <i>Database</i> Perencanaan Teknis Bidang Perkeretaapian	Selesai
Balai Pengujian	Pembangunan Aplikasi Layanan BLU Balai Pengujian Perkeretaapian	Selesai, berprogres UAT dan VA

### 1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi kumulatif sistem TIK Tahun 2020-2023 sebanyak 19 sistem TIK, maka diperoleh persentase pemenuhan Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian sebesar 70,37% (19 sistem TIK dari rencana 27 sistem TIK berdasarkan Rencana Induk TIK). Selanjutnya dengan target Tahun 2023 sebesar 70%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,53%. Rincian target dan realisasi kinerja per triwulan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 3-17 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan (%)	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	70	62	62	62	70	62,96	62,96	62,96	70,37	101,55	101,55	101,55	100,53	100,53



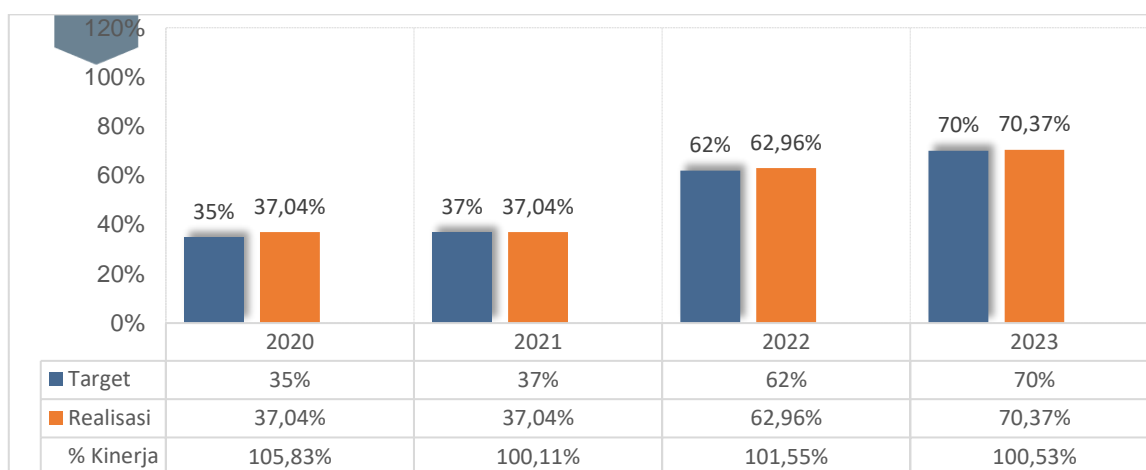
**Gambar 3-10 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Tahun 2023**

## 2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Dalam 3 tahun terakhir diperoleh bahwa target yang ditetapkan telah terpenuhi setiap tahun (kinerja > 100%). Realisasi kegiatan TIK setiap tahun mengalami peningkatan didukung dengan kebijakan digitalisasi pelayanan agar lebih efektif, efisien dan transparan. Perbandingan realisasi kinerja dengan target 3 tahun terakhir sebagaimana pada Tabel berikut.

**Tabel 3-18 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023  
Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	%	35	37	62	70	37,04 (Kinerja 105,83%)	37,04 (Kinerja 100,11%)	62,96 (Kinerja 101,55%)	70,37 (Kinerja 100,53%)



**Gambar 3-11 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian**

### 3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

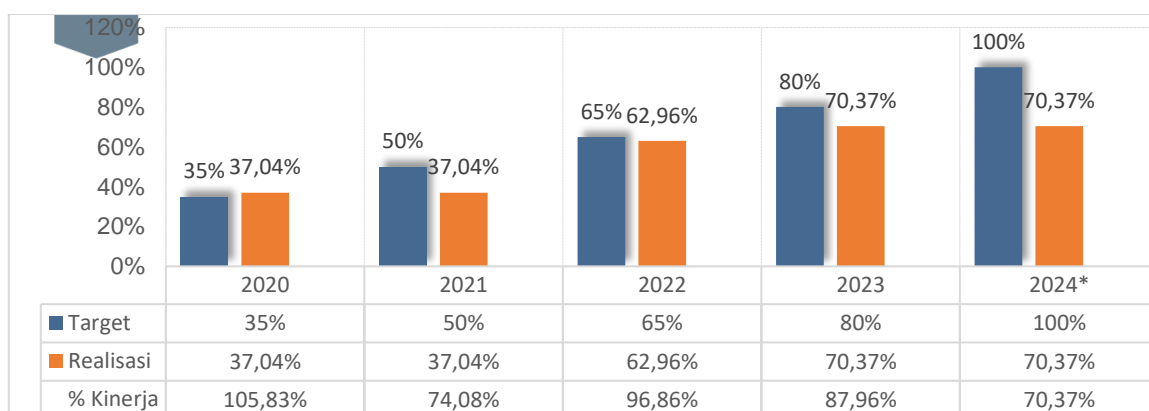
Dengan realisasi persentase pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian sebesar 70,37% dan target Tahun 2023 yang tercantum pada Rencana Strategis sebesar 80,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 87,96%. Pada periode Tahun 2021 – 2023, target berdasarkan Rencana Strategis tidak dapat dipenuhi diantaranya karena adanya kebijakan penghematan/pemotongan anggaran dan *Automatic Adjustment* (AA) dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 serta peningkatan perekonomian nasional. Untuk itu, beberapa kegiatan TIK yang telah diprogramkan dan dianggarkan tidak dapat dilaksanakan pada periode tersebut.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis yaitu Tahun 2024 sebesar 100,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 70,37% atau masih terdapat gap kebutuhan sistem TIK yang perlu dipenuhi pada Tahun 2024 sebanyak 8 Sistem TIK. Namun hal tersebut sulit dipenuhi dikarenakan keterbatasan anggaran Tahun 2024 serta kebijakan penyederhanaan aplikasi sesuai arsitektur SPBE Kementerian Perhubungan.

**Tabel 3-19 Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	Target (%)	35,00	50,00	65,00	80,00	100,00
	Realisasi (%)	37,04	37,04	62,96	70,37	-
	Capaian Kinerja (%)	105,83	74,08	96,86	87,96	70,37

\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024

**Gambar 3-12 Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

#### 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung pada Tahun 2023 diantaranya:



1. Pembentukan Tim Pengelola Website Tahun 2023 serta pelaksanaan koordinasi dan pembahasan pengembangan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk dukungan pengembangan *subsite* BPKAR Sumatera Selatan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
2. Koordinasi dan pembahasan pengelolaan portal aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang fokus pada peningkatan keamanan system serta penerapan *Single Sign On* (SSO) Kementerian Perhubungan.
3. Koordinasi dan pembahasan pengelolaan data bidang perkeretaapian termasuk pengoptimalan ESB Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
4. Pelaksanaan rapat koordinasi dan pembinaan kegiatan TIK Tahun 2023 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala yang mencakup beberapa topik pembahasan:
  - a. Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan kegiatan TIK Tahun 2022-2023 yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
  - b. Evaluasi SPBE dan penyiapan masukan terkait arsitektur SPBE Kementerian Perhubungan terkait perkeretaapian.
  - c. Koordinasi dan pembahasan strategi penyederhanaan aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
  - d. Persiapan usulan kegiatan TIK Tahun 2024.
  - e. *Workshop* peningkatan keamanan siber.
5. Pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6. Pendampingan pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) dan *Vulnerability Assessment* (VA) untuk aplikasi/sistem informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
7. Pelaksanaan Reviu Tingkat I untuk usulan kegiatan TIK tahun berjalan 2023 (Balai Pengujian Perkeretaapian) dan proses lanjut usulan Reviu Tingkat II oleh Pusdatin dan usulan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional.

8. Pelaksanaan Reviu Tingkat I untuk usulan kegiatan TIK tahun 2024 (Direktorat Sarana, Direktorat LLAKA, Direktorat Keselamatan dan Setditjen Perkeretaapian) dan proses lanjut usulan Reviu Tingkat II oleh Pusdatin dan usulan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional.

Keberhasilan pencapaian target kinerja juga didukung dengan ketersediaan anggaran kegiatan TIK (walaupun terdapat pemotongan/pengurangan anggaran) serta kelengkapan data dukung dalam pelaksanaan reviu oleh Pusdatin dan *clearance* oleh Tim SPBE Nasional yang merupakan tahapan evaluasi sebelum usulan kegiatan TIK dapat dilaksanakan (persyaratan pembukaan blokir anggaran). Selain itu juga dilaksanakan monitoring rutin setiap triwulan berdasarkan Kepmenhub Nomor KM 69 Tahun 2020 termasuk penyediaan infrastruktur TIK sesuai kebutuhan dengan intensif koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan.

## 5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Dalam hal perbandingan kinerja (*benchmark*) secara nasional maupun di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap capaian kinerja, diperoleh data bahwa pada Tahun 2023 terdapat 98 sistem TIK/aplikasi sebagaimana matriks inventarisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang disusun oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan. Dari total 100 sistem TIK/aplikasi tersebut 19 diantaranya merupakan sistem TIK/aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau 19,00% dari jumlah keseluruhan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun uraian sistem TIK/aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

**Tabel 3-20 Inventarisasi Sistem TIK/Aplikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2023**

No	Unit Eselon I	Jumlah Sistem TIK/Aplikasi
1.	Sekretariat Jenderal	26 Sistem TIK/Aplikasi
2.	Inspektorat Jenderal	2 Sistem TIK/Aplikasi
3.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	13 Sistem TIK/Aplikasi
4.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	15 Sistem TIK/Aplikasi
5.	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	8 Sistem TIK/Aplikasi

No	Unit Eselon I	Jumlah Sistem TIK/Aplikasi
6.	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	19 Sistem TIK/Aplikasi
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	1 Sistem TIK/Aplikasi
8.	Badan Kebijakan Transportasi	7 Sistem TIK/Aplikasi
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	9 Sistem TIK/Aplikasi

Dari Tabel di atas, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan unit kerja kedua terbanyak yang mengelola sistem TIK/aplikasi dibandingkan unit kerja eselon I lainnya. Hal tersebut menunjukkan tingkat pemanfaatan TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan cukup tinggi. Namun perlu menjadi perhatian kedepan terkait efektifitas pembangunan/pengembangan aplikasi yang cukup banyak namun tidak optimal pemanfaatannya termasuk belum terintegrasinya data bidang perkeretaapian. Selain itu dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan aplikasi sebagaimana arahan Kemenko Marvest dan Pusdatin Kementerian Perhubungan, telah direncanakan pengembangan Portal Aplikasi sebagai *Super Apps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan sistem TIK lainnya.

## 6. Upaya Peningkatan Kinerja

Kebijakan pengembangan/pembangunan sistem TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian kedepan sangat diperlukan agar menjadi terarah dan tepat sasaran. Seiring perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadikan pemanfaatan TIK dalam proses Pemerintahan memegang peran penting untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan menuju *e-Government*. Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

1. Pelaksanaan dan pendampingan usulan *clearance* terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2024 sesuai ketentuan SPBE, Rencana Induk/*Roadmap* serta mengacu rencana penyederhanaan aplikasi.

2. Pelaksanaan reviu peta jalan (*roadmap*) TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk penyesuaian kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan serta sebagai acuan utama dalam perencanaan TIK Tahun 2025-2029 sesuai arsitektur SPBE.
3. Pengembangan Portal Aplikasi sebagai *Super Apps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan sistem TIK lainnya serta dukungan *database* bidang perkeretaapian yang memadai.
4. Sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh unit kerja untuk pengoptimalan penggunaan Portal Aplikasi dan website Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas, anggaran, serta organisasi dan penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***

- a. Pelaksanaan reviu peta jalan (*roadmap*) TIK untuk penyesuaian kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan serta sebagai acuan utama dalam perencanaan TIK Tahun 2025-2029 sesuai arsitektur SPBE.
- b. Diperlukan tindak lanjut Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sesuai kebijakan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran:*** Antisipasi kegiatan pendukung TIK Tahun 2023 yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.

3. ***Penyesuaian organisasi dan penempatan jabatan/pegawai:***

- a. Diusulkan penambahan penempatan pegawai pranata komputer di Bagian Perencanaan Setditjen Perkeretaapian agar mendukung pembinaan dan pengelolaan sistem TIK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

- b. Diusulkan pembentukan unit/kelompok baru yang khusus menangani TIK dan pengelolaan data di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

### **3.2.5 Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian**

#### **Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Publikasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian dilaksanakan untuk membangun dan mempertahankan sebuah reputasi citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Tujuan dilakukannya publikasi bidang perkeretaapian antara lain:

1. Meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dengan membentuk opini positif.
2. Memperkenalkan program-program pembangunan/kebijakan terkait perkeretaapian kepada masyarakat luas.
3. Membangun kepercayaan publik dengan memberikan informasi terkait pembangunan di bidang perkeretaapian yang akuntabel dan transparan.
4. Menciptakan hubungan harmonis dengan publik melalui penyampaian kebijakan, program pembangunan dan hasil kerja organisasi di bidang perkeretaapian.

Persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan Indikator Kinerja Kegiatan terkait kehumasan yang diperoleh dari pemenuhan jumlah pemberitaan bidang perkeretaapian pada media cetak, elektronik, *online* dan media sosial yang mempublikasikan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian termasuk pembangunan prasarana, sarana, peningkatan keselamatan dan pelayanan serta isu-isu strategis perkeretaapian lainnya dalam bentuk siaran pers dan konten media sosial.

Indikator kinerja persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 100% pada Tahun 2023, dengan perhitungan pelaksanaan publikasi sebagai berikut:

1. 50 pelaksanaan pemberitaan pada saluran media cetak, TV, radio, *website/online* yang dihasilkan dari penyusunan siaran pers maupun liputan per tahun (bobot 50%);
2. 365 postingan konten media sosial per tahun (bobot 50%).

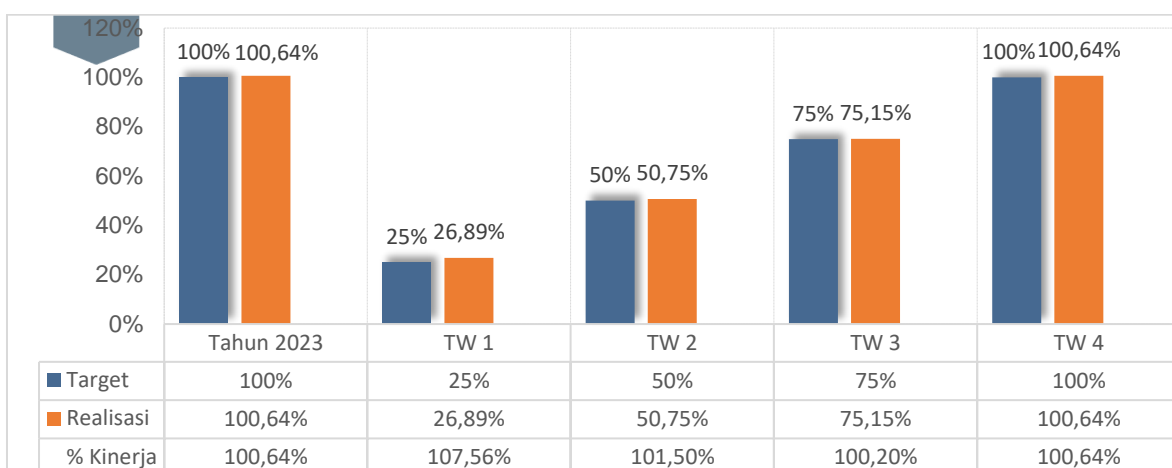
Pada Tahun 2023, realisasi jumlah pelaksanaan publikasi bidang perkeretaapian melalui media cetak, TV, radio, *website/online* telah terealisasi sebanyak 29 siaran pers dan postingan konten melalui media sosial (*instagram/twitter/facebook*) sebanyak 523 konten.

### 1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi jumlah pelaksanaan publikasi bidang perkeretaapian sebanyak 29 siaran pers (bobot 29,00%) dan 523 konten media sosial/*online* (bobot 71,64%), maka diperoleh realisasi persentase pemenuhan publikasi bidang perkeretaapian sebesar 100,64%. Rincian target dan realisasi kinerja persentase pemenuhan publikasi Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 3-21 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan (%)	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	100	25	50	75	100	26,89	50,75	75,15	100,64	107,56	101,50	100,20	100,64	100,64



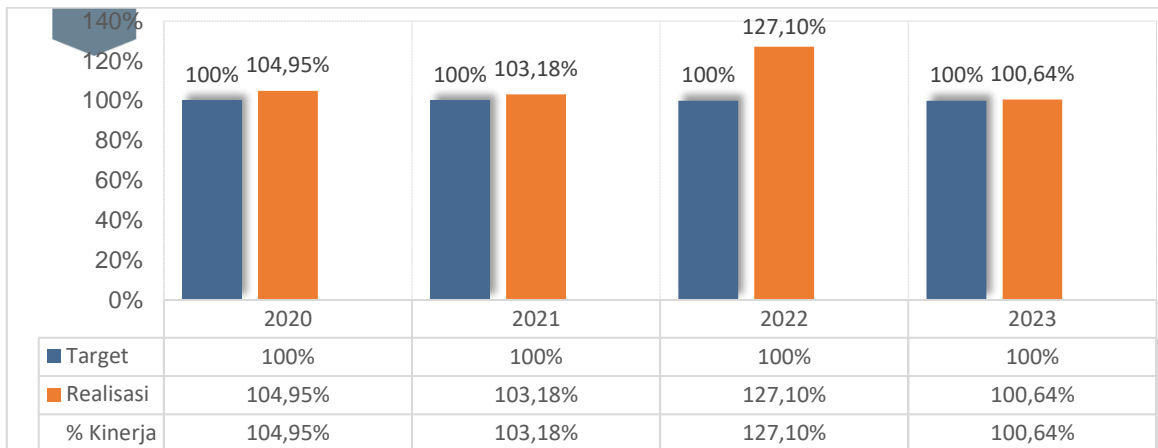
**Gambar 3-13 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

## 2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Secara keseluruhan dalam 3 tahun terakhir seluruh target yang ditetapkan dapat terpenuhi (kinerja > 100%). Pemenuhan tersebut didukung dengan peningkatan pemanfaatan media sosial sebagai wadah komunikasi yang masif digunakan beberapa tahun terakhir. Perbandingan realisasi kinerja dengan target 3 tahun terakhir sebagaimana pada Tabel berikut.

**Tabel 3-22 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100	100	100	100	104,95 (Kinerja 104,95%)	103,18 (Kinerja 103,18%)	127,10 (Kinerja 127,10%)	100,64 (Kinerja 100,64%)



**Gambar 3-14 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

### 3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

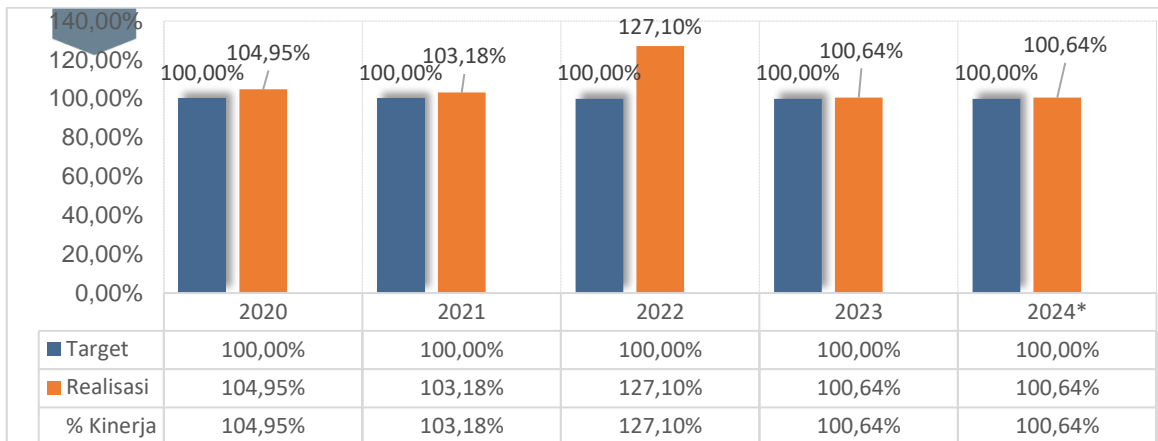
Dengan realisasi persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 100,64% dan target Tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 100%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,64%. Secara keseluruhan target kinerja pada Rencana Strategis dapat terpenuhi untuk periode Tahun 2020-2023 (kinerja > 100%) dengan dukungan anggaran yang memadai dan keaktifan tim humas. Demikian juga apabila dibandingkan dengan target periode akhir Rencana Strategis yaitu Tahun 2024 sebesar 100,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,64%. Capaian terhadap target Rencana Strategis tersebut selanjutnya perlu dipertahankan pada Tahun 2024.

**Tabel 3-23 Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Target (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Realisasi (%)	104,95	103,18	127,10	100,64	-
	Capaian Kinerja (%)	104,95	103,18	127,10	100,64	100,64

\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024





\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024

**Gambar 3-15 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

#### 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target persentase pemenuhan publikasi diperoleh dengan keaktifan Tim Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam memposting konten pada media sosial milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian (*Twitter/Instagram/Facebook/Youtube*) didukung dengan tenaga desain grafis dan anggaran yang memadai. Pencapaian tersebut, tidak lepas dari peran dan strategi Tim Humas yang secara konsisten melakukan *update* setiap hari khususnya di media sosial terkait perkeretaapian. Tema dan topik juga cukup beragam mulai dari hal umum (*event*, hari besar), pengetahuan terkait perkeretaapian, informasi peresmian prasarana/sarana perkeretaapian, kegiatan pimpinan (Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perkeretaapian, pimpinan lainnya), progres pembangunan perkeretaapian, dan lainnya.

Pemberitaan/publikasi terkait penyelenggaraan perkeretaapian melalui berbagai media (cetak dan elektronik) termasuk media *online/website* dalam bentuk siaran pers maupun liputan juga dilaksanakan, walaupun belum optimal dilaksanakan dimana hanya mencapai 58% dari target Tahun 2023. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan untuk peningkatan publikasi dalam bentuk siaran pers/liputan.

Dukungan lainnya adalah penyusunan buku publikasi (*QnA series* lanjutan, buku profil, dan lainnya) dengan desain menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal tersebut menjadi media komunikasi yang menarik kepada masyarakat umum yang berminat mengetahui lebih detail terkait perkeretaapian dan program-program pembangunan.

## 5. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Monitoring media dilaksanakan setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan *update* berkala "*Hot Issue Perkeretaapian*".
2. Peningkatan publikasi dalam bentuk siaran pers/liputan terkait perkeretaapian dengan menyiapkan berbagai topik antara lain pemanfaatan hasil pembangunan, program unggulan Tahun 2024, perkembangan teknologi perkeretaapian serta kebijakan pengembangan perkeretaapian ke depan.

Publikasi dalam bentuk siaran pers sangat penting sebagai media komunikasi karena memiliki berbagai keunggulan diantaranya menyebarkan informasi dengan efektif, sekali waktu, menjangkau audiensi yang luas, menciptakan hubungan yang baik dengan media, membangun citra positif melalui klarifikasi dan meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap aktivitas, anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. **Penyesuaian strategi/kebijakan:** Kerjasama dengan media dan *influencer* untuk membantu pelaksanaan publikasi serta meningkatkan reputasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian.

2. **Penyesuaian aktivitas dan anggaran:** Antisipasi kegiatan pendukung publikasi (siaran pers, seminar, pameran dan lainnya) yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.
3. **Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai:** Dukungan penempatan pegawai pranata humas di Bagian Hukum Setditjen Perkeretaapian dengan kompetensi yang memadai untuk peningkatan publikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

### 3.2.6 Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

#### Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Evaluasi AKIP dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 2 Tahun 2023. Variabel-variabel dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. Komponen terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
2. Sub-komponen dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
3. Kriteria merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir), ditetapkan target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 83. Pada periode Juni – Agustus 2023, telah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan penilaian dari Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Evaluasi dilaksanakan dengan menggabungkan nilai LKE Instansi (Eselon I) dan LKE Unit Utama dimana untuk LKE Unit Utama mengambil *sampling* pada

unit kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dan Balai Perawatan Perkeretaapian.

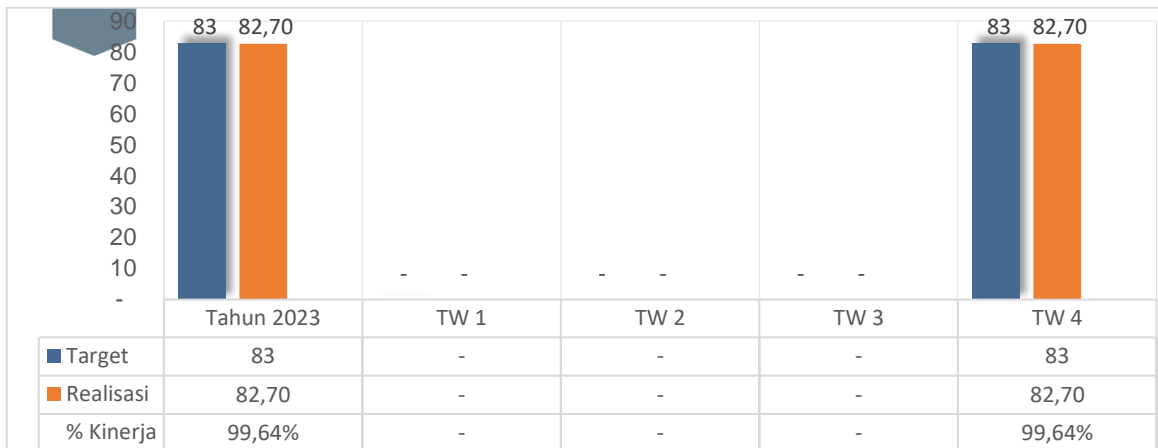
Hasil evaluasi implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.306/3/4/ITJEN/2023 tanggal 30 Agustus 2023 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh bahwa hasil penilaian untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 82,70 (Kategori A).

#### 1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 82,70 dan target Tahun 2023 sebesar 83,00, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,64%. Realisasi tersebut dilaporkan pada Triwulan IV 2023 dikarenakan surat penyampaian hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan baru diterima pada Oktober 2023. Rincian target dan realisasi kinerja per triwulan Tahun 2023 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 3-24 Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan (Nilai)	Target Kinerja Triwulan (Nilai)				Realisasi Kinerja Triwulan (Nilai)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	83	-	-	-	83	-	-	-	82,70	-	-	-	99,64	99,64



**Gambar 3-16 Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

## 2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

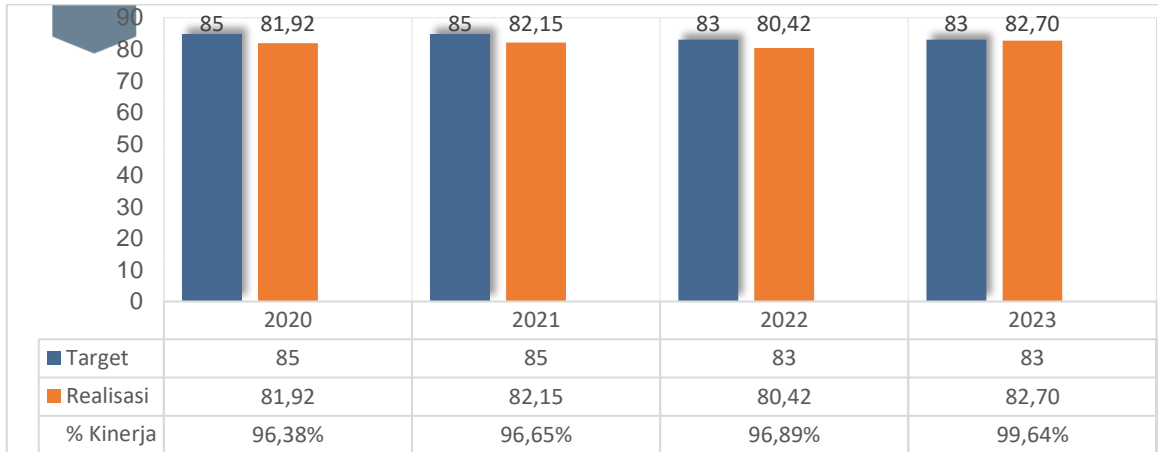
Realisasi kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada 3 tahun terakhir yaitu Tahun 2020 – 2022 dan Tahun 2023 mengalami fluktuasi setiap tahun dan tidak memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut diantaranya karena adanya perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang digunakan mulai Tahun 2022 dengan mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Metode penilaian dan objek penilaian juga berubah setiap tahun, semula pada Tahun 2020 hanya dilakukan evaluasi pada tingkat Eselon I, namun pada Tahun 2021-2023 juga dilakukan evaluasi pada tingkat Eselon II dan Balai sebagai *sampling* unit kerja. Pada Tahun 2021 *sampling* sebanyak 2 unit kerja (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana), Tahun 2022 *sampling* sebanyak 4 unit kerja (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, BTP Jakarta, Balai Pengujian), sedangkan Tahun 2023 *sampling* sebanyak 5 unit kerja (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, BTP Surabaya, BTP Padang dan Balai Perawatan).

Namun apabila dibandingkan dalam hal capaian kinerja, terdapat *trend* peningkatan setiap tahun. Pada Tahun 2020 capaian kinerja sebesar 96,38%, terus meningkat sampai pada Tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 99,64%. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dari Tahun 2020 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3-25 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	%	85	85	83	83	81,92 (Kinerja 96,38%)	82,15 (Kinerja 96,65%)	80,42 (Kinerja 96,89%)	82,70 (Kinerja 99,64%)



**Gambar 3-17 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

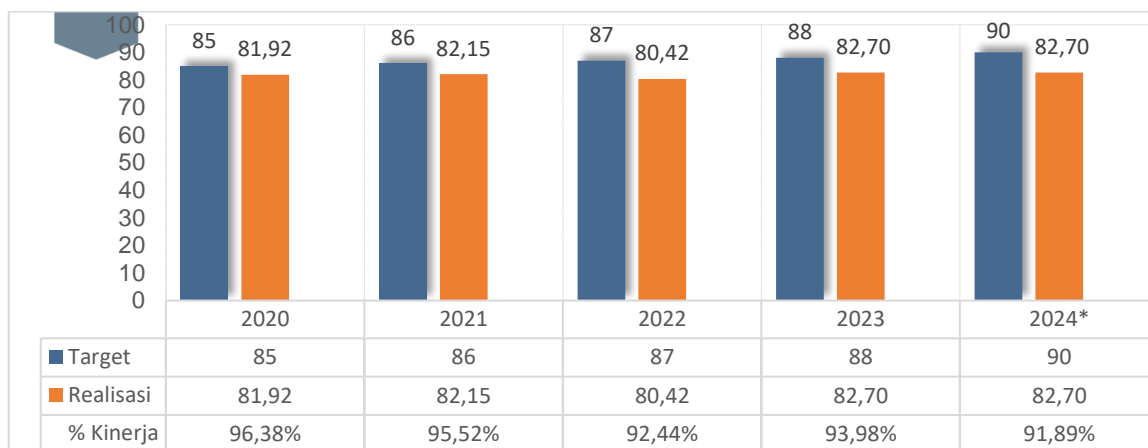
### 3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 sebesar 82,70% (Kategori A), sedangkan target Tahun 2023 yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 88,00. Untuk itu, diperoleh capaian kinerja sebesar 93,98%. Secara keseluruhan pada Tahun 2020-2023, capaian indikator kinerja ini tidak dapat memenuhi target Rencana Strategis setiap tahun (kinerja < 100%). Capaian kinerja cenderung menurun dari Tahun 2020-2022, namun meningkat pada Tahun 2023. Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3-26 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Target (Nilai)	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00
	Realisasi (Nilai)	81,92	82,15	80,42	82,70	-
	Capaian Kinerja (%)	96,38	95,52	92,44	93,98	91,89

\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024

**Gambar 3-18 Capaian Kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

#### 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 2 Tahun 2022. Penilaian dilaksanakan dengan menggabungkan nilai LKE Instansi dan LKE Unit Utama, dimana untuk LKE Unit Utama mengambil *sampling* pada unit kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dan Balai Perawatan Perkeretaapian.

Dari hasil evaluasi, terdapat beberapa catatan penilaian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan rincian sebagai berikut:

#### **a. Perencanaan Kinerja**

Rata-rata skor hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 24,09 dari skor maksimal adalah 30, dengan beberapa catatan yaitu:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) belum dipublikasikan tepat waktu;
- 2) Masih terdapat target yang ditetapkan pada IKU/IKK yang tidak memenuhi kriteria menantang yaitu lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya;
- 3) Masih terdapat realisasi secara keseluruhan IKU/IKK yang tidak termasuk kriteria *on the right track* yaitu realisasi capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d 110%.

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 25,05 dari nilai maksimal 30, dengan catatan yaitu belum terpenuhinya seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membuat Laporan Kinerja bulanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 12,30 dari nilai maksimal 15, dengan beberapa catatan yaitu:

- 1) Belum seluruhnya secara konsisten dalam 5 tahun bukti keberadaan dokumen melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja dan penyampaian dokumen Laporan Kinerja tepat waktu;
- 2) Belum terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai terkait dokumen Laporan Kinerja untuk memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi



keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yaitu dalam hal:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja);
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

**d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Nilai hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar 21,25 dari nilai maksimal 25, dengan catatan belum seluruhnya secara konsisten dalam 5 tahun bukti keberadaan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja secara berjenjang.

Adapun secara lengkap tahapan yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan evaluasi dan penilaian implementasi SAKIP baik yang dilakukan mandiri atau internal oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diuraikan sebagai berikut:

- a. Persiapan penilaian mandiri implementasi SAKIP diantaranya mencakup koordinasi awal tim SAKIP, penjelasan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh narasumber dari Kementerian PANRB serta penjelasan tata cara evaluasi implementasi SAKIP menggunakan Sistem Pelaporan Kinerja (SILAKI) pada Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

- b. Penilaian mandiri oleh masing-masing unit kerja mencakup pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan penyiapan data dukung dengan menggunakan aplikasi SILAKI pada Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- c. Pembentukan Tim Evaluasi melalui penetapan Kepdirjen Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 101 Tahun 2023 yang terdiri dari perwakilan unit kerja dan prioritas yang telah mengikuti Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan SAKIP yang selanjutnya melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian mandiri masing-masing unit kerja.
- d. Evaluasi Tahap Pertama serta pembahasan bersama terhadap hasil penilaian mandiri dengan memberikan catatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- e. Penyampaian progres tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2022 yang akan menjadi data dukung implementasi SAKIP Tahun 2023.
- f. Evaluasi Tahap Kedua serta pembahasan bersama terhadap hasil penilaian mandiri dengan memberikan catatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Kinerja pada Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- g. Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian oleh APIP/Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan termasuk pembahasan dan konsultasi bersama evaluator Inspektorat Jenderal guna pemenuhan data dukung evaluasi implementasi SAKIP untuk unit Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan 5 unit sampel (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, BTP Surabaya, BTP Padang, Balai Perawatan).
- h. Evaluasi Tahap Ketiga termasuk penjelasan oleh Inspektorat Jenderal perihal hasil pleno evaluasi SAKIP dan melengkapi isian LKE dan data dukung pada 11 unit non-sampel sesuai dengan catatan hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

## 5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional

Perbandingan kinerja terkait nilai AKIP dilakukan dengan unit kerja lain baik di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun unit lainnya. Di tingkat Kementerian Perhubungan, diperoleh bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan yang tertinggi dibandingkan unit Eselon I lainnya. Secara lengkap nilai AKIP unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

**Tabel 3-27 Perbandingan Nilai AKIP Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023**

No.	Unit Kerja	Capaian Kinerja per komponen (%)				Nilai 2022	Nilai 2021
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)		
1	Sekretariat Jenderal	24,33	24,15	12,02	19,58	80,08 (A)	80,27 (A)
2	Inspektorat Jenderal	25,20	23,70	13,61	19,53	82,05 (A)	81,26 (A)
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	24,30	25,53	12,09	20,73	82,66 (A)	80,44 (A)
4	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	24,75	24,15	12,38	19,50	80,79 (A)	80,42 (A)
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	24,57	25,20	11,94	18,59	80,22 (A)	80,36 (A)
6	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	24,09	25,05	12,30	21,25	82,70 (A)	80,42 (A)
7	BPSDM Perhubungan	22,65	23,31	10,44	19,73	76,14 (BB)	80,53 (A)
8	Badan Kebijakan Transportasi	23,67	25,20	11,67	20,25	80,80 (A)	82,46 (A)
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	22,69	22,31	11,51	18,50	75,02 (BB)	74,96 (A)
<b>Rata-rata</b>						80,05 (A)	80,12 (A)

Berdasarkan Tabel di atas, juga diperoleh bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya diantaranya pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut penilaian terhadap komponen-komponen tersebut untuk perbaikan pada periode berikutnya.

Dibandingkan dengan instansi Pemerintah lainnya, berdasarkan data Kementerian PANRB pada Tahun 2022-2023 diperoleh bahwa evaluasi SAKIP yang dilakukan kepada 499 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rata-rata nilai AKIP sebesar 63,36. Sedangkan hasil evaluasi kepada 34 Pemerintah Provinsi diperoleh rata-rata nilai AKIP sebesar 72,17. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian di atas nilai rata-rata dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

## 6. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya diperlukan hal-hal sebagai berikut sebagaimana rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan:

- a. Dokumen perencanaan kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) dipublikasikan tepat waktu di aplikasi e-SAKIP Reviu dan Website.
- b. Penetapan target dalam IKU/IKK agar memperhatikan kriteria menantang yaitu lebih tinggi dari relisasi tahun sebelumnya.
- c. Memberikan perhatian lebih (monitoring, evaluasi dan tindak lanjut) untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang pada IKU/IKK yang capaian kinerjanya tidak tercapai, baik pada Laporan Monitoring Rencana Aksi Bulanan/Triwulanan, monitoring capaian kinerja triwulan/tahunan, sehingga kedepannya IKU/IKK tersebut dapat tercapai dan kinerja secara keseluruhan termasuk kriteria masih *on the right track* yaitu realisasi keseluruhan capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d 110%.
- d. Membuat Laporan Kinerja bulanan sesuai dengan PM PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- e. Secara konsisten melaksanakan dan mendokumentasikan bukti keberadaan dokumen:
  - 1) Melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja.
  - 2) Penyampaian dokumen Laporan Kinerja tetap waktu sesuai PM Menhub Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP.
  - 3) Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja secara berjenjang.
- f. Melakukan beberapa upaya yang bisa dihargai terkait Dokumen Laporan Kinerja untuk memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja

serta upaya perbaikan/penyempurnaan dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dalam hal:

- 1) Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (*benchmark* kinerja) dilakukan terhadap seberapa besar IKU/IKK;
- 2) Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak terbatas hanya anggaran namun terkait sumber daya manusia, dan lainnya;
- 3) Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) yang dapat dilaksanakan/kesan yang nyata, sehingga realisasi secara keseluruhan (IKU/IKK) termasuk kriteria setidaknya masih *on the right track* yaitu realisasi capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d 110%.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta kompetensi/penempatan pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

- a. **Penyesuaian strategi/kebijakan:** Kebutuhan kebijakan di tingkat Kementerian Perhubungan untuk mendorong pemanfaatan capaian kinerja unit kerja dalam penentuan besaran tunjangan kinerja pegawai (*reward and punishment*).
- b. **Penyesuaian aktivitas dan anggaran:**
  - 1) Monitoring Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Setditjen Perkeretaapian Tahun 2024 untuk kegiatan pendukung masing-masing indikator kinerja sesuai alokasi anggaran.
  - 2) Antisipasi kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir anggaran Tahun 2024 yang dapat mempengaruhi kegiatan pendukung dan pencapaian kinerja Tahun 2024.

- c. **Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:** Pembentukan Tim Penyelenggaraan SAKIP yang mencakup Tim Penyusun Dokumen SAKIP dan Tim Monitoring dan Evaluasi melalui penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan dukungan SDM yang kompeten.

### Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir), ditargetkan Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP pada level 3 (terdefinisi).

Berikut adalah tingkat maturitas SPIP dan karakteristiknya:

**Tabel 3-28 Tingkat Maturitas SPIP**

Tingkat	Karakteristik SPIP
<b>Level 0 Belum Ada</b>	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik-praktik pengendalian intern.
<b>Level 1 Rintisan</b>	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.
<b>Level 2 Berkembang</b>	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
<b>Level 3 Terdefinisi</b>	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Tingkat	Karakteristik SPIP
<b>Level 4 Terkelola dan Terukur</b>	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Telah ada evaluasi formal dan terdokumentasi.
<b>Level 5 Optimum</b>	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta didukung oleh pemantauan otomatis dengan menggunakan aplikasi TI.

Pada Maret s.d Juni 2023 telah dilakukan Penilaian Mandiri oleh Tim Penilaian Mandiri Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Penjaminan Kualitas oleh APIP/Tim Inspektorat Jenderal menggunakan parameter SPIP terintegrasi mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Penilaian maturitas terintegrasi tersebut meliputi maturitas penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Penanganan Korupsi (IEPK) dan kapabilitas APIP yang selanjutnya dilakukan evaluasi oleh BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP.

Penilaian Mandiri oleh Tim Penilaian Mandiri Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Penjaminan Kualitas oleh APIP/Tim Inspektorat Jenderal dilaksanakan kepada seluruh unit kerja eselon II (5 unit kerja) dan Balai (11 unit kerja) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagai bagian dari Penilaian Mandiri tingkat Kementerian Perhubungan. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/4/6/ITJEN/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Penyampaian Hasil Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, diperoleh hasil penjaminan kualitas oleh APIP yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan berada pada level 3 “terdefinisi” dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.

Penilaian dilakukan terhadap 3 komponen yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP yang

menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kementerian Perhubungan sebesar “3,486” dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3-29 Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023**

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	5	2,000
2.	Struktur dan Proses	2	0,571
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,915
	<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>	<b>3</b>	<b>3,486</b>
	<b>MRI</b>	<b>3</b>	<b>3,06</b>
	<b>IEPK</b>	<b>2</b>	<b>1,50</b>

Hasil penilaian mandiri tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi oleh BPKP. Di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, evaluasi dilakukan kepada seluruh unit kerja Eselon II (Setditjen, Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, dan Direktorat Keselamatan) dan 3 unit kerja Eselon III/Balai yang ditunjuk sebagai sampel (BTP Kelas I Jakarta, BTP Kelas I Bandung, dan BTP Kelas I Semarang). Hasil evaluasi BPKP disampaikan melalui surat Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan BPKP Nomor PE.09.03/LHP-170/D103/2/2023 tanggal 13 November 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 3-30 Hasil Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2023**

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	5	1,800
2.	Struktur dan Proses	2	0,501
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,900
	<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>	<b>3</b>	<b>3,201</b>
	<b>MRI</b>	<b>3</b>	<b>2,770</b>
	<b>IEPK</b>	<b>2</b>	<b>1,460</b>

Dengan karakteristik level maturitas SPIP yang diperoleh dari hasil evaluasi BPKP menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi.

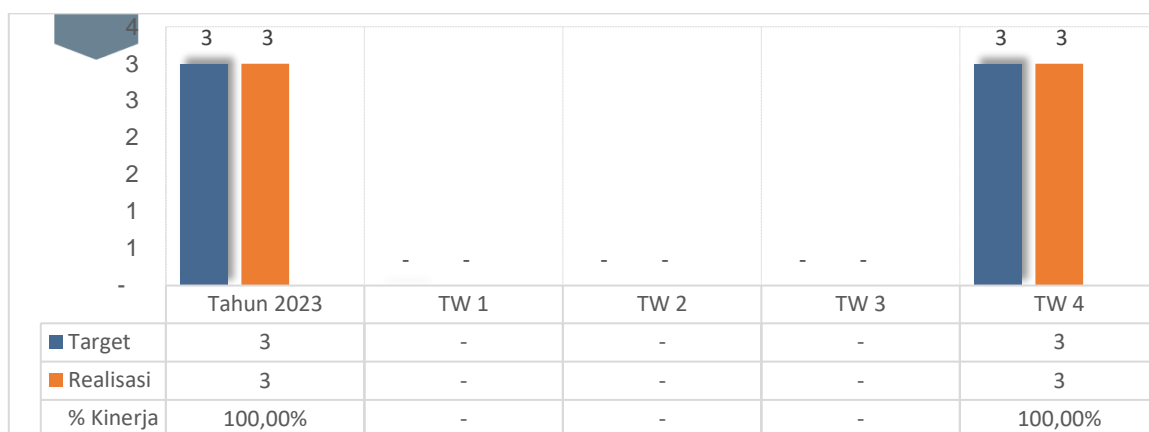


## 1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi tingkat maturitas SPIP terintegrasi adalah Level 3 (terdefinisi) dan target pada Tahun 2023 adalah Level 3, maka capaian kinerja yang diperoleh adalah 100%. Realisasi kinerja dilaporkan pada Triwulan IV 2023 karena menunggu hasil evaluasi dari BPKP yang baru diterbitkan pada November 2023. Rincian target dan realisasi kinerja per triwulan Tahun 2023 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 3-31 Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan (Level)				Realisasi Kinerja Triwulan (Level)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level 3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	100	100



**Gambar 3-19 Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

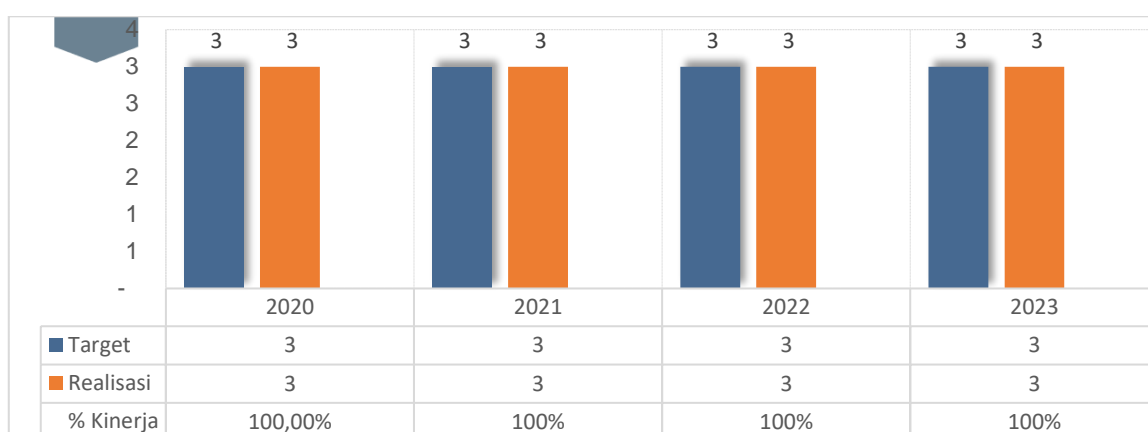
## 2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Realisasi kinerja dengan target kinerja pada 3 tahun terakhir (Tahun 2020 s.d 2022) dan Tahun 2023 untuk indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah Level 3 setiap tahun, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dari target Level 3 pada periode

tersebut. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dari Tahun 2020 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3-32 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level	3	3	3	3	3	3	3	3



**Gambar 3-20 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

### 3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

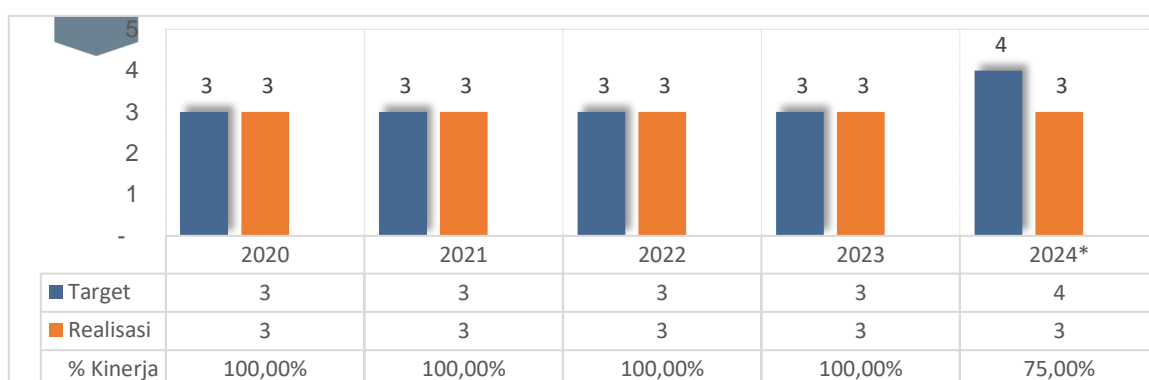
Realisasi Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu Level 3 (terdefinisi), sedangkan target Tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah Level 3 sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100%. Demikian juga dengan target Rencana Strategis Tahun 2020-2022 juga dapat tercapai 100% walaupun pada Tahun 2021-2022 terdapat perubahan metode penilaian mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 205 tahun 2021. Demikian juga dengan unit sampel yang dilakukan penilaian bertambah dari semula 5 unit kerja pada Tahun 2021 menjadi 8 unit kerja pada Tahun 2023 (penambahan sampel 3 unit kerja Balai/UPT).

Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3-33 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Target (Level)	3	3	3	3	4
	Realisasi (Level)	3	3	3	3	-
	Target (%)	100	100	100	100	75

\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024

**Gambar 3-21 Perbandingan Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

#### 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Tahun 2023 di tingkat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja (Eselon II dan Balai) mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung penilaian mandiri tersebut antara lain:

- a. Penetapan Surat Keputusan terkait Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mulai dari Tingkat Eselon I, Eselon II dan Eselon III Unit Mandiri;
- b. Sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

- c. Pelaksanaan penilaian risiko oleh masing-masing pemilik risiko di setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diantaranya berupa daftar risiko, peta risiko, rencana tindak pengendalian;
- d. Pembentukan Tim Penilaian Mandiri yang terdiri dari unit kerja eselon I, II dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk pelaksanaan bimbingan teknis untuk tim penilaian mandiri guna peningkatan kompetensi;
- e. Penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko dan peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui pelatihan dan sertifikasi.
- f. Koordinasi dan konsolidasi dalam pengumpulan data dukung penilaian mandiri serta penjaminan kualitas oleh tim penilaian mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk asistensi secara berkala dengan Inspektorat Jenderal.

Selanjutnya juga telah dilakukan pembahasan dan perbaikan KKE serta data dukung sebagaimana hasil evaluasi BPKP. Pelaksanaan pembahasan tersebut antara lain:

- a. Persiapan evaluasi terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP bersama BPKP, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan dan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Pembahasan bersama BPKP, Inspektorat Jenderal dan 8 unit kerja sampel di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Setditjen, Direktorat, BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Semarang) terkait evaluasi sementara terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Selain itu juga dilaksanakan pembahasan perihal pengurangan nilai (penalti) pada KK 4 dengan penjelasan terkait kronologis kejadian kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Hal lain yang dilaksanakan pada Tahun 2023 guna mendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP antara lain monitoring Rencana Tindak Pengendalian setiap triwulan, sosialisasi KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan kepada seluruh unit kerja serta penyusunan revidi Pedoman Teknis Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh pada Level 3 (terdefinisi). Dengan tingkat maturitas tersebut, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

## **5. Upaya Peningkatan Kinerja**

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti termasuk rekomendasi dari BPKP sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon.
- b. Mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan implementasi sehingga dapat diukur dan disimpulkan efektivitas dan manfaat terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- c. Memperbaiki indikator dan target kinerja agar berorientasi pada *outcome* dan memenuhi kriteria SMART.
- d. Melaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi manajemen risiko dan pengukuran tingkat pemahaman manajemen risiko dari pegawai.
- e. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, diantaranya dengan:

- 1) Melakukan pemutakhiran Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan mempertimbangkan anggaran, perubahan dalam lingkungan organisasi, dan efektivitas pengendalian;
- 2) Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antar Lembaga dan risiko fraud;
- 3) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas SDM;
- 4) Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
- 5) Melakukan monitoring RTP dan efektivitasnya oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) untuk masing-masing unit kerja;
- 6) Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam setiap pengambilan Keputusan oleh pejabat pada seluruh unit kerja.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran, serta penempatan pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. ***Penyesuaian strategi/kebijakan:***

- 1) Implementasi manajemen risiko mengacu pada KM 69 Tahun 2023 dan petunjuk teknis penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- 2) Pengendalian pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien, menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan serta perbaikan dari sisi administrasi dan keuangan secara berangsur dilakukan guna menciptakan kondisi organisasi yang transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- b. **Penyesuaian aktivitas dan anggaran:** Antisipasi kegiatan pendukung SPIP dan Manajemen Risiko (termasuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi manajemen risiko) yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.
- c. **Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:**
  - 1) Pengoptimalan fungsi skema 3 Lini (*Three Lines of Defence*) dalam penerapan manajemen risiko di masing-masing unit kerja khususnya peran pengelola risiko (lini pertama) dan unit manajemen risiko (lini kedua).
  - 2) Diusulkan penempatan pegawai untuk posisi strategis/pengelola anggaran/pengelola barang milik negara yang memiliki kompetensi manajemen risiko.

### **Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perkeretaapian bersumber dari Pendapatan Fungsional sesuai PP No.15 Tahun 2016 dan Pendapatan Non Fungsional. Penyelenggaraan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan oleh seluruh unit kerja baik Sekretariat, Direktorat maupun Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir) ditargetkan pemenuhan PNBP Tahun 2023 sebesar 100% dengan target PNBP yang tercatat dalam dokumen anggaran/DIPA dan aplikasi SPAN sebesar Rp1.197.097.575.000,-. Mengacu pada target tersebut, rincian realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-34 Realisasi PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023

No	Jenis Pendapatan	Target Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)</b>	<b>1.154.850.900.000</b>	<b>576.349.753.829</b>	<b>49,91</b>
	a. Pendapatan Pengguna Prasarana Perkeretaapian	1.007.000.000.000	568.455.398.829	56,45
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	60.722.990.000	3.672.520.000	6,05
	c. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.415.750.000	2.647.800.000	187,02
	d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI	85.712.160.000	1.574.035.000	1,84
<b>2</b>	<b>Pendapatan BLU</b>	<b>27.246.675.000</b>	<b>79.667.327.609</b>	<b>292,44</b>
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (BLU)	18.335.775.000	77.205.039.725	421,13
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Bdan Usaha	8.910.900.000	2.179.458.220	24,46
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	83.955.444	-
	d. Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	22.499.220	-
	e. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang	-	176.375.000	-
<b>3</b>	<b>Pendapatan Non Fungsional</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>107.568.233.300</b>	<b>717,12</b>
	a. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	85.000.000	-
	b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.015.130.442	-
	c. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	34.070.846.685	-
	d. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.000.000.000	56.525.046.708	376,83
	e. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	2.075.160.307	-
	f. Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	-	11.510.000	-
	g. Pendapatan Jasa Lainnya	-	3.200.442.000	-
	h. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.171.108.091	-
	i. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	166.194.928	-
	j. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.203.475.609	-
	k. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	3.297.498.934	-
	l. Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	3.746.819.596	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.197.097.575.000</b>	<b>763.585.314.738</b>	<b>63,79</b>



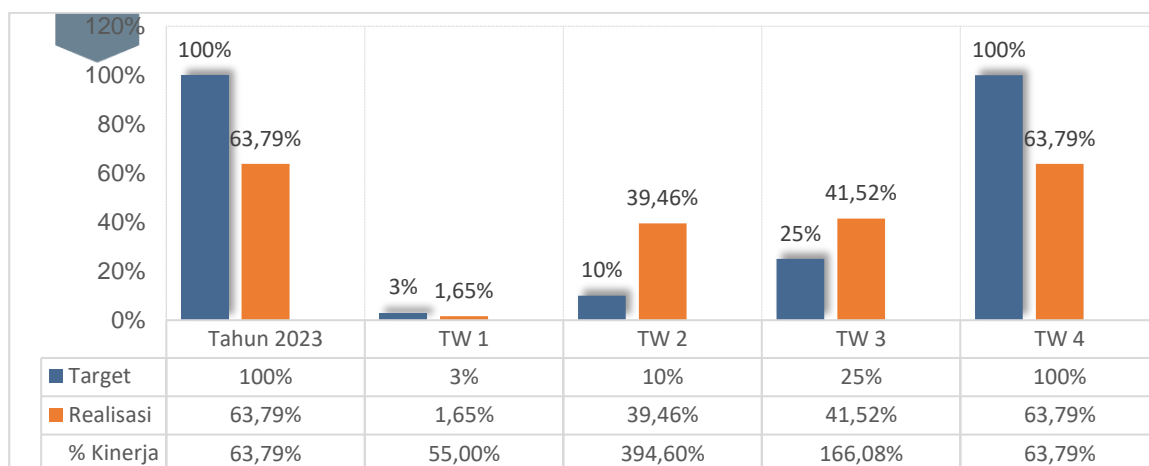
Berdasarkan data di atas, dengan realisasi PNBP pada Tahun 2023 sebesar Rp763.585.314.738,- dan target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.197.097.575.000,- maka diperoleh capaian persentase realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 63,79%.

### 1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi PNBP sebesar 63,79%, diperoleh capaian kinerja sebesar 63,79% dari target Tahun 2023 sebesar 100,00%. Capaian kinerja per triwulan berfluktuatif, mengacu pada target triwulan yang ditetapkan. Target per triwulan ditetapkan dengan acuan dari realisasi tahun sebelumnya dimana realisasi PNBP terbesar yang bersumber dari TAC terealisasi pada Triwulan IV. Rincian target dan realisasi kinerja per triwulan Tahun 2023 disampaikan pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 3-35 Capaian Kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan (%)	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	100	3	10	25	100	1,65	39,46	41,52	63,79	55,00	394,60	166,08	63,79	63,79



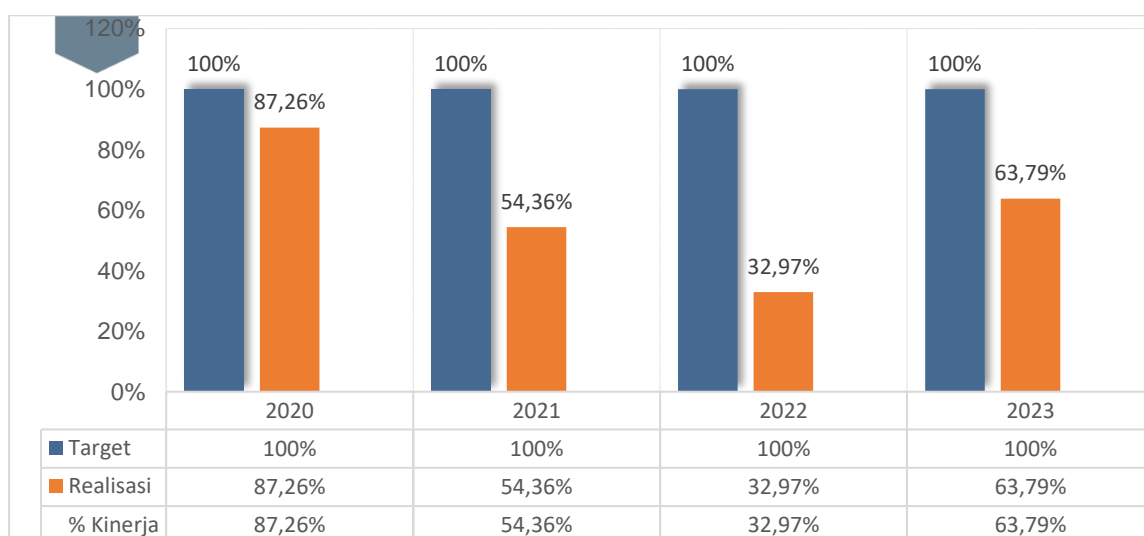
**Gambar 3-22 Capaian Kinerja Persentase Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

## 2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Realisasi kinerja pada 3 tahun terakhir (Tahun 2020 s.d 2022) dan Tahun 2023 untuk indikator kinerja persentase realisasi PNBP diperoleh mengalami penurunan dari Tahun 2020 s.d 2022, mulai dari Rp634 milyar pada Tahun 2020 dan terus menurun sampai Rp330 milyar pada Tahun 2022. Sedangkan pada Tahun 2023, realisasi PNBP mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp763,58 milyar walaupun masih berkinerja rendah (63,79%) apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu Rp1.197 Milyar. Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja dari Tahun 2020 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3-36 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100% (Rp727,69 Milyar)	100% (Rp837,03 Milyar)	100% (Rp1.002 Milyar)	100% (Rp1.197 Milyar)	87,26% (Rp634,96 Milyar)	54,36% (Rp454,97 Milyar)	32,97% (Rp330,50 Milyar)	63,79% (Rp763,58 Milyar)



**Gambar 3-23 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak**

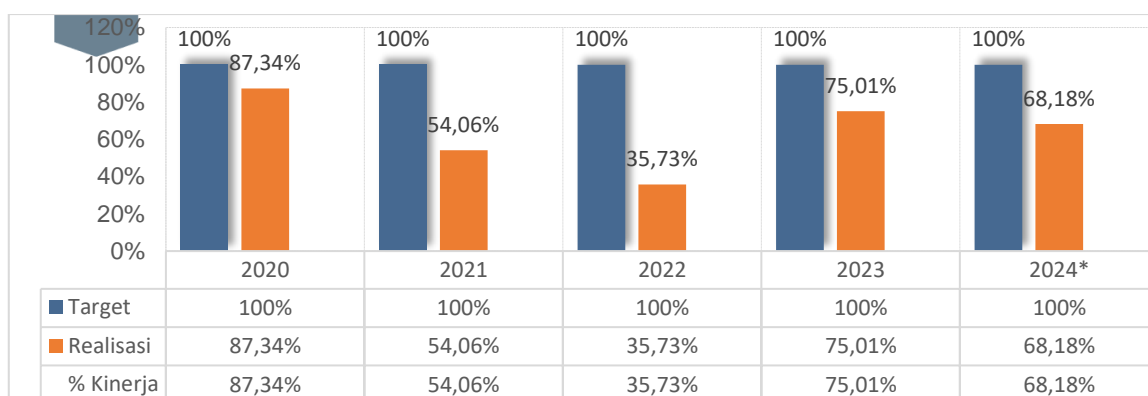
### 3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 sebesar Rp763.585.314.738,- sedangkan target Tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar Rp1.018 Milyar, sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 75,01%. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja ini tidak dapat memenuhi target Renstra setiap tahun (kinerja < 100%) dan kinerjanya berfluktuatif pada periode Tahun 2020-2022. Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis (konversi dalam bentuk persentase) dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3-37 Target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Uraian (Satuan)	Target dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Target (%)	100,00 (Rp727 M)	100,00 (Rp841,61 M)	100,00 (Rp925 M)	100,00 (Rp1.018 M)	100,00 (Rp1.120 M)
	Realisasi (%)	87,34 (Rp634,96 M)	54,06 (Rp454,97 M)	35,73 (Rp330,5 M)	75,01 (Rp763,6 M)	-
	Capaian Kinerja (%)	87,34	54,06	35,73	75,01	68,18

\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024

**Gambar 3-24 Perbandingan Target dan Realisasi PNBP Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

### 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 sampai posisi 31 Desember 2023 tidak dapat

tercapai mayoritas karena tidak dibayarnya *Track Access Charge* (TAC) oleh Badan Usaha Perkeretaapian. Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyampaikan surat pemberitahuan tagihan TAC triwulan I, II III dan IV Tahun 2023, namun pembayaran TAC oleh PT. KAI, PT. KCI dan PT. Railink belum dilaksanakan. Selain hal tersebut, terdapat permohonan keringanan TAC Tahun 2023 dari PT.KAI yang perlu dikaji berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pada saat ini, pembayaran TAC telah mendapatkan persetujuan atas besaran biaya penggunaan KA dan faktor prioritas untuk perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian dengan nilai tertinggi yang dapat berubah sesuai hasil verifikasi yang melibatkan BPKP dengan memperhatikan kemampuan membayar PT KAI yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Selain capaian TAC yang tidak terpenuhi, capaian PNBP dari pendapatan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi bidang perhubungan serta pendapatan penggunaan sarana dan prasarana juga beberapa tidak memenuhi target yang ditetapkan diantaranya karena sebagian besar pendapatan PNBP atas pengujian, sertifikasi dan kalibrasi bidang perhubungan telah dilaksanakan Balai Pengujian sebagai satker BLU serta kurangnya sosialisasi atas penggunaan Sarana Milik Negara Perkeretaapian.

Hal lainnya yang menjadi faktor penyebab kegagalan pencapaian target adalah belum optimalnya pemanfaatan aset/barang milik Negara yang dapat menjadi sumber pemasukan PNBP.

## **5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional / Internasional**

Analisa perbandingan kinerja dilakukan terhadap capaian PNBP unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mengacu pada data SPAN sebagaimana pada Tabel berikut:

**Tabel 3-38 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2023**

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	4.092.665.000	5.101.960.919	124,66
2	Inspektorat Jenderal	-	211.440.251	-
3	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1.442.693.169.000	1.375.049.257.717	95,31
4	Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1.197.097.575.000	763.597.248.089	63,79
5	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	4.400.543.180.000	4.965.294.740.618	112,83
6	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	1.292.437.237.000	1.336.636.654.980	103,42
7	BPSDM	1.317.355.566.000	1.582.309.207.765	120,11
8	BKT	-	1.410.239.825	-
9	BPTJ	8.488.650.000	12.649.311.801	149,01
<b>TOTAL</b>		<b>9.662.708.042.000</b>	<b>10.042.260.061.965</b>	<b>103,93</b>

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa perolehan kinerja PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada di posisi terendah (63,79%) dibandingkan unit kerja lainnya yang minimal 95,31% (Ditjen Perhubungan Darat), bahkan untuk 5 unit kerja lainnya memiliki capaian realisasi PNBP yang melebihi target yaitu lebih dari 100% (Setjen, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, BPSDM, BPTJ). Unit kerja Inspektorat Jenderal dan Badan Kebijakan Transportasi juga terdapat realisasi PNBP walaupun tidak ditargetkan. Berdasarkan besaran nilai PNBP yang tertinggi diperoleh dari unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mencapai Rp4,97 triliun. Penetapan target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan TAC sebagai komponen terbesar namun tidak optimal terealisasi menjadi faktor utama rendahnya capaian PNBP Tahun 2023.

## 6. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya antara lain:

- a. Berkoordinasi intensif dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk percepatan pengundangan PM 60 Tahun 2023 (Perubahan/Revisi PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian) guna dijadikan landasan dan dasar hukum dalam pengelolaan PNBPN bidang perkeretaapian.
- b. Peningkatan pendapatan PNBPN dengan pengoptimalan layanan BLU.
- c. Pengoptimalan pemanfaatan aset bangunan dan lahan dengan skema konsesi untuk peningkatan perolehan PNBPN didukung dengan penyelesaian inventarisasi dan sertifikasi aset/barang milik negara.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

- a. **Penyesuaian strategi/kebijakan:**
  - 1) Diperlukan penyelesaian penyesuaian dasar hukum terkait pendapatan fungsional TAC (revisi PP 15 tahun 2016, revisi PM 1 Tahun 2022, revisi PM 112 Tahun 2015).
  - 2) Diperlukan kebijakan terkait penagihan PNBPN TAC Tahun 2023 guna dibayarkan pada Tahun 2024, dimana telah dilaksanakan verifikasi dengan ditandatangani Berita Acara untuk selanjutnya penerbitan billing PNBPN TAC Triwulan I dan II Tahun 2023. Di sisi lain terdapat permohonan keringanan TAC dari PT.KAI.
- b. **Penyesuaian aktivitas dan anggaran:** Lanjutan pelaksanaan sertifikasi aset tanah/barang milik negara dengan dukungan anggaran Tahun 2024.

### **Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

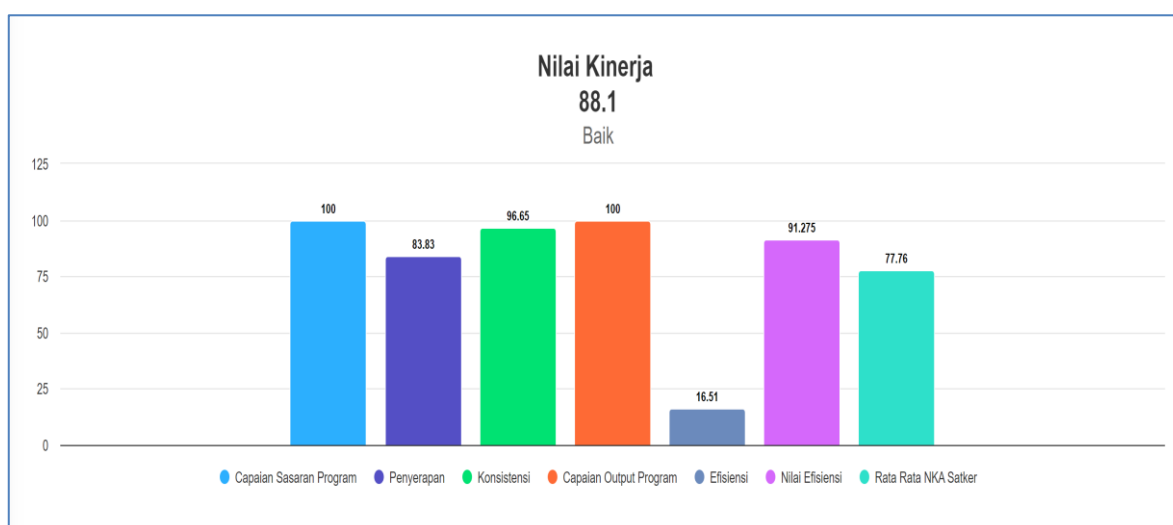
Perhitungan persentase kualitas pelaksanaan anggaran berupa Nilai Kinerja Anggaran mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 dengan perhitungannya terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian *Output* Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi, yang

nilainya diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi SMART Unit Eselon I. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA tersebut dikelompokkan pada kategori:

1. Lebih dari 90%: Kategori Sangat Baik;
2. 80% - 90%: Kategori Baik;
3. 60% - 80%: Kategori Cukup;
4. 50% - 60%: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50%: Kategori Sangat Kurang.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir), ditargetkan persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2023 sebesar 92,00%. Adapun realisasi pada Tahun 2023 berdasarkan aplikasi SMART sebesar 88,10% dengan rincian:

1. Capaian Sasaran Program (CSP): 100,00%.
2. Penyerapan: 83,83%.
3. Konsistensi: 96,65%.
4. Capaian *Output* Program (COP): 100,00%.
5. Nilai Efisiensi: 91,28% atau Efisiensi sebesar 16,51.
6. Rata-Rata NKA Satker: 77,76%.



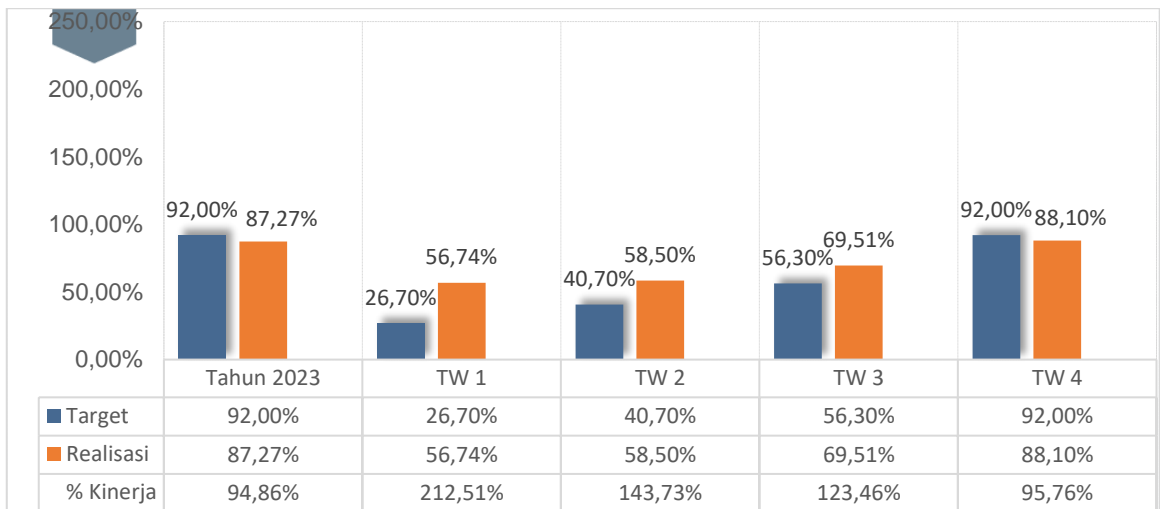
**Gambar 3-25 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

**1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja**

Realisasi kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2023 sebesar 88,10% (sumber data: aplikasi SMART Kemenkeu). Dengan realisasi kinerja tersebut dan target Tahun 2023 sebesar 92,00%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 95,76%. Rincian target dan realisasi kinerja per Triwulan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 3-39 Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan (%)	Target Kinerja Triwulan (%)				Realisasi Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	92,0	26,7	40,7	56,3	92,0	56,74	58,50	69,51	88,10	212,51	143,73	123,46	95,76	95,76



**Gambar 3-26 Capaian Kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

**2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir**

Perhitungan persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada Tahun 2023 terdapat perbedaan dengan Tahun 2020 s.d 2022. Perhitungan pada Tahun 2020 s.d 2022 diperoleh dari kombinasi capaian penyerapan anggaran dan pencapaian *output*/fisik, sedangkan perhitungan pada Tahun 2023



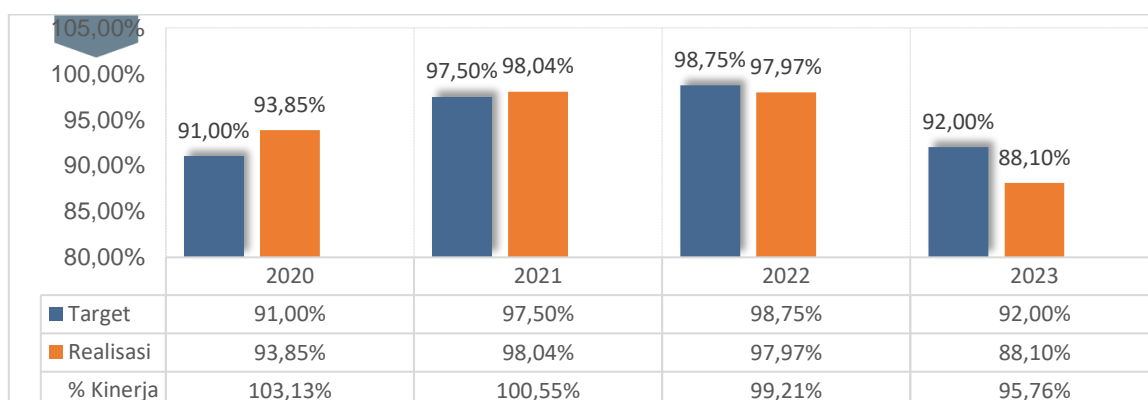
mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang perhitungannya berupa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) terdiri dari Capaian Sasaran Program, Capaian *Output* Program, Rata-rata NKA Satker, Penyerapan, Efisiensi dan Konsistensi. NKA masing-masing unit kerja dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi SMART/Monev Kemenkeu.

Capaian persentase kualitas pelaksanaan anggaran cenderung menurun apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (periode 2020-2023). Pada Tahun 2020 diperoleh kinerja sebesar 103,13% dan pada Tahun 2023 diperoleh kinerja sebesar 95,76%, mengingat pada Tahun 2023 parameter penilaian tidak hanya mencakup capaian serapan anggaran dan capaian *output* namun juga terdapat parameter penilaian lainnya (konsistensi, efisiensi, lainnya).

Perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja 3 tahun terakhir untuk indikator kinerja Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 3-40 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	91	97,50	98,75	92,00	93,85 (Kinerja 103,13%)	98,04 (Kinerja 100,55%)	97,97 (Kinerja 99,21%)	88,10 (Kinerja 95,76%)



**Gambar 3-27 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

### 3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

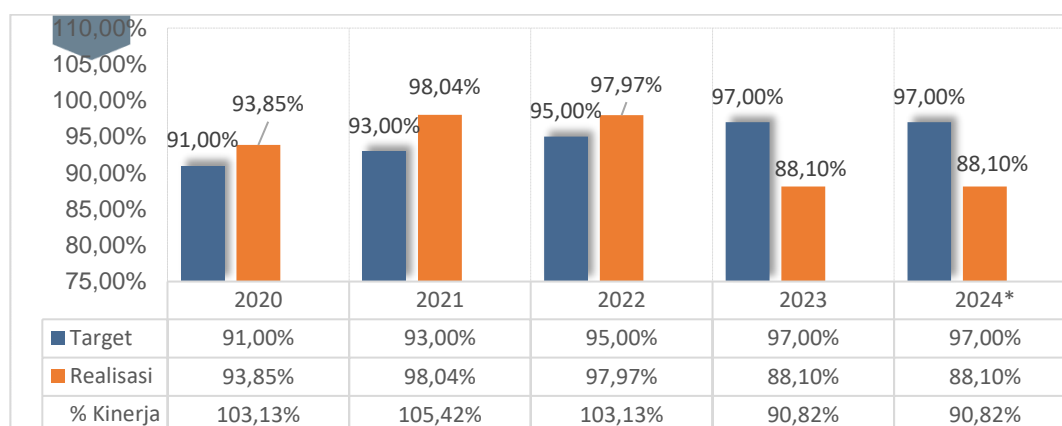
Target yang tercantum pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 masih mengacu pada perhitungan atas penyerapan anggaran dan pencapaian *output*, sedangkan pada Tahun 2023 perhitungan mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 sehingga terdapat perbedaan metode perhitungan termasuk ada tambahan parameter penilaian. Target Tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 sebesar 97,00% (untuk penyerapan anggaran dan asumsi target pencapaian *output* dengan nilai yang sama). Dengan realisasi persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 sebesar 88,10%, maka capaian kinerja diperoleh sebesar 90,82%. Secara umum target kinerja pada Rencana Strategis dapat terpenuhi untuk Tahun 2020-2022 (kinerja > 100%), namun pada Tahun 2023 tidak tercapai karena beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya (perbedaan tata cara perhitungan dan penggunaan parameter penilaian).

Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis (konversi kualitas pelaksanaan anggaran) dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3-41 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Target (%)	91,00	93,00	95,00	97,00	97,00
	Realisasi (%)	93,85	98,04	97,97	88,10	-
	Capaian Kinerja (%)	103,13	105,42	103,13	90,82	90,82

\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024

**Gambar 3-28 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

#### 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 Nomor SP. DIPA-022.08-0/2023, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada awal Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.344.665.225.000,-, sedangkan pada akhir Tahun 2023 mengalami perubahan menjadi Rp7.776.454.929.000,- dengan kronologis sebagai berikut:

- a. Pemblokiran anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp198.637.746.000,- pada DIPA Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Namun revisi anggaran berikut tidak mengubah pagu total Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. Pencantuman Saldo Awal badan Layanan Umum Balai Pengujian sebesar Rp43.335.564.000,- pada tanggal 2 Februari 2023;
- c. Lanjutan luncuran SBSN TA. 2022 ke TA. 2023 sebesar Rp20.542.236.000,- pada tanggal 24 Februari 2023 dengan rincian kegiatan yaitu:
  - 1) Pembangunan Jalur KA antara Langsa – Besitang termasuk supervisi sebesar Rp20.538.777.000,-;
  - 2) Pembangunan Jalur Ganda KA antara Bogor - Sukabumi termasuk supervisi sebesar Rp3.459.000,-.

- d. Lanjutan luncuran SBSN TA. 2022 ke TA. 2023 sebesar Rp24.335.531.000,- pada tanggal 24 April 2023 dengan rincian kegiatan antara lain:
- 1) Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar - Parepare antara Mandai - Palanro termasuk supervisi sebesar Rp22.496.111.000,-;
  - 2) Pembangunan Jalur KA Medan - Binjai termasuk supervisi sebesar Rp1.836.379.000,-;
  - 3) Pembangunan Jalur Ganda Solo - Semarang Fase I (Solo Balapan - Kalioso) termasuk supervisi sebesar Rp3.041.000,-.
- e. Penghapusan catatan Halaman IV.A DIPA di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp106.536.595.000,- dan realokasi antar satker untuk pemenuhan sebagian kebutuhan anggaran Belanja Pegawai dan kegiatan prioritas lainnya sebesar Rp24.000.000.000,-;
- f. Usulan Revisi Anggaran TA. 2023 dalam hal Pagu Anggaran berubah yaitu pergeseran antar Eselon I ke Sekretariat Jenderal sebesar Rp12.000.000.000,- (pergeseran anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke Sekretariat Jenderal bersumber pada Rupiah Murni sebesar Rp3.000.000.000,- untuk kekurangan Belanja Pegawai);
- g. Usulan Revisi Anggaran TA. 2023 dalam hal Pagu Anggaran berubah yaitu pergeseran antar Eselon I ke Sekretariat Jenderal sebesar Rp12.000.000.000,- untuk kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (pergeseran anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke Sekretariat Jenderal bersumber pada Rupiah Murni sebesar Rp3.000.000.000,- untuk kekurangan Belanja Pegawai);
- h. Usulan Revisi Anggaran TA. 2023 dalam hal Pagu Anggaran berubah yaitu pergeseran antar Eselon I ke Sekretariat Jenderal sebesar Rp6.200.000.000,- untuk kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (Pergeseran Anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke Sekretariat Jenderal bersumber pada Rupiah Murni sebesar Rp1.605.695.000,-);

- i. Usulan revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap berupa penghapusan catatan Halaman IV.A DIPA di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp77.826.847.000,- dan realokasi antar satker untuk pemenuhan kegiatan prioritas lainnya sebesar Rp13.479.334.000,-.
- j. Pergeseran Anggaran Blokir *Automatic Adjustment* Non Belanja Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke BABUN sebesar Rp6.299.963.000,-.
- k. Pencatatan atas pengadaan lahan dari LMAN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Periode Semester I TA. 2023 sebesar Rp190.506.481.000,-.
- l. Penambahan pagu dari penggunaan dana PNPB atas pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp4.342.200.000,-;
- m. Penambahan Pagu Anggaran dalam rangka pencatatan atas pengadaan lahan dari LMAN pada Proyek Strategis Nasional pada 4 lokasi/satker Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Semester II TA 2023 atas 219 bidang dengan luas tanah 156.406 M2 sebesar Rp167.607.689.854,- (pembulatan pada ADK menjadi Rp167.607.691.000,-).

Selain aspek penyerapan anggaran, penilaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran juga mempertimbangkan konsistensi, pencapaian *output* dan sasaran program. Beberapa faktor kendala dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Rata-rata nilai NKA Satker masih cukup rendah (77,76) dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan di Tahun 2023 sehingga berdampak pada Capaian *Output* dan NKA unit Eselon 1.
- b. Kesalahan penginputan kode referensi pada aplikasi SAKTI saat melakukan penginputan capaian *output* termasuk ketidaksesuaian data realisasi dan persentase capaian terhadap target yang tercantum pada aplikasi SAKTI.

- c. Komponen penyerapan anggaran masih rendah menjadi hal yang perlu segera dilakukan peningkatan pada Tahun 2024 melalui percepatan pelaksanaan kegiatan dan identifikasi kendala/hambatan.

## 5. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Dalam rangka perbandingan capaian kinerja, dilakukan *benchmarking* kinerja baik antar unit Eselon I maupun antar Kementerian/Lembaga guna menghasilkan analisa/rekomendasi yang komprehensif. Untuk indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran, dilakukan analisa perbandingan terhadap realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di level nasional serta antar unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada aplikasi SMART/Monev Kemenkeu sebagaimana pada Tabel berikut:

**Tabel 3-42 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2023**

No.	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
1	Sekretariat Jenderal	92.75	100.00	99.52	99.03	100.00	20.00	100	85.57
2	Inspektorat Jenderal	90.93	100.00	99.98	99.70	100.00	4.11	60.275	85.66
3	Ditjen Perhubungan Darat	90.71	100.00	98.35	97.74	100.00	6.55	66.375	84.81
4	Ditjen Perhubungan Laut	88.10	100.00	97.81	94.78	90.77	-2.25	44.375	83.23
5	Ditjen Perhubungan Udara	90.15	100.00	98.97	96.23	99.37	0.55	51.375	85.28
6	Ditjen Perkeretaapian	88.81	100.00	83.83	96.64	100.00	16.51	91.275	79.18
7	Badan Kebijakan Transportasi	91.12	100.00	99.91	99.39	100.00	6.58	66.45	85.47
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	89.03	100.00	99.62	97.31	90.43	-2.77	43.075	85.04
9	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	90.69	100.00	99.83	98.58	100.00	2.83	57.075	85.55

Mengacu pada Tabel di atas, diperoleh bahwa NKA Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2023 paling rendah apabila dibandingkan dengan unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Secara berurutan unit kerja yang memperoleh NKA tertinggi yakni Sekretariat Jenderal (92,75), Badan Kebijakan Transportasi (91,12), Inspektorat Jenderal (90,93), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (90,71), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (90,69), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (90,15), Badan Pengembangan SDM Perhubungan (89,03) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (88,81).

Selain itu, dilakukan juga analisa perbandingan terhadap salah satu komponen penilaian NKA yakni penyerapan anggaran. Penyerapan/realisasi anggaran baik tingkat Kementerian/Lembaga maupun antar eselon I diperoleh dari aplikasi SPAN dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3-43 Realisasi Anggaran Unit Kerja/Kementerian/Lembaga Lainnya Tahun 2023**

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	295,106,419,000	295,324,440,555	100,07%
2	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	4,614,034,533,000	4,605,846,423,050	99,82%
3	BADAN INTELIJEN NEGARA	15,823,856,051,000	15,768,383,231,867	99,65%
4	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,199,093,753,000	2,191,058,412,575	99,63%
5	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	184,667,396,000	183,855,010,980	99,56%
6	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	219,520,537,000	218,475,931,022	99,52%
7	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	329,423,576,000	327,797,004,390	99,51%
8	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	247,666,124,000	246,205,261,906	99,41%
9	LEMBAGA SANDI NEGARA	602,951,229,000	599,240,157,327	99,38%
10	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	296,234,394,000	294,241,499,614	99,33%
11	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	407,191,105,000	404,476,261,240	99,33%
12	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	430,076,132,000	426,960,091,164	99,28%
13	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,316,856,713,000	1,306,686,312,780	99,23%
14	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	329,099,461,000	326,538,665,624	99,22%
15	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	714,273,367,000	708,257,051,872	99,16%
16	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	524,390,687,000	519,230,088,328	99,02%
17	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	245,480,500,000	242,998,904,315	98,99%
18	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,089,874,149,000	4,046,046,621,270	98,93%
19	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	267,670,167,000	264,529,794,146	98,83%
20	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	341,990,713,000	337,894,479,988	98,8%
21	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	51,020,046,000	50,369,298,518	98,72%
22	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6,098,212,555,000	6,019,389,792,398	98,71%
23	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	119,831,945,000	118,214,807,714	98,65%
24	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	241,525,168,000	238,074,180,645	98,57%
25	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,201,183,049,000	1,182,715,214,584	98,46%
26	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	122,534,805,000	120,600,010,822	98,42%
27	KEMENTERIAN PARIWISATA	3,391,631,213,000	3,336,990,355,918	98,39%
28	KOMISI YUDISIAL RI	177,206,353,000	174,281,300,281	98,35%
29	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	5,481,143,903,000	5,390,008,587,553	98,34%
30	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	374,136,493,000	367,844,818,653	98,32%
31	SEKRETARIAT KABINET	356,605,412,000	350,586,033,180	98,31%
32	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	16,237,525,348,000	15,952,111,860,103	98,24%
33	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8,838,358,325,000	8,680,994,083,941	98,22%
34	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,818,011,584,000	1,785,046,474,976	98,19%
35	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7,285,579,878,000	7,150,538,001,807	98,15%
36	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,455,280,145,000	6,335,454,623,418	98,14%
37	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	3,174,537,259,000	3,115,269,990,171	98,13%
38	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	121,810,074,153,000	119,525,633,788,160	98,12%
39	BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1,963,765,328,000	1,926,555,116,562	98,11%
40	BADAN KEAMANAN LAUT	999,175,887,000	979,066,521,673	97,99%
41	KEMENTERIAN AGAMA	74,303,994,635,000	72,780,799,989,708	97,95%
42	KEMENTERIAN SOSIAL	87,275,374,140,000	85,450,328,833,258	97,91%
43	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1,393,656,874,000	1,362,970,608,141	97,8%
44	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	8,072,163,385,000	7,874,964,280,962	97,56%
45	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	124,246,201,000	121,175,304,404	97,53%
46	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2,389,935,124,000	2,330,384,254,078	97,51%
47	KEMENTERIAN KEUANGAN	67,947,898,774,000	66,224,407,739,682	97,46%
48	MAHKAMAH AGUNG	11,911,520,197,000	11,594,033,617,747	97,33%

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
49	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	4,614,692,296,000	4,490,447,063,630	97.31%
50	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4,385,969,126,000	4,265,153,052,424	97.25%
51	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	3,376,466,778,000	3,281,434,076,297	97.19%
52	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	18,933,274,107,000	18,395,194,724,367	97.16%
53	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1,128,605,685,000	1,094,951,654,261	97.02%
54	BADAN PUSAT STATISTIK	7,737,050,832,000	7,504,605,155,902	97%
55	KEMENTERIAN KESEHATAN	97,439,065,696,000	94,462,985,236,717	96.95%
56	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	291,326,942,000	282,321,773,172	96.91%
57	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1,694,059,841,000	1,640,437,671,493	96.83%
58	KOMISI PEMILIHAN UMUM	20,338,596,336,000	19,682,629,500,830	96.77%
59	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,000,382,475,000	967,397,861,413	96.7%
60	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	5,987,810,898,000	5,788,407,953,540	96.67%
61	KEMENTERIAN PERTANIAN	14,808,408,721,000	14,314,442,297,123	96.66%
62	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	187,144,450,000	180,573,176,981	96.49%
63	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	382,823,821,000	367,539,693,460	96.01%
64	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	182,020,768,752,000	174,324,456,800,897	95.77%
65	KEMENTERIAN PERTAHANAN	178,817,251,750,000	170,849,932,350,721	95.54%
66	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36,686,586,653,000	35,004,965,399,446	95.42%
67	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	3,207,506,191,000	3,059,412,186,175	95.38%
68	BADAN PANGAN NASIONAL	464,776,703,000	443,158,920,771	95.35%
69	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1,079,227,170,000	1,028,677,308,609	95.32%
70	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	84,527,635,111,000	80,436,682,780,903	95.16%

Tabel 3-44 Realisasi Anggaran Per-Unit Eselon I Tahun 2023

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja										Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer		
1	02201   SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU REALISASI	135,876,597,000 135,441,084,109 (99.68%)	364,895,730,000 362,731,280,118 (99.41%)	65,109,131,000 64,984,085,661 (99.81%)	0	0	0	0	0	0	0	565,881,458,000 563,156,449,868 (99.52%)
		SISA	435,512,891	2,164,449,882	125,045,339	0	0	0	0	0	0	0	2,725,008,112
2	02202   INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU REALISASI	46,046,388,000 46,036,313,174 (99.98%)	51,498,442,000 51,491,506,559 (99.99%)	4,269,953,000 4,266,374,347 (99.92%)	0	0	0	0	0	0	0	101,814,783,000 101,794,194,080 (99.98%)
		SISA	10,074,826	6,935,441	3,578,653	0	0	0	0	0	0	0	20,588,920
3	02203   DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU REALISASI	568,232,214,000 560,902,286,762 (98.71%)	3,206,073,186,000 3,178,184,404,295 (99.13%)	2,044,219,620,000 1,982,435,754,761 (96.98%)	0	0	0	0	0	0	0	5,818,525,020,000 5,721,522,445,818 (98.33%)
		SISA	7,329,927,238	27,888,781,705	61,783,865,239	0	0	0	0	0	0	0	97,002,574,182
4	02204   DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU REALISASI	1,773,083,473,000 1,747,851,998,408 (98.58%)	4,850,179,519,000 4,808,797,080,718 (99.15%)	4,024,641,307,000 3,858,329,883,002 (95.87%)	0	0	0	0	0	0	0	10,647,904,299,000 10,414,978,962,128 (97.81%)
		SISA	25,231,474,592	41,382,438,282	166,311,423,998	0	0	0	0	0	0	0	232,925,336,872
5	02205   DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU REALISASI	890,722,123,000 921,547,736,516 (103.46%)	2,538,473,462,000 2,505,251,886,640 (98.69%)	4,004,519,055,000 3,934,935,775,284 (98.26%)	0	0	0	0	0	0	0	7,433,714,640,000 7,361,735,198,440 (99.03%)
		SISA	-30,825,613,516	33,221,775,360	69,583,279,716	0	0	0	0	0	0	0	71,979,441,560
6	02208   DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	144,616,902,000 141,936,482,873 (98.15%)	1,783,968,349,000 1,718,747,155,260 (96.34%)	5,847,869,678,000 4,685,435,474,695 (80.12%)	0	0	0	0	0	0	0	7,776,454,929,000 6,546,119,112,828 (84.18%)
		SISA	2,680,419,127	65,221,193,740	1,162,434,203,305	0	0	0	0	0	0	0	1,230,335,816,172
7	02211   BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	34,805,083,000 34,796,038,240 (99.97%)	122,553,304,000 122,411,344,287 (99.88%)	3,772,426,000 3,772,425,110 (100.00%)	0	0	0	0	0	0	0	161,130,813,000 160,979,807,637 (99.91%)
		SISA	9,044,760	141,959,713	890	0	0	0	0	0	0	0	151,005,363
8	02212   BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	298,140,404,000 295,984,666,590 (99.28%)	2,855,198,484,000 2,813,789,849,889 (98.55%)	768,108,870,000 765,626,905,196 (99.68%)	0	0	0	0	0	0	0	3,921,447,758,000 3,875,401,421,675 (98.83%)
		SISA	2,155,737,410	41,408,634,111	2,481,964,804	0	0	0	0	0	0	0	46,046,336,325
9	02213   BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU REALISASI	33,114,459,000 32,964,156,841 (99.55%)	159,009,366,000 158,728,687,097 (99.82%)	67,589,128,000 67,584,963,014 (99.99%)	0	0	0	0	0	0	0	259,712,953,000 259,277,806,962 (99.83%)
		SISA	150,302,159	280,678,903	4,164,986	0	0	0	0	0	0	0	435,146,048
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>PAGU REALISASI</b>	<b>3,924,637,643,000 3,917,460,763,513 (99.82%)</b>	<b>15,931,849,842,000 15,720,132,994,863 (98.67%)</b>	<b>16,830,099,168,000 15,367,371,641,070 (91.31%)</b>	<b>0 (0.00%)</b>	<b>0 (0.00%)</b>	<b>0 (0.00%)</b>	<b>0 (0.00%)</b>	<b>0 (0.00%)</b>	<b>0 (0.00%)</b>	<b>0 (0.00%)</b>	<b>36,686,586,653,000 35,004,965,399,446 (95.42%)</b>
		<b>SISA</b>	<b>7,176,879,487</b>	<b>211,716,847,137</b>	<b>1,462,727,526,930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,681,621,253,554</b>



Mengacu Tabel 3-43 di atas, diperoleh bahwa rata-rata capaian realisasi anggaran nasional tahun 2023 pada 84 Kementerian/Lembaga rata-rata sebesar 96,4%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (84,18%) masih dibawah rata-rata apabila dibandingkan dengan Unit Kerja/Kementerian/Lembaga lainnya secara nasional maupun di internal Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya pada Tabel 3-44 bahwa pada internal Kementerian Perhubungan, realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga masih dibawah rata-rata dimana realisasi Kementerian Perhubungan sebesar 95,42%. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya secara masif dan nyata guna meningkatkan kinerja penyerapan anggaran pada periode berikutnya dengan tetap memperhatikan capaian *output* dan *outcome* kegiatan yang telah dilaksanakan serta perlu menunjukkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

## **6. Upaya Peningkatan Kinerja**

Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan pada periode berikutnya. Beberapa upaya yang perlu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran antara lain:

- a. Mempercepat proses lelang di awal tahun anggaran agar pekerjaan bisa dilaksanakan dengan maksimal dan selesai tepat waktu.
- b. Rapat koordinasi intensif, monitoring dan evaluasi rutin oleh seluruh unit kerja terkait realisasi anggaran dan progress kegiatan termasuk mempersiapkan dokumen perencanaan teknis yang memadai dengan pengoptimalan PMU/tenaga ahli.
- c. Penyusunan RPD/prognosa realisasi anggaran yang valid guna selanjutnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi berkala (setiap bulan) termasuk penyelesaian hal-hal yang menghambat pelaksanaan anggaran dan pencapaian *output*.

- d. Kegiatan prioritas perlu dilengkapi dengan identifikasi *hazard* dan risiko guna mempersiapkan rencana pengendalian/penanganan risiko.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

- a. ***Penyesuaian strategi/kebijakan***: Penerapan manajemen risiko pada kegiatan prioritas guna memastikan pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja.
- b. ***Penyesuaian aktivitas dan anggaran***: Antisipasi kegiatan dan anggaran yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment (AA)* atau blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia.
- c. ***Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai***:
  - 1) Penempatan pegawai untuk posisi pengelola anggaran yang memiliki kompetensi manajerial dan pemahaman teknis yang memadai.
  - 2) Pelatihan kepada operator pelaporan untuk aplikasi SAKTI agar dapat menginput data sesuai ketentuan, valid dan tidak anomali.

### **Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan indikator kinerja dalam upaya pengukuran kinerja terhadap layanan perkantoran serta pemenuhan kebutuhan pegawai dan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga dapat berjalan lancar. Kegiatan layanan perkantoran diantaranya berupa layanan prasarana dan sarana internal terkait dukungan kegiatan perkantoran serta dalam hal pengelolaan SDM dan ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Tingkat kepuasan pelayanan perkantoran diperoleh dari hasil survey kepuasan kepada pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang

memperoleh layanan terkait SDM, ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Pelaksanaan survei tersebut dilaksanakan kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian setiap triwulan melalui *google form* yang disematkan pada *login* Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (revisi terakhir), ditargetkan tingkat kepuasan pelayanan perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan nilai 3,60. Pada Triwulan IV 2023, telah dilaksanakan survey dengan pengisian kuisioner oleh 150 pegawai dari 1.588 pegawai (9,45%) dan diperoleh tingkat kepuasan pelayanan perkantoran dengan nilai 3,69. Adapun hasil survey diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3-45 Uraian Hasil Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Triwulan IV 2023**

No	Uraian	Respon					Total	Top Two	Nilai
		Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik			
1	Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan SDM/Kepegawaian	81	240	541	180	1.050	0,92	3,58	81
2	Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Tata Usaha	48	206	580	214	1.050	0,95	3,76	48
3	Pendapat Responden tentang Kepuasan Layanan Rumah Tangga/Umum	80	301	790	327	1.500	0,95	3,73	80
<b>Nilai</b>									<b>3,69</b>

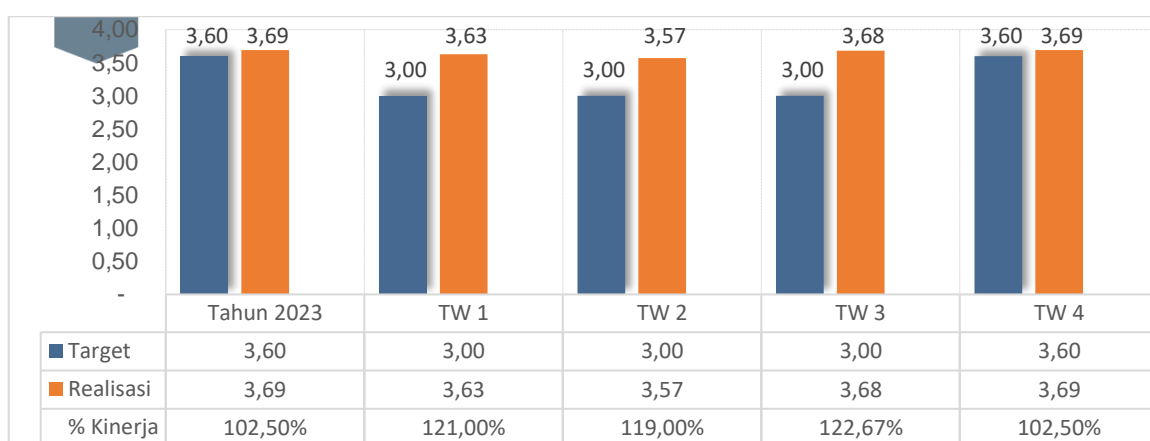
**1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja**

Dengan realisasi tingkat kepuasan pelayanan perkantoran sebesar 3,69 dan target yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar 3,60, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 102,50%. Hasil penilaian tingkat kepuasan pelayanan perkantoran per triwulan berfluktuatif, dan diperoleh penilaian tertinggi pada Triwulan IV 2023. Rincian target dan realisasi tingkat

kepuasan pelayanan perkantoran Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

**Tabel 3-46 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	3,6	3,0	3,0	3,0	3,6	3,63	3,57	3,68	3,69	121,00	119,00	122,67	102,50	102,50



**Gambar 3-29 Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

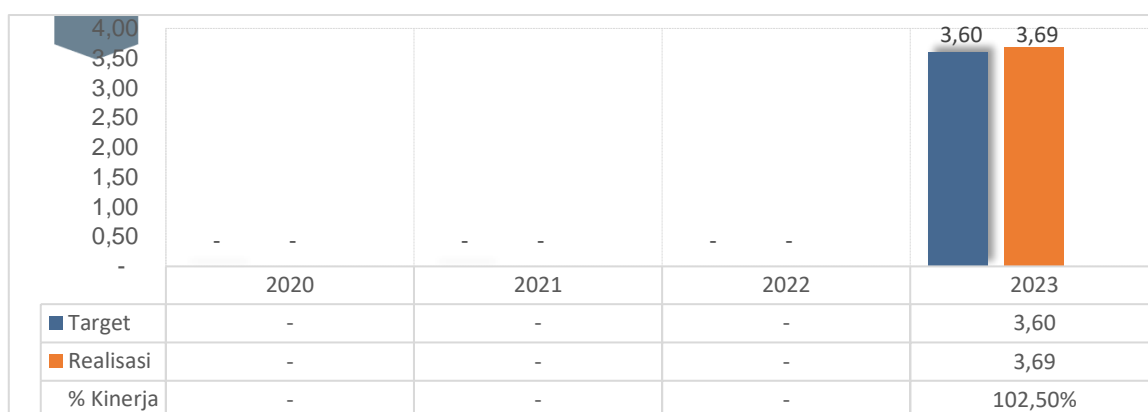
## 2. Perbandingan Realisasi dan Target 3 Tahun Terakhir

Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran merupakan indikator baru di Tahun 2023 mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Indikator tersebut diperuntukkan sebagai ukuran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pelaksanaan tugas terkait pengelolaan SDM, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Untuk itu, pada periode 3 tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 s.d 2022 belum dilaksanakan pengukuran dan penilaian terhadap indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan target 3 tahun terakhir sebagaimana pada Tabel berikut.

**Tabel 3-47 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Realisasi			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	3,60	-	-	-	3,69 (Kinerja 102,50%)



**Gambar 3-30 Perbandingan Realisasi dan Target Tahun 2020 s.d 2023 untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

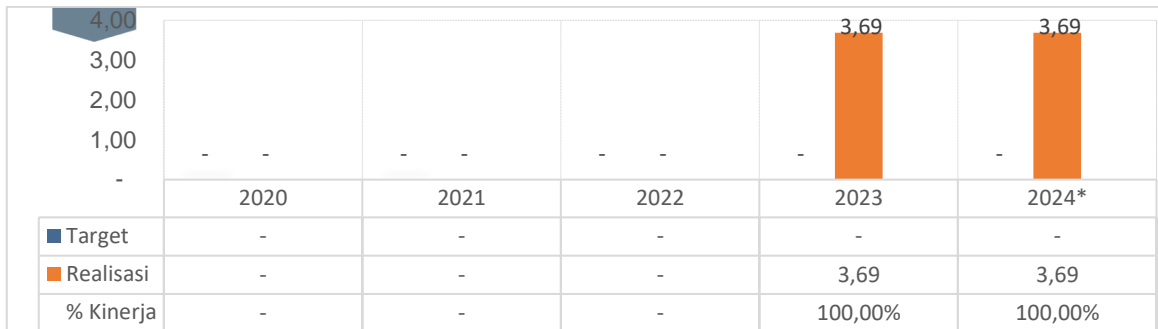
### 3. Perbandingan dengan Target Rencana Strategis

Sebagaimana uraian sebelumnya, indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran merupakan indikator baru di Tahun 2023 dan tidak tercantum pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024. Untuk itu, perbandingan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada target yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis. Selanjutnya indikator tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

**Tabel 3-48 Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024*
Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Target (Nilai)	-	-	-	-	-
	Realisasi (Nilai)	-	-	-	3,69	-
	Capaian Kinerja (%)	-	-	-	100,00	100,00

\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024



\*) Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target Renstra Tahun 2024

**Gambar 3-31 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

#### 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Tersedianya fasilitas dan layanan perkantoran memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas layanan internal terhadap pegawai dan pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Terpenuhinya target tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan perkantoran diantaranya karena beberapa faktor diantaranya:

1. Ketersediaan anggaran dukungan manajemen dan layanan perkantoran yang cukup dan didukung dengan distribusi serta pemanfaatan yang tepat sasaran.
2. Kemudahan akses dan informasi dalam penyampaian kebutuhan/keluhan terkait pelayanan perkantoran termasuk layanan SDM dan ketatausahaan.
3. Komitmen pimpinan untuk pemberian layanan perkantoran sesuai kebutuhan pegawai dan ketentuan yang berlaku.

## 5. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya perbaikan kedepan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tingkat kepuasan pelayanan perkantoran diantaranya:

1. Peningkatan layanan SDM/kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana berdasarkan hasil survey masih terdapat penilaian yang kurang baik diantaranya terkait layanan pembinaan/sosialisasi urusan kepegawaian, layanan mutasi dan pembinaan jenjang karir pegawai.
2. Pengoptimalan sistem TIK untuk *database* dan media informasi terkait layanan SDM/kepegawaian sehingga lebih cepat dan informatif kepada seluruh pegawai (misalnya mekanisme izin belajar, izin cuti, tugas belajar, kenaikan pangkat, informasi diklat, dan lainnya).

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas dan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

1. **Penyesuaian strategi/kebijakan:** Diusulkan kebijakan/SOP yang *update* terkait pelaksanaan layanan kepegawaian, ketatausahaan dan umum/kerumahtanggaan.
2. **Penyesuaian aktivitas dan anggaran:** Diusulkan kegiatan sosialisasi secara intensif khususnya terkait pembinaan SDM/kepegawaian serta pemenuhan hak pegawai sesuai ketentuan.

### 3.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan potensi secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya yang tersedia lebih efektif dan efisien. Dari sisi ketersediaan dan kualitas SDM, diharapkan dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian dalam pencapaian target/tujuan organisasi. Pada Tahun 2023, jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 129 pegawai atau sebesar 8,12% dari total pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (1.588 pegawai). Dari total pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tersebut, 94 pegawai diantaranya telah memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (72,87% dari total pegawai Setditjen Perkeretaapian). SDM yang ahli dan kompeten di bidangnya tersebut cukup mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dimana dibuktikan dengan 7 IKK telah mencapai target Tahun 2023 dari total 10 IKK pada dokumen Perjanjian Kinerja.

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi anggaran dimana beberapa target Indikator Kinerja Kegiatan telah tercapai 100% atau lebih dengan masih terdapat sisa anggaran dari pagu yang dialokasikan pada Tahun 2023. Rincian efisiensi sumber daya anggaran disampaikan pada Tabel berikut.



Tabel 3-49 Analisis Efisiensi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				Keterangan
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	4.442.381.000	4.134.375.375	93,07	308.005.625	Pelaksanaan studi/kajian untuk rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian berupa evaluasi manfaat telah selesai 100% dan telah disahkan oleh pimpinan.
2	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	95,00	97,78	102,93	4.096.976.000	3.824.887.603	93,36	272.088.397	Pelaksanaan koordinasi penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bidang perkeretaaan dengan pihak terkait dan Direktorat Teknis di lingkungan DJKA telah memenuhi kebutuhan/tuntutan pada tahun 2023
3	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	%	55,00	56,74	103,16	5.977.833.000	5.977.313.160	99,99	519.840	Koordinasi pelaksanaan diklat dan pembinaan ASN untuk memiliki sertifikat kompetensi dan keahlian tertentu/teknis
4	Peresentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan	%	70,00	70,37	100,53	3.730.707.000	3.632.283.093	97,36	98.423.907	Penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK DJKA berupa <i>roadmap</i> TIK, kegiatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan				Keterangan
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran/ Efisiensi Pada Indikator yang Tercapai (Rp)	
	Komunikasi Bidang Perkeretaapian									pengelolaan website dan portal aplikasi
5	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100,00	100,64	100,64	11.998.727.000	11.662.654.437	97,20	336.072.563	Pemberitaan/publikasi terkait perkeretaapian melalui media cetak, elektronik maupun sosial media
6	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83,00	82,70	99,64	12.105.314.000	11.797.588.792	97,46	-	Target kinerja tidak tercapai, tidak ada efisiensi
7	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	3	100,00	5.086.738.000	4.998.786.443	98,27	87.951.557	Kegiatan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan SPIP (penilaian risiko) dan penilaian maturitas SPIP
8	Persentase Realisasi Penadapan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100	63,79	63,79	6.202.107.000	6.180.989.247	99,66	-	Target kinerja tidak tercapai, tidak ada efisiensi
9.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	92,00	88,10	95,76	6.730.525.000	6.355.489.727	94,43	-	Target kinerja tidak tercapai, tidak ada efisiensi
10.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,60	3,69	102,50	97.431.603.000	96.476.881.735	99,02	954.721.265	Kegiatan pelayanan ketatausahaan, kerumahtangaan dan kepegawaian
<b>Jumlah</b>						<b>157.802.911.000</b>	<b>155.041.249.612</b>	<b>98,25</b>	<b>2.057.783.154 (1,30%)</b>	

### 3.4 CAPAIAN KEBERHASILAN LAINNYA TAHUN 2023

Pencapaian keberhasilan lainnya merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mencakup 4 bidang yaitu Perencanaan, Keuangan, Hukum, serta SDM dan Umum. Pada Tahun 2023, terdapat capaian keberhasilan lainnya yang merupakan hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diantaranya:

1. Menerima Piagam Penghargaan Peringkat I dengan kategori Capaian Kinerja Terbaik berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2023;
2. Menerima Piagam Penghargaan Peringkat I dengan kategori Capaian Kinerja Terbaik berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2023;
3. Menerima Piagam Penghargaan Peringkat II dengan kategori unit kerja terbaik dalam evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP oleh Tim Inspektorat Jenderal dan Tim Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



Gambar 3-32 Capaian Keberhasilan Lainnya Tahun 2023

### 3.5 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 Nomor SP. DIPA-022.08-0/2023 tanggal 30 November 2022, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebesar Rp7.344.665.225.000,- dengan alokasi anggaran untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp146.845.570.000,-. Pada tahun berjalan, terjadi beberapa kali perubahan alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian baik untuk realokasi, pergeseran maupun penambahan sehingga pada akhir Tahun 2023 total alokasi anggaran menjadi sebesar Rp157.802.911.000,-. Adapun rincian perubahan alokasi anggaran sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran belanja pegawai ke BPKA Sulawesi Selatan sebesar Rp1.557.766.000,-.
2. Penambahan belanja pegawai sebesar Rp16.350.842.000,-.
3. Realokasi blokir belanja pegawai ke BA BUN sebesar Rp1.529.961.000,-.
4. Pergeseran antar unit eselon I ke Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan sebesar Rp3.000.000.000,-.
5. Pergeseran antar unit eselon I untuk pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dan penghapusan blokir sebesar Rp12.316.092.000,-.
6. Pergeseran anggaran antar satker lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka optimalisasi anggaran Rupiah Murni sebesar Rp13.010.318.000,-.

Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2023 sebesar Rp155.041.249.612,- atau 98,25% dan telah melaksanakan seluruh kegiatan/*output* sesuai dengan target yang ditetapkan. Rincian realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian per-jenis belanja dan per-*output* kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3-50 Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja dan Sumber Pembiayaan

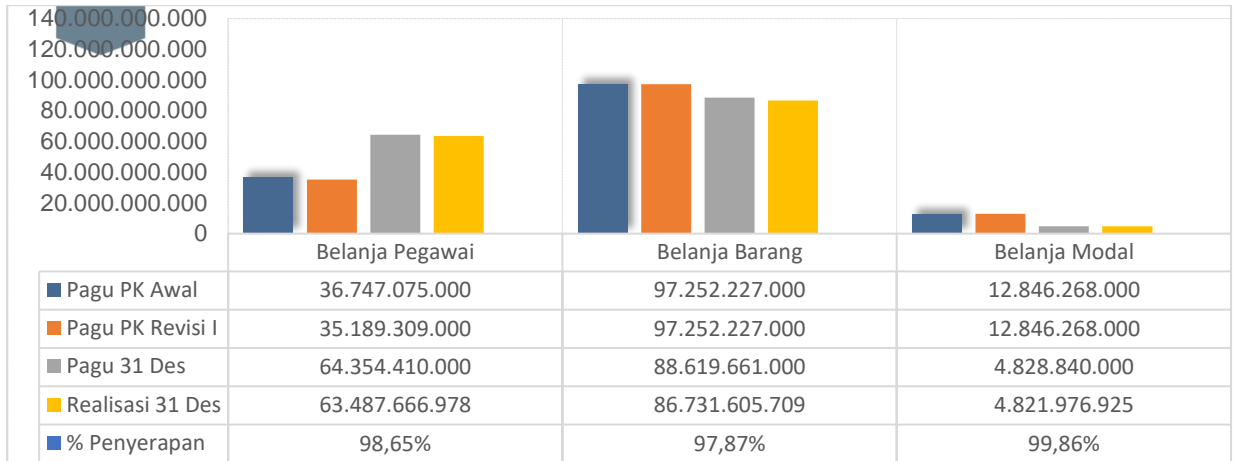
No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK Awal	Pagu Sesuai PK Revisi I	Pagu Sesuai PK Revisi II	Pagu 31 Desember 2023	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	36.747.075.000	35.189.309.000	64.354.410.000	64.354.410.000	63.487.666.978	98,65	866.743.022	1,35
2.	Belanja Barang	97.252.227.000	97.252.227.000	88.619.661.000	88.619.661.000	86.731.605.709	97,87	1.888.055.291	2,13
3.	Belanja Modal	12.846.268.000	12.846.268.000	4.828.840.000	4.828.840.000	4.821.976.925	99,86	6.863.075	0,14
	a. Rupiah Murni	12.846.268.000	12.846.268.000	4.828.840.000	4.828.840.000	4.821.976.925	99,86	6.863.075	0,14
	b. SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. PHLN	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. BLU	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>146.845.570.000</b>	<b>145.287.804.000</b>	<b>157.802.911.000</b>	<b>157.802.911.000</b>	<b>155.041.249.612</b>	<b>98,25</b>	<b>2.761.661.388</b>	<b>1,75</b>

\*Tidak ada perubahan pagu pada saat PK Revisi ke-II dan pagu per 31 Desember 2023

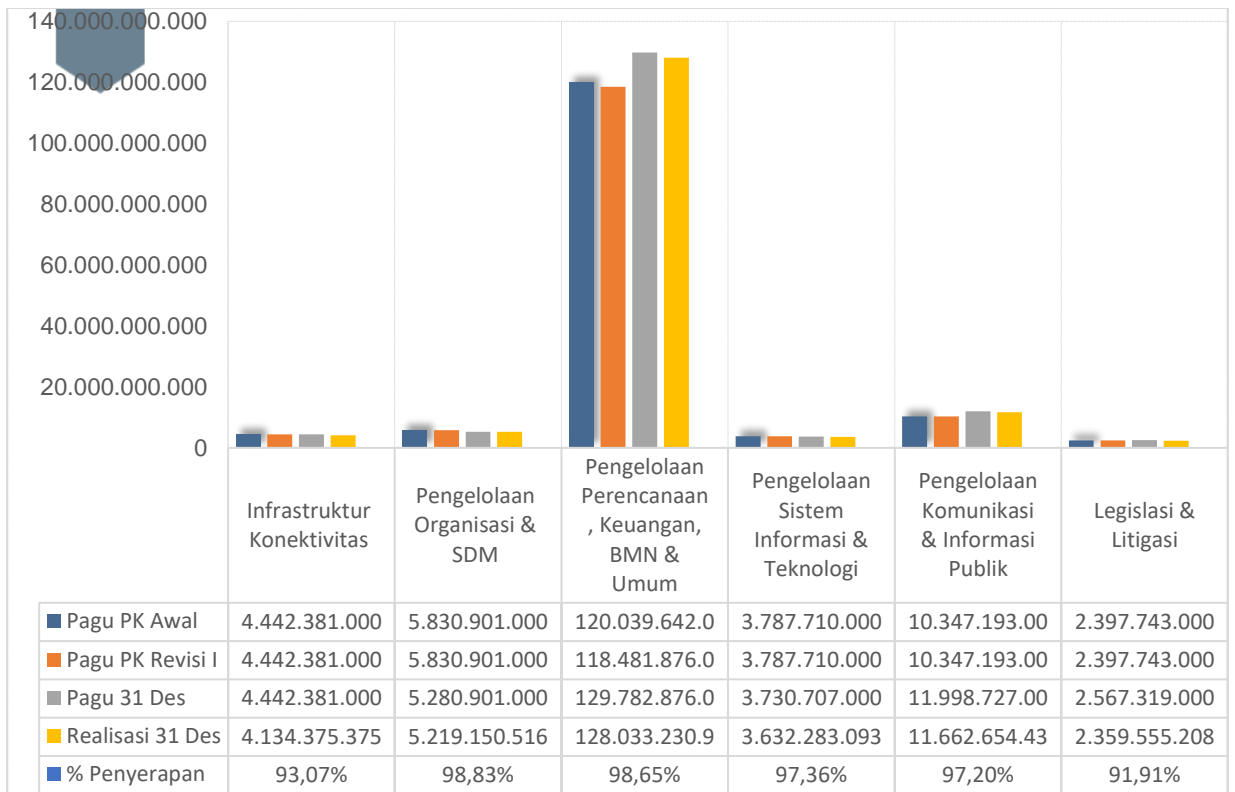
Tabel 3-51 Kronologi Perubahan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan *Output*/Kegiatan

No.	Output Kegiatan	Pagu (Rp)				Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu Sesuai PK Awal	Pagu Sesuai PK Revisi I	Pagu Sesuai PK Revisi II	Pagu 31 Desember 2023	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	4.442.381.000	4.442.381.000	4.442.381.000	4.442.381.000	4.134.375.375	93,07	308.005.625	6,93
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi KA	5.830.901.000	5.830.901.000	5.280.901.000	5.280.901.000	5.219.150.516	98,83	61.750.484	1,17
3.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	120.039.642.000	118.481.876.000	129.782.876.000	129.782.876.000	128.033.230.983	98,65	1.749.645.017	1,35
4.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	3.787.710.000	3.787.710.000	3.730.707.000	3.730.707.000	3.632.283.093	97,36	98.423.907	2,64
5.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	10.347.193.000	10.347.193.000	11.998.727.000	11.998.727.000	11.662.654.437	97,20	336.072.563	2,80
6.	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	2.397.743.000	2.397.743.000	2.567.319.000	2.567.319.000	2.359.555.208	91,91	207.763.792	8,09
<b>Jumlah</b>		<b>146.845.570.000</b>	<b>145.287.804.000</b>	<b>157.802.911.000</b>	<b>157.802.911.000</b>	<b>155.041.249.612</b>	<b>98,25</b>	<b>2.761.661.388</b>	<b>1,75</b>

\*Tidak ada perubahan pagu pada saat PK Revisi ke-II dan pagu 31 Desember 2023



**Gambar 3-33 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Per Jenis Belanja / Pembiayaan**



**Gambar 3-34 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Per Output Kegiatan**

Pada Tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan tetap mempertimbangkan pencapaian per *output* kegiatan yaitu:

1. Realisasi belanja pegawai mencapai 98,65% dikarenakan selisih pagu anggaran perencanaan perhitungan belanja pegawai dengan asumsi peningkatan tunjangan kinerja/lainya pada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Realisasi belanja barang tidak mencapai 100% sebagai langkah efisiensi pelaksanaan belanja barang di seluruh unit kerja di lingkungan Sekeretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Realisasi belanja modal tidak mencapai 100% merupakan selisih pagu anggaran terhadap kontrak pelaksanaan kegiatan.

Penyerapan anggaran berbasis kinerja sudah seharusnya berpegang pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif dengan memperhatikan dan membandingkan *input* atas *output* dan *outcome*. Realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan serta indikator kinerja sebagai berikut.

**Tabel 3-52 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

Program	Kegiatan/Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Infrastruktur Konektivitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	4.442.381.000	4.134.375.375
Program Dukungan Manajemen	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan)	4.096.976.000	3.824.887.603
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian	5.977.833.000	5.977.313.160



Program	Kegiatan/Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian	3.730.707.000	3.632.283.093
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	11.998.727.000	11.662.654.437
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian;	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	12.105.314.000	11.797.588.792
		Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	5.086.738.000	4.998.786.443
		Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian Bidang Perkeretaapian	6.202.107.000	6.180.989.247
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	6.730.525.000	6.355.489.727
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkantoran	97.431.603.000	96.476.881.735
<b>Jumlah</b>			<b>157.802.911.000</b>	<b>155.041.249.612</b>

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada laporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2023), sebagai berikut:

**Tabel 4-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Pelaporan Kinerja Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring pemanfaatan hasil kajian/studi melalui koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait untuk mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan penyampaian hasil kajian/studi pada Triwulan IV Tahun 2023 kepada Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan, Bappeda) dan PT. KAI.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arsip secara digital hasil studi/kajian agar mudah diakses unit kerja internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Direktorat teknis, Balai terkait) guna mempermudah akses dan meningkatkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil studi/kajian telah diarsip secara digital memanfaatkan TIK yaitu menggunakan database perencanaan teknis bidang perkeretaapian agar mudah diakses oleh internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta meningkatkan pemanfaatan rekomendasi kebijakan.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan usulan kegiatan pendukung untuk rekomendasi kebijakan Tahun 2024 sesuai kebutuhan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Tahun 2024, direncanakan penyusunan 3 rekomendasi kebijakan dimana akhir tahun 2023 telah dilaksanakan pengajuan lelang kegiatan kepada Biro LPPBMN.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diusulkan penyusunan kebijakan yang mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan kajian/studi terkait perencanaan teknis sesuai tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 271 Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Kewenangan dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perkeretaapian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna menjadi dasar dan acuan yang mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan kajian/studi terkait perencanaan teknis.</li> </ul>

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
Persentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi intensif dengan Direktorat teknis dan Biro Hukum Setjen Kementerian Perhubungan guna mempercepat penyelesaian khususnya peraturan perundangan bidang perkeretaapian yang strategis/mendesak.</li> <li>Diusulkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan capaian kinerja yang telah melebihi 110% (tidak on the right track 90-110%).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat teknis dan Biro Hukum Setjen Kementerian Perhubungan terkait penyelesaian peraturan perundangan bidang perkeretaapian yang strategis/mendesak.</li> <li>Telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 per Desember 2023 dikarenakan capaian kinerja indikator kinerja persentase pencapaian target legislasi bidang perkeretaapian melebihi 110%, target semula 80% menjadi 90%.</li> </ul>
Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan penyesuaian/<i>inpassing</i> jabatan ASN ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu bidang perkeretaapian.</li> <li>Lanjutan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diklat manajerial/umum dan diklat teknis kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan uji kompetensi tahap 1 melalui penyesuaian/<i>inpassing</i> Jabatan Fungsional Bidang Perkeretaapian serta menentukan kelas jabatan untuk Jabatan Fungsional Bidang Perkeretaapian.</li> <li>Telah dilaksanakan diklat teknis <i>highspeed railway</i> Kereta Cepat Jakarta Bandung oleh Sekeretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.</li> </ul>
Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan dan pendampingan reviu Tingkat II terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2024 sesuai ketentuan SPBE, Rencana Induk/Roadmap serta mengacu rencana penyederhanaan aplikasi.</li> <li>Penyelesaian tindak lanjut hasil <i>Vulnerability Assessment</i> (VA) untuk proses lanjut permohonan domain ESB Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna mendukung integrasi dan berbagi pakai data;</li> <li>Penyelesaian pengelolaan Portal Aplikasi dan website Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan implementasi <i>Single Sign On</i> (SSO) untuk mendukung rencana penyederhanaan aplikasi.</li> <li>Pelaksanaan monitoring progres kegiatan TIK periode Triwulan IV 2023 diantaranya untuk pembangunan Sistem Aplikasi Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian Berbasis Digital dan pembangunan Aplikasi Layanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan pembahasan dan pendampingan terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2024 dengan Pusdatin Perhubungan dan unit kerja yang mengusulkan.</li> <li>Catatan/rekomendasi Pusdatin terhadap VA telah ditindaklanjuti dan Berita Acara telah proses penandatanganan oleh Pusdatin Perhubungan.</li> <li>Portal Aplikasi dan Website Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah mengimplementasikan <i>Single Sign On</i> (SSO) untuk mendukung rencana penyederhanaan aplikasi serta peningkatan keamanan sistem.</li> <li>Monitoring progres kegiatan TIK untuk pembangunan Sistem Aplikasi Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian Berbasis Digital dan pembangunan Aplikasi Layanan BLU Balai Pengujian Perkeretaapian telah</li> </ul>

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	BLU Balai Pengujian Perkeretaapian.	<p>dilaksanakan termasuk UAT dengan Pusdatin Perhubungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Selain itu juga telah disusun tindak lanjut catatan hasil revidi kegiatan TIK semester II Tahun 2023.</li> </ul>
Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring media dilaksanakan setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan update berkala "<i>Hot Issue Perkeretaapian</i>".</li> <li>Penyusunan dokumen/buku publikasi (QnA series lanjutan, buku profil, dan lainnya) dengan desain menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.</li> <li>Peningkatan publikasi dalam bentuk siaran pers, pameran dan kegiatan edukasi perkeretaapian dengan menyiapkan berbagai topik antara lain pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (pengoperasian LRT Jabodebek, KCJB, jalur ganda lintas selatan Jawa, dan lainnya) serta kebijakan pengembangan perkeretaapian ke depan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan analisis dan monitoring pemberitaan media untuk mengetahui arah pemberitaan dan narasi yg berkembang ke masyarakat terkait <i>issue</i> Ditjen Perkeretaapian serta sebagai upaya mitigasi jika terjadi krisis. Selain itu juga telah membuat siaran pers untuk pengalihan <i>issue/counter issue, hoding statement</i>, konten sosmed dan kegiatan publikasi lainnya.</li> <li>Tahun 2023 telah disusunnya Buku Saku QnA Perkeretaapian dan Buku Profil Ditjen Perkeretaapian dengan desain menarik dan mudah dipahami oleh publik.</li> <li>Telah dilakukan publikasi terkait pemanfaatan hasil-hasil pembangunan serta kebijakan pengembangan perkeretaapian ke depan dalam bentuk siaran pers, publikasi pada media sosial, pameran, dan kegiatan edukasi.</li> </ul>
Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan pengisian LKE oleh 11 unit kerja non-sampel dilengkapi data dukung evaluasi implementasi SAKIP pada masing-masing komponen, sub komponen dan kriteria melalui aplikasi SILAKI pada Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan menggunakan standar penilaian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan</li> <li>Pelaksanaan pleno untuk finalisasi hasil evaluasi dan penyusunan rekomendasi terhadap penilaian mandiri implementasi SAKIP 11 unit kerja non-sampel.</li> <li>Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dalam rangka penyesuaian sumber daya anggaran, perubahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan koordinasi terkait perbaikan pengisian LKE untuk melengkapi data dukung evaluasi implementasi SAKIP pada masing-masing komponen, sub komponen dan kriteria melalui SILAKI untuk 11 unit kerja <i>non-sample</i> (Setditjen Perkeretaapian, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BTP Jakarta, BTP Bandung, BTP Semarang, BTP Medan, BTP Palembang, Balai Pengujian, BPKAR Sumsel, BPKA Sulse).</li> <li>Telah dilakanakan rapat pleno dan disusun rekomendasi terhadap hasil penilaian mandiri implementasi SAKIP 11 unit kerja <i>non-sample</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.</li> <li>Telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada bulan Desember 2023 dalam rangka penyesuaian sumber</li> </ul>

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>pimpinan dan memastikan capaian kinerja di akhir Tahun 2023 dapat memenuhi kriteria <i>on the right track</i> (capaian 90-110%)</p>	<p>daya anggaran, perubahan pimpinan dan memastikan capaian kinerja di akhir Tahun 2023 dapat memenuhi kriteria <i>on the right track</i> (capaian 90-110%).</p>
<p>Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan pembahasan terkait hasil evaluasi BPKP terhadap penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk selanjutnya digunakan sebagai capaian kinerja masing-masing unit kerja.</li> <li>• Finalisasi reviu petunjuk teknis penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai acuan dan tindak lanjut KM 69 Tahun 2023.</li> <li>• Lanjutan peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perkeretaapian terkait Manajemen Risiko melalui pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.</li> <li>• Melakukan penetapan konteks, penyusunan profil risiko dan rencana tindak pengendalian sebagai bagian dari piagam manajemen risiko serta mengusulkan alokasi anggaran untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Desember 2023, telah dilaksanakan pembahasan terkait hasil evaluasi BPKP terhadap penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan berkoordinasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.</li> <li>• Telah disusun reviu petunjuk teknis penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang mengacu pada KM 69 Tahun 2023.</li> <li>• Telah diselenggarakan pelatihan dan sertifikasi Manajemen Risiko pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian</li> <li>• Telah disusun penetapan konteks, profil risiko, rencana tindak pengendalian, piagam manajemen risiko, serta mengusulkan alokasi anggaran untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024.</li> </ul>
<p>Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan intensif dengan unit kerja terkait (Kementerian Keuangan, Kemenkumham, BPKP, lainnya) terkait penyesuaian dasar hukum pendapatan fungsional TAC termasuk penyusunan RPP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.</li> <li>• Peningkatan pendapatan PNBP dari pengoptimalan layanan BLU.</li> <li>• Pengoptimalan pemanfaatan aset bangunan dan lahan dengan skema konsesi untuk peningkatan perolehan PNBP didukung dengan penyelesaian inventarisasi dan sertifikasi aset/barang milik negara.</li> <li>• Diperlukan kebijakan terkait penagihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat ini peraturan yang mengatur terkait metode serta dasar hukum terkait pendapatan fungsional TAC (evaluasi PMK 138, revisi PP 15 tahun 2016, revisi PM 1 Tahun 2022, revisi PM 112 Tahun 2015) sudah diberikan penomoran dan tinggal menunggu pengundangan di Tahun 2024.</li> <li>• Hingga akhir tahun 2023, pendapatan PNBP dari sector layanan BLU telah melebihi target bahkan mencapai 292% dari target yang ditetapkan (realisasi sebesar Rp.79.667.327.609,- dari target Rp.27.246.675.000,-).</li> <li>• Hingga akhir Tahun 2023, pemanfaatan aset/barang milik negara belum optimal dalam mendukung pencapaian PNBP, sehingga hal ini menjadi catatan perbaikan di periode berikutnya.</li> <li>• Kebijakan terkait penagihan PNBP TAC</li> </ul>

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>PNBP TAC Tahun 2023 dimana telah dilaksanakan verifikasi dengan ditandatangani Berita Acara untuk selanjutnya penerbitan billing PNBP TAC Triwulan I dan II Tahun 2023. Di sisi lain terdapat permohonan keringanan TAC dari PT.KAI.</p>	<p>Tahun 2023 masih menunggu hasil koordinasi dengan BPKP dan pihak terkait lainnya.</p>
<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan PT. KAI terkait pelaksanaan/penolakan penugasan dan kontrak IMO.</li> <li>• Koordinasi intensif dengan unit kerja terkait (Kementerian Keuangan, Bappenas, Setjen dan Itjen Kemenhub) untuk dukungan percepatan revisi optimalisasi anggaran, usulan rekomposisi dan persetujuan kontrak tahun jamak, serta usulan skema pinjam pagu untuk optimalisasi sumber dana SBSN.</li> <li>• Evaluasi pelaksanaan anggaran secara intensif terhadap seluruh unit kerja guna percepatan penyerapan anggaran sesuai RPD serta penyelesaian hal-hal yang menghambat pelaksanaan anggaran.</li> <li>• Percepatan pencapaian <i>output</i> pelaksanaan kegiatan masing-masing Unit Kerja/Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilaksanakan kontrak IMO dengan PT.KAI pada Desember 2023.</li> <li>• Telah dilaksanakan koordinasi dengan intensif pada triwulan IV Tahun 2023 guna mendukung percepatan penyerapan anggaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.</li> <li>• Telah dilaksanakan evaluasi berkala pada triwulan IV Tahun 2023 guna mendukung percepatan penyerapan anggaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.</li> <li>• Telah dilaksanakan percepatan beberapa kegiatan pada triwulan IV Tahun 2023 guna mendukung percepatan penyerapan anggaran dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan, namun masih terdapat beberapa kegiatan yang lelang gagal sehingga tidak dapat terealisasi.</li> </ul>
<p>Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan layanan SDM/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana berdasarkan hasil survey masih terdapat penilaian yang tidak baik/kurang baik diantaranya terkait layanan pembinaan/sosialisasi terkait kepegawaian dan layanan mutasi dan jenjang karir pegawai.</li> <li>• Pengoptimalan sistem TIK untuk database dan share informasi terkait layanan kepegawaian sehingga lebih cepat dan informatif kepada seluruh pegawai (misalnya terkait mekanisme izin belajar, izin cuti, tugas belajar, kenaikan pangkat, informasi diklat, dan lainnya).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada triwulan IV Tahun 2023 telah dilaksanakan penyusunan manajemen pola karir pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.</li> <li>• Perolehan informasi terkait kepegawaian telah mengoptimalkan sistem TIK seperti izin cuti memanfaatkan aplikasi SIK Kemenhub, informasi diklat pegawai memanfaatkan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian dan Whatsapp Group, dan informasi kenaikan pangkat memanfaatkan aplikasi SiASN (milik BKN). Kedepan</li> </ul>

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diusulkan kebijakan/SOP yang <i>update</i> terkait pelaksanaan layanan kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga.</li> </ul>	<p>diharapkan pengoptimalan pemanfaatan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pada Tahun 2023, penyusunan/<i>update</i> SOP terkendala alokasi anggaran dan ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga dialihkan ke Tahun 2024.</li> </ul>

Setelah menindaklanjuti rekomendasi periode sebelumnya, ditemukan adanya perbaikan terhadap perubahan budaya kinerja diantaranya:

1. Penggunaan aplikasi SILAKI untuk proses implementasi dan evaluasi SAKIP internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Penerapan manajemen risiko serta penggunaan *Dashboard* Manajemen Risiko (MR BEAN) untuk internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Penggunaan *google form* yang disematkan pada *login* Portal Aplikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pelaksanaan survey kepuasan layanan perkantoran.

## 4.2 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan pelaksanaan program infrastruktur konektivitas dan program dukungan manajemen pada Perjanjian Kinerja terdiri dari:
  - a. Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian.
  - b. Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.
  - c. Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional.

- d. Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal.
- e. Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian.
- f. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2. Rata-rata capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 sebesar 96,90%, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4-2 Rata-Rata Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SP 1 Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian	IK 1 Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas	%	100,00	100,00	100,00
SP 2 Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan perkeretaapian	IK 2 Persentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	95,00	97,78	102,93
SP 3 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	IK 3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian tertentu	%	55,00	56,74	103,16
SP 4 Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	IK 4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	70,00	70,37	100,53
SP 5 Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	IK 5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100,00	100,64	100,64
SP 6 Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK 6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83,00	82,70	99,64
	IK 7 Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	3	100,00
	IK 8 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100	63,79	63,79
	IK 9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	92,00	88,10	95,76



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	IK 10 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,60	3,69	102,50
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>96,90</b>

3. Pada Tahun 2023, alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp.157.802.911.000,- dengan realisasi sebesar Rp155.041.249.612,- atau capaian penyerapan anggaran sebesar 98,25% serta efisiensi anggaran terhadap kinerja yang tercapai sebesar 1,30%.
4. Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tahun 2023 serta dapat memberikan berbagai informasi terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menjadi acuan dan tolak ukur keberhasilan/kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

### 4.3 REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2023, terdapat beberapa indikator kinerja kegiatan yang tidak dapat memenuhi target. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti:**
  - a. Persiapan pelaksanaan kegiatan studi/kajian pendukung Tahun 2024 khususnya pada tahapan pengadaan barang dan jasa dengan penyiapan dokumen dan koordinasi dengan Biro LPPBMN.
  - b. Antisipasi kegiatan studi/kajian pendukung yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan pengusulan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

- c. Koordinasi terkait usulan penetapan Tim Pengarah dan Tim Pendamping melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk persiapan pelaksanaan kegiatan studi/kajian pendukung.
- 2. Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian:**
- a. Koordinasi yang baik dengan Direktorat teknis dan Biro Hukum Setjen Kementerian Perhubungan yang mengusulkan rancangan peraturan baru maupun perubahan/revisi yang didukung dengan kajian akademis yang memadai.
  - b. Percepatan penyelesaian peraturan/legislasi khususnya peraturan perundangan bidang perkeretaapian yang strategis/mendesak dan telah berproses baik di Kementerian Hukum dan HAM serta Biro Hukum.
  - c. Antisipasi kebutuhan peraturan/legislasi untuk mendukung penerapan teknologi perkeretaapian baru diantaranya *Autonomous Rail Rapid Transit* (ART) yang direncanakan di IKN baru.
  - d. Penyiapan Rencana Strategis bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 pada Tahun 2024 khususnya kerangka regulasi yang memuat kebutuhan peraturan/legislasi perundangan bidang perkeretaapian
- 3. Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu:**
- a. Percepatan penyesuaian/inpassing jabatan ASN ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu bidang perkeretaapian termasuk koordinasi dengan Kementerian PANRB dan Pusbin Jabatan Fungsional Transportasi untuk penetapan kelas jabatan.
  - b. Lanjutan program magang ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 dengan bekerjasama operator/badan usaha/industri bidang perkeretaapian.

- c. Lanjutan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan termasuk bimbingan teknis terkait manajerial/umum dan teknis perkeretaapian kepada ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran.
- d. Penempatan SDM kompeten untuk menjalankan tugas dan fungsi Satuan Pelayanan di Balai Teknik Perkeretaapian

**4. Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian:**

- a. Pelaksanaan dan pendampingan usulan *clearence* terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2024 sesuai ketentuan SPBE, Rencana Induk/Roadmap serta mengacu rencana penyederhanaan aplikasi.
- b. Pelaksanaan reviu peta jalan (*roadmap*) TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk penyesuaian kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan serta sebagai acuan utama dalam perencanaan TIK Tahun 2025-2029 sesuai arsitektur SPBE.
- c. Pengembangan Portal Aplikasi sebagai *Super Apps* Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan sistem TIK lainnya serta dukungan database bidang perkeretaapian yang memadai.
- d. Sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh unit kerja untuk pengoptimalan penggunaan Portal Aplikasi dan website Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

**5. Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian:**

- a. Monitoring media dilaksanakan setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan *update* berkala "*Hot Issue Perkeretaapian*".
- b. Peningkatan publikasi dalam bentuk siaran pers/liputan terkait perkeretaapian dengan menyiapkan berbagai topik antara lain pemanfaatan hasil pembangunan, program unggulan Tahun 2024, perkembangan teknologi perkeretaapian serta kebijakan pengembangan perkeretaapian ke depan.

- c. Kerjasama dengan media dan influencer untuk membantu pelaksanaan publikasi serta meningkatkan reputasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian.

**6. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian:**

- a. Dokumen perencanaan kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) dipublikasikan tepat waktu di aplikasi e-SAKIP Reviu dan Website.
- b. Penetapan target dalam IKU/IKK agar memperhatikan kriteria menantang yaitu lebih tinggi dari relisasi tahun sebelumnya.
- c. Memberikan perhatian lebih (monitoring, evaluasi dan tindak lanjut) untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang pada IKU/IKK yang capaian kerjanya tidak tercapai, baik pada Laporan Monitoring Rencana Aksi Bulanan/Triwulanan, monitoring capaian kinerja triwulan/tahunan, sehingga kedepannya IKU/IKK tersebut dapat tercapai dan kinerja secara keseluruhan termasuk kriteria masih on the right track yaitu realisasi keseluruhan capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d 110%.
- d. Membuat Laporan Kinerja bulanan sesuai dengan PM PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- e. Secara konsisten melaksanakan dan mendokumentasikan bukti keberadaan dokumen reviu terhadap Laporan Kinerja, dokumen Laporan Kinerja tetap waktu sesuai PM Menhub Nomor 85 Tahun 2020, serta pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja secara berjenjang.
- f. Melakukan beberapa upaya yang bisa dihargai terkait Dokumen Laporan Kinerja untuk memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dan pelaporan kinerja telah

memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

#### **7. Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian:**

- a. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon.
- b. Mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan implementasi sehingga dapat diukur dan disimpulkan efektivitas dan manfaat terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- c. Memperbaiki indikator dan target kinerja agar berorientasi pada outcome dan memenuhi kriteria SMART.
- d. Melaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi manajemen risiko dan pengukuran tingkat pemahaman manajemen risiko dari pegawai.
- e. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh.

#### **8. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian:**

- a. Berkoordinasi intensif dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk percepatan pengundangan PM 60 Tahun 2023 (Perubahan/Revisi PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian) guna dijadikan landasan dan dasar hukum dalam pengelolaan PNBP bidang perkeretaapian.
- b. Peningkatan pendapatan PNBP dengan pengoptimalan layanan BLU.
- c. Pengoptimalan pemanfaatan aset bangunan dan lahan dengan skema konsesi untuk peningkatan perolehan PNBP didukung dengan penyelesaian inventarisasi dan sertifikasi aset/barang milik negara.
- d. Diperlukan kebijakan terkait penagihan PNBP TAC Tahun 2023 guna dibayarkan pada Tahun 2024.

**9. Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian:**

- a. Mempercepat proses lelang di awal tahun anggaran agar pekerjaan bisa dilaksanakan dengan maksimal dan selesai tepat waktu.
- b. Rapat koordinasi intensif, monitoring dan evaluasi rutin oleh seluruh unit kerja terkait realisasi anggaran dan progress kegiatan termasuk mempersiapkan dokumen perencanaan teknis yang memadai dengan pengoptimalan PMU/tenaga ahli.
- c. Penyusunan RPD/prognosa realisasi anggaran yang valid guna selanjutnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi berkala (setiap bulan) termasuk penyelesaian hal-hal yang menghambat pelaksanaan anggaran dan pencapaian output.
- d. Kegiatan prioritas perlu dilengkapi dengan identifikasi hazard dan risiko guna mempersiapkan rencana pengendalian/penanganan risiko.
- e. Antisipasi kegiatan dan anggaran yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan *exercise* dan pengoptimalan anggaran yang tersedia

**10. Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Direktorat Jenderal Perkeretaapian:**

- a. Peningkatan layanan SDM/kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana berdasarkan hasil survey masih terdapat penilaian yang kurang baik diantaranya terkait layanan pembinaan/sosialisasi urusan kepegawaian, layanan mutasi dan pembinaan jenjang karir pegawai, termasuk pemenuhan hak pegawai sesuai ketentuan.
- b. Pengoptimalan sistem TIK untuk database dan media informasi terkait layanan SDM/kepegawaian sehingga lebih cepat dan informatif kepada seluruh pegawai (misalnya mekanisme izin belajar, izin cuti, tugas belajar, kenaikan pangkat, informasi diklat, dan lainnya).
- c. Diusulkan kebijakan/SOP yang *update* terkait pelaksanaan layanan kepegawaian, ketatausahaan dan umum/kerumahtanggaan.

Selain hal-hal tersebut di atas, pencapaian target Perjanjian Kinerja periode selanjutnya agar dimonitoring secara berkala sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta pengukuran keberhasilan kegiatan dapat lebih mudah dilaksanakan. Selain itu juga diperlukan sinkronisasi dan konsistensi antara kegiatan melalui rencana kerja dan anggaran sesuai sasaran dan target yang hendak dicapai berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

# LAMPIRAN



# **LAMPIRAN I**

**Rencana Kinerja Tahunan 2023**



# RENCANA KINERJA TAHUNAN

## SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2023



# KATA PENGANTAR

Puji Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan diberlakukannya restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh Kementerian/ Lembaga, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

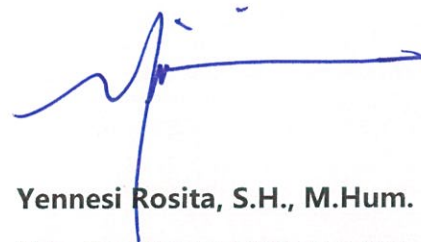
Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijakan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan penganggaran berbasis kinerja, baik yang terkait dengan kebijakan APBN maupun yang diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan transportasi perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 disamping dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, secara substansi juga sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan 2020–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang.

Jakarta, Januari 2023

PLT. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
PERKERETAAPIAN



**Yennesi Rosita, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19660716 199503 2 001**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 DASAR HUKUM .....	1
1.2 LATAR BELAKANG .....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI SETDITJEN PERKERETAAPIAN .....	3
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....</b>	<b>9</b>
2.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN .....	9
2.2 TUJUAN & SASARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN .....	10
2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN .....	11
2.4 TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN .....	12
2.5 ISU STRATEGIS DAN POTENSI .....	14
2.6 TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN .....	15
<b>BAB III EVALUASI RENCANA STRATEGIS 2015-2019 .....</b>	<b>16</b>
3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/PENDANAAN .....	16
3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT .....	17
3.3 EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	21
<b>BAB IV RENCANA KINERJA TAHUN 2023 .....</b>	<b>24</b>
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023 .....	24
4.1.1 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian .....	24
4.1.2 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian .....	25
4.1.3 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian .....	26
4.1.4 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian .....	27
4.1.5 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian .....	27
4.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024 .....	28
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>30</b>



# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian .....	10
Tabel 2.2	Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024.....	11
Tabel 2.3	Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024.....	13
Tabel 3.1	Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019 .....	17
Tabel 3.2	Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015-2019.....	18
Tabel 3.3	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015-2019.....	22
Tabel 4.1	Target Rincian Output (RO) Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023.....	25
Tabel 4.2	Target Rincian Output (RO) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 .....	26
Tabel 4.3	Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 .....	26
Tabel 4.4	Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 .....	27
Tabel 4.5	Target Rincian Output (RO) Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023.....	28
Tabel 4.6	Reviu Target Kinerja Program Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 .....	29

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian .....	4
Gambar 3.1	Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019.....	15



# B A B 1

## PENDAHULUAN



### 1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum mengenai penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 terdiri dari peraturan perundangan berikut

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.005/SK.89/DJKA/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020–2024;
15. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP-DJKA 10 TAHUN 2023 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

## **1.2 LATAR BELAKANG**

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan.

Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) unit kerja



Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 memuat fungsi Dukungan Manajemen Kinerja kesekretariatan baik dari fungsi perencanaan, fungsi hukum dan kehumasan, fungsi pelaksanaan anggaran serta organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian di bidang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian pada tahun 2023 khususnya untuk menunjang Keberlangsungan Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020-2024.

### **1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI SETDITJEN PERKERETAAPIAN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, menyatakan bahwa tugas pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi





dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diatur melalui Peraturan Menteri tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar berikut:



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- c. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga di bidang perkeretaapian;
- d. Penyiapan koordinasi dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri, serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan

dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai 4 (empat) susunan unit kerja dibawahnya yang terdiri dari:

### **1. Bagian Perencanaan**

Bagian Perencanaan sesuai dengan Pasal 440-441 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja, pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian, serta penyusunan program pinjaman luar negeri dan dalam negeri;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen anggaran, serta penyusunan program prioritas tahunan; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam Pasal 442 menyatakan bahwa Bagian Perencanaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Perencanaan memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Rencana; 2) Sub Koordinator Kelompok Program; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan.



## **2. Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan sesuai dengan Pasal 443-444 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara, serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan anggaran, tata usaha keuangan, dan pengelolaan barang milik negara, serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi anggaran, pembukuan dan perhitungan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam Pasal 445 menyatakan bahwa Bagian Keuangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Keuangan memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Pelaksana Anggaran; 2) Sub Koordinator Kelompok Pembendaharaan; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Verifikasi Anggaran.

## **3. Bagian Hukum**

Bagian Hukum sesuai dengan Pasal 446-447 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri, serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;



- b. Penyiapan bahan dan penyusunan perjanjian, kerja sama dan pelaksanaan advokasi, sosialisasi hukum di bidang perkeretaapian, serta pendokumentasian hukum; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian, publikasi dan edukasi publik tentang kebijakan bidang perkeretaapian, pengelolaan berita, serta penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Dalam Pasal 448 menyatakan bahwa Bagian Hukum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Hukum memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Peraturan Perundang-Undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum; 2) Sub Koordinator Kelompok Perjanjian dan Advokasi Hukum; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

#### **4. Bagian Kepegawaian dan Umum**

Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan Pasal 449-450 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, promosi dan mutasi pegawai, kepangkatan pegawai, standar kompetensi jabatan, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang perkeretaapian;



- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan keprotokolan; dan
- c. Penyiapan bahan pengelolaan urusan umum dan rumah tangga, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam Pasal 451 menyatakan bahwa Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit organisasi, Bagian Kepegawaian dan Umum memiliki sub koordinator yang terdiri atas: 1) Sub Koordinator Kelompok Kepegawaian dan Organisasi; 2) Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha; dan 3) Sub Koordinator Kelompok Rumah Tangga.





## B A B 2

### RENCANA STRATEGIS 2020-2024

#### 2.1 VISI DAN MISI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024. Adapun Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, yaitu:

***“Mewujudkan simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”***

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

- 1) Merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif;
- 2) Merumuskan regulasi perkeretaapian yang responsif dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan SDM regulator yang kompeten dan profesional;
- 4) Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 5) Mengembangkan proses bisnis berbasis digital sesuai kemajuan teknologi; dan
- 6) Meningkatkan dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Sejalan dengan Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Aspek Pelayanan tersebut ditetapkan Tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Rekomendasi Kebijakan yang mendukung konektivitas;
- 2) Perumusan regulasi yang adaptif dengan perkembangan waktu;
- 3) Peningkatan kualitas SDM Perkeretaapian yang berkelanjutan;
- 4) Pengelolaan birokrasi yang agile, efektif, dan efisien;
- 5) Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi terbaru; dan
- 6) Peningkatan dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Mengacu kedudukan, tugas dan fungsinya yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan serta merujuk konsep Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 (Cascading Sasaran Strategis), bahwa Sasaran untuk unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang akan dicapai sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian;
- 2) Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian;
- 3) Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional Yang Memiliki Sertifikat JFT/Teknis;
- 4) Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 5) Sistem Informasi yang andal; dan
- 6) Dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian**

NO	TUJUAN	SASARAN			
		URAIAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
1.	Penyediaan Rekomendasi Kebijakan yang	1.	Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan	1.	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian (dokumen)

NO	TUJUAN	SASARAN			
		URAIAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
	mendukung Konektivitas		Konektivitas Perkeretaapian		
2.	Perumusan Regulasi yang Adaptif dengan perkembangan waktu	2.	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	2.	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian (%)
3.	Peningkatan Kualitas SDM Perkeretaapian yang Berkelanjutan	3.	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertifikat JFT/ teknis	3.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu (%)
4.	Pengelolaan Birokrasi yang Agile, Efektif, dan Efisien	4.	Terwujudnya Birokrasi yang <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	4.	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
				5.	Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian
				6.	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
				7.	Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perkeretaapian (%)
				8.	Persentase pemenuhan fasilitas dan layanan perkantoran (%)
5.	Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi terbaru	5.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	9.	Persentase pemenuhan target Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (%)
6.	Peningkatan dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	6.	Dukungan publik terhadap Ditjen Perkeretaapian	10.	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian (%)

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

### 2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdiri dari 4 poin utama, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyediaan rekomendasi kebijakan yang mendukung konektivitas;
2. Mewujudkan pengelolaan birokrasi yang agile, efektif dan efisien;
3. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Perkeretaapian yang berkelanjutan; dan
4. Mewujudkan perumusan regulasi dan kebijakan yang adaptif dengan perkembangan.



**Tabel 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024**

NO.	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Mewujudkan penyediaan rekomendasi kebijakan yang mendukung konektivitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan survey/studi kebijakan/masterplan/studi kelayakan/pedoman teknis pembinaan dan peningkatan perkeretaapian;</li> <li>Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, RKT, PK) serta pelaksanaan evaluasi (LAKIP).</li> </ol>
2.	Mewujudkan pengelolaan birokrasi yang agile, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkat muturasi SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;</li> <li>Kegiatan layanan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perkeretaapian, layanan internal dan layanan perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi;</li> <li>Monitoring pembayaran PNBP Bidang Perkeretaapian;</li> <li>Monitoring pelaksanaan anggaran termasuk revisi anggaran dengan optimalisasi dan efisiensi penyerapan anggaran.</li> </ol>
3.	Mewujudkan peningkatan kualitas SDM Perkeretaapian yang berkelanjutan	- Pembinaan dan pengembangan SDM perkeretaapian yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertifikat JFT/Teknis.
4.	Mewujudkan perumusan regulasi dan kebijakan yang adaptif dengan perkembangan	- Penyusunan legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian.
5.	Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi terbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>Implementasi tata kelola TIK yang andal</li> <li>Dukungan implementasi <i>digital workplace</i></li> <li>Implementasi satu data Ditjen Perkeretaapian</li> </ol>
6.	Peningkatan dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	- Penguatan strategi komunikasi melalui kebijakan strategi komunikasi.

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

#### 2.4 TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyusun Indikator Kinerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian.
- 2) Persentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian;
- 3) Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/ keahlian tertentu;
- 4) Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian;
- 5) Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 6) Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian;
- 7) Persentase penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 8) Persentase pemenuhan fasilitas dan layanan perkantoran;
- 9) Persentase pemenuhan target Rencana Induk Teknologi Informasi & Komunikasi; dan
- 10) Persentase pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

**Tabel 2.3 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>SK A1</b> Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	<b>IKK A1</b> Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	-	4	5	5	6
2.	<b>SK A3</b> Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	<b>IKK A3</b> Persentase Pencapaian Target Legislasi (jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) di Bidang Perkeretaapian (%)	20	40	60	80	100
3.	<b>SK A3</b> Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Berkompeten dan Profesional memiliki Sertifikat JFT/ Teknis	<b>IKK A3</b> Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki Sertifikat Kompetensi / Keahlian Tertentu (%)	25	35	45	55	65
4.	<b>SK A4</b> Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<b>IKK A4.1</b> Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	85	86	87	88	90
		<b>IKK A4.2</b> Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	3	3	3	3	4
		<b>IKK A4.3</b> Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian ( <i>dalam Rp. Miliar</i> )	727	841	925	1.018	1.120
		<b>IKK A4.4</b> Persentase Penyerapan Anggaran (%)	91	93	95	97	97

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		<b>IKK A4.5</b> Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Perkantoran (%)	100	100	100	100	100
5.	<b>SK A5</b> Sistem informasi dan teknologi terbaru	<b>IKK A5</b> Persentase Pemenuhan Target Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (%)	35	50	65	80	100
6.	<b>SK A6</b> Dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	<b>IKK A6</b> Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

## 2.5 ISU STRATEGIS DAN POTENSI

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perbaikan organisasi di masa mendatang. Pada unit organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain:

- 1) Aspek Perencanaan, yaitu integrasi rencana strategis, penganggaran/program dan pengukuran kerja dalam sistem perencanaan pembangunan perkeretaapian dengan mempertimbangkan outcome kegiatan dan indikator kinerja dalam setiap unit kerja dalam lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 2) Aspek Organisasi, Tata Laksana, dan Kepegawaian, yaitu penataan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk pengembangan pelayanan umum (BLU). Selain itu juga perlu dilakukan penguatan profesionalisme SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator penyelenggara perkeretaapian;
- 3) Aspek Keuangan, yaitu peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran serta percepatan pelaksanaan kegiatan yang transparansi dan akuntabilitas berlandaskan efisiensi, tepat guna, tepat waktu;
- 4) Aspek Barang Milik Negara yaitu inventaris barang milik negara serta pengesahan pencatatan aset tersebut dalam upaya Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 5) Aspek Perundang-undangan dan legalitas hukum yaitu percepatan penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait peningkatan keselamatan,

keamanan, dan kinerja pelayanan transportasi serta mendukung kemudahan investasi di sektor transportasi bidang perkeretaapian;

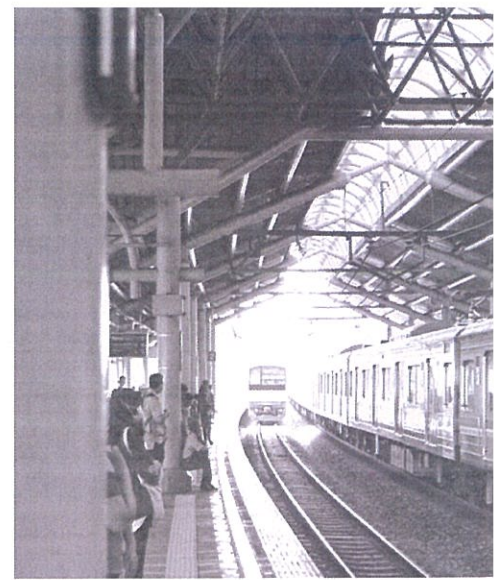
- 6) Aspek Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang yaitu tuntutan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dalam peningkatan layanan administrasi perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

## **2.6 TARGET KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu antara lain:

- 1) Keterbatasan pendanaan melalui APBN sehingga perlu adanya sumber pendanaan alternatif yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
- 2) Keterbatasan jumlah SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara kuantitas dan kualitas yang memenuhi standar kompetensi/ sertifikat teknis khususnya untuk Unit Pelaksana Teknis/ Balai;
- 3) Fungsi pada Unit Pelaksana Teknis/Balai perlu ditingkatkan agar beban kerja dapat tepat dan proporsional;
- 4) Belum optimalnya pendataan aset dan pemanfaatan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk yang bersumber dari pengoperasian prasarana milik Negara;
- 5) Belum optimalnya pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka identifikasi dan mitigasi/ pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan pembangunan perkeretaapian.





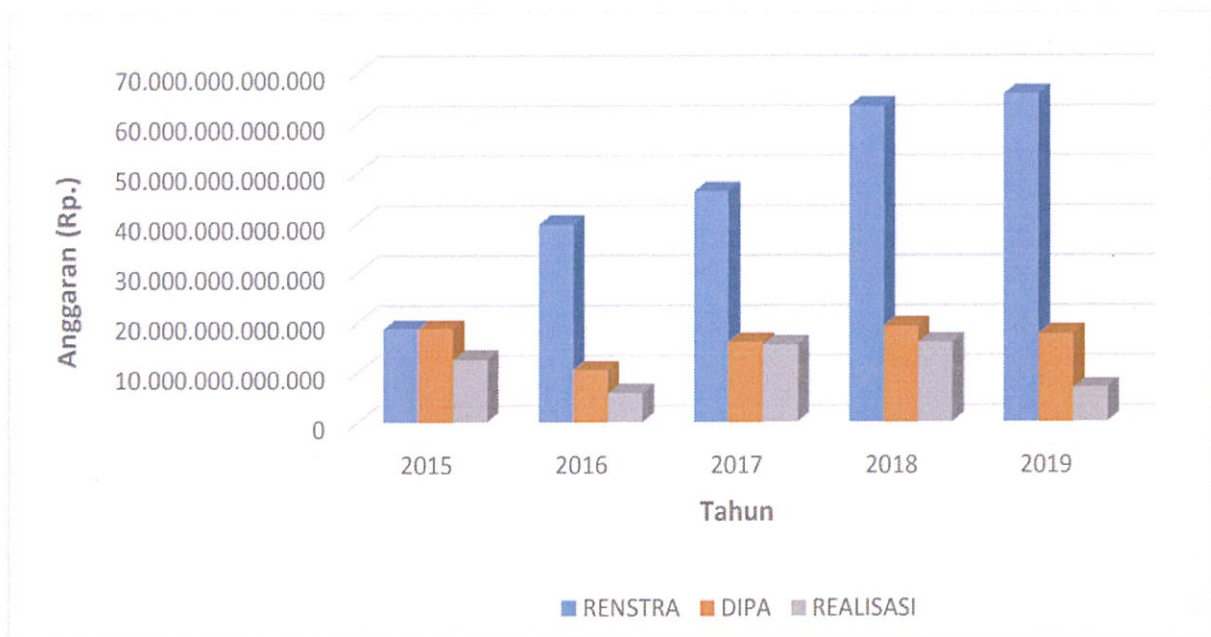
# BAB 3

## EVALUASI RENCANA STRATEGIS

### TAHUN 2015-2019

#### 3.1 EVALUASI PEMBIAYAAN/PENDANAAN

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 bidang perkeretaapian, diperoleh kebutuhan pendanaan untuk setiap penyelenggaraan perkeretaapian untuk Tahun 2015-2019 sekitar Rp 233 triliun. Namun dengan keterbatasan pembiayaan APBN, maka sampai dengan tahun 2019, investasi APBN dalam pembangunan perkeretaapian yang disediakan total hanya mencapai Rp. 81 triliun atau 35% dari total kebutuhan tahun 2015-2019 berdasarkan Renstra. Gap pembiayaan tahun 2015-2019 sampai mencapai Rp. 151 triliun.



Gambar 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019



Secara rinci per kegiatan/ unit kerja Eselon I dapat disampaikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Kebutuhan dan Realisasi Pendanaan Tahun 2015-2019**

<b>TAHUN</b>	<b>RPJMN</b>	<b>REVIU RENSTRA</b>	<b>DIPA</b>	<b>REALISASI</b>
2015	18.697.955.926.000	12.583.388.000	18.697.955.926.000	12.563.760.933.460
2016	39.558.846.384.000	11.690.413.000	10.407.315.735.000	5.801.339.893.298
2017	46.200.813.641.000	23.526.744.000	16.022.981.642.000	15.487.396.107.877
2018	63.253.294.900.000	32.810.329.000	19.188.457.243.000	15.949.445.231.083
2019	65.641.932.209.000	46.262.372.000	17.648.465.659.000	6.836.010.427.155
<b>Total</b>	<b>233.352.843.060.000</b>	<b>126.873.247.000</b>	<b>81.965.176.205.000</b>	<b>56.637.952.592.873</b>

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian

### **3.2 EVALUASI PENCAPAIAN OUTPUT**

Sehubungan dengan pembiayaan/pendanaan pada APBN Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2015-2017 hanya mencapai 43% dari kebutuhan berdasarkan Renstra 2015-2019, maka pencapaian output juga sebagian besar tidak dapat tercapai sesuai target. Berdasarkan target output dalam Renstra tahun 2015-2019, dapat diperoleh pencapaian sampai dengan tahun 2019 masing-masing kegiatan/output sebagai berikut:



Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

**Tabel 3.2 Capaian Output Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2015-2019**

PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)										
Studi/ Kajian/ Masterplan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	dokumen	9	9	15	15						
Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kegiatan	4	4	4	4						
Sosialisasi/ Seminar/ Workshop/ Lokakarya	Tahun	1	1	3	3						
Rapat/ Rakor/ Rakornis/ Radin/ Raker	Tahun	1	1	10	10						
Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan			3	3						
Laporan Hasil Kegiatan/ Kinerja	Laporan			12	11,1						
Pengumpulan dan Pengolahan Data Perkeretaapian	Laporan			1	1						
Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan			1	0						
Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan			2	1						



PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)										
Berita Acara Serah Terima Barang	Laporan			3	1						
Pembinaan Penerimaan Bukan Pajak	Laporan			1	1						
Laporan Keuangan	Laporan			1	1						
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terkait dengan Operasional Satker/ UPT	Laporan			3	3						
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian setingkat Peraturan Menteri Perhubungan	Laporan			9	9						
Pengawasan di Bidang Perkeretaapian	Laporan			2	1						
Bantuan Hukum	Laporan			3	3						
Penyelenggaraan Humas	Laporan			6	5						
Pameran	Laporan			1	1						
Kegiatan Kerjasama Luar Negeri	Laporan			1	1						
Penyertaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Laporan			130	10						
Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	Laporan			99	70						





PROGRAM/ KEGIATAN STRATEGIS	SATUAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)										
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Laporan			13	9						
Layanan Perkantoran	Laporan			120	163,37	120	117,76	10	9	12	11,30
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Laporan			172	87,97						
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Laporan			491	291,65						
Rekomendasi Kebijakan Pembinaan Perkeretaapian	Dokumen					13	13	11	11	10	10
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan					123	60,97	35	34	29	26,45
Layanan Internal (Overhead)	Layanan					18	14,8	13	12	13	12,67

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 Bidang Perkeretaapian



### **3.3 EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Jenderal Perkeretaapian setiap tahun dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan LAKIP tahun 2019, berikut disampaikan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019

PERSPECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
<b>STAKE-HOLDERS PERSPECTIVE</b>	SP1 Meningkatnya <b>KONEKTIVITAS</b> Jaringan Perkeretaapian Nasional	IK 1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	-	-	-	-	0,28	0,25	0,31	0,29	0,34	0,31
	SP2 Terwujudnya <b>PELAYANAN</b> Transportasi Kereta Api yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah	IK 2 Modal share angkutan penumpang kereta api	% total nasional	-	-	-	-	4,00	5,03	5,20	5,35	5,40	5,62
		IK 3 Modal share angkutan barang kereta api	% total nasional	-	-	-	-	0,20	0,23	0,25	0,25	0,29	0,26
<b>CUSTOMERS PERSPECTIVE</b>	SP3 Meningkatnya <b>KESELAMATAN</b> dan <b>KEAMANAN</b> Transportasi Kereta Api	IK 4 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api ( <i>rate of accident</i> )	Kejadian kecelakaan/ 1 juta km tempuh	0,55	1,15	0,55	0,24	0,55	0,26	0,26	0,24	0,26	0,15
		IK 5 Rasio Gangguan Keamanan pada	Kejadian gangguan	-	-	-	-	10,7	6,59	6,50	6,89	6,50	4,44



PERS- PECTIVE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
		Pelayanan Jasa Transportasi Kereta Api	keamanan/ 1 juta km tempuh										
	SP4 Meningkatkan KINERJA PELAYANAN Sarana dan Prasarana Transportasi Kereta Api	IK 6 Prosentase Capaian <i>On Time Performance (OTP)</i> Transportasi Kereta Api	%	-	-	-	-	65,00	66,05	67,00	76,18	69,00	81,31
		IK 7 Prosentase Penurunan Gas Rumah Kaca ari Subsektor Perkeretaapian	%	-	-	-	-	6,04	15,32	18,00	18,61	20,00	29,52
			Juta ton CO2/ tahun	-	-	-	-	3,51	3,81	-	-	-	-



# **B A B 4**

## **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

### **RKT 2024**



Penjabaran Rencana Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 disusun sesuai dengan Konsep Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024.

#### **4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023**

Program pembangunan Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun Tugas dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk pengelolaan kepegawaian. Kegiatan pada program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2023, antara lain:

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian;
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian;
3. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian;
4. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian; dan
5. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

##### **4.1.1 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian**

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Tahun 2023 yaitu:



1. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal;
2. Layanan SDM, terdiri dari Layanan SDM.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023:

**Tabel 4.1 Target Rincian Output (RO) Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
<b>4602</b>	<b>Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi</b>			
<b>EBA</b>	<b>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</b>			
EBA.001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	layanan	10,0	2,0
<b>EBC</b>	<b>Layanan SDM</b>			
EBC.001	Layanan SDM	orang	18,0	1.284,0

#### 4.1.2 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu:

1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari Kebijakan Perencanaan;
2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, terdiri dari Layanan Perencanaan;
3. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, terdiri dari Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Hukum dan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kepegawaian dan Umum;
4. Layanan Umum, terdiri dari Layanan Organisasi dan Rumah Tangga;
5. Layanan Perkantoran, terdiri: Gaji dan Tunjangan, Operasional & Pemeliharaan Kantor;
6. Layanan Sarana Internal, terdiri dari Kendaraan Bermotor, Peralatan Pengelolaan Data dan Komunikasi dan Peralatan fasilitas perkantoran; dan
7. Layanan Prasarana Internal, terdiri dari Gedung dan Bangunan.

Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023:

**Tabel 4.2 Target Rincian Output (RO) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
<b>4601</b>	<b>Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum</b>			
<b>ABF</b>	<b>Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana</b>			
ABF.001	Kebijakan Perencanaan	rekomendasi	17,0	3,0
<b>EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>			
EBA.957	Layanan Perencanaan	Layanan		4,0
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan		50,0
EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan		19,0
<b>EBB</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>			
EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit		112,0
EBB.957	Layanan Prasarana Internal	Unit		1,0
<b>EBD</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>			
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen		13,0
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen		32,0
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen		26,0
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen		9,0

#### 4.1.3 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu Layanan Data dan Informasi. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023 :

**Tabel 4.3 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
<b>4602</b>	<b>Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi</b>			
<b>BMA</b>	<b>Data dan Informasi Publik</b>			
BMA.001	Pengelolaan Data dan Informasi	Layanan	3,0	3,0
<b>CAN</b>	<b>Layanan Data dan Informasi</b>			
CAN.001	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit		199,0
CAN.003	Pengadaan Software	Unit		1,0
CAN.004	Pengadaan Antivirus	Unit		1,0
<b>CDS</b>	<b>OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>			
CDS.001	OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Titik/Lokasi		1,0
<b>FAB</b>	<b>Sistem Informasi Pemerintahan</b>			
FAB.001	Sistem Informasi	Layanan	3,0	3,0

#### 4.1.4 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu Layanan Kehumasan dan Protokoler. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023:

**Tabel 4.4 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
<b>4603</b>	<b>Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik</b>			
<b>EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>			
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	layanan	22,0	13,0

#### 4.1.5 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian

Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) pada kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023 yaitu Layanan Hukum. Secara lengkap, berikut rincian KRO dan RO untuk tahun 2023.



**Tabel 4.5 Target Rincian Output (RO) Kegiatan Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian Tahun 2023**

KODE	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)/ RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	TARGET RENSTRA	USULAN PENYESUAIAN TARGET
<b>4604</b>	<b>Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian</b>			
<b>EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>			
EBA.957	Layanan Hukum	layanan	3,0	1,0

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian

#### 4.2 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2020-2024 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019, maka telah ditetapkan target sasaran program penyelenggaraan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 (periode Renstra 2020- 2024) sebagaimana disampaikan berikut.



**Tabel 4.6 *Reviu* Target Kinerja Program Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET VOLUME 2023
<b>SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN</b>			
Termanfaatkannya kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%	100
Terlaksananya perumusan regulasi dan kebijakan dalam penyelenggaraan	Persentase pencapaian target legalisasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian	%	80
Tersedianya SDM perkeretaapian berkompeten dan profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	%	55
Sistem Informasi dan Teknologi yang andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	80
Dukungan publik terhadap penyelenggaraan perkeretaapian	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100
Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	a. Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	88
	b. Tingkat Maturasi SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level	3
	c. Persentase Realisasi PNBPN Bidang Perkeretaapian	%	100
	d. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	100

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 Bidang Perkeretaapian



## B A B 5

### PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2023 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi manajemen sektor perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan *New Initiatives* maka Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dilakukan review dan penyesuaian sebagaimana perkembangan yang terjadi selama tahun berjalan.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan seluruh *stakeholder* di bidang perhubungan khususnya insan perkeretaapian harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 ini sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.

Akhir kata, semoga dokumen Reviu Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 ini dapat menjadi acuan/ pegangan/ pedoman/ arah bagi unit kerja dalam melaksanakan tugas maupun fungsi sebagaimana mestinya.



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
Jl . Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat - 10110



# **LAMPIRAN II**

**Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

**LAMPIRAN B**  
**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti	%	100,00
2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pencapaian Target Legislasi (Jumlah Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian	%	95,00
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian Tertentu	%	55,00
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	70,00
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100,00
6	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83
		Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian	Level	Level 3
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100,00
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	92,00
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian	Nilai	3,60

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

**1. Program Infrastruktur Konektivitas**

Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

**2. Program Dukungan Manajemen**

- a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian
- b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
- c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian
- d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian
- e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian

**TOTAL**

**ANGGARAN**

Rp.	<b>4.442.381.000</b>
Rp.	4.442.381.000
Rp.	<b>153.360.530.000</b>
Rp.	5.280.901.000
Rp.	129.782.876.000
Rp.	3.730.707.000
Rp.	11.998.727.000
Rp.	2.567.319.000
Rp.	<b>157.802.911.000</b>

Disetujui,

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196706081990031005

Jakarta, Desember 2023

SEKRETARIS  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN,

JUJUN ENDAH WAHJUNGRUM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP 196507031991032001

# **LAMPIRAN III**

**Rekomendasi Peningkatan Kinerja Berdasarkan  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2023**

**REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA BERDASARKAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2023**

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
<b>A</b>	<b>Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian yang Telah Ditindaklanjuti</b>		
1	Persiapan pelaksanaan kegiatan studi/kajian pendukung Tahun 2024 khususnya pada tahapan pengadaan barang dan jasa dengan penyiapan dokumen dan koordinasi dengan Biro LPPBMN.	Triwulan I 2024	Bagian Perencanaan
2	Antisipasi kegiatan studi/kajian pendukung yang terdampak kebijakan <i>Automatic Adjustment</i> (AA) atau blokir dengan pengusulan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.	Triwulan I 2024	Bagian Perencanaan
3	Koordinasi terkait usulan penetapan Tim Pengarah dan Tim Pendamping melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk persiapan pelaksanaan kegiatan studi/kajian pendukung.	Triwulan I 2024	Bagian Perencanaan
<b>B</b>	<b>Persentase Pencapaian Target Legislasi (Rancangan dan Peraturan Perundangan) Bidang Perkeretaapian</b>		
1	Koordinasi yang baik dengan Direktorat teknis dan Biro Hukum Setjen Kementerian Perhubungan yang mengusulkan rancangan peraturan baru maupun perubahan/revisi yang didukung dengan kajian akademis yang memadai.	Triwulan I 2024	Bagian Hukum
2	Percepatan penyelesaian peraturan/legislasi khususnya peraturan perundangan bidang perkeretaapian yang strategis/mendesak dan telah berproses baik di Kementerian Hukum dan HAM serta Biro Hukum.	Triwulan I-III 2024	Bagian Hukum
3	Antisipasi kebutuhan peraturan/legislasi untuk mendukung penerapan teknologi perkeretaapian baru diantaranya <i>Autonomous Rail Rapid Transit</i> (ART) yang direncanakan di IKN baru.	Triwulan I-III 2024	Bagian Hukum



NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Penyiapan Rencana Strategis bidang perkeretaapian Tahun 2025-2029 pada Tahun 2024 khususnya kerangka regulasi yang memuat kebutuhan peraturan/legislasi perundangan bidang perkeretaapian	Triwulan I-III 2024	Bagian Hukum, Bagian Perencanaan
<b>C</b>	<b>Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang Memiliki Sertifikat Kompetensi/Keahlian</b>		
1	Percepatan penyesuaian/inpassing jabatan ASN ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu bidang perkeretaapian termasuk koordinasi dengan Kementerian PANRB dan Pusbin Jabatan Fungsional Transportasi untuk penetapan kelas jabatan.	Triwulan I 2024	Bagian SDM dan Umum
2	Lanjutan program magang ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2024 dengan bekerjasama operator/badan usaha/industri bidang perkeretaapian.	Triwulan I-IV 2024	Bagian SDM dan Umum
3	Lanjutan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan termasuk bimbingan teknis terkait manajerial/umum dan teknis perkeretaapian kepada ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai kebutuhan kompetensi dan ketersediaan anggaran.	Triwulan I-IV 2024	Bagian SDM dan Umum
4	Penempatan SDM kompeten untuk menjalankan tugas dan fungsi Satuan Pelayanan di Balai Teknik Perkeretaapian	Triwulan I 2024	Bagian SDM dan Umum
<b>D</b>	<b>Persentase Pemenuhan Rencana Induk TIK Bidang Perkeretaapian</b>		
1	Pelaksanaan dan pendampingan usulan <i>clearance</i> terhadap usulan kegiatan TIK Tahun 2024 sesuai ketentuan SPBE, Rencana Induk/Roadmap serta mengacu rencana penyederhanaan aplikasi.	Triwulan I 2024	Bagian Perencanaan
2	Pelaksanaan reviu peta jalan ( <i>roadmap</i> ) TIK Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk penyesuaian kebijakan TIK terbaru di lingkungan Kementerian Perhubungan serta sebagai acuan utama dalam perencanaan TIK Tahun 2025-2029 sesuai arsitektur SPBE.	Triwulan I-IV 2024	Bagian Perencanaan
3	Pengembangan Portal Aplikasi sebagai <i>Super Apps</i> Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang terintegrasi dengan sistem TIK lainnya serta dukungan database bidang perkeretaapian yang memadai.	Triwulan I - IV 2024	Bagian Perencanaan

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Sosialisasi dan pembinaan kepada seluruh unit kerja untuk pengoptimalan penggunaan Portal Aplikasi dan website Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan I 2024	Bagian Perencanaan
<b>E</b>	<b>Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian</b>		
1	Monitoring media dilaksanakan setiap hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan <i>update</i> berkala " <i>Hot Issue Perkeretaapian</i> ".	Triwulan I-IV 2024	Bagian Hukum
2	Peningkatan publikasi dalam bentuk siaran pers/liputan terkait perkeretaapian dengan menyiapkan berbagai topik antara lain pemanfaatan hasil pembangunan, program unggulan Tahun 2024, perkembangan teknologi perkeretaapian serta kebijakan pengembangan perkeretaapian ke depan.	Triwulan I - IV 2024	Bagian Hukum, Bagian Perencanaan
3	Kerjasama dengan media dan influencer untuk membantu pelaksanaan publikasi serta meningkatkan reputasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian.	Triwulan I-IV 2024	Bagian Hukum
<b>F</b>	<b>Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian</b>		
1	Melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja	Triwulan I 2024	Bagian Perencanaan
2	Penyampaian dokumen Laporan Kinerja tepat waktu sesuai PM Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP.	Triwulan I 2024	Bagian Perencanaan
3	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja secara berjenjang.	Triwulan I-II 2024	Bagian Perencanaan
<b>G</b>	<b>Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Perkeretaapian</b>		
1	Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh.	Triwulan I 2024	Bagian Perencanaan
2	Penerapan manajemen risiko mengacu pada petunjuk teknis penerapan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan I 2024	Bagian Perencanaan, Bagian Hukum
3	Penyiapan alokasi anggaran dan persiapan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajemen risiko sesuai	Triwulan II 2024	Bagian Perencanaan, Bagian SDM dan Umum

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
	usulan masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.		
<b>H</b>	<b>Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian</b>		
1	Berkoordinasi intensif dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan percepatan pengundangan PM 59 Tahun 2023 (Perubahan/Revisi atas PM 156 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara) serta PM 60 Tahun 2023 (Perubahan/Revisi PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian) guna dijadikan landasan dan dasar hukum mengingat sudah diberikan penomoran dan hanya menunggu pengundangan di tahun 2024.	Triwulan I 2024	Bagian Keuangan, Bagian Hukum
2.	Peningkatan pendapatan PNBP dari pengoptimalan layanan BLU.	Triwulan I-IV 2024	Bagian Keuangan
3.	Pengoptimalan pemanfaatan aset bangunan dan lahan dengan skema konsesi untuk peningkatan perolehan PNBP didukung dengan penyelesaian inventarisasi dan sertifikasi aset/barang milik negara.	Triwulan I-IV 2024	Bagian Keuangan
<b>I</b>	<b>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perkeretaapian</b>		
1.	Mempercepat proses lelang di awal tahun anggaran agar pekerjaan bisa dilaksanakan dengan maksimal.	Triwulan I 2024	Bagian Keuangan
2.	Rapat koordinasi intensif, monitoring dan pelaporan rutin oleh seluruh unit kerja terkait realisasi anggaran dan progress kegiatan termasuk kesiapan dokumen perencanaan teknis dengan pengoptimalan PMU/tenaga ahli.	Triwulan I-IV 2024	Bagian Keuangan
3	Evaluasi pelaksanaan anggaran secara intensif terhadap seluruh unit kerja guna peningkatan penyerapan anggaran sesuai RPD/prognosa serta penyelesaian hal-hal yang menghambat pelaksanaan anggaran.	Triwulan I-IV 2024	Bagian Keuangan

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Perbaikan dan peningkatan pencapaian output pelaksanaan kegiatan masing-masing Unit Kerja/Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan I-IV 2024	Bagian Keuangan
5	Untuk kegiatan prioritas diperlukan identifikasi hazard dan risiko guna mempersiapkan penanganan dan solusi penyelesaian/percepatan pelaksanaan pekerjaan	Triwulan I-IV 2024	Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan
<b>J</b>	<b>Tingkat Kualitas Pelayanan Perkantoran Ditjen Perkeretaapian</b>		
1	Peningkatan layanan SDM/pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dimana berdasarkan hasil survey masih terdapat penilaian yang tidak baik/kurang baik diantaranya terkait layanan pembinaan/sosialisasi terkait kepegawaian dan layanan mutasi dan jenjang karir pegawai.	Triwulan I-IV 2024	Bagian SDM dan Umum
2	Pengoptimalan sistem TIK untuk database dan <i>share</i> informasi terkait layanan kepegawaian sehingga lebih cepat dan informatif kepada seluruh pegawai (misalnya terkait mekanisme izin belajar, izin cuti, tugas belajar, kenaikan pangkat, informasi diklat, dan lainnya).	Triwulan I-II 2024	Bagian SDM dan Umum, Bagian Perencanaan
3	Diusulkan kebijakan/SOP yang <i>update</i> terkait pelaksanaan layanan kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga.	Triwulan I 2024	Bagian SDM dan Umum

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIS

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19650703 199103 2 001

# **LAMPIRAN IV**

**Monitoring Renaksi Periode Oktober - Desember 2023**

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Bulan: Oktober, Tahun: 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	95	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	1.476.558.800	12.88	-	1.151.679.463	-	78%	Adanya perubahan anggaran dan Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	95	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	191.119.100	12.88	-	101.559.982	-	53.14%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	95	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	233.631.000	12.88	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	%	95	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	1	-	-	280.912.250	12.88	-	228.467.920	-	81.33%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	95	Pengelolaan Hukum	-	1	-	-	1.223.725.600	16.32	-	1.216.227.717	-	99.39%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Pengelolaan Kepegawaian	-	1	-	-	2.026.217.600	16.32	-	3.483.190.878	-	171.91%	Adanya perubahan anggaran dan Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai	-	1	-	-	166.336.000	16.32	-	389.455.450	-	234.14%	Adanya Perubahan Anggaran Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	929.050.400	16.32	-	973.495.864	-	104.78%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Character Building	-	1	-	-	1.676.044.000	16.32	-	707.800.902	-	42.23%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	94.224.000	16.34	-	76.442.925	-	81.13%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	2.515.752.000	17.44	-	483.240.781	-	19.21%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, terdapat pembatasan kegiatan disebabkan adanya pandemi COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Dokumen	83	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	4	9	2	22.22	1.113.190.400	21.07	-	70.600.000	-	6.34%	Anggaran telah terserap 100%, namun pelaksanaan pelaporan kinerja masih berlangsung s.d Desember 2021	Optimalisasi dan usulan penambahan anggaran sesuai kebutuhan kegiatan	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Laporan	83	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	468.155.200	14.77	-	334.689.575	-	71.49%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	6.352.000	9.69	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai PP no.39 Tahun 2006, KSP dan Padat Karya	-	1	-	-	842.380.800	14.97	-	706.308.919	-	83.85%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Kegiatan Prioritas dan Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	734.400.000	15.53	-	555.454.586	-	75.63%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	-	1	-	-	1.228.399.200	15.91	-	1.038.462.504	-	84.54%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Induk Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	1.291.189.600	15.22	-	1.061.457.968	-	82.21%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis	-	2	-	-	1.356.862.500	13.85	-	1.206.099.360	-	88.89%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Kegiatan Penunjang Non Operasional	-	1	-	-	2.877.580.000	13.32	-	1.404.914.350	-	48.82%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Laporan	3	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	2	1	-	-	649.489.200	14.99	-	1.539.126.653	-	236.97%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, terdapat pembatasan kegiatan disebabkan adanya pandemi COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Contact Center Bidang Perkeretaapian	1	1	-	-	66.552.800	16.34	-	714.459.324	-	1073.52%	Adanya perubahan anggaran dan Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Pembinaan Keprotokolan dan MC	1	1	-	-	107.504.000	16.34	-	340.324.039	-	316.57%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, terdapat pembatasan kegiatan disebabkan adanya pandemi COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Nilai	3	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Manajemen Risiko	4	1	-	-	2.282.671.200	16.32	-	12.248.917.729	-	536.6%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, terdapat pembatasan kegiatan disebabkan adanya pandemi COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	207.172.800	16.32	-	239.973.612	-	115.83%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBP Yang Berkaitan Dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBP Ditjen Perkeretaapian	10	1	-	-	355.553.600	12.31	-	24.203.917.360	-	6807.39%	1 kegiatan telah selesai yaitu penyusunan buku informasi perkeretaapian, 4 kegiatan masih dalam proses pelaksanaan (Adanya perubahan yaitu penambahan kegiatan penyusunan kajian)	Pemanfaatan penyusunan kajian yang telah selesai, serta percepatan penyelesaian kegiatan lainnya sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Laporan	100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	11	1	9.09	474.098.000	10.42	-	4.320.000	-	0.91%	Anggaran telah terserap 100%, namun pelaksanaan monitoring PNBP masih berlangsung s.d Desember 2021	Optimalisasi dan usulan penambahan anggaran sesuai kebutuhan kegiatan	Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	239.257.600	12.31	-	376.206.833	-	157.24%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, terdapat pembatasan kegiatan disebabkan adanya pandemi COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2	11	1	9.09	262.048.000	12.31	1	44.690.000	100%	17.05%	Adanya perubahan anggaran kegiatan	Koordinasi untuk pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan dengan optimal	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN		100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	3.466.858.400	16.29	0.84	383.277.797	-	11.06%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	1	1	-	-	154.370.400	16.29	1	173.102.426	-	112.13%	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	1.221.119.200	16.63	-	112.852.900	-	9.24%	Adanya perubahan anggaran kegiatan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	10	1	-	-	551.025.600	12.74	-	56.430.298.139	-	10240.96%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan (rutin setiap bulan), termasuk penanganan COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu, termasuk mengoptimalkan anggaran untuk penanganan COVID-19	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	518.511.200	12.74	-	942.262.927	-	181.72%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Pelelangan	-	1	-	-	108.768.000	12.74	-	2.033.551.500	-	1869.62%	Kegiatan masih dalam proses penyelesaian pekerjaan	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	377.308.000	15.6	-	94.882.981	-	25.15%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	887.079.200	12.74	-	566.381.796	-	63.85%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	771.689.600	12.74	-	855.178.003	-	110.82%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	621.828.000	12.74	-	513.393.092	-	82.56%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran	-	1	-	-	324.368.500	12.88	-	356.333.509	-	109.85%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Pengelolaan Arsip	-	1	-	-	173.303.200	10.72	-	216.614.261	-	124.99%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	141.192.800	1.28	-	201.699.540	-	142.85%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3	Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	-	1	-	-	264.825.600	11.77	-	302.948.620	-	114.4%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	246.948.100	16.63	-	308.222.723	-	124.81%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,60	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	-	1	-	-	507.644.200	16.63	-	243.798.492	-	48.03%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,60	Bimbingan Teknis Kerumahahtangaan dan Umum	-	1	-	-	462.497.000	16.63	-	559.643.672	-	121%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Bulan	3,60	Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahahtangaan serta Peningkatan Kelembagaan	8	78	10	12.82	99.286.400	12.74	8	104.973.440	80%	105.73%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Stelan	3,60	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/ Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis lainnya	-	1	-	-	758.250.000	13.04	-	858.100.000	-	113.17%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Bulan	3,60	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	9	78	10	12.82	147.052.800	12.74	9	183.816.000	90%	125%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Unit	3	Kendaraan Bermotor	6	68	6	8.82	3.731.865.000	8.81	6	3.725.970.000	100%	99.84%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,60	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	2.697.731.250	15.31	-	1.846.302.802	-	68.44%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,60	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	51.483.528.000	12.74	-	53.805.720.705	-	104.51%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,60	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	15.414.619.200	12.74	-	15.492.074.325	-	100.5%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERMANFAATKANYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS PERKERETA APIAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI		100	Penyusunan dokumen perencanaan	10	15	3	20	4.442.381.000	13.51	4	5.627.455.612	133.33%	126.68%	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan telah selesai	Diperlukan penetapan/legalisasi dokumen perencanaan yang telah disusun melalui Kepdirjen	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	70	Pengelolaan data dan informasi	-	1	-	-	2.318.553.500	12.88	-	723.126.500	-	31.19%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, terdapat pembatasan kegiatan disebabkan adanya pandemi COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	70	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	-	1	-	-	902.697.300	17.81	-	847.618.200	-	93.9%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETA APIAN	PERSENTASE PEMENUHAN PUBLIKASI DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	100	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	9.598.981.600	16.32	-	1.626.706.727	-	16.95%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, terdapat pembatasan kegiatan disebabkan adanya pandemi COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

SEKRETARIS  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN



JUUN ENDAH WAHJUNGRUM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19650703 199103 2 001

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Bulan: November, Tahun: 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	95	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	1.563.415.200	13.64	-	1.806.685.305	-	115.56%	adanya perubahan anggaran dan Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	95	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	-	1	-	-	202.361.400	13.64	-	101.559.982	-	50.19%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	95	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	247.374.000	13.64	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETA APIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETA APIAN	%	95	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	-	1	-	-	297.436.500	13.64	-	228.467.920	-	76.81%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETA APIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	95	Pengelolaan Hukum	-	1	-	-	1.376.691.300	18.36	-	1.216.227.717	-	88.34%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETA APIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETA APIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Pengelolaan Kepegawaian	-	1	-	-	2.279.494.800	18.36	-	3.722.830.778	-	163.32%	adanya perubahan anggaran dan Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETA APIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETA APIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai	-	1	-	-	187.128.000	18.36	-	428.668.141	-	229.08%	Adanya Perubahan Anggaran Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDINYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	1.045.181.700	18.36	-	973.495.864	-	93.14%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERSEDINYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Character Building	-	1	-	-	1.885.549.500	18.36	-	707.800.902	-	37.54%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERSEDINYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	106.002.000	18.38	-	76.442.925	-	72.11%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	-	1	-	-	2.830.221.000	19.62	-	648.606.431	-	22.92%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, terdapat pembatasan kegiatan disebabkan adanya pandemi COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Dokumen	83	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	4	9	4	44.44	1.252.339.200	23.7	2	70.600.000	50%	5.64%	Anggaran telah terserap 100%, namun pelaksanaan pelaporan kinerja masih berlangsung s.d Desember 2021	Optimalisasi dan usulan penambahan anggaran sesuai kebutuhan kegiatan	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Laporan	83	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	526.674.600	16.62	-	334.689.575	-	63.55%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	7.146.000	10.9	-	-	-	-	Kegiatan masih dalam tahap persiapan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai PP no.39 Tahun 2006, KSP dan Padat Karya	-	1	-	-	947.678.400	16.84	-	706.308.919	-	74.53%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Kegiatan Prioritas dan Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	826.200.000	17.48	-	555.454.586	-	67.23%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	-	1	-	-	1.381.949.100	17.9	-	1.038.462.504	-	75.14%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Induk Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	1.452.588.300	17.13	-	1.061.457.968	-	73.07%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis	-	2	1	50	1.507.625.000	15.38	-	1.206.099.360	-	80%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Kegiatan Penunjang Non Operasional	-	1	-	-	3.237.277.500	14.99	-	1.404.914.350	-	43.4%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Laporan	3	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	-	1	-	-	865.985.600	19.98	-	2.277.320.365	-	262.97%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan , terdapat perubahan anggaran	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Contact Center Bidang Perkeretaapian	-	1	-	-	74.871.900	18.38	-	1.071.515.418	-	1431.13%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan , terdapat perubahan anggaran	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Pembinaan Keprotokolan dan MC	-	1	-	-	120.942.000	18.38	-	340.324.039	-	281.39%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan , terdapat pembatasan kegiatan disebabkan adanya pandemi COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Kepegawaian dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Nilai	3	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Manajemen Risiko	-	1	-	-	2.568.005.100	18.36	-	13.030.923.556	-	507.43%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan , terdapat pembatasan kegiatan disebabkan adanya pandemi COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	-	1	-	-	233.069.400	18.36	-	239.973.612	-	102.96%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	100	Pengusulan PNBPN Yang Berkaitan Dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNBPN Ditjen Perkeretaapian	1	1	-	-	399.997.800	13.85	1	31.827.952.425	-	7957.03%	1 kegiatan telah selesai yaitu penyusunan buku informasi perkeretaapian, 4 kegiatan masih dalam proses pelaksanaan (Adanya perubahan yaitu penambahan kegiatan penyusunan kajian)	Pemanfaatan penyusunan kajian yang telah selesai, serta percepatan penyelesaian kegiatan lainnya sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETA APIAN	Laporan	100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	2	11	1	9.09	474.098.000	10.42	1	4.320.000	100%	0.91%	Anggaran telah terserap 100%, namun pelaksanaan monitoring PNBPN masih berlangsung s.d Desember 2021	Optimalisasi dan usulan penambahan anggaran sesuai kebutuhan kegiatan	Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	269.164.800	13.85	-	1.025.940.915	-	381.16%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, terdapat pembatasan kegiatan disebabkan adanya pandemi COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	11	1	9.09	294.804.000	13.85	1	178.042.370	100%	60.39%	adanya perubahan anggaran kegiatan	Koordinasi untuk pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan dengan optimal	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN		100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	-	1	-	-	3.900.215.700	18.33	-	476.545.345	-	12.22%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	-	1	-	-	173.666.700	18.33	-	173.102.426	-	99.68%	Kegiatan selesai tepat waktu	Penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	-	1	-	-	1.395.564.800	19	-	201.515.100	-	14.44%	adanya perubahan anggaran kegiatan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	-	1	-	-	606.128.160	14.01	-	60.822.486.202	-	10034.59%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan (rutin setiap bulan), termasuk penanganan COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu, termasuk mengoptimalkan anggaran untuk penanganan COVID-19	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	570.362.320	14.01	-	942.262.927	-	165.2%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Pelelangan	-	1	-	-	119.644.800	14.01	-	3.634.121.500	-	3037.43%	Kegiatan masih dalam proses penyelesaian pekerjaan	Percepatan Pelaksanaan Kegiatan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	1	-	-	327.918.800	13.55	-	855.178.003	-	260.79%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	-	1	-	-	975.787.120	14.01	-	566.381.796	-	58.04%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	-	1	-	-	848.858.560	14.01	-	855.178.003	-	100.74%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	-	1	-	-	684.010.800	14.01	-	513.393.092	-	75.06%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran	-	1	-	-	343.449.000	13.64	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Pengelolaan Arsip	-	1	-	-	194.966.100	12.06	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Monitoring Ketatausahaan	-	1	-	-	161.363.200	1.47	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3	Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	-	1	-	-	297.928.800	13.24	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	-	1	-	-	282.226.400	19	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,60	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	-	1	-	-	580.164.800	19	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,60	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	-	1	-	-	528.568.000	19	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIJEN PERKERETA APIAN	Bulan	3,60	Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	-	78	11	14.1	109.215.040	14.01	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIJEN PERKERETA APIAN	Stelan	3,60	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis lainnya	-	1	-	-	909.900.000	15.65	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIJEN PERKERETA APIAN	Bulan	3,60	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	-	78	11	14.1	161.758.080	14.01	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIJEN PERKERETA APIAN	Unit	3	Kendaraan Bermotor	-	68	6	8.82	3.731.865.000	8.81	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,60	Renovasi gedung dan bangunan	-	1	-	-	2.697.731.250	15.31	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,60	Gaji dan Tunjangan	-	1	-	-	56.631.880.800	14.01	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,60	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	-	1	-	-	16.956.081.120	14.01	-	-	-	-			Kabag SDM dan Umum
TERMANFAATKANYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS PERKERETA APIAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI		100	Penyusunan dokumen perencanaan	4	15	3	20	4.442.381.000	13.51	4	5.627.455.612	133.33%	126.68%	Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan telah selesai	Diperlukan penetapan/egalisisasi dokumen perencanaan yang telah disusun melalui Kepdirjen	Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	70	Pengelolaan data dan informasi	-	1	-	-	2.454.939.000	13.64	-	809.306.000	-	32.97%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, terdapat pembatasan kegiatan disebabkan adanya pandemi COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	70	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	-	1	-	-	954.000.000	18.82	-	-	-	-			Kabag Perencanaan
DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETA APIAN	PERSENTASE PEMENUHAN PUBLIKASI DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	100	Pelayanan humas dan protokoler	-	1	-	-	10.798.854.300	18.36	-	2.536.243.866	-	23.49%	Kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, terdapat pembatasan kegiatan disebabkan adanya pandemi COVID-19	Percepatan penyelesaian kegiatan sesuai target waktu	Kabag Hukum

SEKRETARIS  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN

JUJU ENDAH WAHJUNINGRUM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19650703 199103 2 001

**MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Bulan: Desember, Tahun: 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	95	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkeretaapian	2	1	1	100	1.737.128.000	15.15	1	3.387.204.905	100%	194.99%	Kegiatan selesai tepat waktu		Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	95	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Produk Hukum Atas Penyelenggaraan Perkeretaapian	1	1	1	100	224.846.000	15.15	1	223.409.946	100%	99.36%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	95	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perkeretaapian	1	1	1	100	274.860.000	15.15	1	199.357.950	100%	72.53%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Hukum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETA APIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETA APIAN	%	95	Penyusunan Pendapat Hukum (Legal Opinion)	1	1	1	100	330.485.000	15.15	1	426.619.670	100%	129.09%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun sehingga realisasi melebihi target.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Hukum
TERLAKSANANYA PERUMUSAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETA APIAN	PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGALISASI (JUMLAH RANCANGAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN) BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	95	Pengelolaan Hukum	1	1	1	100	1.529.657.000	20.4	1	1.465.332.395	100%	95.79%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Hukum
TERSEDINYA SDM PERKERETA APIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETA APIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Pengelolaan Kepegawaian	2	1	1	100	2.532.772.000	20.4	1	6.272.344.130	100%	247.65%	Terdapat perubahan anggaran setelah revisi, semula Rp. 12.513.196.000 menjadi Rp. 6.285.781.000,-		Kabag Kepegawaian dan Umum
TERSEDINYA SDM PERKERETA APIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETA APIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai	2	1	1	100	207.920.000	20.4	1	1.762.544.938	100%	847.7%	Terdapat perubahan anggaran setelah revisi, semula Rp. 1.857.137.000,- menjadi Rp. 1.762.924.000,-		Kabag Kepegawaian dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	1.161.313.000	20.4	1	1.183.950.064	100%	101.95%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun sehingga realisasi melebihi target.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Character Building	1	1	1	100	2.095.055.000	20.4	1	2.018.519.048	100%	96.35%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERSEDIAANYA SDM PERKERETAAPIAN YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL	PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN TERTENTU	Tahun	55	Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	117.780.000	20.43	1	83.642.925	100%	71.02%	Capaian kegiatan rendah dikarenakan ada perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Kepegawaian dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	83	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	2	1	1	100	3.144.690.000	21.8	1	3.397.327.759	100%	108.03%	Terjadi perubahan anggaran setelah revisi semula Rp. 12.364.727.000,- menjadi Rp. 3.590.979.000,-		Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN	Dokumen	83	Penyusunan Dokumen SAKIP Ditjen Perkeretaapian serta Sekretariat Ditjen Perkeretaapian	5	9	1	11.11	1.391.488.000	26.33	4	4.239.354.457	400%	304.66%			Kabag Perencanaan



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Laporan	83	Penyusunan Laporan Tahunan dan Pengolahan Data Statistik Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	1	1	100	585.194.000	18.47	1	392.687.475	100%	67.1%	Capaian kegiatan rendah dikarenakan ada perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan Ditjen Perkeretaapian	-	1	1	100	7.940.000	12.11	-	-	-	-	Kegiatan ini tidak dilaksanakan pada tahun 2023	-	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sesuai PP no.39 Tahun 2006, KSP dan Padat Karya	1	1	1	100	1.052.976.000	18.71	1	719.808.919	100%	68.36%	Capaian kegiatan rendah dikarenakan ada perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Kegiatan Prioritas dan Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	1	1	100	918.000.000	19.42	1	861.689.361	100%	93.87%	Kegiatan telah dilaksanakan , terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	1	1	1	100	1.535.499.000	19.89	1	1.547.881.129	100%	100.81%	Kegiatan telah dilaksanakan , terdapat perubahan pagu diakhir tahun sehingga realisasi melebihi target.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Monitoring Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Induk Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian	1	1	1	100	1.613.987.000	19.03	1	1.499.661.618	100%	92.92%	Kegiatan telah dilaksanakan , terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Penyusunan kajian kebijakan/standar/pedoman teknis	1	2	1	50	1.507.625.000	15.38	1	1.507.624.200	100%	100%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	NILAI AKIP DJEN PERKERETA APIAN	Tahun	83	Kegiatan Penunjang Non Operasional	1	1	1	100	3.596.975.000	16.66	1	3.595.162.436	100%	99.95%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Laporan	3	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	5	1	1	100	1.082.482.000	24.98	4	3.129.627.501	400%	289.12%			Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Contact Center Bidang Perkeretaapian	3	1	1	100	83.191.000	20.43	2	1.784.100.186	200%	2144.58%			Kabag Kepegawaian dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Pembinaan Keprotokolan dan MC	4	1	1	100	134.380.000	20.43	3	1.583.344.586	300%	1178.26%			Kabag Kepegawaian dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Nilai	3	Penyusunan SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Manajemen Risiko	9	1	1	100	2.853.339.000	20.4	8	33.429.756.431	800%	1171.6%	Terjadi perubahan anggaran setelah revisi semula Rp. 35.623.482.000,- menjadi Rp. 33.598.482.000,-		Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL PERKERETA APIAN	Tahun	3	Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut (LHP)	1	1	1	100	258.966.000	20.4	1	257.132.462	100%	99.29%	Kegiatan telah dilaksanakan , terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengusulan PNPB Yang Berkaitan Dengan Tupoksi dan Monitoring Pelaksanaan PNPB Ditjen Perkeretaapian	13	1	1	100	444.442.000	15.38	12	26.231.224.767	1200%	5902.06%	Terjadi perubahan anggaran setelah revisi semula Rp. 28.025.725.000,- menjadi Rp. 26.275.105.000,-		Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Laporan	100	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian	2	11	1	9.09	474.098.000	10.42	1	364.531.011	100%	76.89%			Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Peninjauan Lapangan Pemanfaatan Barang Milik Negara pada Ditjen Perkeretaapian	2	1	1	100	299.072.000	15.38	1	695.134.475	100%	232.43%			Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pemutakhiran Data Investasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2	11	1	9.09	327.560.000	15.38	1	230.607.000	100%	70.4%			Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN		100	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN)	2	1	1	100	4.333.573.000	20.37	1	173.102.426	100%	3.99%			Kabag Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN	Tahun	100	Pengelolaan Pembinaan Badan Layanan Umum	2	1	1	100	192.963.000	20.37	1	173.102.426	100%	89.71%			Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	2	1	1	100	1.744.456.000	23.75	1	1.146.867.042	100%	65.74%			Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Pembinaan Pengelolaan Balai/Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	14	1	1	100	688.782.000	15.92	13	76.407.449.863	1300%	11093.13%	Terjadi perubahan anggaran setelah revisi semula Rp. 80.975.150.000,- menjadi Rp. 79.175.150.000,-		Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Rapat Koordinasi Antar Bagian, Direktorat dan Rapat koordinasi Teknis Ditjen Perkeretaapian	3	1	1	100	648.139.000	15.92	2	1.896.697.410	200%	292.64%	Terjadi perubahan anggaran setelah revisi semula Rp. 4.347.500.000,- menjadi Rp. 1.897.500.000,-		Kabag Keuangan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Pelelangan	2	1	1	100	135.960.000	15.92	1	10.059.945.372	100%	7399.19%	Terjadi perubahan anggaran setelah revisi semula Rp. 19.561.363.000,- menjadi Rp. 10.060.000.000,-		Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	1	1	1	100	372.635.000	15.4	1	223.372.323	100%	59.94%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	-	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Kegiatan Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian	1	1	1	100	1.108.849.000	15.92	1	1.080.746.289	100%	97.47%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Kegiatan Kantor PPTKA	1	1	1	100	964.612.000	15.92	1	925.554.843	100%	95.95%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	92	Administrasi Satuan Kerja Pelayanan Peraturan Perundang Undangan, Perjanjian dan Kehumasan	1	1	1	100	777.285.000	15.92	1	747.810.282	100%	96.21%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Hukum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran	1	1	1	100	381.610.000	15.15	1	427.303.509	100%	111.97%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun sehingga realisasi melebihi target.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Pengelolaan Arsip	1	1	1	100	216.629.000	13.4	1	216.614.261	100%	99.99%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Monitoring Ketatausahaan	1	1	1	100	201.704.000	1.83	1	201.699.540	100%	100%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3	Administrasi Pengelolaan Umum dan Rumah Tangga	1	1	1	100	331.032.000	14.71	1	350.956.120	100%	106.02%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun sehingga realisasi melebihi target.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Monitoring Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Absensi UPT/Balai dan Satker Perkeretaapian	1	1	1	100	352.783.000	23.75	1	352.702.643	100%	99.98%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	1	1	1	100	725.206.000	23.75	1	849.384.359	100%	117.12%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun sehingga realisasi melebihi target.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETAAPIAN	Tahun	3,60	Bimbingan Teknis Kerumahtanggaan dan Umum	1	1	1	100	660.710.000	23.75	1	639.755.433	100%	96.83%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Bulan	3,60	Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kantor PPK Pelayanan Kepegawaian dan Kerumahtanggaan serta Peningkatan Kelembagaan	12	78	12	15.38	124.108.000	15.92	12	113.923.440	100%	91.79%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Stelan	3,60	Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis lainnya	1	1	1	100	1.011.000.000	17.39	1	951.655.000	100%	94.13%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Bulan	3,60	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	12	78	12	15.38	183.816.000	15.92	12	183.816.000	100%	100%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Unit	3	Kendaraan Bermotor	6	68	6	8.82	3.731.865.000	8.81	6	3.725.970.000	100%	99.84%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,60	Renovasi gedung dan bangunan	1	1	1	100	3.596.975.000	20.41	1	3.595.162.436	100%	99.95%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,60	Gaji dan Tunjangan	1	1	1	100	64.354.410.000	15.92	1	63.587.904.818	100%	98.81%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN DIJEN PERKERETA APIAN	Tahun	3,60	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	1	1	100	19.268.274.000	15.92	1	21.380.272.016	100%	110.96%	Kegiatan telah dilaksanakan, terdapat perubahan pagu diakhir tahun sehingga realisasi melebihi target.	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag SDM dan Umum
TERMANFAATKANYA KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PERKERETAAPIAN	PERSENTAS REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS PERKERETA APIAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI		100	Penyusunan dokumen perencanaan	7	15	3	20	4.442.381.000	13.51	4	6.932.805.172	133.33%	156.06%			Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTAS PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	70	Pengelolaan data dan informasi	2	1	1	100	2.727.710.000	15.15	1	2.693.280.058	100%	98.74%	Terjadi perubahan anggaran setelah revisi semula Rp. 2.814.719.000,- menjadi Rp. 2.746.238.000,-		Kabag Perencanaan
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI YANG ANDAL	PERSENTAS PEMENUHAN RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BIDANG PERKERETA APIAN	Tahun	70	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi	1	1	1	100	1.002.997.000	19.79	1	1.002.996.000	100%	100%	Kegiatan telah dilaksanakan	Kegiatan telah dilaksanakan	Kabag Perencanaan



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN	PERSENTASAN PEMENUHAN PUBLIKASI DITJEN PERKERETA APIAN	Tahun	100	Pelayanan humas dan protokoler	2	1	1	100	11.998.727.000	20.4	1	10.613.515.637	100%	88.46%			Kabag Hukum

SEKRETARIS  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



JUJUN ENDAH WAHJUNINGRUM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19650703 199103 2 001

# **LAMPIRAN V**

**Data Dukung per-Indikator Kinerja Kegiatan**

# **LAMPIRAN**

## **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1**

**PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN  
PENINGKATAN KONEKTIVITAS PERKERETAAPIAN YANG  
TELAH DITINDAKLANJUTI**



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758  
3813972

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN NOMOR : PR.005 /Sk. 89 /DJKA /2020

### TENTANG

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2024

### DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERKERETAAPIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIDANG  
PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2024.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.

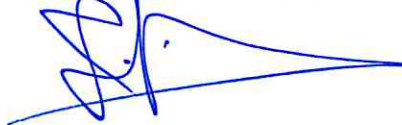
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 18 DESEMBER 2020

-----  
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. ZULFIKRI, M.Sc., DEA,  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196207091992031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758  
3813972

## KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN NOMOR: HK.209/3/24/DJKA/2021 TENTANG

### PENGESAHAN DOKUMEN KEGIATAN STUDI PENINGKATAN DAN PEMBINAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2021

#### DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, terkait dokumen-dokumen perencanaan di bidang transportasi perlu pengesahan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pengesahan Dokumen Kegiatan Studi Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Kereta Api;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1710);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

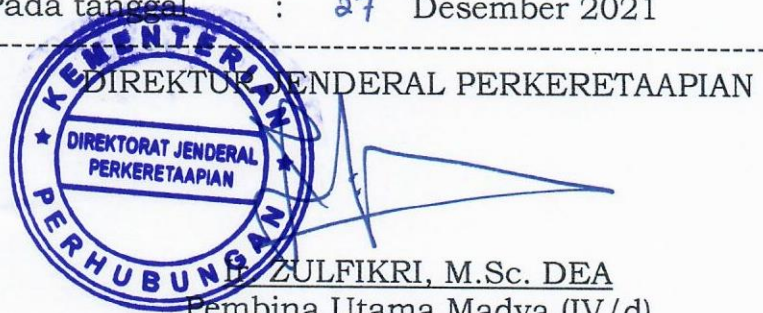
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN KEGIATAN STUDI PENINGKATAN DAN PEMBINAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2021.



- KESATU : Mengesahkan Dokumen Kegiatan Studi Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen kegiatan studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai masa berlaku penggunaan maksimum 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 27 Desember 2021



ZULFIKRI, M.Sc. DEA  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.19620709 199203 1 002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
5. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
6. Direktur Sarana Perkeretaapian;
7. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

Lampiran  
Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian  
Nomor : HK.209/3/24/DJKA/2021  
Tanggal : 27 Desember 2021

---


PENGESAHAN DOKUMEN KEGIATAN STUDI PENINGKATAN DAN  
PEMBINAAN TRANSPORTASI PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2021

NO	KEGIATAN
1.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Minangkabau
2.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Soekarno Hatta
3.	Studi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Bandara Internasional Kualanamu
4.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pengoperasian Kereta Api Perintis Lintas Kertapati - Indralaya
5.	Buku Informasi Perkeretaapian Tahun 2020
6.	Penyusunan Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2021-2025

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : Desember 2021

---

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ZULFIKRI, M.Sc. DEA  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.19620709 199203 1 002



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA  
JL. MEDAN MERDEKA BARAT N08  
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

Fax : (021) 3506204,  
3813972

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN  
NOMOR: KP- DJKA 60 TAHUN 6022

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN KEGIATAN STUDI PENINGKATAN DAN  
PEMBINAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN  
PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, terkait dokumen-dokumen perencanaan di bidang transportasi perlu pengesahan oleh Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pengesahan Dokumen Kegiatan Studi Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1710);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN KEGIATAN STUDI PENINGKATAN DAN PEMBINAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2022.
- KESATU : Mengesahkan Dokumen Kegiatan Studi Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen kegiatan studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai masa berlaku penggunaan maksimum 5 (lima) tahun.

- KETIGA : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

---

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ZULMAFENDI, S.E., M.Sc  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.19621005 198903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
5. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
6. Direktur Sarana Perkeretaapian;
7. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

Lampiran Keputusan Dirjen Perkeretaapian  
Nomor : KP- DJKA 60 TAHUN 2022  
Tanggal : 31 Oktober 2022

---

PENGESAHAN KEGIATAN STUDI PENINGKATAN DAN PEMBINAAN  
TRANSPORTASI PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT  
JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2022

NO	KEGIATAN
1.	Studi Kelayakan Reaktivasi Lintas Mati di Provinsi Jawa Tengah Dan DIY
2.	Studi Kelayakan Reaktivasi Lintas Mati di Provinsi Jawa Barat Dan Banten
3.	Studi Kelayakan Reaktivasi Lintas Mati di Provinsi Jawa Timur
4.	Review Studi Kelayakan Reaktivasi Lintas Mati di Provinsi Sumatera Barat
5.	Penyusunan Kamus Dan Kodifikasi Data Bidang Perkeretaapian

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ZULMAFENDI, S.E., M.Sc  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.19621005 198903 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758  
3813972

**NOTA - DINAS**

Nomor : 639 /ND/K1/DJKA/2023

Kepada Yth. : Direktur Jenderal Perkeretaapian  
D a r i : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian  
Perihal : Pengesahan Kegiatan Studi Peningkatan Dan Pembinaan  
Transportasi Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat  
Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023  
Tanggal : 6 September 2023

Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Nota Dinas Kepala Bagian Hukum Nomor: 598/ND/K1.3/DJKA/2023 perihal Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pengesahan Kegiatan Studi Peningkatan Dan Pembinaan Transportasi Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023, bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan Perencanaan Perhubungan perlu pengesahan/penetapan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.

Dalam rangka peningkatan dan pembinaan transportasi perkeretaapian, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melaksanakan kegiatan-kegiatan studi yang perlu mendapatkan pengesahan/penetapan melalui keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Pelaksanaan penyusunan studi dimaksud telah dilakukan sesuai dengan kaidah penyusunan kajian dan dibahas Bersama dengan para pihak terkait termasuk dengan narasumber tenaga ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir disampaikan konsep Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pengesahan Kegiatan Studi Peningkatan Dan Pembinaan Transportasi Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023. Apabila Bapak berkenan, mohon persetujuan dan tanda tangan.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut diucapkan terima kasih.

Jujun Endah Wahjuningrum  
NIP. 19650703 199103 2 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : ( 021) 3860758  
3813972

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN  
NOMOR: KP-DJKA 185 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENGESAHAN DOKUMEN KEGIATAN STUDI PENINGKATAN DAN  
PEMBINAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN  
PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2023**

**DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu pengesahan oleh Pejabat yang berwenang terkait dokumen-dokumen perencanaan di bidang transportasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pengesahan Dokumen Kegiatan Studi Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1710);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815).


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN KEGIATAN STUDI PENINGKATAN DAN PEMBINAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2023.
- KESATU : Mengesahkan Dokumen Kegiatan Studi Peningkatan dan Pembinaan Transportasi Perkeretaapian Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Dokumen kegiatan studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai masa berlaku penggunaan maksimum 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di : J a k a r t a  
 Pada tanggal : September 2023

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

  
Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM *pk*  
 Pembina Utama Madya (IV/d)  
 NIP. 19670608 199003 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
5. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
6. Direktur Sarana Perkeretaapian;
7. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

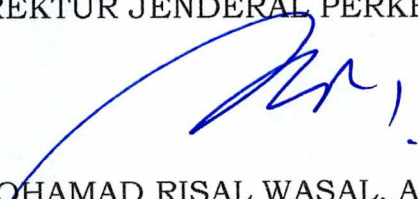
No	Uraian	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Novie Hasta	PPK PPTKA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	5/9/23	
2.	Diperiksa	Dandun Prakosa	Kepala Bagian Perencanaan	5.9.23	
3.	Diperiksa	Yennesi Rosita	Kepala Bagian Hukum	5/9/23	
4.	Disetujui	Jujun Endah W.	Sekretaris Direktorat Jenderal perkeretaapian	6/9/23	

- KEDUA : Dokumen kegiatan studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai masa berlaku penggunaan maksimum 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 12 September 2023

---

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

  
Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19670608 199003 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
5. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
6. Direktur Sarana Perkeretaapian;
7. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian  
Nomor :  
Tanggal : September 2023





PENGESAHAN DOKUMEN KEGIATAN STUDI PENINGKATAN DAN  
PEMBINAAN TRANSPORTASI PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2023

NO	KEGIATAN
1.	Kajian Dukungan Pengembangan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang
2.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Kereta Api Bandara Internasional Adi Sumarmo
3.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Kereta Api Bandara Internasional Yogyakarta

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19670608 199003 1 005

No	Uraian	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Novie Hasta	PPK PPTKA Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	5/9/23	
2.	Diperiksa	Dandun Prakosa	Kepala Bagian Perencanaan	5.9.23	
3.	Diperiksa	Yennesi Rosita	Kepala Bagian Hukum	5/9/23	
4.	Disetujui	Jujun Endah W.	Sekretaris Direktorat Jenderal perkeretaapian	6/9/23	


Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian  
Nomor :  
Tanggal : September 2023

---

PENGESAHAN DOKUMEN KEGIATAN STUDI PENINGKATAN DAN  
PEMBINAAN TRANSPORTASI PADA SATUAN KERJA KANTOR PUSAT  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2023

NO	KEGIATAN
1.	Kajian Dukungan Pengembangan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang
2.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Kereta Api Bandara Internasional Adi Sumarmo
3.	Studi Evaluasi Kemanfaatan Pembangunan dan Pengoperasian Jalur Kereta Api Bandara Internasional Yogyakarta

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

  
Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19670608 199003 1 005

# **LAMPIRAN**

## **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2**

**PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET LEGISLASI (RANCANGAN  
DAN PERATURAN PERUNDANGAN) DI BIDANG  
PERKERETAAPIAN**



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
- b. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 27 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- b. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun





**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 28 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR SARANA PERKERETAAPIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- b. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 29 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
- b. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 30 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
AUDITOR PERKERETAAPIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian;
- b. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 31 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
ASISTEN PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
  - a. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 32 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
ASISTEN PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- b. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 49 TAHUN 2023  
TENTANG  
STANDAR, TATA CARA PENGUJIAN, DAN SERTIFIKASI KELAIKAN  
KERETA API KECEPATAN NORMAL DENGAN PENGGERAK SENDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan mengenai uji pertama, uji berkala tahunan, uji berkala lengkap, dan pelaksanaan sertifikasi terhadap sarana perkeretaapian kecepatan normal dengan penggerak sendiri, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201, Pasal 206, dan Pasal 220 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

# **LAMPIRAN**

## **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3**

**PERSENTASE ASN DITJEN PERKERETAAPIAN YANG MEMILIKI  
SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN**







No	Nama	NIP	STATUS	UNIT	KOMPETENSI TEKNIS										KOMPETENSI UMUM/MANAJERIAL								Jabatan Fungsional CPNS dan PPPK	Unit Kerja												
					Auditor	Inspektur Sarana	Inspektur Prasarana	Penguji Jalang	Penguji Fasop	Penguji Prasarana	Penguji Sarana	Asesor	PPNS	Diklat Teknis Khusus Perkeretaapian	Diklat Kecakapan SDM (PPKA)	Ahli K3	Diklat Teknologi LRT Go A	Diklat Kereta Cepat	Arsiparis	Kepegawaian	Penyetaraan Jabfung	Manajemen Risiko (QRMP/QRMA/QRMO)			Ahli KPBU	Diklat Manajerial										
169	EKO PURNOMO, SE	197812272010121004	PNS	DIKA									v	v							v (QRMO)											Sedtjen Perkeretaapian				
170	NOVI HASTA WAHYUDI, ST	19851162008121002	PNS	DIKA																	v (QRMA)											Sedtjen Perkeretaapian				
171	DEDI HUMAIDI, S.Si.T.	198603182009121002	PNS	DIKA																	v (QRMA)											BTP Kelas II Padang				
172	DUTA PRATAMA, ST	198810202009121002	PNS	DIKA			v																									Dit. LLAKA				
173	ABDURAHMAN AHMAD	199608012018011001	PNS	DIKA						v																						Balai Pengujian Perkeretaapian				
174	HASMAN SYUHAS	198108202006041001	PNS	DIKA					v	v																						Dit. LLAKA				
175	RIKA RAHIM	198805102010121003	PNS	DIKA																												BTP Kelas I Semarang				
176	ARI SURYOBO	198105042010121002	PNS	DIKA						v	v																					Dit. Prasarana Perkeretaapian				
177	HERRY WUJ UTOMO	199605142010011000	PNS	DIKA																												Balai Pengujian Perkeretaapian				
178	MUHAMMAD HAQID	199205052018011003	PNS	DIKA											v																	Dit. Prasarana Perkeretaapian				
179	NUR SETIANWAN SEDIK	197703112010121003	PNS	DIKA																													Dit. Prasarana Perkeretaapian			
180	ROSITA	198001192001122001	PNS	DIKA																													Dit. LLAKA			
181	DANDUN PRAKOSA	1968051051997031001	PNS	DIKA																													Sedtjen Perkeretaapian			
182	DEKDI TRI ISTANTARA	197710102000121002	PNS	DIKA																													BPKAR Sumatera Selatan			
183	LUKMAN AL AMIN	198101242001121001	PNS	DIKA																													Dit. Prasarana Perkeretaapian			
184	SYAFEK JAMHARI	196809101994031004	PNS	DIKA																													Sedtjen Perkeretaapian			
185	MOCHAMMAD ANEH HARI MURY	197507312002121001	PNS	DIKA																													Balai Perawatan Perkeretaapian			
186	NURHADI LINGGIL WIBOWO	1971116198031002	PNS	DIKA																													BTP Kelas I Surabaya			
187	SURANTO	198804251991031002	PNS	DIKA																													Dit. Keselamatan Perkeretaapian			
188	RIZKY HANDARU BASUKI	198301092007121001	PNS	DIKA																													BTP Kelas I Medan			
189	HASBIJUD SAMAD	197903282009031002	PNS	DIKA																														BPKA Sulawesi Selatan		
190	AMIN INDIRA VERDANI	198505112009122003	PNS	DIKA																														BTP Kelas I Semarang		
191	ANDRE BUDI DHARMANWAN	198510052010121001	PNS	DIKA																													Dit. LLAKA			
192	SALIS MAHFUDHDIH	199208062010121007	PNS	DIKA																														Dit. LLAKA		
193	RISWANTARA	199108032020121004	PNS	DIKA																														BTP Kelas I Bandung		
194	YOHANES YLANA NATANIEL N	199801292020121007	PNS	DIKA																																
195	MUHAMMAD RAFI AL-FARIZI, S	199502172020121008	PNS	DIKA																																
196	ARINTA LUWIYANA	197004071993032001	PNS	DIKA																																
197	AKBARANI CANTIKA	199807102020121003	PNS	DIKA																																
198	VIKI OKISA SAFFUDIN	19951002201801001	PNS	DIKA																																
199	YOSEP YOGO WIDHAYATMOKO	198610222020121003	PNS	DIKA																																
200	TRINANDA MENJAR ARIANI	199605132020122006	PNS	DIKA																																
201	ANGELA MERICI YOSHINTA RINAWATI	199205102020122007	PNS	DIKA																																
202	DESI SATYA	199706102020121008	PNS	DIKA																																
203	HERRY KURNIAWAN KADAR ISMANTO	19861232020121003	PNS	DIKA																																
204	HKI FERNANDO	199010112020121002	PNS	DIKA																																
205	RANTI AHMAD ALRADYDI	199102262020121004	PNS	DIKA																																
206	MUHAMMAD HANNAFI	199702282020121006	PNS	DIKA																																
207	YUSUF FAJAR RAMADHAN	199407142020121009	PNS	DIKA																																
208	MAULANA ACHSAN	19980422020121003	PNS	DIKA																																
209	IKI SENIA PUSPITASARI	1986082720101212005	PNS	DIKA																																
210	SUPANDIANSYAH	198702202020121004	PNS	DIKA																																
211	ESTINNA SARIE	199408022020121014	PNS	DIKA																																
212	YULUS NIRWANSYAH AWI	200006022021111001	PNS	DIKA																																
213	ANIS CHORUNISA	199603222020122005	PNS	DIKA																																
214	NOWHANA NISA YU,ROHMAM	199411292010122001	PNS	DIKA																																
215	SIDIQ SALEH	199311132020121001	PNS	DIKA																																
216	RIZKY MUHAMMAD	199312072020121005	PNS	DIKA																																
217	FAISAL KRISTOFEL LUMBAN TORING	199507052016121001	PNS	DIKA																																
218	AYU PERMATA SANI	199401202016122002	PNS	DIKA																																
219	INDAH DWI ARIANI	199707242018122003	PNS	DIKA																																
220	OHAIRANA TIARDI	199609042020121012	PNS	DIKA																																
221	REZA AHMAD	199403242020121005	PNS	DIKA																																
222	HARMITA MORGAN	199003062020122005	PNS	DIKA																																
223	GUNAWAN	199105302020121004	PNS	DIKA																																
224	MELINA KRISNAWATI	199405072020121007	PNS	DIKA																																
225	RESTU FAJAR WIDI USWORO	19970326201801001	PNS	DIKA																																
226	JOHANNES ANGGA PRIMA	199411152020121005	PNS	DIKA																																
227	ALIK HUSULY PARIKURDI	199808282020122005	PNS	DIKA																																
228	MUHAMMAD FATHURRACHMAN PRINGGATAMA	199705082020121003	PNS	DIKA																																
229	ANNE RUFALDIH	198009072012122002	PNS	DIKA																																
230	INKA PRATIWI	199101022020121007	PNS	DIKA																																
231	MOH MAULANA RIZKI ZANLUR ROHQ	19960401201801003	PNS	DIKA																																
232	SENTUR WIKU PRIBADI	199308292020121004	PNS	DIKA																																



















**REKAP JUMLAH PEGAWAI DITJEN PERKERETAAPIAN  
PEMILIK SERTIFIKAT KOMPETENSI/KEAHLIAN**

<b>NO</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>JUMLAH SDM PEMILIK SERTIFIKAT KOMPETENSI/ KEAHLIAN</b>
1	Setditjen Perkeretaapian	94
2	Direktorat LLAKA	70
3	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	98
4	Direktorat Sarana Perkeretaapian	90
5	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	89
6	BTP Kelas I Medan	56
7	BTP Kelas II Padang	32
8	BTP Kelas II Palembang	39
9	BTP Kelas I Jakarta	52
10	BTP Kelas I Bandung	40
11	BTP Kelas I Semarang	43
12	BTP Kelas I Surabaya	45
13	Balai Pengujian Perkeretaapian	56
14	Balai Perawatan Perkeretaapian	48
15	BPKAR Sumatera Selatan	29
16	BPKA Sulawesi Selatan	20
<b>TOTAL</b>		<b>901</b>

**Keterangan :**

- 1) Total pegawai DJKA pemilik sertifikat kompetensi/keahlian sebanyak 901 pegawai
- 2) Posisi s.d akhir Desember 2023

# **LAMPIRAN**

## **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4**

**PERSENTASE PEMENUHAN RENCANA INDUK TIK BIDANG  
PERKERETAAPIAN**

**Progres Kegiatan Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2023  
Per-Triwulan IV Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Unit Kerja/PIC	Progres Kegiatan
1	Pengelolaan Portal Aplikasi Ditjen Perkeretaapian	Setditjen Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrasi aplikasi teknis di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk menunjang kebutuhan pimpinan</li> <li>- Melakukan integrasi aplikasi manajemen pada Portal DJKA dengan SSO Kemenhub</li> <li>- Melakukan migrasi data dari Portal sebelumnya ke Alfresco</li> <li>- Melakukan penggantian design UI dengan warna sesuai Website DJKA</li> <li>- Melakukan integrasi API Skema Radja terkait absensi dan integrasi API e-Monitoring untuk monitoring dashboard pada Portal DJKA</li> <li>- Melakukan penyempurnaan fitur persuratan sesuai masukan yang diberikan</li> </ul>
2	Pengembangan Website Ditjen Perkeretaapian	Setditjen Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perbaikan atas celah keamanan pada Website DJKA (ditemukan adanya serangan script injection)</li> <li>- Melakukan integrasi Website DJKA dengan SSO Kemenhub</li> <li>- Melakukan penterjemahan ke Bahasa Inggris dari bulan September 2022 s.d Desember 2023 untuk artikel dan konten website lainnya.</li> <li>- Melakukan migrasi data dari website lama ke webiste baru.</li> <li>- Menyempurnakan backend BLU BPKARS yang terintegrasi dengan BIOS Kemenkeu</li> <li>- Membuat tampilan halaman PPID DJKA</li> <li>- Melakukan perbaikan minor setelah migrasi</li> <li>- Melakukan integrasi dengan website BLU Pengujian</li> </ul>
3	Pengembangan Aplikasi <i>Database</i> Teknis Bidang Perkeretaapian	Setditjen Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan integrasi dengan Website DJKA</li> <li>- Menyediakan <i>dashboard</i> statistik dan informasi terkait data perencanaan teknis DJKA</li> <li>- Menyediakan informasi data perencanaan teknis per wilayah berupa geospasial</li> <li>- Pengembangan fitur <i>user</i> dan <i>role management</i> yang dibuat secara dinamis dan dapat di konfigurasi melalui interface aplikasi</li> <li>- Melakukan pengembangan modul pengelolaan buku agar lebih mudah digunakan oleh user</li> <li>- Melakukan migrasi data studi/kajian/sop ke dalam alfresco</li> <li>- Melakukan perubahan desain dashbord menyesuaikan masukan yang diberikan.</li> <li>- Melakukan pemilahan kategori studi/unit kerja berdasarkan judul kajian</li> </ul>

Jakarta, Januari 2024

**Koordinator Evaluasi dan Pelaporan  
Ditjen Perkeretaapian**



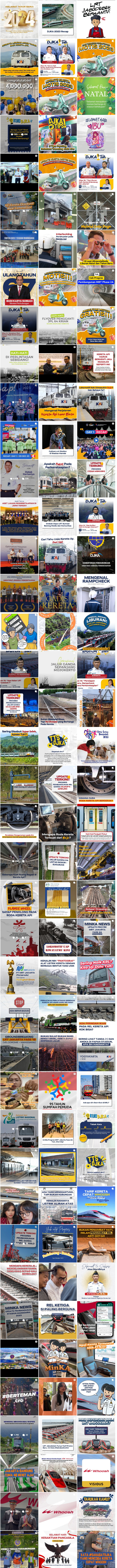
**ANDI GUNTUR ASAPA**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19840724 200712 1 001

# **LAMPIRAN**

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5  
PERSENTASE PEMENUHAN PUBLIKASI DITJEN  
PERKERETAAPIAN**

**REKAP SIARAN PERS DITJEN PERKERETAAPIAN 2023**  
**Periode Januari - Desember**

No	Nomor Siaran Pers	Judul
1	01SP/01/DJKA/2023	SEDOT 65,15 DANA DJKA KUCURKAN SUBSIDI HINGGA RP 1.77 TRILIUN UNTUK KRL JABODETABEK PADA TAHUN 2022
2	02/SP/01/DJKA/2023	PERMUDAH AKSES MENUJU LAYANAN KERETA API PERKOTAAN, DJKA DORONG INTEGRASI ANTARMODA
3	03/SP/02/DJKA/2023	Gelar Motis 2023, DJKA Siapkan 10 Ribu Slot "Motor Gratis"
4	04/SP/02/DJKA/2023	TANGGAPI MASUKAN DARI MASYARAKAT, DJKA TURUNKAN TULISAN DI AREA CONCOURSE
5	05/SP/03/DJKA/2023	PERLUAS JARINGAN KERETA API, DJKA BERI SUNTIKAN SUBSIDI
6	06/SP/03/DJKA/2023	KERAHKAN RATUSAN TENAGA, DJKA PERCEPAT KONSTRUKSI TANGGA TAMBAHAN DI ST. MANGGARAI
7	07/SP/03/DJKA/2023	TURUT BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN AWAL GBK, DJKA APRESIASI PELESTARIAN LOKOMOTIF C 300 11
8	08/SP/03/DJKA/2023	DITARGETKAN BEROPERASI PADA APRIL 2024, DJKA PERCEPAT PENGEMBANGAN STASIUN TANAH ABANG
9	09/SP/03/DJKA/2023	SAMBANGI KORBAN BENCANA LONGSOR, DIRJEN KA BERIKAN SANTUNAN
10	10/SP/03/DJKA/2023	Uji coba opesional terbatas KA Bogor - Sukabumi DJKA : Dinding Tanah dilokasi longsor diperkuat
11	11/SP/03/DJKA/2023	DJKA Pastikan Angkutan Lebaran Aman Terkendali
12	12/SP/04/DJKA/2023	DJKA himbau pemudik lewat merak, naik kereta api
13	13/SP/04/DJKA/2023	DJKA ALIHKAN SISA TIKET MOTIS UNTUK TIKET PENUMPANG
14	14/SP/05/DJKA/2023	Pemberlakuan untuk KRL Jabodetabek Bertahap Gapeka Baru Segera Berlaku
15	15/SP/06/DJKA/2023	Jelang Soft Launching LRT Jabodebek, KEMENHUB Tuntaskan Integrasi Antarmoda
16	16/SP/07/DJKA/2023	Trial Operation LRT Jabodebek Masuki Hari Ke-4, DJKA Lakukan Evaluasi*
17	17/SP/07/DJKA/2023	Insiden di Perlintasan Sebidang Kerap Berulang, DJKA Ambil Langkah Cepat Pencegahan
18	18/SP/08/DJKA/2023	Pembaharuan Software Operasi LRT Jabodebek Hampir Rampung
19	19/SP/09/DJKA/2023	Sesalkan Pembongkaran Paksa Pagar Pengaman Jalur Kereta di Rangkasbitung, DJKA Lakukan Evaluasi
20	20/SP/09/DJKA/2023	Sebelas Hari LRT Jabodebek Beroperasi, Kementerian Perhubungan Lakukan Evaluasi
21	21/SP/10/DJKA/2023	Restui Uji Coba Terbatas KCJB, DJKA Minta KCIC Pastikan Keselamatan Penumpang
22	22/SP/10/DJKA/2023	Siap layani penumpang kelentarian perhubungan terbitkan izin operasi KCJB
23	23/SP/10/DJKA/2023	Jalur Arus Penumpang di Stasiun Manggarai Diubah
24	24/SP/10/DJKA/2023	Tinjau Proyek MRT Jakarta Fase 2A
25	25/SP/11/DJKA/2023	DJKA Dukung Perawatan LRT
26	26/SP/11/DJKA/2023	Rangkul Konsultan Internasional, *DJKA Optimis Percepatan Perbaikan Roda LRT Jabodebek Dapat Terwujud*
27	27/SP/11/DJKA/2023	12 Trainset Siap Beroperasi Waktu Tunggu LRT Lebih Cepat
28	28/SP/12/DJKA/2023	Switch Over ke-7 Stasiun Manggarai Digelar Pintu Masuk Penumpang dan Jalur Perjalanan Commuter Line Diubah
29	29/SP/12/DJKA/2023	Matangkan Kesiapan Pemberlakuan Pola Operasi Baru Pelaksanaan Switch Over ke-7 Stasiun Manggarai Dilaksanakan Malam Ini





# **LAMPIRAN**

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6  
NILAI AKIP DITJEN PERKERETAAPIAN**



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL.MERDEKA BARAT 8  
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919  
3813154  
3507656

FAX : (021) 3813154  
TLX : 44310 DEPHUB IA  
FAX :

Nomor : PS.306/3/4/ITJEN/2023 Jakarta, 30 Agustus 2023  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Evaluasi atas Implementasi  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintahan (SAKIP) Tahun 2022  
pada Direktorat Jenderal  
Perkeretaapian

Yth. Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE-ITJEN 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun 2022, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Penilaian tidak hanya dilakukan atas Implementasi SAKIP Eselon I saja, akan tetapi penilaian dilakukan terhadap sampel Implementasi SAKIP Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk tahun ini sampel dilakukan terhadap Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dan Balai Perawatan Perkeretaapian, dimana hasil penilaian terhadap sampel akan berpengaruh terhadap penilaian Eselon I.
3. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

4. Dari...

4. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut yang didasarkan pada penilaian terhadap unsur pemenuhan dokumen, kualitas, dan pemanfaatan SAKIP, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai sebesar **82,70 (Predikat A)** dengan interpretasi "**Memuaskan**" dengan gambaran bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Adapun rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,09
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,05
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>			<b>82,70</b>
<b>Predikat</b>			<b>A</b>

5. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja pada masing-masing Unit Kerja yang dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. Perencanaan kinerja**

Nilai hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja sebesar **24,09 dari nilai maksimal 30**, dengan beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) belum dipublikasikan tepat waktu;
- 2) Masih terdapat target yang ditetapkan dalam IKU/IKK masuk kriteria tidak menantang yaitu lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya;
- 3) Masih terdapat realisasi secara keseluruhan IKU/IKK tidak termasuk kriteria setidaknya masih *on the right track* yaitu realisasi capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d.110%.

**b. Pengukuran Kinerja**

Nilai hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja sebesar **25,05 dari nilai maksimal 30**, dengan catatan belum seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membuat Laporan Kinerja bulanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

**c. Pelaporan Kinerja**

Nilai hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja sebesar **12,30 dari nilai maksimal 15**, dengan beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Belum...

- 1) Belum seluruhnya secara konsisten dalam 5 tahun bukti keberadaan dokumen melakukan revidi terhadap Laporan Kinerja dan penyampaian dokumen Laporan Kinerja tepat waktu;
- 2) Belum terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai terkait dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yaitu dalam hal:
  - a) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja);
  - b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
  - c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

**d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Nilai hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar **21,25 dari nilai maksimal 25**, dengan catatan belum seluruhnya secara konsisten dalam 5 tahun bukti keberadaan dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja secara berjenjang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar Dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) dipublikasikan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2018 tentang Revidi AKIP dan Tata Cara Penyampaian LAKIP;
2. Agar dalam menetapkan target dalam IKU/IKK memperhatikan kriteria menantang yaitu lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya;
3. Memberikan perhatian lebih (monitoring, evaluasi dan tindak lanjut) untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang pada IKU/IKK yang capaian kinerjanya tidak tercapai, baik pada Laporan Monitoring Rencana Aksi Bulanan/Triwulanan, monitoring capaian kinerja triwulanan/tahunan, sehingga kedepannya IKU/IKK tersebut dapat tercapai

dan...

dan kinerja secara keseluruhan termasuk kriteria masih *on the right track* yaitu realisasi keseluruhan capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d. 110%;

4. Agar seluruh unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membuat Laporan Kinerja bulanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Agar secara konsisten dilaksanakan dan terdokumentasi bukti keberadaan dokumen:
  - a. Melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja;
  - b. Penyampaian dokumen Laporan Kinerja tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja secara berjenjang.
6. Melakukan beberapa upaya yang bisa dihargai terkait Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yaitu dalam hal:
  - a) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (*benchmark* kinerja) dilakukan terhadap sebagian besar IKU/IKK;
  - b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak terbatas hanya anggaran namun juga terkait sumber daya manusia, dll;
  - c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) yang dapat dilaksanakan/kesan yang nyata, sehingga realisasi secara keseluruhan IKU/IKK termasuk kriteria setidaknya masih *on the right track* yaitu realisasi capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d. 110%.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2022 Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Mohon...

Mohon kiranya Saudara beserta jajaran dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan paling lambat 60 hari setelah diterimanya surat ini.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Inspektur Jenderal,

Arif Toha

NIP 196703201992031003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
6. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758  
3813972

Nomor : *PS.306/1/2/DJKA/2023* Jakarta, *28* Desember 2023  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi  
Implementasi SAKIP Direktorat  
Jenderal Perkeretaapian

Yth. Inspektur Jenderal  
Kementerian Perhubungan

Menunjuk surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan nomor: PS.306/3/4/ITJEN/2023 tanggal 30 Agustus 2023 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan ini disampaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terhadap implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam periode Oktober s.d Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar Dokumen Perencanaan Kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kegiatan dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja) dipublikasikan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu AKIP dan Tata Cara Penyampaian LAKIP.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelesaian dan penyampaian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-SAKIP Reviu yang hasilnya disampaikan kepada masing-masing unit kerja untuk meningkatkan kepatuhan publikasi pada aplikasi e-SAKIP Reviu tersebut.</li><li>• Telah dilakukan himbauan/rapat pembahasan kepada masing-masing unit kerja agar melakukan <i>upload</i> dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada e-SAKIP Reviu dan juga pada website Ditjen Perkeretaapian secara tepat waktu sesuai PM 85 Tahun 2020.</li></ul>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Triwulan III 2023, unit kerja telah melakukan publikasi melalui e-SAKIP Reviu dan website Ditjen Perkeretaapian dengan tepat waktu.</li> </ul>
2	<p>Agar dalam menetapkan target dalam IKU/IKK memperhatikan kriteria menantang yaitu lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam menetapkan target IKK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya serta juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sumber daya lainnya dengan target yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya.</li> <li>• Telah dilakukan revisi PK kedua Tahun 2023 pada Desember 2023 untuk memastikan target yang ditetapkan memenuhi kriteria menantang yaitu lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya.</li> </ul>
3	<p>Memberikan perhatian lebih (monitoring, evaluasi dan tindak lanjut) untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang pada IKU/IKK yang capaian kinerjanya tidak tercapai, baik pada Laporan Monitoring Rencana Aksi Bulanan/Triwulanan, monitoring capaian kinerja Triwulanan/Tahunan, sehingga kedepannya IKU/IKK tersebut dapat tercapai dan kinerja secara keseluruhan termasuk kriteria masih <i>on the right track</i> yaitu realisasi keseluruhan capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d. 110%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara rutin tetap dilakukan monitoring setiap bulan melalui <i>e-performance</i> dan monitoring kinerja triwulan melalui rapat pembahasan dan pelaporan dengan memberikan perhatian lebih pada indikator yang berkinerja rendah dilengkapi analisa, evaluasi dan upaya peningkatan kinerja termasuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, organisasi, jabatan/pegawai serta budaya kinerja pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III 2023. Hal tersebut sudah dihimbau juga ke seluruh unit kerja untuk melengkapi upaya peningkatan kinerja pada laporan kinerja triwulan/tahunan.</li> <li>• Telah dilakukan pembahasan dan penetapan revisi PK Tahun 2023 pada November-Desember 2023 untuk memastikan target yang ditetapkan diprediksi dapat memenuhi kriteria <i>on the right track</i> yaitu realisasi keseluruhan capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d. 110%.</li> </ul>
4	<p>Agar seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membuat Laporan Kinerja bulanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah disampaikan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.013/1/1/K1/DJKA/2023 perihal Penyampaian SE Menteri Perhubungan Nomor</li> </ul>



No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.</p>	<p>18 Tahun 2023 tentang Penggunaan Aplikasi e-Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk himbauan melakukan pengisian SKP dan laporan kinerja bulanan pegawai pada aplikasi e-Kinerja Kemenhub.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah disampaikan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.III/1/3/K1/DJKA/2023 perihal Monitoring Penyusunan SKP pada Aplikasi e-Kinerja kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.</li> <li>• Telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam penyusunan laporan kinerja bulanan pegawai menggunakan aplikasi e-Kinerja.</li> </ul>
5	<p>Agar secara konsisten dilaksanakan dan terdokumentasi bukti keberadaan dokumen:</p> <p>a. Melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja.</p> <p>b. Penyampaian dokumen Laporan Kinerja tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reviu terhadap Laporan Kinerja telah dilakukan untuk laporan monitoring kinerja triwulan melalui rapat pembahasan dan evaluasi substansi dan pemenuhan pelaporan. Sedangkan untuk reviu laporan kinerja tahunan direncanakan pelaksanaan pada Januari 2024.</li> <li>• Untuk Triwulan III 2023, telah disampaikan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/4/5/K1/DJKA/2023 tanggal 11 Desember 2023 perihal Evaluasi Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2023 yang mencakup evaluasi capaian kinerja dan evaluasi kepatuhan pelaporan kinerja termasuk kelengkapan substansi dan ketepatan waktu penyampaian laporan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.</li> <li>• Telah disampaikan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III 2023 secara tepat waktu melalui surat Direktur</li> </ul>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>c. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja secara berjenjang.</p>	<p>Jenderal Perkeretaapian nomor UM.006/8/24/DJKA/2023 pada tanggal 30 Oktober 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja (selain unit sampel) telah dilaksanakan dan difinalisasi pada Oktober – November 2023 serta hasilnya telah disampaikan melalui surat Sesditjen Perkeretaapian kepada masing-masing unit kerja.</li> </ul>
6	<p>Melakukan beberapa upaya yang bisa dihargai terkait Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dan pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya yaitu dalam hal:</p> <p>a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (benchmark kinerja) dilakukan terhadap sebagian besar IKU/IKK;</p> <p>b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak terbatas hanya anggaran namun juga terkait sumber daya manusia, dll;</p> <p>c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah ditambahkan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/Internasional (<i>benchmark</i> kinerja) pada Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III 2023 untuk beberapa indikator kinerja. Selain itu, juga telah dihimbau kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melengkapi <i>benchmark</i> kinerja tersebut.</li> <li>Telah ditambahkan analisis efisiensi sumber daya anggaran dan SDM pada Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan III 2023. Selain itu, juga telah dihimbau kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melengkapi analisis efisiensi tersebut.</li> <li>Telah ditambahkan analisa, evaluasi dan upaya peningkatan kinerja berupa uraian pengaruh terhadap penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, anggaran, organisasi jabatan/pegawai</li> </ul>

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>dapat dilaksanakan/ kesan yang nyata, sehingga realisasi secara keseluruhan IKU/IKK termasuk kriteria setidaknya masih <i>on the right track</i> yaitu realisasi capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d. 110%.</p>	<p>serta budaya kinerja pada Laporan Monitoring Ditjen Perkeretaapian Triwulan III 2023. Selain itu, juga telah dihimbau kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melengkapi analisis dan upaya peningkatan kinerja tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dilakukan pembahasan dan penetapan revisi PK Tahun 2023 pada November-Desember 2023 untuk memastikan target yang ditetapkan diprediksi dapat memenuhi kriteria <i>on the right track</i> yaitu realisasi keseluruhan capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d. 110%.</li> <li>• Telah dilakukan <i>benchmarking</i> penyelenggaraan SAKIP dengan Kementerian Keuangan dan Pemprov Jawa Barat untuk referensi inovasi dan upaya lebih yang bisa dihargai termasuk dalam pelaporan kinerja.</li> </ul>

Dokumen pendukung terkait tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagaimana pada link berikut: <https://bit.ly/TLEvaluasiSAKIPDJK2023>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal Perkeretaapian

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perkeretaapian,



Jujun Endah Wahjuningrum  
NIP 196507031991032001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
3. Inspektur IV selaku Koordinator Evaluasi SAKIP.

# **LAMPIRAN**

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 7  
TINGKAT MATURASI SPIP DIREKTORAT JENDERAL  
PERKERETAAPIAN**



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308,3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

Nomor : **UM. 006 / 22 / 1 Phb 2023**  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Laporan Hasil Penilaian Mandiri  
Maturitas Penyelenggaraan  
SPIP Kementerian Perhubungan  
Tahun 2022/2023

Jakarta, 27 Juni 2023

Yth. Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2022/2023 yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP dengan uraian sebagai berikut:

## A. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **"terdefinisi"** atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **"3,486"**.

Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	5	2,00
2.	Struktur dan Proses	2	0,571
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	2	0,915
	<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>	<b>3</b>	<b>3,486</b>
	<b>-MRI</b>	<b>3</b>	<b>3,06</b>
	<b>-IEPK</b>	<b>2</b>	<b>1,50</b>

Dengan tingkat maturitas **"terdefinisi"**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta

pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Sehingga Kementerian Perhubungan telah berada pada level 3 (terdefinisi).

## **2. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “**terdefinisi**” adalah perlu melakukan “finalisasi penyusunan kebijakan dan prosedur/sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai/mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya/evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis”.

Rincian kondisi maturitas per komponen dan saran perbaikannya diuraikan pada bagian berikutnya di uraian penilaian

## **B. URAIAN PENILAIAN**

### **1. Dasar Penilaian**

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, di mana Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP;
- 3) Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- 4) Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 206 Tahun 2021 tentang Tim Penilai Mandiri penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan;
- 5) Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan RI Nomor KP-ITJEN 18 TAHUN 2023 tentang Tim Penyusun Kebijakan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

## **2. Tujuan Penilaian**

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

- 1) Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan;
- 2) Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan.

## **3. Ruang Lingkup Penilaian**

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

- 1) Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- 2) Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (duapuluh lima) subunsur penilaian; dan
- 3) Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) subunsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan dilakukan pada 9 (sembilan) buah Unit Kerja Eselon I , yaitu:

- 1) Sekretariat Jenderal;
- 2) Inspektorat Jenderal;
- 3) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- 4) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 5) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 6) Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- 7) Badan Kebijakan Transportasi;
- 8) Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
- 9) Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek.

Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari Juli 2022 sampai dengan Juni 2023.

#### 4. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

<b>1.</b>	<b>Penetapan Tujuan</b>	<b>2</b>	<b>40%</b>
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
<b>2.</b>	<b>Struktur dan Proses</b>	<b>25</b>	<b>30%</b>
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	
<b>3.</b>	<b>Pencapaian Tujuan SPIP</b>	<b>7</b>	<b>30%</b>
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	c. Pengamanan atas Aset Negara	3	
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1	
	<b>Total Bobot</b>		<b>100%</b>

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari pejabat/pelaksana pada Kementerian Perhubungan. Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.



Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing focus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

<b>Tingkat Maturitas</b>	<b>Klasifikasi Nilai</b>	<b>Interval Nilai</b>
Rintisan	1	1,0 ≤ Nilai < 2,0
Berkembang	2	2,0 ≤ Nilai < 3,0
Terdefinisi	3	3,0 ≤ Nilai < 4,0
Terkelola dan Terukur	4	4,0 ≤ Nilai < 4,5
Optimum	5	≥ 4,5

### 5. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2022/2023; disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan telah memenuhi kriteria pada tingkat “**terdefinisi**” dengan skor sebesar 3,486 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>	<b>Bobot Unsur</b>	<b>Skor</b>	<b>Nilai</b>
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>			
<b>Kualitas Sasaran Strategis</b>	50%	5	2,50
<b>Kualitas Strategi Pencapaian</b>	50%	5	2,50
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	<b>100.00%</b>	5	5,00
<b>BOBOT PERENCANAAN</b>	<b>40.00%</b>		<b>2,000</b>
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>			
<b>Lingkungan Pengendalian</b>	30.00%	2,209	0,663
<b>Penilaian Risiko</b>	20.00%	1,013	0,202
<b>Kegiatan Pengendalian</b>	25.00%	2,318	0,580
<b>Informasi dan Komunikasi</b>	10.00%	2,319	0,232
<b>Pemantauan</b>	15.00%	1,521	0,228
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100.00%</b>		
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>30.00%</b>		<b>0,571</b>
<b>PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAAN SPIP</b>			
<b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b>			1,20
<b>Capaian Outcome</b>	15.00%	5	0,75

Capaian <i>Output</i>	15.00%	3	0,45
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>			0,75
Opini LK	25.00%	3	0,75
<b>Pengamanan atas Aset Negara</b>			0,90
Keamanan Administrasi	10.00%	3	0,30
Keamanan Fisik	5.00%	2	0,10
Keamanan Hukum	10.00%	5	0,50
<b>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>			0,20
Temuan Ketaatan - BPK	20.00%	1	0,20
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>	<b>100.00%</b>		
<b>BOBOT HASIL</b>	<b>30.00%</b>		<b>0,915</b>
<b>TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>			<b>3,486</b>

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2022/2023 adalah sebagai berikut:

**1) Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan Tahun 2022/2023 mencapai level “terdefinisi”**

Seperti diuraikan sebelumnya, dengan tingkat maturitas “**terdefinisi**”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Sedangkan dari sisi manajemen risiko, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Selanjutnya dilihat dari efektivitas pengendalian korupsi, menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan, serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.

## **2) Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan**

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:

### **a. Kualitas Sasaran Strategis**

Kementerian Perhubungan telah mempunyai Kualitas Sasaran Strategis yang baik dimana sudah dilakukan Studi Naskah Teknokratik Rencana Strategis 2020-2024 pada Tahun 2018 yang dilanjutkan dengan terbitnya PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024.

### **b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis**

Kementerian Perhubungan sudah melakukan review atas Rencana Strategis Eselon I sebagai dasar untuk dilakukannya revisi Rencana setategis baik di unit kerja Eselon I dan Kementerian.

## **3) Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses**

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

### **a. Lingkungan Pengendalian**

Perlu menyusun *risk register* dan melakukan pengalokasian anggaran terkait pelaksanaan Manajemen Risiko setelah ditetapkannya pedoman/kebijakan/prosedur terkait dengan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.

### **b. Penilaian Risiko**

Perlu dilakukannya percepatan finalisasi terhadap pedoman/kebijakan/prosedur terkait dengan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.

### **c. Kegiatan Pengendalian**

Telah dilakukan sosialisasi pedoman/kebijakan/prosedur guna meningkatkan pengawasan dan pengamanan aset.

### **d. Informasi dan Komunikasi**

Perlu dilakukan sosialisasi system *Whistle Blowing* (Aplikasi SIMADU) dan sosialisasi pedoman/kebijakan/prosedur Manajemen Risiko kepada seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

**e. Pemantauan**

Perlu menyusun pedoman *review* dan pemantauan terhadap proses setelah ditetapkannya pedoman/kebijakan/prosedur terkait dengan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.

**4) Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan**

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut:

**a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi**

1. Kementerian Perhubungan sudah mempunyai Kinerja yang baik dimana hasil penilaian LAKIP oleh KemenPANRB pada tahun 2022 memperoleh nilai 77,58 dengan predikat BB (sangat baik).
2. Kementerian Perhubungan perlu melakukan perbaikan atas capaian sasaran program dan kegiatan pada satker yang capaiannya diatas 200% dan diatas 150% $<x<200\%$ .

**b. Keandalan Pelaporan Keuangan**

1. Masih terdapat permasalahan tata kelola PNBPN, mekanisme pengawasan serta pencatatan penatausahaan aset yang belum tuntas ditindaklanjuti sebagaimana LHP BPK.
2. Perlu dilakukan percepatan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

**c. Pengamanan atas Aset Negara**

1. Berdasarkan LHP BPK, masih terdapat beberapa aset yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah.
2. Tindak lanjut terhadap permasalahan penatausahaan dan pengamanan aset yang perlu diperbaiki pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

**d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

1. Melakukan Bimbingan Teknis kepada para pengelola anggaran (KPA, PPK, Bendahara) secara rutin.
2. Terkait kelebihan pembayaran/denda keterlambatan atas temuan LHP BPK yang masih dalam proses, agar Satker/ UPT di

lingkungan unit kerja (yang belum selesai) segera menyetorkan kelebihan pembayaran belanja barang/denda keterlambatan ke kas Negara.

3. Terkait belanja subsidi yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan atas temuan LHP BPK yang masih dalam proses, agar Satker/ UPT di lingkungan unit kerja segera menyetorkan kelebihan pembayaran belanja subsidi ke kas Negara, serta mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan pelaksanaan perintis udara.
4. Terkait belanja perjalanan dinas yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan atas temuan LHP BPK yang masih dalam proses, agar Satker/ UPT di lingkungan unit kerja (yang belum selesai) segera menyetorkan kelebihan belanja perjalanan dinas ke kas Negara.
5. Dirjen Perhubungan Darat agar melakukan review terhadap peraturan/ pedoman teknis perhitungan biaya operasional kendaraan.

#### **6. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan ke tingkat terkelola, disarankan agar:

- 1) Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, Kementerian Perhubungan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan percepatan finalisasi pedoman/kebijakan/prosedur terkait Manajemen Risiko, melakukan sosialisasi, menyusun *risk register* dan mengalokasikan anggaran terkait pelaksanaan Manajemen Risiko setelah ditetapkannya Kebijakan Manajemen Risiko.
  - b. Melakukan sosialisasi dan publikasi atas pentingnya *Whistle Blowing* serta melakukan evaluasi secara berkala atas keandalan sistem *Whistle Blowing*.
- 2) Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Kementerian Perhubungan perlu meningkatkan perbaikan atas capaian sasaran program kegiatan dan melakukan peningkatan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas arahan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Novie Riyanto R.

NIP. 19661111 199503 1 001

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan.



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919  
3813154  
3507656

FAX : (021) 3813154  
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : PS.302/4/6/ITJEN/2023  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Penjaminan  
Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi di  
Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, 14 Juni 2023

Yth. Sekretaris Jenderal

Dengan ini kami disampaikan bahwa APIP Inspektorat Jenderal selaku Tim Penjamin Kualitas (PK) telah melakukan rangkaian kegiatan Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023.

1. Beberapa hal pokok – pokok dari rangkaian kegiatan penilaian maturitas tersebut sebagai berikut :
  - a. Penjaminan Kualitas mengacu pada:
    - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
    - 2) Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
  - b. Penjaminan dilakukan pada 9 (Sembilan) Unit Eselon I, yaitu:
    - 1) Sekretariat Jenderal;
    - 2) Inspektorat Jenderal;
    - 3) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
    - 4) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
    - 5) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
    - 6) Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
    - 7) Badan Kebijakan Transportasi;
    - 8) Badan Pengembangan SDM Perhubungan;
    - 9) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
  - c. Pelaksanaan Penilaian Mandiri telah dilakukan pada 218 satker dari 582 satker di Kemenhub atau sekitar 37,457% yang terdiri dari satker pusat dan UPT mandiri dan untuk Penjaminan Kualitas dilakukan pada 140 satker dengan mengacu Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021, yaitu minimal 40 persen dari total nilai anggaran Kemenhub, 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) satker wajib.
  - d. Hasil Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat Jenderal tahun 2023, Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Perhubungan adalah 3,486 atau Level 3 (terdefinisi), secara lengkap disampaikan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas dan Matrik Rekapitulasi sesuai Format Lampiran I Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 (sebagaimana terlampir).

2. Sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, diharapkan pada Penilaian Mandiri yang akan datang Biro Perencanaan selaku Koordinator Tim Penilaian Mandiri Kementerian Perhubungan :
  - a) Menambah jumlah satker yang akan melakukan Penilaian Mandiri secara bertahap dengan pertimbangan jumlah anggaran yang dikelola dan tingkat strategis kegiatan atau proyek yang dikelola;
  - b) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada satker-satker khususnya UPT Mandiri mengenai Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi;
  - c) Dalam melakukan kompilasi juga melakukan validasi dokumen yang disampaikan Tim Penilaian Mandiri Sub Sektor dengan Kertas Kerja Evaluasi SPIP;
  - d) Memerintahkan seluruh Satker untuk menyelenggarakan SPIP, manajemen risiko, dan pengendalian korupsi secara terintegrasi, terstruktur dan sistematis;
  - e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kemampuan keahlian penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada Tim Asesor Penilai Mandiri.
3. Nilai Maturitas SPIP yang disajikan dalam laporan ini merupakan skor penjaminan kualitas penilaian mandiri maturitas SPIP oleh Inspektorat Jenderal dan akan dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku *Quality Assurance* (QA) dan Pembina SPIP Kementerian/Lembaga.

Sesuai Arahan BPKP diharapkan Sekjen cq. Biro Perencanaan selaku Koordinator Tim Penilaian Mandiri Tingkat Kementerian dapat menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP ke Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP cq. Direktur Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan paling lambat tanggal 30 Juni 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur Jenderal,



Ir. Jujun Endah Wahjuningrum, M.T., QGIA.  
NIP. 196507031991032001

Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
3. Inspektur I.



Lampiran Surat  
 Nomor : PS.302/4/6/ITJEN/2023  
 Tanggal : 13 Juni 2023

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
 Periode Penilaian 01 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023**

**PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP**

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50,00%		2,50		
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>		100,00%		<b>5,00</b>		
<b>BOBOT PERENCANAAN</b>			40,00%		<b>2,000</b>	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>						
<b>Lingkungan Pengendalian</b>						
Penegekan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,063	3,75%		0,08		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,250	3,75%		0,12		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	0,482	3,75%		0,02		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	2,750	3,75%		0,10		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,500	3,75%		0,09		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,500	3,75%		0,06		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,11		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,125	3,75%		0,08		
<b>Penilaian Risiko</b>						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,167	10%		0,12		
Analisis Risiko (2.2)	0,858	10%		0,09		
<b>Kegiatan Pengendalian</b>						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,250	2,27%		0,05		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	1,750	2,27%		0,04		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,27%		0,07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,500	2,27%		0,06		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,750	2,27%		0,06		
Pemisahan Fungsi (3.6)	1,250	2,27%		0,03		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,500	2,27%		0,06		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,750	2,27%		0,06		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan (3.9)	2,500	2,27%		0,06		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatan (3.10)	2,250	2,27%		0,05		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,27%		0,05		
<b>Informasi dan Komunikasi</b>						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,888	5%		0,09		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,750	5%		0,14		
<b>Pemantauan</b>						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,417	7,50%		0,11		
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,625	7,50%		0,12		
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>				<b>1,905</b>		
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>			30,00%		<b>0,571</b>	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>						
<b>Efektivitas dan Efisiensi</b>						
Capaian Outcome	5	15%		0,75		
Capaian Output	3	15%		0,45		
<b>Keandalan Laporan Keuangan</b>						
Opini LK	3	25%		0,75		
<b>Pengamanan atas Aset</b>						
Keamanan Administrasi	3	10%		0,30		
Keamanan Fisik	2	5%		0,10		
Keamanan Hukum	5	10%		0,50		
<b>Ketaatan pada Peraturan</b>						
Temuan Ketaatan - BPK	1	20%		0,20		
<b>SUB JUMLAH HASIL</b>		100,00%		<b>3,05</b>		
<b>BOBOT HASIL</b>			30,00%		<b>0,915</b>	
<b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>						<b>3,486</b>

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)				3.06		
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
<b>PERENCANAAN</b>	<b>40,00%</b>		<b>2,00</b>			
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	5,00	2,00			
<b>KAPABILITAS</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,33</b>			
KEPEMIMPINAN	5,00%	0,99	0,05			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	1,17	0,06			
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	1,00	0,05			
KEMITRAAN	2,50%	1,75	0,04			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	1,07	0,13			
<b>HASIL</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,72</b>			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	0,86	0,16			
OUTCOMES	11,25%	5	0,56			
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>		<b>3,06</b>			
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)				1.50		
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
<b>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</b>	<b>48%</b>		<b>0,65</b>			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,06	0,20			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	2,06	0,15			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	0,48	0,03			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	0,48	0,07			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,06	0,20			
<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>	<b>36%</b>		<b>0,53</b>			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	0,86	0,08			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	3,00	0,11			
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	0,48	0,04			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	2,06	0,15			
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	2,06	0,15			
<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>	<b>16%</b>		<b>0,33</b>			
INVESTIGASI	8,00%	2,06	0,17			
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	2,06	0,17			
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>		<b>1,50</b>			
KAPABILITAS APIP				3		



Ir. Jujun Endah Wahjuningrum, M.T., QGIA.  
NIP. 196507031991032001



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919  
3813154  
3507656

FAX : (021) 3813154  
TLX : 44310 DEPHUB IA

## **PERNYATAAN TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2022**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kami selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada **Kementerian Perhubungan** melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Penjaminan kualitas dilakukan secara profesional sehingga terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan pedoman dapat langsung diperbaiki secara berkelanjutan sampai dengan penilaian selesai dilakukan.

Berdasarkan penjaminan kualitas yang kami lakukan, baik proses penilaian maupun hasil penilaian **telah sesuai** dengan pedoman yang ditetapkan, dengan catatan koreksi selama proses penjaminan kualitas terlampir.

Jakarta, 13 Juni 2023

Plt. Inspektur Jenderal

Ir. Jujun Endah Wahjuningrum, M.T., QGIA.  
NIP. 196507031991032001



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR,  
TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
ATAS  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2023**

**NOMOR : PE.09.03/LHP-170/D103/2/2023  
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR,  
TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120  
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimile (021) 85906456  
E-mail [dep1.dir3@bpkp.go.id](mailto:dep1.dir3@bpkp.go.id), Website [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

---

Nomor : PE.09.03/LHP-170/D103/2/2023 13 November 2023  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas  
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Perhubungan  
Tahun 2023

Yth. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan  
Di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023 pada Kementerian Perhubungan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Dasar Penugasan**

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres nomor 20 tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
4. Surat Tugas Direktur Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan Nomor PE.09.02/ST-232/D103/2/2023 tanggal 21 Agustus 2023 Hal Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan.

**B. Tujuan Penugasan**

Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, menetapkan nilai akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen

Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), serta telah mengidentifikasi *Area of Improvement* (Aoi) dan rekomendasi atas Aoi.

### **C. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023 pada Kementerian Perhubungan meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP meliputi aspek:
  - a. Tahap persiapan, terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim *assessor* dan tim penjamin kualitas, dan menilai penetapan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi beserta pemaparannya;
  - b. Tahap pelaksanaan, terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, MRI dan IEPK;
  - c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *AOI*, pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang disusun oleh tim *assessor*.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sesuai dengan rentang waktu penilaian SPIP Tahun 2023;
3. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh sasaran strategis Kementerian Perhubungan yang berjumlah 8 (delapan) Sasaran Strategis, yaitu:
  - a. Terwujudnya konektivitas nasional;
  - b. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
  - c. Meningkatnya keselamatan transportasi;
  - d. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum;
  - e. Meningkatnya kualitas SDM transportasi yang kompeten;
  - f. Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan;
  - g. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian;
  - h. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada komponen Struktur dan Proses, evaluasi dilaksanakan terhadap 70 (tujuh puluh) satuan kerja, dengan rincian terdapat pada lampiran 1.

### **D. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab atas kebenaran formal atas dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Kementerian Perhubungan. Tanggung jawab Tim Evaluasi terbatas pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan data dan

informasi yang telah disampaikan.

## E. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui wawancara, observasi dan revidu atas dokumen.

## F. Hasil Evaluasi

### 1. Informasi Umum

Informasi umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

No.	Tahapan	Satker Sampel	Nilai Komponen			
			Maturitas SPIP	MRI	IEPK	Kap. APIP
1.	Penilaian Mandiri	218	3,992	3,470	3,180	3,000
2.	Penjaminan Kualitas	140	3,486	3,060	1,500	3,000

Terdapat 15 (lima belas) indikator penilaian tahun 2022 dari instansi lain yang menjadi pertimbangan di dalam penilaian setiap parameter SPIP Terintegrasi, yaitu:

No.	Indikator Penilaian	Nilai/Predikat
1.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	N/A
2.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	N/A
3.	Nilai SAKIP	77,58
4.	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A
5.	Indeks Pengelolaan Arsip	83,29
6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,12
7.	Indeks Pengelolaan Aset	2,85
8.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A
9.	Indeks Kematangan Pembinaan UKPBJ	76,8
10.	Indeks Sistem Merit	258,5 (Kategori III)
11.	Indeks Pelayanan Publik	4,55
12.	Indeks SPBE	3,33
13.	Opini atas Laporan Keuangan K/L/D	WTP
14.	Survey Penilaian Integritas (SPI)	75,18
15.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	96,6

### 2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Perhubungan Tahun 2023 **telah sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas

penyelenggaraan SPIP sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

Namun demikian, masih terdapat area perbaikan atas Proses Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan jumlah satker yang melaksanakan penilaian mandiri secara bertahap;
- b. Meningkatkan pemahaman tim asesor dan tim penjaminan kualitas mengenai SPIP terintegrasi.

### **3. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi**

Kementerian Perhubungan telah melakukan penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2023 secara mandiri melalui pengujian bukti pendukung implementasinya. Penilaian mandiri dilakukan pada 218 satker dari total 582 satker yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan oleh tim asesor masing-masing satker, kemudian dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal pada 140 satker untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP.

Hasil penilaian mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 Kementerian Perhubungan setelah dilakukan penjaminan kualitas adalah sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah **3,486** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)**;
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **3,060** atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada **Level 3**; dan
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **1,500**.

### **4. Hasil evaluasi**

#### **a. Simpulan Hasil Evaluasi**

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2023 yang telah dilakukan penjaminan kualitas pada Kementerian Perhubungan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,200** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** yang menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian



kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

- 2) Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **2,770** atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada **Level 2** yang menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah memiliki karakteristik pendekatan manajemen risiko, namun masih silo.
- 3) Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **1,460** yang menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah memiliki kebijakan anti korupsi, namun proses cegah-deteksi-respon belum mampu mencegah terjadinya korupsi.

**b. Uraian Hasil Evaluasi**

Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2023 pada Kementerian Perhubungan setelah dilakukan evaluasi oleh BPKP adalah sebagai berikut:

No.	Fokus Penilaian/ Komponen	Level		
		Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas	Evaluasi	Naik/Turun
1	2	4	5	6=5-4
1	Maturitas SPIP Terintegrasi	3,486	3,200	(0,286)
2	MRI	3,060	2,770	(0,290)
3	IEPK	1,500	1,460	(0,040)
4	Kapabilitas APIP	3,000	3,000	(0,000)

Penjelasan atas hasil evaluasi sebagai berikut:

**1) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi**

**(a) Komponen Penetapan Tujuan**

Komponen penetapan tujuan pada Kementerian Perhubungan telah menggambarkan aspek perencanaan sebagai alat pengendalian yang memadai, yaitu perencanaan kinerja telah disusun, ukuran-ukuran kinerja telah didefinisikan dengan baik, dan strategi pencapaian sasaran strategis telah relevan dan terintegrasi. Namun demikian terdapat beberapa kondisi yang masih perlu perbaikan.

Hasil evaluasi komponen Penetapan Tujuan adalah sebagai berikut:

Penetapan Tujuan	Skor		
	Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas	Evaluasi	Naik/Turun
1	2	3	4=3-2
Kualitas Sasaran Strategis	5,0	4,5	(0,5)
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,0	5,0	0,00
<b>Rata-rata Sub Jumlah Perencanaan</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>(0,5)</b>

Beberapa kondisi yang masih perlu perbaikan dalam komponen penetapan tujuan antara lain sebagai berikut:

- (1) Pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian”, Sasaran Strategis ini merupakan salah satu poin penilaian pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, sehingga sasaran strategis dan indikator utamanya dapat diturunkan menjadi Sasaran Program (SasProg) dan Indikator Kinerja Program (IKP).
- (2) Terdapat target kinerja yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya, yaitu:
  - Target pada indikator “Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum
  - Target pada indikator “Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Berkompeten
  - Target pada indikator “Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi”
  - Target pada indikator “OTP Transportasi Udara”
  - Target pada indikator “Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten”
  - Target pada indikator “Indeks RB Kementerian Perhubungan”
  - Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000

Keberangkatan

- Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi SDP per 10.000 Pelayaran
  - Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi per Juta Ton CO2
- (3) Terdapat perumusan formula indikator yang kurang tepat, yaitu:
- Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan
  - Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Udara per 1 Juta Penerbangan (*departure*)

**(b) Komponen Struktur dan Proses**

Komponen struktur dan proses merupakan instrumen pengendalian utama dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Selain parameter-parameter ukuran maturitas SPIP, komponen struktur dan proses juga dilengkapi parameter-parameter MRI dan IEPK.

Hasil evaluasi atas maturitas komponen struktur dan proses SPIP menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan sistem pengendalian, namun pengendalian yang dilakukan belum sepenuhnya dapat mencapai tujuan SPIP, khususnya tujuan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini utamanya disebabkan kebijakan dan implementasi penyelenggaraan manajemen risiko dan sistem pengendalian korupsi masih belum memadai.

Hasil evaluasi atas komponen struktur proses maturitas SPIP tahun 2023 setelah evaluasi adalah sebagai berikut:

Struktur dan Proses	Skor		
	Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas	Evaluasi	Naik/Turun
1	2	3	4=3-2
<b>Lingkungan Pengendalian</b>			
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,063	2,063	0,000
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,250	3,250	0,000
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	0,482	0,607	0,125
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	2,750	3,250	0,500
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,500	2,000	(0,500)
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,500	1,417	(0,083)

Struktur dan Proses	Skor		
	Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas	Evaluasi	Naik/Turun
1	2	3	4=3-2
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,000	0,000
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,125	0,875	(1,250)
<b>Penilaian Risiko</b>			
Identifikasi Risiko (2.1)	1,167	1,500	0,333
Analisis Risiko (2.2)	0,858	0,675	(0,183)
<b>Kegiatan Pengendalian</b>			
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,250	2,500	0,250
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	1,750	1,750	0,000
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,000	2,750	(0,250)
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,500	2,000	(0,500)
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,750	3,000	0,250
Pemisahan Fungsi (3.6)	1,250	3,000	1,750
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,500	1,500	(1,000)
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,750	3,000	0,250
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,500	1,500	(1,000)
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,250	1,500	(0,750)
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	2,000	0,000
<b>Informasi dan Komunikasi</b>			
Informasi yang Relevan (4.1)	1,888	1,263	(0,625)
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,750	2,750	0,000
<b>Pemantauan</b>			0,000
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,417	0,417	(1,000)
Evaluasi Terpisah (5.2)	1,625	0,625	(1,000)

Dari hasil diatas, diketahui nilai sub unsur yang masih rendah, yaitu:

(1) Kepemimpinan yang Kondusif

- Pimpinan belum mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk penerapan manajemen risiko
- Pimpinan belum menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan
- Pimpinan belum menggunakan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja

- (2) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM, yaitu fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko belum memadai.
- (3) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait, yaitu belum mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan.
- (4) Identifikasi Risiko, yaitu register risiko belum mencakup semua jenis risiko (terutama risiko strategis dan risiko korupsi).
- (5) Analisis Risiko, yaitu tindak pengendalian belum terbukti efektif menurunkan risiko.
- (6) Informasi yang Relevan, yaitu strategi dan kebijakan manajemen risiko belum dikomunikasikan.
- (7) Pemantauan Berkelanjutan, yaitu proses manajemen risiko belum direviu. Hasil evaluasi atas komponen struktur dan proses di atas telah memasukkan adanya penalti atau pengurangan nilai atas beberapa sub unsur SPIP karena adanya kasus keterjadian korupsi hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Kasus ini melibatkan enam pegawai, yaitu satu orang direktur, satu orang kepala balai, dan empat orang PPK di lingkungan DJKA.

Perkara suap ini terjadi di beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api pada tahun anggaran 2021-2022, diantaranya:

- Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan - Kadipiro – Kalioso;
- Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar Sulawesi Selatan;
- Proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat;
- Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera.

Atas adanya perkara tersebut, sub unsur SPIP yang mengalami pengurangan nilai, yaitu:

- Penegakan Integritas dan Nilai Etika
- Kepemimpinan yang Kondusif
- Identifikasi Risiko
- Analisis Risiko

- Pembinaan SDM
- Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
- Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
- Pengendalian Fisik atas Aset
- Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting
- Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya
- Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya
- Informasi yang Relevan
- Pemantauan Berkelanjutan
- Evaluasi Terpisah

**(c) Komponen Pencapaian Tujuan**

PENCAPAIAN TUJUAN SPIP	Skor		
	Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas	Evaluasi	Naik/ Turun
1	2	3	4
<b>Efektivitas dan Efisiensi</b>			
Capaian <i>Outcome</i>	5	5	0,000
Capaian <i>Output</i>	3	3	0,000
<b>Keandalan Laporan Keuangan</b>			
Opini LK	3	3	0,000
<b>Pengamanan atas Aset</b>			
Keamanan Aset	3,3	3	(0,333)
<b>Ketaatan pada Peraturan</b>			
Temuan Ketaatan – BPK	1	1	0,000

Penjelasan atas komponen pencapaian tujuan sebagai berikut:

- (1) Capaian output tahun 2022 diambil berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang memperoleh nilai sebesar 77,58 dengan predikat “BB”, yang dikonversikan ke dalam skor SPIP sebesar “3”.

Hasil evaluasi AKIP menunjukkan hal-hal berikut, antara lain:

- Masih terdapat penetapan target kinerja pada perjanjian kinerja sebagian kecil unit/satuan kerja yang belum sepenuhnya realistis dan

*achievable* karena target kinerja yang ditetapkan melebihi capaian yang seharusnya (tidak logis).

- Cascading kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip *logis/logical framework* yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan *critical success factor* untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kondisi penjenjangan kinerja yang *sama/redundant* antara level kinerja.
- Data kinerja dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya, khususnya penetapan target kinerja yang realistis.

(2) Penilaian atas keandalan laporan keuangan, pengamanan atas aset dan ketepatan pada peraturan didasarkan pada hasil laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), yang menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut, namun masih terdapat temuan berulang dan catatan terkait aset.

## 2) Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Gambaran perubahan penilaian manajemen risiko adalah sebagai berikut:

AREA/KOMPONEN	Nilai		
	Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas	Evaluasi	Naik/Turun
<b>PERENCANAAN</b>	<b>2,00</b>	<b>1,80</b>	(0,20)
Kualitas Perencanaan	2,00	1,80	(0,20)
<b>KAPABILITAS</b>	<b>0,33</b>	<b>0,28</b>	(0,06)
Kepemimpinan	0,05	0,04	(0,01)
Kebijakan Manajemen Risiko	0,06	0,08	(0,02)
Sumber Daya Manusia	0,05	0,03	(0,02)
Kemitraan	0,04	0,02	(0,02)
Proses Manajemen Risiko	0,13	0,11	(0,02)
<b>HASIL</b>	<b>0,72</b>	<b>0,69</b>	(0,03)
Aktivitas Penanganan Risiko	0,16	0,13	(0,03)
<i>Outcomes</i>	0,56	0,56	(0,00)
<b>TOTAL</b>	<b>3,06</b>	<b>2,77</b>	(0,29)

Uraian penjelasan perubahan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut:

**a) Perencanaan**

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan dalam perencanaan antara lain masih terdapat beberapa *cascading* kinerja, perumusan formula indikator, dan penetapan target yang kurang tepat. Penjelasan lebih rinci telah disajikan pada pembahasan nilai SPIP atas komponen penetapan tujuan.

**b) Kapabilitas**

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan dalam kapabilitas manajemen risiko, antara lain:

- Pimpinan belum mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk penerapan manajemen risiko;
- Pimpinan belum menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan;
- Pimpinan belum menggunakan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
- Fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko belum memadai;
- Belum mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan;
- Register risiko belum mencakup semua jenis risiko (terutama risiko strategis dan risiko korupsi);
- Tindak pengendalian belum terbukti efektif menurunkan risiko;
- Strategi dan kebijakan manajemen risiko belum dikomunikasikan;
- Proses manajemen risiko belum direviu.

**c) Hasil**

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan dalam hasil manajemen risiko, antara lain:

- Tindak pengendalian belum terbukti efektif menurunkan risiko.
- Proses manajemen risiko belum direviu.



### 3) Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Area/komponen	Nilai		
	Penilaian Mandiri	Evaluasi	Naik/Turun
1	2	3	4=3-2
<b>Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi</b>	<b>0,65</b>	<b>0,68</b>	<b>0,03</b>
Kebijakan Anti Korupsi	0,20	0,20	0,00
Seperangkat Sistem Antikorupsi	0,15	0,15	0,00
Dukungan Sumber Daya	0,03	0,04	0,01
Power (Kuasa dan Wewenang)	0,07	0,09	0,02
Pembelajaran Antikorupsi	0,20	0,20	0,00
<b>Penerapan Strategi Pencegahan</b>	<b>0,53</b>	<b>0,46</b>	<b>(0,07)</b>
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	0,08	0,06	(0,02)
Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel	0,11	0,05	(0,06)
Kepemimpinan Etis	0,04	0,05	0,01
Integritas Organisasional	0,15	0,15	0,00
Iklim Etis Prinsip	0,15	0,15	0,00
<b>Penanganan Kejadian Korupsi</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>
Investigasi	0,17	0,17	0,00
Tindakan Korektif	0,17	0,17	0,00
<b>Total</b>	<b>1,50</b>	<b>1,46</b>	<b>(0,04)</b>

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan penegakan integritas dan nilai etika, telah memiliki kebijakan anti korupsi dan SOP anti korupsi serta kegiatan pembelajaran anti korupsi, namun proses cegah-deteksi-respon belum mampu mencegah terjadinya korupsi.

#### G. Saran

Atas permasalahan tersebut, kami menyarankan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan agar dapat mendorong penerapan *area of improvement* berikut ini:

1. Memperbaiki indikator dan target kinerja agar berorientasi pada *outcome* dan memenuhi kriteria SMART;
2. Mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon;
3. Mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian

dan implementasinya sehingga dapat diukur dan disimpulkan efektivitas dan manfaatnya terhadap pencapaian tujuan organisasi;

4. Melaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi manajemen risiko dan pengukuran tingkat pemahaman manajemen risiko dari pegawai pada masing-masing unit kerja;
5. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja Eselon 1 dengan:
  - a. Melakukan pemutakhiran Register Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan mempertimbangkan anggaran, perubahan dalam lingkungan organisasi, dan efektivitas pengendalian;
  - b. Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antar lembaga dan risiko *fraud* pada tingkat kementerian maupun unit kerja;
  - c. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas SDM untuk tingkat kementerian maupun unit kerja;
  - d. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
  - e. Melakukan monitoring RTP dan efektivitasnya oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) masing-masing unit kerja;
  - f. Mendorong Inspektorat Jenderal untuk melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko; dan
  - g. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam setiap pengambilan keputusan oleh pejabat pada seluruh unit kerja.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur,

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Kisyadi

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap.

Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada [wbs.bpkp.go.id](http://wbs.bpkp.go.id). atau menghubungi 085210991239

**DAFTAR SATUAN KERJA SAMPEL  
SAMPEL EVALUASI**

No	Nama Satker
1	Satker Eselon II Itjen
2	Satker Eselon II BPTJ
3	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi
4	Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
5	Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
6	Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan
7	Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
8	Setditjen KA
9	Dit. LLAKA
10	Dit. Prasarana
11	Dit. Sarana
12	Dit. Keselamatan
13	BTP Jakarta
14	BTP Bandung
15	BTP Semarang
16	BTP Surabaya
17	BTP Medan
18	BTP Padang
19	BTP Palembang
20	Balai Pengujian
21	Balai Perawatan
22	BPKAR Sumsel
23	BPKA Sulawesi Selatan
24	Sekretariat BPSDMP
25	PPSDM Phb Darat
26	PPSDM Phb Laut
27	PPSDM Phb Udara
28	Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan
29	STIP Jakarta
30	BP3IP
31	Poltektrans SDP Palembang
32	Poltekel Banten
33	PIP Semarang
34	Poltekel Surabaya
35	PPI Curug
36	Poltekel Palembang
37	Poltekel Medan
38	Poltekel Surabaya
39	PKTJ Tegal
40	PPI Madiun
41	BP3 Curug
42	Biro Perencanaan
43	Biro SDMO
44	Biro Keuangan
45	Biro Hukum
46	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN
47	Biro Umum
48	Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
49	Pusat Data dan Teknologi Informasi
50	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
51	Komite Nasional Keselamatan Transportasi

No	Nama Satker
52	Mahkamah Pelayaran
53	Sesditjen Perhubungan Darat
54	Direktorat Angkutan Jalan
55	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
56	Direktorat Sarana Transportasi Jalan
57	Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
58	BPLJSKB
59	BPTD Wil. II Sumut
60	BPTD Wil. III Sumbar
61	BPTD Wil. VII Sumsel & Babel
62	BPTD Wil. VIII Banten
63	BPTD Wil. IX Jabar
64	BPTD Wil. X Jateng & DIY
65	BPTD Wil. XI Jatim
66	BPTD Wil. XIV Kalbar
67	BPTD Wil. XV Kalsel
68	BPTD Wil. XXII Sulut
69	BPTD Wil. XXIII Maluku
70	BPTD Wil. XXIV Maluku Utara
71	Direktorat Angkutan Udara
72	Direktorat Bandar Udara
73	Direktorat Keamanan Penerbangan
74	Direktorat Navigasi Penerbangan
75	Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara
76	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
77	Balai Teknik Penerbangan
78	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I
79	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II
80	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III
81	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
82	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V
83	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI
84	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII
85	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII
86	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX
87	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X
88	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata
89	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan
90	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sis Al-Jufri
91	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara DEO
92	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Halu oleo
93	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Gusti Sjamsir Alam
94	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani
95	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Umbu Mehang Kunda
96	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betoambari
97	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung
98	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo
99	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tambolaka
100	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman
101	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Gorontalo
102	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Karel Satsuitubun - Langgur
103	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire
104	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Aek Godang
105	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Morowali

No	Nama Satker
106	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Namrole
107	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Tanjung Balai Karimun
108	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kaimana
109	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Long Ampung
110	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Yuvai Semaring
111	Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Nunukan
112	Sesditjen Perhubungan Laut
113	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
114	Direktorat Kepelabuhanan
115	Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
116	Direktorat Kenavigasian
117	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
118	Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok
119	Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak
120	Kesyahbandaran Utama Makassar
121	Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
122	Otoritas Pelabuhan Utama Belawan
123	KSOP Khusus Batam
124	KSOP Kelas I Banten
125	KSOP Kelas I Balikpapan
126	Disnav Kelas I Tanjung Priok
127	Disnav Kelas I Surabaya
128	Disnav Kelas I Tanjung Pinang
129	Disnav Kelas I Samarinda
130	Disnav Kelas I Makassar
131	Disnav Kelas I Bitung
132	Disnav Kelas I Ambon
133	Disnav Kelas I Palembang
134	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar
135	Distrik Navigasi Kelas II Pontianak
136	Distrik Navigasi Kelas II Kendari
137	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Patimban
138	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit
139	Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Manado
140	Distrik Navigasi Kelas III Cilacap

**Evaluasi**  
**Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi**  
**K/L: Kementerian Perhubungan**

**KERTAS KERJA EVALUASI**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>						
Kualitas Sasaran Strategis	4	0,500		2,000		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	0,500		2,500		
<b>SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN</b>		1,000		<b>4,500</b>		
<b>BOBOT PENETAPAN TUJUAN</b>			<b>0,400</b>		<b>1,800</b>	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>						
<b>Lingkungan Pengendalian</b>						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,063	0,038		0,077		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,250	0,038		0,122		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	0,607	0,038		0,023		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,250	0,038		0,122		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,000	0,038		0,075		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	1,417	0,038		0,053		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	0,038		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	0,875	0,038		0,033		
<b>Penilaian Risiko</b>						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,500	0,100		0,150		
Analisis Risiko (2.2)	0,675	0,100		0,068		
<b>Kegiatan Pengendalian</b>						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,500	0,023		0,057		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	1,750	0,023		0,040		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,750	0,023		0,063		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,000	0,023		0,045		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	0,023		0,068		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	0,023		0,068		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	1,500	0,023		0,034		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	0,023		0,068		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	1,500	0,023		0,034		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	1,500	0,023		0,034		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,000	0,023		0,045		
<b>Informasi dan Komunikasi</b>						
Informasi yang Relevan (4.1)	1,263	0,050		0,063		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,750	0,050		0,138		
<b>Pemantauan</b>						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	0,417	0,075		0,031		
Evaluasi Terpisah (5.2)	0,625	0,075		0,047		
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>				<b>1,670</b>		
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>			<b>0,300</b>		<b>0,501</b>	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>						
<b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b>						

Capaian <i>Outcome</i>	5,000	0,200		1,000		
Capaian <i>Output</i>	3,000	0,100		0,300		
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>						
Opini Laporan Keuangan	3,000	0,250		0,750		
<b>Pengamanan atas Aset Negara</b>						
Catatan Pengamanan Aset	3,000	0,250		0,750		
<b>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>						
Temuan Ketaatan - BPK	1,000	0,200		0,200		
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN</b>		1,000		3,000		
<b>BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN</b>			0,300		0,900	
<b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI</b>						<b>3,20</b>

**NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS**

**2,77**

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
<b>PERENCANAAN</b>	<b>0,400</b>		<b>1,80</b>
KUALITAS PERENCANAAN	0,400	4,50	1,80
<b>KAPABILITAS</b>	<b>0,300</b>		<b>0,28</b>
KEPEMIMPINAN	0,050	0,77	0,04
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	0,050	1,50	0,08
SUMBER DAYA MANUSIA	0,050	0,63	0,03
KEMITRAAN	0,025	0,88	0,02
PROSES MANAJEMEN RISIKO	0,125	0,90	0,11
<b>HASIL</b>	<b>0,300</b>		<b>0,69</b>
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	0,188	0,68	0,13
OUTCOMES	0,113	5,00	0,56
<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>		<b>2,77</b>

**NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI**

**1,46**

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI
<b>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</b>	<b>0,480</b>		<b>0,68</b>
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	0,096	2,06	0,20
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	0,072	2,06	0,15
DUKUNGAN SUMBER DAYA	0,072	0,61	0,04
POWER (KUASA & WEWEWANG)	0,144	0,61	0,09
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	0,096	2,06	0,20
<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>	<b>0,360</b>		<b>0,46</b>
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	0,090	0,68	0,06
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	0,036	1,26	0,05
KEPEMIMPINAN ETIS	0,090	0,61	0,05
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	0,072	2,06	0,15
IKLIM ETIS PRINSIP	0,072	2,06	0,15
<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>	<b>0,160</b>		<b>0,33</b>
INVESTIGASI	0,080	2,06	0,17
TINDAKAN KOREKTIF	0,080	2,06	0,17
<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>		<b>1,46</b>

**KAPABILITAS APIP**

**3**

# **LAMPIRAN**

## **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 8**

**PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
(PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN**





**KEMENTERIAN KEUANGAN R.I  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN  
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)**

**LAPORAN TARGET & REALISASI PNPB PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
UNIT ESELON I : 08 - Ditjen Perkeretaapian  
PERIODE LAPORAN : JANUARI s.d. DESEMBER

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	2.200.000.000,00	1.856.650.000,00	1.856.650.000,00
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	29.763.160,00	0,00
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	18.335.775.000,00	21.675.126.142,00	0,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	8.910.900.000,00	2.179.458.220,00	0,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0,00	83.955.444,00	0,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424915 - Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	22.499.220,00	0,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0,00	176.375.000,00	0,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.072,00	0,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.457.575.492,00	1.457.575.492,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	900.190.000,00	900.190.000,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	0,00	0,00	37.055.000,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	1.360.885.000,00	1.299.020.000,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425711 - Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	24.810.000,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425791 - Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0,00	0,00	16.320.000,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	46.935.561,00	46.935.561,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	16.320.000,00	0,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	72.646.500,00	72.646.500,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	3.746.819.596,00	3.746.819.596,00
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	53.367.777,00	53.367.777,00
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	212.736.667,00	212.736.667,00
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	53.687.514,00	53.068.951,00
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.930.250,00	0,00
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	13.140.000,00	13.140.000,00
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	281.496.420,00	281.496.420,00
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425121 - Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	28.111.000,00	28.111.000,00
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	558.844.000,00	558.844.000,00
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	633.613.234,00	633.435.324,00
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.670.100,00	0,00
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	493.531.397,00	493.531.397,00
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	211.370.000,00	211.370.000,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.570.000,00	0,00
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	93.036.665,00	93.036.665,00
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	473.195.000,00	473.195.000,00
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	8.559.925,00	5.639.000,00
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	156.093.720,00	156.093.720,00
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.935.809.405,00	1.935.809.405,00
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	2.699.000,00	2.699.000,00
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425248 - Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0,00	11.510.000,00	11.510.000,00
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	807.518.000,00	807.518.000,00
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	45.997.249,00	0,00
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	15.171.050,00	0,00
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	16.880.000,00	16.880.000,00
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	20.324.124,00	20.324.124,00
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	6.165.766.440,00	6.165.766.440,00
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	352.716.400,00	352.716.400,00
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	32.585.923.000,00	32.585.923.000,00
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	2.075.160.307,00	2.075.160.307,00
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	85.512.160.000,00	632.100.000,00	632.100.000,00
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.386.454,00	0,00
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0,00	55.541.846.934,00	0,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	15.002.345,00	15.002.345,00
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	56.557.240.000,00	55.120.000,00	55.120.000,00
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	13.189.100,00	13.189.100,00
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	7.246.000,00	0,00
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	36.000.000,00	0,00
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	368.095.000,00	368.095.000,00
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.007.000.000.000,00	568.455.398.829,00	568.455.398.829,00
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	331.750.000,00	1.712.000.000,00	1.712.000.000,00
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	205.026.250,00	205.026.250,00
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	200.000.000,00	41.745.000,00	41.745.000,00
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.141.500.000,00	1.675.000.000,00	1.675.000.000,00
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	3.543.292,00	0,00
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	824.250.000,00	85.750.000,00	85.750.000,00
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.084.000.000,00	935.800.000,00	935.800.000,00
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	69.225.315,00	0,00
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	461.037.557,00	461.037.557,00
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	27.890.077.900,00	27.890.077.900,00
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.000.000.000,00	23.723.688.041,00	23.723.688.041,00
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	130.906.077,00	81.736.020,00
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	24.689.000,00	24.689.000,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	256.000.000,00	256.000.000,00
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	70.127.416,00	0,00
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	137.468.528,00	137.468.528,00
<b>Total</b>		<b>1.197.097.575.000,00</b>	<b>763.597.248.089,00</b>	<b>683.576.468.316,00</b>



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN PER ESELON1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	Kode Es. 1   Nama Es. 1	Pagu	Realisasi		Persentase
			Perpajakan	PNBP	Realisasi
10	02201   SEKRETARIAT JENDERAL	4,092,665,000	0	5,101,960,919	124.66%
11	02202   INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	211,440,251	0.00%
12	02203   DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1,442,571,669,000	1,627,100	1,374,783,594,977	95.30%
13	02204   DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	4,575,087,064,000	0	4,965,294,740,352	108.53%
14	02205   DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	1,282,082,532,000	0	1,336,635,329,024	104.26%
15	02208   DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	1,197,097,575,000	0	763,597,248,089	63.79%
16	02211   BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	0	0	1,410,239,825	0.00%
17	02212   BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	1,382,978,701,000	0	1,582,309,207,765	114.41%
18	02213   BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	8,488,650,000	0	12,649,311,801	149.01%

# **LAMPIRAN**

## **INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 9**

**PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN  
PERKERETAAPIAN**

## Ditjen Perkeretaapian

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

## Nilai Kinerja

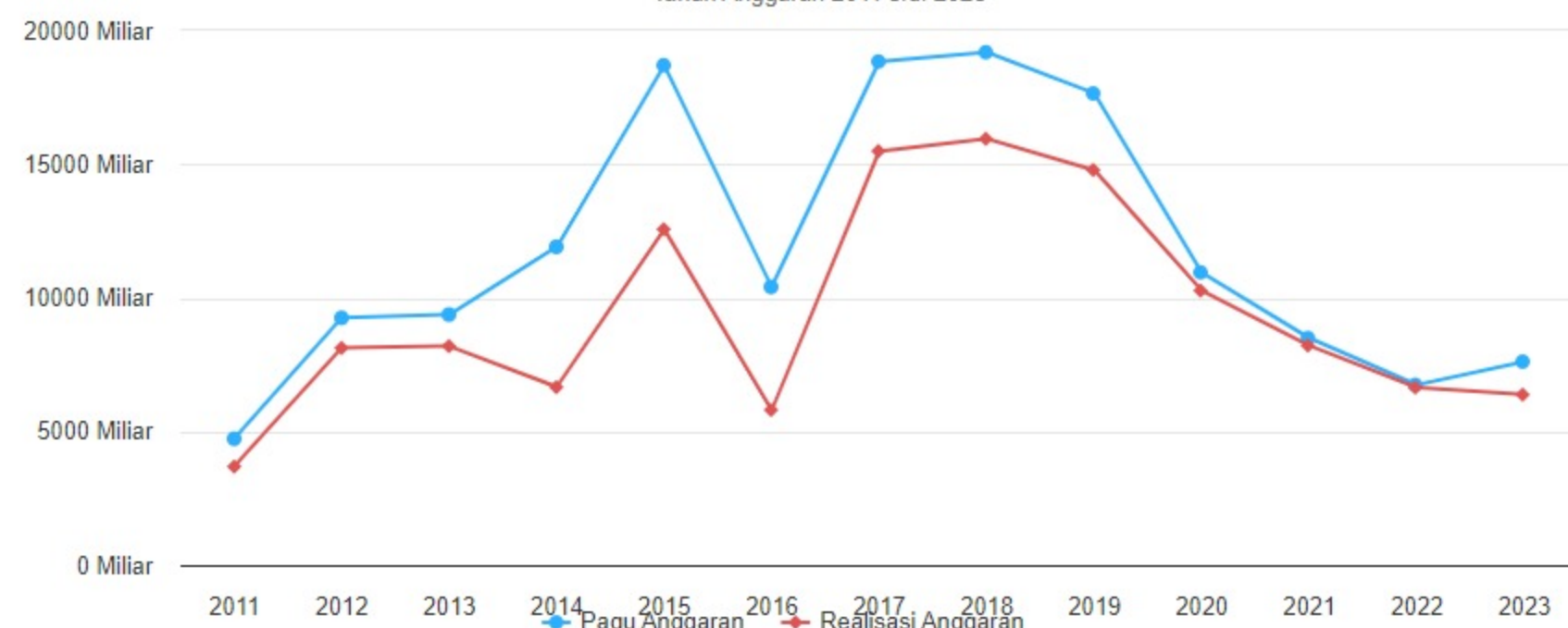
87.27

Baik

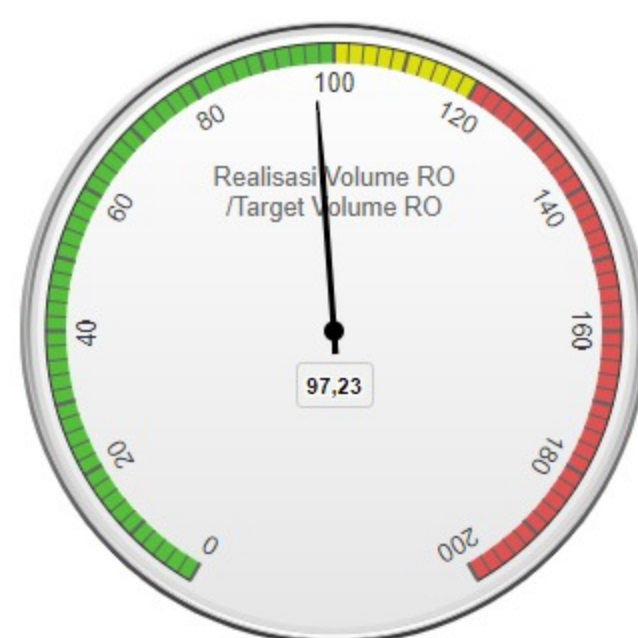


## Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2023



## Persentase Volume RO



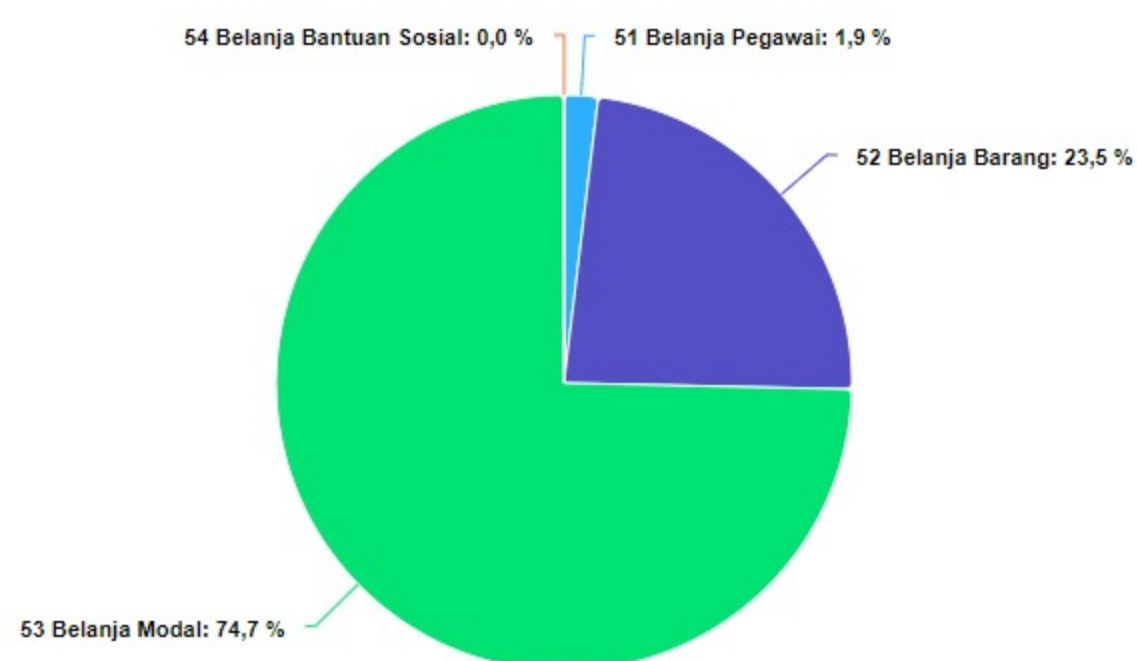
## Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	144.616.902.000	141.936.482.873	98.15 %
52 Belanja Barang	1.783.968.349.000	1.718.747.155.260	96.34 %
53 Belanja Modal	5.680.261.987.000	4.517.827.784.841	79.54 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

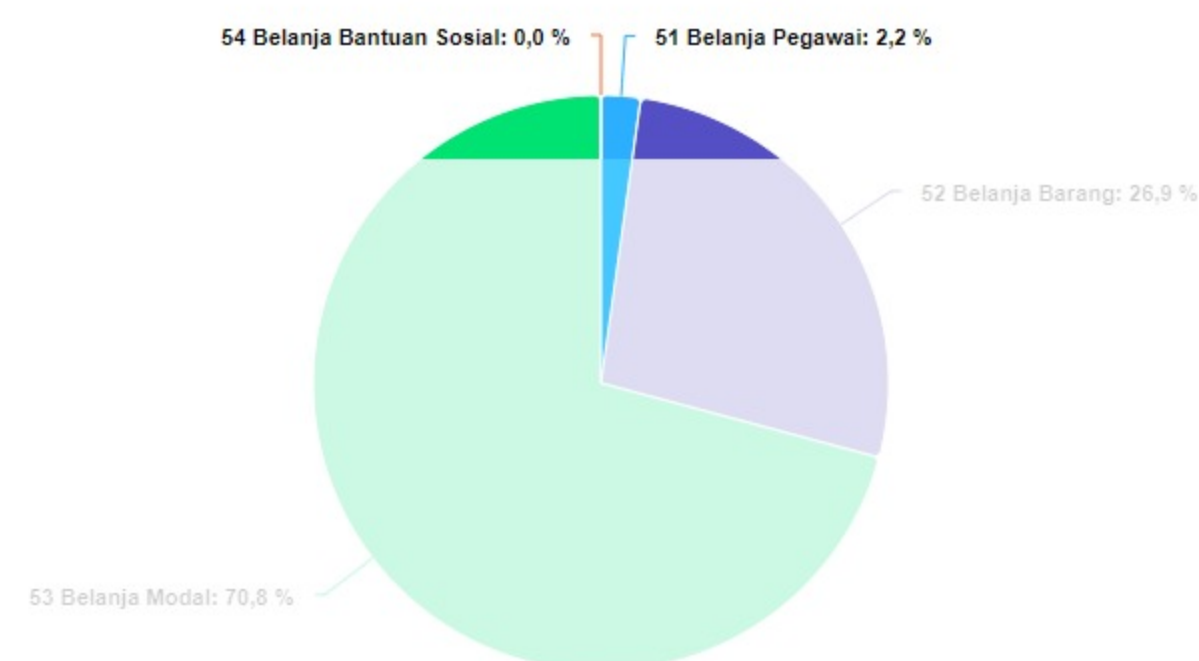
Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

## Komposisi Alokasi Anggaran



## Komposisi Realisasi Anggaran



## Partisipasi Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	445572	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	467005	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	467006	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!
4	467309	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	467321	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	467337	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!
7	467345	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!
8	467352	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 8 dari 16 entri

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya



## NKA Satuan Kerja

Monitoring / NKA Satker

[Download Excel](#)Tampilkan  entriCari: 

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	Kinerja ↑↓	Penyerapan ↑↓	Konsistensi ↑↓	CRO ↑↓	Efisiensi ↑↓	Nilai Efisiensi ↑↓
9	467364	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	97,85	89,33	93,90	100,00	20,00	100,00
11	467385	BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	96,46	97,21	86,33	100,00	18,91	97,27
14	467484	PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	91,65	90,12	99,14	100,00	9,88	74,71
4	467309	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	88,22	52,79	89,40	87,89	20,00	100,00
12	467462	PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	87,50	97,02	99,75	100,00	2,98	57,46
13	467478	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	86,38	98,66	99,17	100,00	1,34	53,35
1	445572	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	86,14	99,20	99,72	100,00	0,80	51,99
15	467504	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	86,07	98,07	95,47	100,00	1,93	54,84
8	467352	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	85,95	99,50	99,68	100,00	0,50	51,25
2	467005	BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	81,68	99,67	99,68	90,43	0,33	50,82
3	467006	BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	75,60	91,32	88,22	93,48	-5,98	35,05
10	467373	BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	70,68	99,18	98,06	65,79	0,41	51,02
6	467337	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	65,89	95,39	99,62	87,18	-19,19	2,03
5	467321	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	49,93	66,45	92,56	61,24	-20,00	0,00
16	467515	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	35,00	89,44	97,41	19,75	-20,00	0,00
7	467345	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	32,36	85,58	91,92	16,86	-20,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 16 dari 16 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya



## REALISASI BELANJA ES.1 PER JENIS BELANJA

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	02201   SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU REALISASI	135,876,597,000 135,441,084,109 (99.68%)	364,895,730,000 362,731,280,118 (99.41%)	65,109,131,000 64,984,085,661 (99.81%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	565,881,458,000 563,156,449,888 (99.52%)
		SISA	435,512,891	2,164,449,882	125,045,339	0	0	0	0	0	0	2,725,008,112
2	02202   INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU REALISASI	46,046,388,000 46,036,313,174 (99.98%)	51,498,442,000 51,491,506,559 (99.99%)	4,269,953,000 4,266,374,347 (99.92%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	101,814,783,000 101,794,194,080 (99.98%)
		SISA	10,074,826	6,935,441	3,578,653	0	0	0	0	0	0	20,588,920
3	02203   DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU REALISASI	568,232,214,000 560,902,286,762 (98.71%)	3,206,073,186,000 3,178,184,404,295 (99.13%)	2,044,219,620,000 1,982,435,754,761 (96.98%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	5,818,525,020,000 5,721,522,445,818 (98.33%)
		SISA	7,329,927,238	27,888,781,705	61,783,865,239	0	0	0	0	0	0	97,002,574,182
4	02204   DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU REALISASI	1,773,083,473,000 1,747,851,998,408 (98.58%)	4,850,179,519,000 4,808,797,080,718 (99.15%)	4,024,641,307,000 3,858,329,883,002 (95.87%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	10,647,904,299,000 10,414,978,962,128 (97.81%)
		SISA	25,231,474,592	41,382,438,282	166,311,423,998	0	0	0	0	0	0	232,925,336,872
5	02205   DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU REALISASI	890,722,123,000 921,547,736,516 (103.46%)	2,538,473,462,000 2,505,251,686,640 (98.69%)	4,004,519,055,000 3,934,935,775,284 (98.26%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	7,433,714,640,000 7,361,735,198,440 (99.03%)
		SISA	-30,825,613,516	33,221,775,360	69,583,279,716	0	0	0	0	0	0	71,979,441,560
6	02208   DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	144,616,902,000 141,936,482,873 (98.15%)	1,783,968,349,000 1,718,747,155,260 (96.34%)	5,847,869,678,000 4,685,435,474,695 (80.12%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	7,776,454,929,000 6,546,119,112,828 (84.18%)
		SISA	2,680,419,127	65,221,193,740	1,162,434,203,305	0	0	0	0	0	0	1,230,335,816,172
7	02211   BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	34,805,083,000 34,796,038,240 (99.97%)	122,553,304,000 122,411,344,287 (99.88%)	3,772,426,000 3,772,425,110 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	161,130,813,000 160,979,807,637 (99.91%)
		SISA	9,044,760	141,959,713	890	0	0	0	0	0	0	151,005,363



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

8	02212   BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	298,140,404,000 295,984,666,590 (99.28%)	2,855,198,484,000 2,813,789,849,889 (98.55%)	768,108,870,000 765,626,905,196 (99.68%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	3,921,447,758,000 3,875,401,421,675 (98.83%)
		SISA	2,155,737,410	41,408,634,111	2,481,964,804	0	0	0	0	0	0	46,046,336,325
9	02213   BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU REALISASI	33,114,459,000 32,964,156,841 (99.55%)	159,009,366,000 158,728,687,097 (99.82%)	67,589,128,000 67,584,963,014 (99.99%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	259,712,953,000 259,277,806,952 (99.83%)
		SISA	150,302,159	280,678,903	4,164,986	0	0	0	0	0	0	435,146,048
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	<b>3,924,637,643,000</b> <b>3,917,460,763,513</b> <b>(99.82%)</b>	<b>15,931,849,842,000</b> <b>15,720,132,994,863</b> <b>(98.67%)</b>	<b>16,830,099,168,000</b> <b>15,367,371,641,070</b> <b>(91.31%)</b>	<b>0</b> <b>(0.00%)</b>	<b>0</b> <b>(0.00%)</b>	<b>0</b> <b>(0.00%)</b>	<b>0</b> <b>(0.00%)</b>	<b>0</b> <b>(0.00%)</b>	<b>0</b> <b>(0.00%)</b>	<b>36,686,586,653,000</b> <b>35,004,965,399,446</b> <b>(95.42%)</b>
		SISA	<b>7,176,879,487</b>	<b>211,716,847,137</b>	<b>1,462,727,526,930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,681,621,253,554</b>



LAPORAN PERINGKAT REALISASI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	295,106,419,000	295,324,440,555	100.07%
2	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	4,614,034,533,000	4,605,846,423,050	99.82%
3	BADAN INTELIJEN NEGARA	15,823,856,051,000	15,768,383,231,867	99.65%
4	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,199,093,753,000	2,191,058,412,575	99.63%
5	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	184,667,396,000	183,855,010,980	99.56%
6	BADAN STANDARISASI NASIONAL	219,520,537,000	218,475,931,022	99.52%
7	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	329,423,576,000	327,797,004,390	99.51%
8	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	247,666,124,000	246,205,261,906	99.41%
9	LEMBAGA SANDI NEGARA	602,951,229,000	599,240,157,327	99.38%
10	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	296,234,394,000	294,241,499,614	99.33%
11	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	407,191,105,000	404,476,261,240	99.33%
12	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	430,076,132,000	426,960,091,164	99.28%
13	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,316,856,713,000	1,306,686,312,780	99.23%
14	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	329,099,461,000	326,538,665,624	99.22%
15	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	714,273,367,000	708,257,051,872	99.16%
16	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	524,390,687,000	519,230,088,328	99.02%
17	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	245,480,500,000	242,998,904,315	98.99%
18	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,089,874,149,000	4,046,046,621,270	98.93%
19	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	267,670,167,000	264,529,794,146	98.83%
20	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	341,990,713,000	337,894,479,988	98.8%
21	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	51,020,046,000	50,369,298,518	98.72%
22	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	6,098,212,555,000	6,019,389,792,398	98.71%
23	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	119,831,945,000	118,214,807,714	98.65%
24	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	241,525,168,000	238,074,180,645	98.57%
25	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,201,183,049,000	1,182,715,214,584	98.46%
26	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	122,534,805,000	120,600,010,822	98.42%
27	KEMENTERIAN PARIWISATA	3,391,631,213,000	3,336,990,355,918	98.39%
28	KOMISI YUDISIAL RI	177,206,353,000	174,281,300,281	98.35%
29	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	5,481,143,903,000	5,390,008,587,553	98.34%
30	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	374,136,493,000	367,844,818,653	98.32%
31	SEKRETARIAT KABINET	356,605,412,000	350,586,033,180	98.31%
32	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	16,237,525,348,000	15,952,111,860,103	98.24%
33	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8,838,358,325,000	8,680,994,083,941	98.22%
34	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1,818,011,584,000	1,785,046,474,976	98.19%
35	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	7,285,579,878,000	7,150,538,001,807	98.15%
36	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,455,280,145,000	6,335,454,623,418	98.14%
37	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	3,174,537,259,000	3,115,269,990,171	98.13%
38	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	121,810,074,153,000	119,525,633,788,160	98.12%
39	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1,963,765,328,000	1,926,555,116,562	98.11%
40	BADAN KEAMANAN LAUT	999,175,887,000	979,066,521,673	97.99%
41	KEMENTERIAN AGAMA	74,303,994,635,000	72,780,799,989,708	97.95%
42	KEMENTERIAN SOSIAL	87,275,374,140,000	85,450,328,833,258	97.91%
43	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1,393,656,874,000	1,362,970,608,141	97.8%
44	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	8,072,163,385,000	7,874,964,280,962	97.56%
45	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	124,246,201,000	121,175,304,404	97.53%
46	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2,389,935,124,000	2,330,384,254,078	97.51%
47	KEMENTERIAN KEUANGAN	67,947,898,774,000	66,224,407,739,682	97.46%
48	MAHKAMAH AGUNG	11,911,520,197,000	11,594,033,617,747	97.33%
49	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	4,614,692,296,000	4,490,447,063,630	97.31%
50	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4,385,969,126,000	4,265,153,052,424	97.25%
51	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	3,376,466,778,000	3,281,434,076,297	97.19%
52	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	18,933,274,107,000	18,395,194,724,367	97.16%
53	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1,128,605,685,000	1,094,951,654,261	97.02%
54	BADAN PUSAT STATISTIK	7,737,050,832,000	7,504,605,155,902	97%
55	KEMENTERIAN KESEHATAN	97,439,065,696,000	94,462,985,236,717	96.95%
56	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	291,326,942,000	282,321,773,172	96.91%
57	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1,694,059,841,000	1,640,437,671,493	96.83%

58	KOMISI PEMILIHAN UMUM	20,338,596,336,000	19,682,629,500,830	96.77%
59	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,000,382,475,000	967,397,861,413	96.7%
60	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	5,987,810,898,000	5,788,407,953,540	96.67%
61	KEMENTERIAN PERTANIAN	14,808,408,721,000	14,314,442,297,123	96.66%
62	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	187,144,450,000	180,573,176,981	96.49%
63	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	382,823,821,000	367,539,693,460	96.01%
64	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	182,020,768,752,000	174,324,456,800,897	95.77%
65	KEMENTERIAN PERTAHANAN	178,817,251,750,000	170,849,932,350,721	95.54%
66	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36,686,586,653,000	35,004,965,399,446	95.42%
67	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	3,207,506,191,000	3,059,412,186,175	95.38%
68	BADAN PANGAN NASIONAL	464,776,703,000	443,158,920,771	95.35%
69	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	1,079,227,170,000	1,028,677,308,609	95.32%
70	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	84,527,635,111,000	80,436,682,780,903	95.16%
71	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	444,623,115,000	422,480,461,258	95.02%
72	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	239,573,649,000	227,024,780,862	94.76%
73	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	285,909,376,000	269,655,347,469	94.31%
74	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	347,841,015,000	327,733,646,641	94.22%
75	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	917,377,288,000	863,930,512,516	94.17%
76	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	61,989,606,000	57,677,533,539	93.04%
77	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,624,963,914,000	1,505,907,984,062	92.67%
78	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	1,783,852,019,000	1,649,813,187,182	92.49%
79	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6,870,115,006,000	6,182,513,275,071	89.99%
80	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	9,943,019,129,000	8,558,820,520,945	86.08%
81	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16,789,096,461,000	14,258,689,518,580	84.93%
82	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	6,355,164,560,000	5,175,931,166,094	81.44%
83	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,714,892,330,000	2,152,638,770,664	79.29%
84	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4,530,403,749,000	3,168,043,190,067	69.93%

# **LAMPIRAN**

**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 10  
TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PERKANTORAN**



## Dokumentasi Fasilitas Perkantoran Tahun 2023

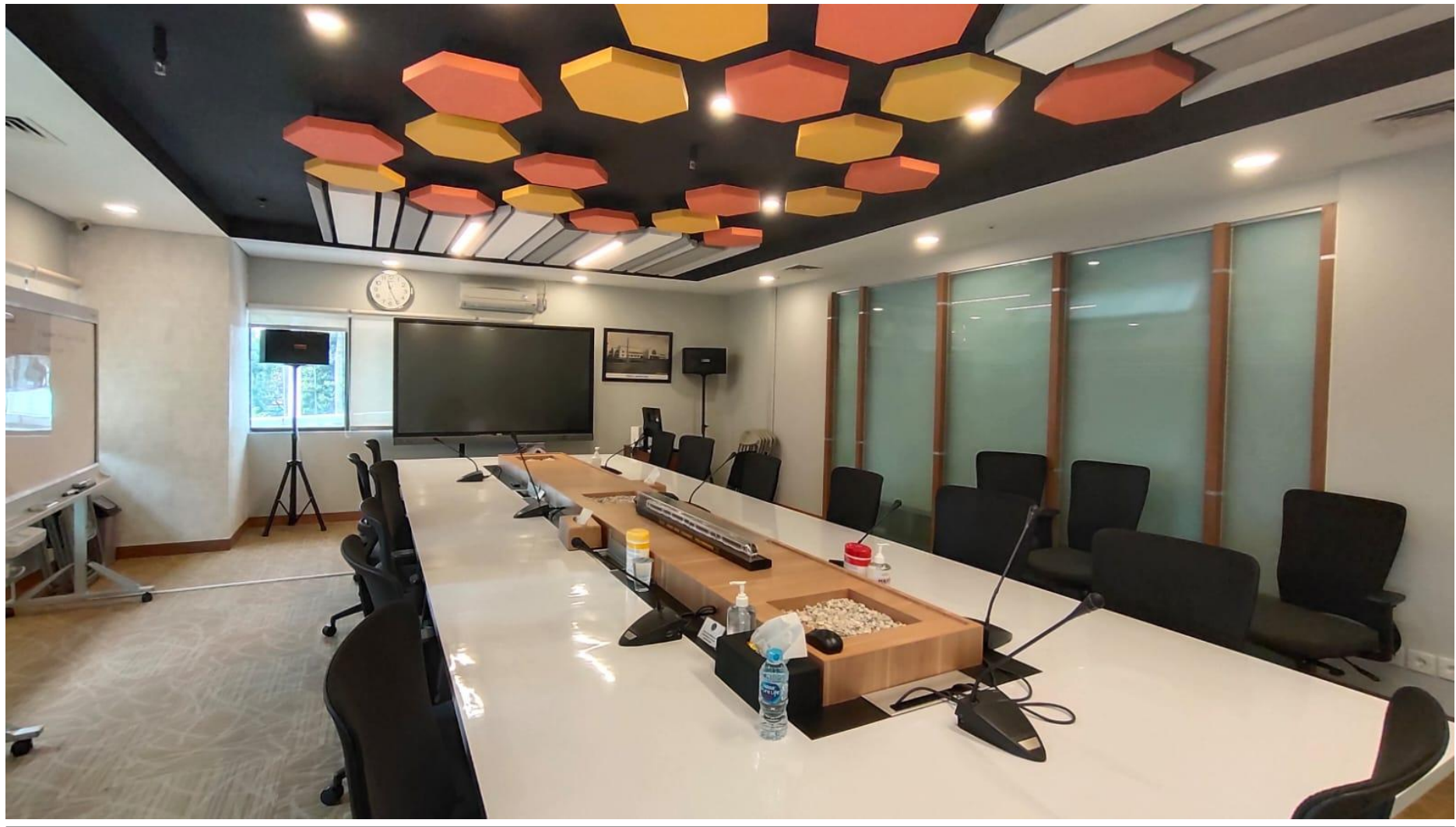


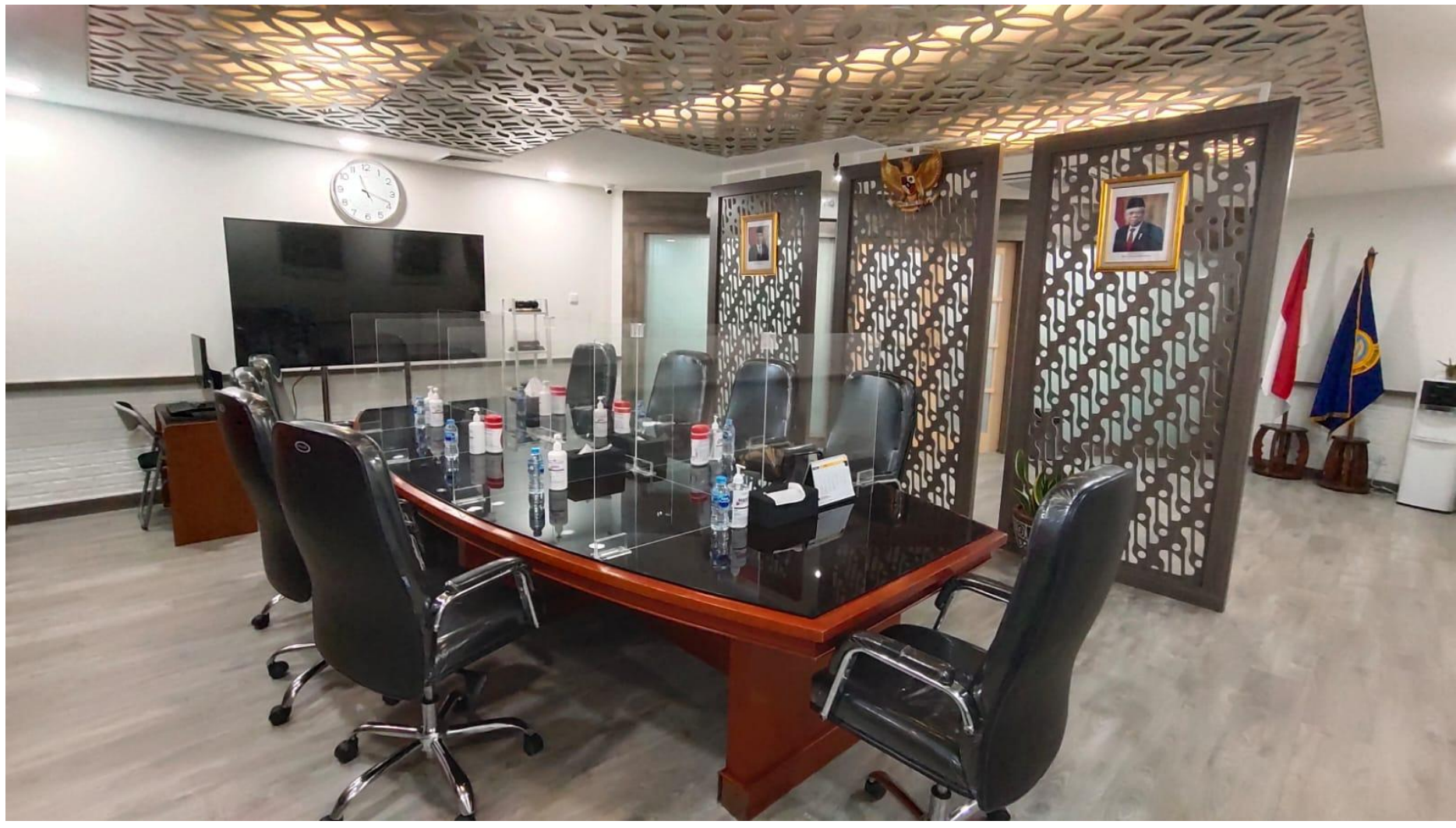
















# **LAMPIRAN VI**

**Dokumentasi Pembahasan Capaian Kinerja  
Tahun 2023**



No. ST : KP.004/2/12/K1/DJKA/2023  
Lokasi : Bogor



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**LAPORAN  
PEMBAHASAN DAN REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DAN EVALUASI  
PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN  
DIREKTORATJENDERAL PERKERETAAPIAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN  
JANUARI 2024**

**PEMBAHASAN DAN REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 DAN EVALUASI  
PEMANFAATAN APLIKASI PELAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN  
DIREKTORATJENDERAL PERKERETAAPIAN**

---

**A. DASAR PENUGASAN**

1. Surat Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/1/14/K1/DJKA/2024 tanggal 8 Januari 2024 perihal Undangan Rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP.004/2/12/K1/DJKA/2023 tanggal 10 Januari 2024

**B. PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Tempat : Salak Heritage Hotel Bogor dan Aplikasi *Zoom Meetings*
2. Tanggal : Kamis s.d Sabtu / 11 s.d 13 Januari 2024
3. Peserta Rapat :
  - a. Perwakilan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB (narasumber);
  - b. Perwaktilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA;
  - c. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
  - d. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
  - e. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
  - f. Perwakilan Bagian Keuangan, Setditjen Perkeretaapian;
  - g. Perwakilan Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
  - h. Perwakilan Bagian SDM dan umum, Setditjen Perkeretaapian;
  - i. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
  - j. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
  - k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
  - l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
  - m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
  - n. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
  - o. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
  - p. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
  - q. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
  - r. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
  - s. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.
4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Registrasi;
  - b. Mekanisme pelaksanaan reviu laporan kinerja;
  - c. Pembahasan capaian kinerja dan reviu konsep Laporan Kinerja Tahun 2023/Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 serta Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja untuk Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III;
  - d. Pembahasan dan penyusunan konsep Laporan Kinerja Tahun 2023/Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2023 Unit

Eselon I Ditjen Perkeretaapian;

- e. Penyusunan laporan kegiatan.

### C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

#### 1. Penyampaian materi dari Perwakilan KemenPANRB terkait Laporan Kinerja

- a. Tujuan LKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (atasan), sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan sebagai bentuk manajemen internal (bentuk usaha menemukan *Room of Improvement* pada struktur anggaran dan struktur perencanaan).
- b. Siklus SAKIP pada proses pelaporan kinerja yaitu proses berkelanjutan (*continuitas*) dari tahap perencanaan ke tahap pengukuran kinerja, lalu ke tahap pelaporan kinerja, lalu tahap evaluasi pelaporan kinerja dan berikutnya hasil evaluasi pelaporan kinerja tersebut nantinya digunakan untuk bahan Perjanjian Kinerja periode berikutnya.
- c. Format laporan capaian kinerja triwulan dalam PermanPAN 53 Tahun 2014 sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja dan dasar penyusunan pelaporan kinerja yaitu berisikan indikator kinerja:
  - 1) Rasio konektivitas antar wilayah;
  - 2) Rasio kejadian kecelakaan transportasi kereta api (*rate of accident*).
  - 3) Presentase *on time performance* (OTP) transportasi kereta api;
  - 4) Pemenuhan target angkutan penumpang kereta api;
  - 5) Pemenuhan target angkutan barang kereta api;
  - 6) Presentase pengoperasian jalur KA yang sesuai TQI.
- d. Disarankan pada format laporan kinerja disarankan untuk menambahkan analisis perbandingan antar capaian tahun berjalan dengan capaian periode akhir Renstra. Hal ini bertujuan untuk memantau serta melakukan evaluasi apakah capaian target di periode Renstra sudah realistis atau belum, serta untuk merumuskan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai target akhir periode Renstra (tahun ke lima).
- e. Disarankan kedepannya dalam penyusunan PK dilakukan revidi juga terhadap bahasa sasaran, yaitu sasaran adalah kondisi yang ingin dicapai pada periode akhir Renstra (tahun kelima). Bahasa Sasaran yaitu bahasa perubahan dari kondisi semula ke kondisi yang lebih baik (contohnya ada kata meningkatkan/mengembangkan).
- f. Pada Analisis Capaian Kinerja ketika menguraikan capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja, langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya:
  - 1) Mendefinisikan alasan/urgensi perkeretaapian Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program sebagai indikator kinerja yang harus ditingkatkan;
  - 2) Membandingkan antara target dengan realisasi;

- 3) Disarankan untuk menambahkan analisis perbandingan capaian kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - 4) Disarankan bila memungkinkan untuk menambahkan analisis perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional atau internasional (jika ada);
  - 5) Disarankan untuk menambahkan analisis dampak/outcome yang muncul dari pelaksanaan program (*subject* dampak bisa berupa masyarakat/*stakeholder*/lainnya);
  - 6) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - 7) Pada penyajian kegiatan capaian indikator kinerja, disarankan untuk menambahkan data pendukung untuk memperkaya isian laporan, misalnya dengan menambahkan elemen grafis terutama foto, grafik, gambar, tabel dan pendukung lainnya terkait capaian kinerja indikator tersebut (per masing-masing indikator);
  - 8) Disarankan untuk analisis sebaiknya disajikan dalam bentuk paragraf uraian.
- g. Untuk Analisis Capaian Kinerja Realisasi Anggaran langkah yang dapat dilakukan yaitu:
- 1) Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, bisa dianalisis untuk setiap Sasaran Strategis atau setiap indikator kinerja.
  - 2) Menguraikan analisis penggunaan sumber daya dan analisis efisiensi.
- h. Sesi Diskusi bersama Narasumber MenPANRB**
- 1) Narasumber perwakilan MenPANRB menyampaikan bahwasanya tidak ada acuan format rewiu karena diserahkan kewenangannya ke APIP/Inspektorat masing-masing K/L, sehingga untuk kewenangan rewiu LKIP disarankan sebaiknya mengikuti format AKIP Kementerian Perhubungan.
  - 2) Analisis *Benchmarking* hanya untuk indikator-indikator yang bisa dibandingkan secara nasional atau secara internasional, jika tidak ada tidak masalah. Disarankan untuk melakukan indikator mana saja yang bisa dilakukan *benchmarking* skala internasional, misalnya seperti indikator *Rate of Accident* dan indikator Rasio Konektivitas.
  - 3) KemenPANRB menyampaikan bahwasanya target minimal harus sama dengan capaian tahun lalu, sedangkan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyampaikan target harus lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kesimpulannya sebaiknya menentukan target yang realistis dicapai.
  - 4) Dalam penyusunan Renstra 2025 – 2029 perlu dilakukan analisis yang detail dan menggunakan bahasa sasaran dan bahasa target (SMART), dimensi indikator.

- 5) Perlu ditambahkan analisis perbandingan presentase capaian dengan Renstra.
- 6) Disampaikan dari KemenPANRB untuk target indikator yaitu minimal sama dengan tahun lalu, namun Itjen menyarankan lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
- 7) Diharapkan pada sasaran penggunaan Bahasa Sasaran dioptimalkan, pada target indikator menggunakan Bahasa Target dengan optimal dan SMART serta menggunakan Dimensi Indikator. Penetapan target juga disarankan menggunakan *based line* periode sebelumnya.

## 2. **Monitoring Pemanfaatan Aplikasi Pelaporan Kinerja**

- a. Diharapkan untuk unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, BTP Bandung dan BTP Padang untuk mengupload dokumen PK Revisi II Tahun 2023 di E-SAKIP Reviu. Diharapkan untuk tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III untuk segera mengupload dokumen monitoring rencana aksi bulan Oktober s.d bulan Desember.
- b. Tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III diharapkan segera melakukan pengisian aplikasi E-Performance diharapkan untuk melengkapi dokumen.
- c. Tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III diharapkan segera melengkapi monitoring rencana aksi pada SILAKI.
- d. Tiap unit kerja Eselon II dan Eselon III diharapkan segera melakukan pengecekan rincian output pada pemantauan komponen aplikasi e-monev bapenas.

## 3. **Penyusunan Laporan Kinerja & Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV 2023**

- a. Pada catatan dan rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat Jenderal disarankan agar melakukan reviu terhadap Laporan Kinerja, penyampaian dokumen Laporan Kinerja tepat waktu, serta melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit kerja secara berjenjang.
- b. Diperlukannya informasi terkait analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/Internasional (*benchmark* kinerja) dilakukan terhadap sebagian besar IKU/IKK pada Laporan Kinerja.
- c. Diperlukannya informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak terbatas hanya anggaran namun juga terkait sumber daya manusia, dll pada Laporan Kinerja.
- d. Diperlukannya informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) yang dapat dilaksanakan/kesan yang nyata, sehingga realisasi secara keseluruhan IKU/IKK termasuk kriteria setidaknya masih *on the right track* yaitu realisasi capaian kinerja IKU/IKK antara 90% s.d. 110%.
- e. Beberapa informasi yang harus dilaporkan di LKIP atau laporan capaian kinerja Triwulan IV diantaranya yaitu:

- 1) Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja → upaya peningkatan kinerja.
  - 2) Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi → upaya peningkatan kinerja.
  - 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas & penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja → upaya peningkatan kinerja.
  - 4) Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) → analisa.
  - 5) Dokumen Laporan Kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja → analisa.
  - 6) Setiap unit/satuan kerja/pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja termasuk pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang. → dokumen pendukung.
  - 7) Diperlukan informasi capaian/realisasi fisik masing-masing unit kerja → analisa.
  - 8) Pencantuman analisis SMART → uraian Perjanjian Kinerja.
  - 9) Upaya perubahan Budaya Kinerja dan yang patut dihargai pada pelaporan kinerja → tindak lanjut rekomendasi.
  - 10) Evaluasi terhadap prediksi capaian kinerja yang tidak On The Right Track → analisa.
- f. Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan:
- 1) Pada Bab I Sub Bab 1.5 terkait Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan, perlu diuraikan sesuaikan kondisi tahun 2023. Urgensi terkait dengan indikator juga bisa dimasukkan ke dalam poin ini.
  - 2) Pada Bab II Sub Bab 2.1 perlu ditambahkan uraian singkat mengenai Renstra dan uraian mengenai Revisi I PK dan Revisi II PK serta keterangan justifikasi perubahannya.
  - 3) Pada Bab III Sub Bab 3.2 butir A disarankan untuk menambahkan selengkap-lengkapnya data pendukung termasuk *impact* terkait indikatornya beserta foto, grafik, gambar, tabel pendukung. Serta alternatif solusi yang perlu dilakukan (*termasuk uraian pengaruh terhadap penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas, Anggaran, Organisasi, Jabatan/Pegawai*).
  - 4) Pada Bab III Sub Bab 3.2 butir C perlu ditambahkan perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode Renstra.
  - 5) Pada Bab III Sub Bab 3.2 butir D agar ditambahkan analisis perbandingan realisasi kinerja sebagian besar indikator dengan perbandingan skala nasional/internasional (50% indikator + 1 indikator).
  - 6) Pada Bab III Sub Bab 3.3 perlu ditambahkan analisis efisiensi Sumber Data (anggaran, SDM, dll).

- 7) Pada Bab III Sub Bab 3.4 perlu apabila memungkinkan ditambahkan dukungan program Prioritas Nasional.
  - 8) Pada Bab III Sub Bab 3.6 pada realisasi anggaran disarankan untuk melengkapi dengan *crosscutting* anggaran, kondisi perencanaan anggaran, dll).
  - 9) Pada Bab IV Sub Bab 4.1 sebaiknya ditambahkan upaya perubahan Budaya Kinerja apa saja yang sudah dilakukan.
  - 10) Pada Bab IV Sub Bab 4.3 terkait Rekomendasi Peningkatan Kinerja sebaiknya dilakukan sinkronisasi data dengan yang disajikan pada Bab III.
  - 11) Lampiran yang perlu disampaikan yaitu:
    - a) Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan
    - b) Lampiran II. Perjanjian Kerja (revisi terakhir)
    - c) Lampiran III. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja
    - d) Lampiran IV. Monitoring Rencana Aksi
    - e) Lampiran V. Data Dukung Capaian Kinerja Yang Valid
    - f) Lampiran VI. Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Kinerja di Internal
  - g. Format mandatory Laporan Tahunan/LKIP bisa mengacu *Benchmarking* LKIP Kementerian Keuangan.
4. **Reviu Laporan Kinerja 2023**
- a. KemenPANRB membebaskan mekanisme terkait Reviu Laporan Kinerja 2023. Reviu Draft LKIP Unit Kerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2023 berisikan hasil evaluasi dokumen LKIP Tahun 2022, Dokumen yang disampaikan (dalam reviu saat ini), serta pelaksanaan reviu (meliputi kelengkapan format laporan kinerja, mekanisme penyusunan dan substansi atas dokumen LKIP).
  - b. Format Draft LKIP 2023 dapat diakses pada link berikut: <http://lnk.dephub.go.id/UQJuK>
5. **Reviu Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II dan Eselon III di lingkungan Ditjen Perkeretaapian**
- a. **Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api**
    - 1) Hasil Evaluasi Dokumen LKIP Tahun 2022 akan diakomodir di LMCK Triwulan dan LKIP tahun 2023
    - 2) Draft dokumen LKIP LLAKA Tahun 2023 tahap penyusunan karena menunggu data dukung.
    - 3) Kelengkapan Format Laporan Kinerja masih dalam proses penyusunan.
    - 4) Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja masih dalam tahap proses penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
    - 5) Subtansi atas Dokumen LKIP Dit. LLAKA Tahun 2023 antara lain:
      - a) IKK Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaringan Perkeretaapian yang telah Ditindaklanjuti.  
Target TW IV yaitu 80,00 dan realisasi TW IV 80,00 (capaian 100%, terpenuhinya 7 kegiatan dari target 7 kegiatan).

Analisa Keberhasilan: Koordinasi yang intens kepada stakeholder terkait dalam rangka penyempurnaan dokumen hasil kajian studi kelayakan serta survei investigasi dan rancangan dasar.

- b) IKK Persentase Pencapaian Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian.

Target TW IV yaitu 69,00 dan realisasi TW IV 69,00 (capaian 100%, terpenuhinya 5 kegiatan dari target 5 kegiatan).

Analisa Keberhasilan: Telah melaksanakan koordinasi aktif dan pembahasan revidi dengan pihak terkait sehingga kegiatan dapat diselesaikan.

- c) IKK Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA Target TW IV yaitu 84,00 dan realisasi TW IV 90,78 (capaian 100%). Total kumulatif perjalanan kereta api dari Januari s.d. Desember 2023 sebanyak 686.881 KA dari program 756.683 KA.

Analisa keberhasilan: Terpenuhinya target dipengaruhi seiring dengan meningkatnya frekuensi perjalanan LRT Jabodebek periode tanggal 1 - 14 Oktober 2023 dan beropersinya KA Feeder Whoosh sejak tanggal 3 Oktober 2023.

- d) IKK Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu.

Target TW IV yaitu 91,00 dan realisasi TW IV 90,28 (capaian 99%). Keberangkatan dan kedatangan tepat waktu kereta api dari Januari s.d. Desember 2023 sebanyak 620.093 KA dari jumlah frekuensi kereta api sebanyak 686.881 KA. Komponen data ini termasuk data dari KAI, data KCJB, data LRT Sumatera Selatan dan data kereta api di Sulawesi Selatan.

Analisa Kegagalan: Tidak terpenuhinya Target IKU Tahun 2023 dipengaruhi karena adanya andil kelambatan dari faktor Jalan Rel dan Jembatan (40,79%), Anjlogon (26,87%), dan Sarana (12,64%). Data LRT Jabodebek dan MRT menggunakan *headway*.

- e) IKK Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Target TW IV yaitu 53,88 dan realisasi TW IV 57,11 (capaian 106%). Total angkutan penumpang Januari s.d. November 387.301.870 Pnp dari jumlah target 425.107.168 Pnp dengan rata-rata realisasi angkutan penumpang tiap bulan sebesar 35.209.958 KA.

Analisa Keberhasilan:

- Peningkatan angkutan penumpang pada KRL Jabodebek, beroperasinya LRT Jabodebek, dan beroperasinya KCJB.
- Meningkatnya permintaan dan produksi barang yang mengakibatkan naiknya penggunaan KA Barang terutama pada angkutan pupuk, dan angkutan hasil perkebunan.

- f) IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang LLAKA.



Target TW IV yaitu 82,00 dan realisasi TW IV 84,00 (capaian 102%).  
Analisa Keberhasilan:

Melakukan koordinasi yang intens dan diskusi yang mendalam kepada stakeholder terkait dalam penyusunan NSPK guna memperoleh data sekunder sesuai kebutuhan analisis.

- g) IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA.

Target TW IV yaitu 3,60 dan realisasi TW IV 3,67 (capaian 102%).  
Analisa Keberhasilan:

Kualitas pelayanan Informasi Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu penyelesaian, Tarif/biaya, Sarana Prasarana, Respon, Konsultasi dan Pengawasan sangat baik.

- h) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA

Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 56,61 (capaian 56,61%).

Total realisasi PNBP Periode Januari s.d. Desember 2023 Bidang LLAKA adalah sebesar Rp. 570.215.398.829,- dari target PNBP sebesar Rp. 1.101.432.822.000,-

- Penerimaan PNBP Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge (TAC) Tahun 2023 sebesar Rp. 568.455.398.829,00.
- Penerimaan PNBP dari bidang Perizinan sampai dengan bulan Desember 2023 adalah sebesar: Rp.1.760.000.000,-

Analisa kegagalan:

Penerimaan PNBP TAC diperoleh dari PNBP TAC terutang pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 belum diperoleh penerimaan PNBP TAC dari Badan Usaha Wajib Bayar yang telah dilakukan pengiriman surat penagihan sampai Triwulan III Tahun 2023.

- i) IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA

Target TW IV yaitu 80,00 dan realisasi TW IV 87,50 (capaian 109%).

Analisa keberhasilan:

- Pembahasan Laporan yang dilakukan oleh Tim Teknis di Direktorat LLAKA dilakukan sesuai dengan jadwal.
- Pengawasan terhadap Pengguna Anggaran salah satunya dengan cara penyesuaian terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah ditetapkan agar target Capaian Kinerja Tercapai.
- Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap sisa Anggaran di Tahun Anggaran berjalan.

- j) IKK Nilai AKIP Direktorat LLAKA

Target TW IV yaitu 80,00 dan realisasi TW IV 83,35 (capaian 104%).

- k) IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat LLAKA

Target TW IV yaitu 3,00 dan realisasi TW IV 3,20 (capaian 107%). Namun untuk penulisan baiknya ditulis 3 karena menggunakan satuan level (pembulatan ke bawah).

**b. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;**

- 1) IKK Rasio Keterhubungan Jalur Kereta Api Antar Wilayah  
Target TW IV yaitu 0,45 dan realisasi TW IV 0,440 (capaian 98,44%). Kendala pencapaian target tahun 2023 pada PKW Sawahlunto, sampai dengan bulan November 2023 belum dilaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian dikarenakan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang belum melengkapi Syarat-syarat teknis Pengujian sebagaimana berdasarkan surat Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor : KA.605/3/3/K3/DJKA/2023 Tgl 16 Mei 2023 Tentang Permintaan Dokumen Persyaratan sertifikasi uji pertama jalur dan bangunan KA lintas Sawahlunto - Muaro Kalaban.
- 2) IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II  
Target TW IV yaitu 92,87 dan realisasi TW IV 93,85 (capaian 101,05%). Realisasi ini berdasarkan hasil pengukuran TQI Periode ke 3 Tahun 2023 terdiri dari panjang jalur KA kategori 1 dan 2 sepanjang 5.538,965 Km dan kategori 3 dan 4 sepanjang 361,979 Km.
- 3) IKK Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal  
Target TW IV yaitu 63,92 dan realisasi TW IV 63,92 (capaian 100%). Analisa keberhasilan yaitu dengan penambahan interlocking sistem persinyalan elektrik pada tahun 2023 sebanyak 8 interlocking elektrik yaitu :
  - a) Interlocking elektrik pada Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Universitas Indonesia, Stasiun Depok Baru telah dilaksanakan Switch Over St. Depok Baru dan St. Universitas Indonesia pada Bulan Juni 2023.
  - b) Interlocking elektrik LRT Jabodebek yang ada di OCC Depo Jatimulya, telah dilakukan peresmian LRT Jabodebek pada bulan Agustus 2023 oleh Presiden RI dan sudah beroperasi untuk melayani publik;
  - c) Interlocking Woosh menggunakan CTCS (Chinese Train Control System)-3 dengan teknologi GoA2 di 4 Stasiun yaitu Tegalluar, Padalarang, Karawang, Halim telah dilakukan Peresmian pada bulan Oktober oleh Presiden RI dan sudah beroperasi untuk melayani publik;
- 4) IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 3,60 dan realisasi TW IV 3,70 (capaian 103,05%). Capaian ini merupakan nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat bulan Januari s.d Desember 2023.
- 5) IKK Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 94,80% dan realisasi TW IV 94,93 (capaian 100,13%). Capaian ini berhasil dikarenakan penerbitan sertifikat kelaikan prasarana perkeretaapian pada tahun 2023 sebanyak 447 sertifikat yang terdiri 144 sertifikat kelaikan jalur dan bangunan KA dan 303 sertifikat kelaikan fasilitas operasi kereta api.

- 6) IKK Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian.  
Target TW IV yaitu 89,19% dan realisasi TW IV 91,89% (capaian 103,02%). Penambahan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian yang telah disusun dan ditetapkan pada tahun 2023 sebanyak 9 NSPK/Peraturan/Pedoman.
- 7) IKK Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian.  
Target TW IV yaitu 81,00 dan realisasi TW IV 83,95 (capaian 103,64%).
- 8) IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 3,00 dan realisasi TW IV 3,00 (capaian 100%).
- 9) IKK Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 89,50% dan realisasi TW IV 91,85% (capaian 102,62%). Rincian realisasinya yaitu Penyerapan Anggaran 89,79%, Konsistensi 99,11%, Capaian RO 100%, Nilai Efisiensi 75,53%.
- 10) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 100% dan realisasi TW IV 80,54%. Analisa kegagalannya dikarenakan:
  - a) Akun 425287 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan sebesar Rp 85.750.000,-
  - b) Akun 425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya sebesar Rp 920.800.000,-
  - c) Akun 425913 Pengembalian Belanja Modal Tahun YLL sebesar 461.037.557,-
  - d) Akun 522131 sebesar Rp. 5.471.302.674; (Pengembalian Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Konstruksi dan Supervisi)

**c. Direktorat Sarana Perkeretaapian;**

- 1) IKK Persentase rekomendasi kebijakan bidang fasilitas sarana yang telah ditindaklanjuti  
Target TW IV yaitu 66,67 dan realisasi TW IV 66,67 (capaian 100%). Telah dilaksanakan pembahasan laporan akhir pada bulan Desember 2023 dan konsultan ahli sudah menyampaikan dokumen studi reviu DED Depo KRL Cikarang dan SMN kepada Direktorat Sarana Perkeretaapian. Realisasi kinerja hingga bulan Desember 2023 berdasarkan baseline tahun 2020-2023 antara lain:
  - a) Kebijakan fasilitas sarana KRL Lintas Yogyakarta-Solo (2020);
  - b) Kebijakan fasilitas Sarana Milik Negara di Sumatera Utara (2020);

- c) Kebijakan DED (Detail Engineering Design) Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta- Solo (2022);
  - d) Studi reuiu DED Depo KRL Cikarang dan SMN (2023).
- 2) IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 3,20 dan realisasi TW IV 3,68 (capaian 115,01%). Capaian indeks kepuasan masyarakat bulan Desember 3,68 dari skala 4 dengan jumlah responden sebanyak 3 orang. Sehingga kumulatif hingga bulan Desember sebesar 3,68 dari skala 4 dengan responden sebanyak 61. Rencana Tindak Lanjut akan dilakukan evaluasi capaian nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2023.
- 3) IKK Pemenuhan sarana perkeretaapian milik negara  
Target TW IV yaitu 86,36 dan realisasi TW IV 86,60 (capaian 100,28%).  
Analisa pencapaian target:  
Kegiatan pengadaan 1 unit Railways Crane untuk Wilayah Sumatera Selatan merupakan kegiatan MYC 2022-2024, maka ditargetkan pekerjaan selesai di Tahun 2024. Progress dari kegiatan pengadaan sebagai berikut:
- a) Telah dilakukan kontrak pada tanggal 15 Desember 2022
  - b) Telah dilakukan pembayaran termin II pada bulan April 2023 dan pembayaran termin III pada bulan Desember 2023.
  - c) Komponen Hydraulic Winch, Proping Arm, Slewing Cylinder, Wheelset, Steel Plates masih dalam proses pengadaan.
  - d) Keterlambatan kedatangan komponen dan part disebabkan pengaruh perang Ukraina-Rusia.
  - e) Progres pekerjaan fisik per Desember 2023 mencapai 47%.
- Rencana tindak lanjut kedepannya Subdit pengelolaan Sarana Milik Negara akan melakukan koordinasi dan pengawasan pekerjaan pengadaan 1 unit railways crane untuk wilayah Sumatera Selatan (MYC 2022-2024) agar selesai sesuai target penyelesaian di tahun 2024. Rencana akan dilakukan pembayaran progress termin IV dan termin V pada tahun 2024.
- 4) IKK Pemenuhan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 76,19 dan realisasi TW IV 103,23 (capaian 135,49%). Persentase (kumulatif) capaian sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian hingga bulan Desember 2023 adalah sebesar 103,23%. Dengan capaian jumlah kumulatif hingga bulan Desember sebanyak 10.839 sertifikat, dengan rincian 4284 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 6555 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II.  
Rencana tindak lanjut:
- a) Mempercepat progress sertifikasi sarana;
  - b) Meningkatkan Koordinasi dengan Balai Pengujian dan Operator Sarana Perkeretaapian terkait percepatan progres sertifikasi sarana;

- c) Meningkatkan performa aplikasi SISAKA.
- 5) IKK Persentase sarana perkeretaapian yang dilakukan Rampcheck dengan hasil baik/ temuan minor  
Target TW IV yaitu 90,00 dan realisasi TW IV 90,06 (capaian 100,67%). Realisasi kumulatif pelaksanaan *rampcheck* sarana perkeretaapian hingga bulan Desember 2023 adalah 90,6% dengan jumlah sarana baik (memenuhi checksheet) sebanyak 3467 unit dari 3826 sarana yang diperiksa. Rencana tindak lanjut kedepannya akan dilakukan kegiatan *rampcheck* sarana perkeretaapian, secara periodik Subdit pengembangan dan pengawasan sarana melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan dan perawatan sarana. Selanjutnya melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rampcheck tahun 2023 agar pelaksanaan rampcheck di tahun 2024 dapat memenuhi target.
- 6) IKK Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 70,37 dan realisasi TW IV 70,37 (capaian 100%). *Baseline* NSPK Direktorat Sarana Perkeretaapian yang masih berlaku ada 19 dokumen. Posisi Kegiatan pada bulan Desember tahun 2023, sudah dilakukan pembahasan laporan akhir pada:
- a) Studi Standar Pemeriksaan dan Perawatan Sarana Perkeretaapian
  - b) Studi Penyusunan Standar Spesifikasi Teknis Kendaraan Railroad
  - c) Studi Penyusunan Pedoman Evaluasi Rancang Bangun Konstruksi Rangka Dasar, Badan, Alat Perangkai dan Bogie Sarana Perkeretaapian
  - d) Kajian Optimalisasi Pengelolaan Sarana Perkeretaapian Milik Negara untuk mendukung pembangunan transportasi perkeretaapian
  - e) Kegiatan Validasi Umur Data Perawatan dan Pemeriksaan untuk digunakan data pengujian berkala sarana perkeretaapian
  - f) Kegiatan Studi Penyusunan Standar dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Gantung
  - g) Pembangunan Sistem Aplikasi Penetapan Identitas Sarana Perkeretaapian Berbasis Digital
- Rencana tindak lanjut akan dilakukan pengesahan studi terhadap NSPK yang telah selesai dilaksanakan.
- 7) IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 90,00 dan realisasi TW IV 86,38 (capaian 95,97%). Kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian hingga bulan Desember 2023 sebanyak Rp 80.454.542.769 dari pagu anggaran Rp 81.546.079.000 dengan persentase keuangan sebesar 98,66% dan realisasi fisik sebesar 100%. Kedepannya akan dilakukan rencana tindak lanjut dengan evaluasi capaian tahun 2023 agar target tahun 2024 dapat tercapai.
- 8) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana perkeretaapian

Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 127,95 (capaian 127,95%). Kumulatif Capaian Realisasi PNBPN Direktorat Sarana Perkeretaapian hingga bulan Desember 2023 sebesar Rp 1.716.745.000 dari target sebesar Rp 1.341.500.000 dengan persentase sebesar 127,95%. Rencana tindak lanjutnya akan dilakukan pemantauan terhadap Perolehan PNBPN Bidang Sarana Perkeretaapian pada setiap periode.

9) IKK Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 80,00 dan realisasi TW IV 80,50 (capaian 100,63%). Hasil Evaluasi dan Implementasi SAKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian sebesar 80,50 (Predikat A) dengan interpretasi "Memuaskan" dengan rincian perencanaan kinerja: 22,80, pengukuran kinerja: 24,60, pelaporan kinerja 11,85 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 21,25. Kedepannya akan dilakukan koordinasi dengan anggota tim SK SAKIP 2023 terkait ketersediaan data capaian Triwulan IV dan LKIP 2023 serta melakukan evaluasi kinerja tahun 2023.

10) IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Sarana Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 3,00 dan realisasi TW IV 3,00 (capaian 100%). Kedepannya akan dilakukan evaluasi terhadap PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Sarana dan melakukan persiapan pelaksanaan Manajemen Risiko tahun 2024.

**d. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;**

1) IKK Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP)

Target TW IV yaitu 75,00 dan realisasi TW IV 75,00 (capaian 100%). Akan dilaksanakan bimtek terkait dengan penerapan SMKP kepada penyelenggara perkeretaapian sebelum dilakukan Audit SMK. Pada tahun 2023 dilaksanakan Audit SMKP Tingkat transisi kepada 3 penyelenggara perkeretaapian yaitu MRT, KCI, LRT Jakarta dengan nilai baik/memuaskan. Sehingga pada tahun ke 4 renstra (2020-2023) Terdapat 6 hasil Audit Penerapan SMKP oleh Penyelenggara Perkeretaapian dengan nilai baik/memuaskan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tingkat Awal : MRT, KCI, LRT Jakarta
- b) Tingkat Transisi : MRT, KCI, LRT Jakarta
- c) Dengan demikian realisasi tahun ke 4 renstra (2020-2023) tercapai 75% sesuai dengan target
- d) Akan dilaksanakan Audit SMKP Pada tahun 2024 untuk pencapaian target yang di tetapkan.

2) IKK Pemenuhan Sertifikat Kompetensi SDM Regulator Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 48,81 dan realisasi TW IV 69,18 (capaian 141,73%). Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah melaksanakan diklat Auditor dan diklat Asisten Penguji Sarana dan Prasarana pada bulan September dan bulan Oktober 2023. Selanjutnya dilakukan sertifikasi SDM Regulator Perkeretaapian sebanyak 642 orang, sehingga realisasi pada tahun ke 4 Renstra sebesar 69,18% (melebihi target yang

ditetapkan). Kedepannya akan berupaya untuk meningkatkan pencapaian sertifikasi SDM Regulator guna menjamin kompetensi SDM regulator dalam menjalankan tugasnya.

- 3) IKK Pemenuhan Sertifikat Kompetensi SDM Operator Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 89,31 dan realisasi TW IV 123,18 (capaian 137,92%). Pada tahun 2023 penambahan sertifikat SDM Operator sebanyak 10.711 sertifikat. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sertifikat Kompetensi Operator Perkeretaapian (TEKNIS) pada tahun ke 4 renstra di TW IV sebanyak 23.608 (12.922+10.711) sudah terpenuhi sehingga target pada TW IV sebesar 89,31 atau 16.977 sertifikat tercapai dan melampaui target yang ditetapkan. Kedepannya akan ditingkatkan lagi pencapaian sertifikat SDM Operator guna pencapaian target selanjutnya.
- 4) IKK Rekomendasi Keamanan dan Keselamatan yang Menjadi Kebijakan Stakeholder/Sudah Diimplementasikan/Ditindaklanjuti  
Target TW IV yaitu 50,00 dan realisasi TW IV 51,60 (capaian 103,20%). Akan dilakukan koordinasi dengan subdit terkait dan memantau instansi/operator untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.
- 5) IKK Pemenuhan NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 69,23 dan realisasi TW IV 74,35 (capaian 107,40%). Pada Tahun 2023 terdapat penambahan NSPK sebanyak 10 NSPK, dengan demikian realisasi pada Tahun ke 4 Renstra sebesar 74,35% atau 29 NSPK, sehingga capaian melebihi target yang ditetapkan sebesar 69,23%.
- 6) IKK Pemenuhan Akreditasi Lembaga Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 66,67 dan realisasi TW IV 66,67 (capaian 100%). Pada tanggal 23 November 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 19 Tahun 2022, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memberikan akreditasi kepada Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD yang berlaku sampai dengan 23 November 2027. Berdasarkan hal tersebut, dari tahun 2020 s.d. triwulan IV 2023 telah terakreditasi 4 Badan Lembaga Pendidikan Perkeretaapian atau 66,67% dari target Renstra. Kedepannya akan dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian serta Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian.
- 7) IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.  
Target TW IV yaitu 3,60 dan realisasi TW IV 3,82 (capaian 106%). Selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melakukan upaya peningkatan terhadap kualitas pelayanan dan mensosialisasikan link survey kepuasan masyarakat.

- 8) IKK Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 90,00 dan realisasi TW IV 86,14 (capaian 95,71%). Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada aplikasi SMART Kemenkeu adalah 86,14 dengan rincian sebagai penyerapan 99,20, konsistensi 99,72, CRO 100, Efisiensi, 0,8 dan Nilai Efisiensi 51,99. Selanjutnya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melaksanakan dan meningkatkan kegiatan yang mendukung realisasi keuangan dan fisik dan mendorong penyerapan anggaran.
- 9) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Keselamatan Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 86,56 (capaian 86,56%). Pada bulan Desember 2023 terdapat penambahan jumlah PNBP sebesar Rp250.363.160 sehingga total sampai dengan bulan Desember 2023 jumlah realisasi PNBP sebesar Rp.1.904.413.160 dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.200.000.000, sehingga target belum tercapai.
- 10) IKK Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 80,81 dan realisasi TW IV 82,15 (capaian 101,66%). Kedepannya akan dilengkapi hasil rekomendasi oleh Setditjen Perkeretaapian.
- 11) IKK Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 3 dan realisasi TW IV 3 (capaian 100%).

**e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta**

- 1) IKK Rasio Konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta  
Target TW IV yaitu 0,62 dan realisasi TW IV 0,62 (capaian 100%). Terkait Jasa Penilai Publik (KJPP) Pembebasan Lahan untuk Gedung Penunjang Operasional dan Akses Jalan Gudang terpaksa pekerjaannya tidak dapat dilaksanakan karena belum tersedianya lokasi pembebasan lahan untuk Gedung Penunjang Operasional dan Akses Jalan Gudang. Selain itu Kode anggaran tidak sesuai dengan judul wilayah pekerjaan. Selain itu terkait kegiatan RKL - RPL Reaktivasi Jalur KA Rangkasbitung - Labuan Tahap I karena belum ada arahan lebih lanjut dari pimpinan terkait pekerjaan tersebut maka pekerjaan tidak bisa terlaksana.
- 2) IKK Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta  
Target TW IV yaitu 88,96 dan realisasi TW IV 90,76 (capaian 102,06%). Untuk Persentase Pengoperasian Jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II adalah 90,79% (611,62 Kmsp) dengan Panjang Jalur KA terukur 673,681 Kmsp.
- 3) IKK Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta



Target TW IV yaitu 97,22 dan realisasi TW IV 98,72 (capaian 101,54%). Kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a) Penambahan Interlocking elektrik di 3 stasiun dari pekerjaan peningkatan fasilitas operasi KA Jabodetabek yaitu Pasar Minggu, UI, Depok Baru.
  - b) Untuk Triwulan 4 terdapat penambahan di beberapa stasiun yaitu Stasiun KCIC Halim dan Karawang, serta stasiun LRT Jabodebek, MRT, LRT Jakarta.
  - c) Total sinyal interlocking berbasis elektrik tahun 2023 di BTP Kelas I Jakarta menjadi 77 unit dari rencana sampai tahun 2024 sebanyak 78 unit.
  - d) Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek.
- 4) IKK Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta  
Target TW IV yaitu 62,01 dan realisasi TW IV 63,03 (capaian 101,64%). Realisasi kumulatif angkutan pnp s.d Triwulan IV Tahun 2023 adalah 888.797.663 Orang (27,16%) dan angkutan barang 16.125.685 ton (35,87%), total keseluruhan 63,03%. Realisasi TW I s/d Triwulan IV Tahun 2023 saja, untuk Angk Penumpang 346.919.999 Orang dan untuk Angkutan Barang 3.578.213 Ton.
- 5) IKK Tingkat keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta  
Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 99,68 (capaian 99,68%). Untuk Realisasi Triwulan IV, tidak terdapat kejadian kecelakaan KA. Untuk s/d Triwulan IV 2023 terdapat total 2 kejadian kecelakaan. Kecelakaan pertama pada saat Triwulan I, dan kecelakaan kedua pada saat Triwulan III.
- 6) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 100,00 dan realisasi TW IV 100,00 (capaian 100%). Untuk Realisasi PNBP BTP Kelas I Jakarta di Triwulan IV pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 358.141.955,- dengan rincian:
- a) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (Mulia KSO) senilai Rp 121.236.683,-
  - b) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (PT. Gapura Karya Mandiri) senilai Rp 10.309.805,-
  - c) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (Lubuk KSO) senilai Rp 13.858.800,-
  - d) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Sewa coffe corner ruang 2.2 St Manggarai bisnis) senilai Rp 103.395.000,-
  - e) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp 40.000.000,-

f) Sedangkan untuk Realisasi PNBK BTP Kelas I Jakarta di Triwulan I pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 106.436.628,- , di Triwulan II sebesar Rp 16.070.250,- dan di Triwulan III sebesar Rp 136.709.695,- Sehingga Total Realisasi PNBK BTP Kelas I Jakarta sampai dengan Triwulan IV pada Tahun 2023 yaitu sebesar **Rp. 617.358.528,-**.

7) IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

Target TW IV yaitu 82,00 dan realisasi TW IV 37,58 (capaian 45,83%). Perkeretaapian Kelas I Jakarta berdasarkan nilai pada dashboard SMART Kemenkeu yaitu sebesar 37,58%. Target ini tidak tercapai. Selanjutnya BTP Jakarta akan mengupayakan peningkatan penyerapan anggaran dan efisiensi.

Pagu Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV saat ini sebesar Rp 827.180.179.000, dikarenakan di bulan Desember ada penambahan Pagu sebesar Rp. 123.803.526.000 ,- dari pagu sebelumnya, dengan Realisasi Anggaran BTP Jakarta pada Triwulan IV berdasarkan e-MON per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 434.798.436.230 (52,56%) sedangkan untuk SPAN sebesar Rp. 434.789.069.787 (52,56%).

8) IKK Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta

Target TW IV yaitu 81,00 dan realisasi TW IV 80,35 (capaian 99,19%). Target tidak tercapai dikarenakan pelaporan yang kurang lengkap dan kurang tepat waktu, dan beberapa capaian IKK yang belum on the track. Dengan kegiatan yang telah dilakukan yaitu:

a) Pengisian LKE di Silaki.

b) Telah menyusun Laporan monitoring capaian kinerja BTP Kelas I Jakarta pada Triwulan III dan progress untuk TW IV dan LAKIP.

c) Penyesuaian anggaran dengan kegiatan di POK, sampai revisi 16.

9) IKK Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta  
Target TW IV yaitu 3,00 dan realisasi TW IV 3,00 (capaian 100%).

**f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung**

1) IKK Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 0,55 dan realisasi TW IV 0,55 (capaian 100%). Agar dapat diuraikan kegiatan pendukungnya seperti kegiatan pembangunan skybridge, saat ini dilaporkan kegiatan telah selesai.

2) IKK Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 87 dan realisasi TW IV 87 (capaian 100%). Data yang digunakan hasil pengukuran periode III 2023 dari DAOP Kegiatan pendukung yang dilaksanakan yaitu Jalur Ganda Sukabumi

3) IKK Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian

Target TW IV yaitu 67,74 dan realisasi TW IV 67,74 (capaian 100%). Data sudah inline dengan Direktorat Prasarana.

- 4) IKK Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian  
Target TW IV yaitu 39,60 dan realisasi TW IV 41,35. Data sudah inline dengan Direktorat Prasarana.
- 5) IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian
- 6) IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian
- 7) IKK Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian
- 8) IKK Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian

**g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang**

- 1) IKK Rasio Konektivitas Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang  
Target TW IV yaitu 0,42 dan realisasi TW IV 0,42 (capaian 100%). Pada bulan Desember 2023, rasio konektivitas tercapai 0,42 dengan jalur terhubung sebanyak 15 dari 36 titik konektivitas yang telah direncanakan terhubung. Reaktivasi Stasiun Semarang Tawang dan Pelabuhan Tanjung Mas sudah selesai secara fisik progress pekerjaan 100% dan telah dilaksanakan pengujian pertama namun perlu dilakukan tindak lanjut untuk beberapa temuan pengujian.  
Akan dilakukan segera pemenuhan tindak lanjut temuan dari hasil pengujian pertama dan segera dilakukan permohonan pengajuan pengujian paling lambat awal bulan februari 2024
- 2) IKK Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang  
Target TW IV yaitu 99,24 dan realisasi TW IV 99,50 (capaian 100,26%). Berdasarkan data pengukuran periode III dari KA Ukur PT KAI terdapat kenaikan dari capaian TW III yang semula 99,24 menjadi 99,50. Untuk meningkatkan nilai TQI, terdapat pekerjaan peningkatan jalur di tahun 2024 antara lain:
  - a) Pembangunan jalur ganda semarang solo fase I;
  - b) Peningkatan jalur KA Maos-Cilacap;
  - c) Peningkatan Jalur KA Solo-Wonogiri;
  - d) Perawatan dan pengoperasian prasarana (IMO).
- 3) IKK Persentase fasilitas operasi dengan teknologi handal di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang  
Target TW IV yaitu 86,67 dan realisasi TW IV 86,67 (capaian 100%). Perbandingan antara unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik (104 unit) dengan jumlah keseluruhan unit fasilitas operasi yang beroperasi berjumlah 120 unit, dengan rincian 104 sinyal elektrik, 16 sinyal mekanik. Untuk meningkatkan kehandalan fasilitas operasi berbasis sinyal elektrik, pada T.A 2023 di BTP Semarang akan melaksanakan kegiatan peningkatan sistem persinyalan pada stasiun kalioso yang semula

mekanik menjadi elektrik yang berprogress 96,26%. Serta akan dilakukan penggantian sistem sinyal elektrik dengan sistem terbaru pada lintas tegal pekalongan dan prupuk purwokerto, sementara masih dalam proses lelang ulang.pada tahun 2024.

- 4) IKK Pemenuhan target angkutan KA di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang  
Target TW IV yaitu 116,50 dan realisasi TW IV 117,84 (capaian 101,15%). Capaian realisasi angkutan KA bulan Desember 2023 sebanyak 2.563.617 penumpang dan 242.898 ton barang, sehingga capaian kumulatif total (2020-2023) sebesar (117,84%) dari target 2023 sebesar 116,5%. Kenaikan penumpang terjadi dikarenakan terdapat penambahan perjalanan pada gapeka yang baru serta adanya angkutan natal dan tahun baru.
- 5) IKK Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang  
Target TW IV yaitu 100 dan realisasi TW IV 100 (capaian 100%). Pada Bulan Desember 2023 dari 124 perjalanan yang direncanakan, tercapai 100% dengan frekuensi sebanyak 124 perjalanan KA dengan kapasitas angkutan penumpang perintis sebesar 13.154 penumpang. BTP Semarang telah melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan Triwulan IV 2023 bulan oktober dan November 2023 untuk memantau operasional KA Perintis agar sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- 6) IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Semarang  
Target TW IV yaitu 100 dan realisasi TW IV 98,52 (capaian 98,52%). Pada TW IV 2023 terdapat 1 kecelakaan kereta api di bulan oktober 2023 yaitu anjlokkan KA di petak jalan antara wates –stasiun sentolo.
- 7) IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Semarang terealisasi 49,53% dari target 81%. Perlu adanya pengoptimalan penyerapan anggaran agar nilai pada SMART dapat maksimal.
- 8) IKK Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Semarang telah terealisasi sebesar 112,8% dari target 100%, capaian sebesar 112,8%.
- 9) IKK Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Semarang telah terealisasi sebesar 80,45% dari rencana 79%.
- 10) IKK Tingkat Maturitas SPIP Balai Teknik Perkeretaapian Semarang telah terealisasi menggunakan level 3.

#### **h. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya**

- 1) Pada IKK terkait dengan rasio konektivitas wilayah capaian telah terealisasi 0,33% dari target 0,33% (capaian 100%).

- 2) Pada IKK terkait dengan TQI capaian telah terealisasi 98% dari target 97% (capaian 101%).
- 3) Pada IKK Persentase fasop dengan teknologi handal telah terealisasi 42,7% dari target 42,7 (capaian 100%)
- 4) Pada IKK target angkutan KA telah terealisasi 109% dari target 108% (capaian 101%).
- 5) Pada IKK tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 100 dari target 100 (capaian 100%)
- 6) Pada IKK kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 97,62% dari target 100% (capaian 97,62%)
- 7) Pada IKK realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 110% dari target 100 (capaian 110%)
- 8) Pada IKK nilai AKIP telah terealisasi 82,45 dari target 81 (capaian 102%)
- 9) Pada IKK tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%

**i. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan**

- 1) Pada IKK 1 terkait dengan rasio konektivitas wilayah capaian telah terealisasi 0,44% dari target 0,44% (capaian 100%).
- 2) Pada IKK 2 terkait dengan TQI capaian telah terealisasi 91,5% dari target 90% (capaian 101%).
- 3) Pada IKK 3 terkait Fasop dengan teknologi handal telah terealisasi 51,7% dari target 51,7% (capaian 100%)
- 4) Pada IKK 4 target angkutan KA telah terealisasi 45% dari target 42% (capaian 107%).
- 5) Pada IKK 5 realisasi perjalanan KA perintis telah terealisasi sebesar 100% dari target 100% (capaian 100%)
- 6) Pada IKK 6 tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 100 dari target 100 (capaian 100%)
- 7) Pada IKK 7 realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 100% dari target 100 (capaian 100%)
- 8) Pada IKK 8 kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 43,86% dari target 99% (capaian 44,30%)
- 9) Pada IKK 9 nilai AKIP telah terealisasi 81,7 dari target 79 (capaian 103%)
- 10) Pada tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%
- 11) Rekomendasi hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 akan diakomodir pada laporan monitoring capaian kinerja triwulan dan LKIP tahun 2023.
- 12) Dokumen yang disampaikan dalam rewiu berupa bahan paparan capaian kinerja tahun 2023 dan draft dokumen LKIP masih tahap penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 13) SPIP dan SAKIP rekomendasi dapat dimasukkan kepada rencana dan tindak lanjut untuk kedepannya.

- 14) Pelaksanaan anggaran pada penyerapan masih rendah akibat tidak bisa terserapnya 6 kegiatan. Agar dipantau nilai pada SMART
- 15) Keselamatan fokus pada kondisi prasarana, sarana dan SDM, Eksternal (keamanan sarana, prasarana dan SDM).
- 16) Analisis pada pemenuhan target angkutan KA khususnya penumpang perlu didetailkan/ditambahkan terkait penambahan layanan baru KA Perintis Datuk Blambangan.
- 17) Rasio dan TQI sudah sesuai, namun perlu penyamaan data base dengan Direktorat Teknis.
- 18) LKIP tahun 2023, analisis keberhasilan dan Upaya peningkatan dan kendala agar didetailkan berikut dengan dokumentasi dll, SMART agar dipantau sebagai acuan PK Tahun 2024, Data angkutan dan data lainnya agar dapat diisi.

**j. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang**

- 1) Pada IKK terkait dengan rasio konektivitas wilayah capaian telah terealisasi 0,5% dari target 0,63% (capaian 80%).
- 2) Pada IKK terkait dengan TQI capaian telah terealisasi 62,8% dari target 68,02% (capaian 92,33%).
- 3) Pada IKK target angkutan KA telah terealisasi 71,42% dari target 83,44% (capaian 104,24%).
- 4) Pada IKK realisasi perjalanan KA perintis telah terealisasi sebesar 99,59% dari target 100% (capaian 99,59%)
- 5) Pada IKK tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 100 dari target 100 (capaian 100%)
- 6) Pada IKK kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 86% dari target 86% (capaian 100%)
- 7) Pada IKK realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 108,88% dari target 100 (capaian 108,88%)
- 8) Pada IKK nilai AKIP telah terealisasi 82,45 dari target 81 (capaian 102%)
- 9) Pada IKK tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%
- 10) Rekomendasi hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 akan diakomodir pada laporan monitoring capaian kinerja triwulan III dan akan ditindaklanjuti pada triwulan IV 2023 dan LKIP tahun 2023.
- 11) Dokumen yang disampaikan dalam revidi berupa bahan paparan capaian kinerja tahun 2023 dan draft dokumen LKIP masih tahap penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 12) Pada IKK terkait TQI pedoman TQI akan disusun dengan hasil standar pengukuran yang sama sehingga realisasi tidak naik/turun.
- 13) Pada Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian fokus kepada prasarana, sarana dan SDM. perlintasan sebidang tidak mempengaruhi tingkat keselamatan.

14) Pada IKK nilai AKIP dan Tingkat maturitas SPIP rekomendasi dari ITJEN menjadi rencana kedepan yang harus di tindak lanjuti.

**k. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang**

- 1) Pada IKK 1 terkait dengan rasio konektivitas wilayah capaian telah terealisasi 0,71% dari target 0,71% (capaian 100%).
- 2) Pada IKK 2 terkait dengan TQI capaian telah terealisasi 92,04 dari target 89,84 (capaian 102,45%).
- 3) Pada IKK 3 terkait dengan fasilitas operasi dengan teknologi handal terealisasi sebesar 25,30 dari target 25,30 (capaian 100%)
- 4) Pada IKK 4 target angkutan KA telah terealisasi 79,53% dari target 74,78% (capaian 106,35%)
- 5) Pada IKK 5 tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 91,38 dari target 100 (capaian 91,38%)
- 6) Pada IKK 6 terkait dengan kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 93,86% dari target 83,71% (capaian 112,12%)
- 7) Pada IKK 7 terkait dengan nilai AKIP telah terealisasi 81,85 dari target 73 (capaian 103,6)
- 8) Pada IKK 8 terkait dengan tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%
- 9) Rekomendasi dari hasil evaluasi dokumen LKIP 2022 akan diakomodir pada triwulanan dan pada LKIP tahun 2023.
- 10) Dokumen yang disampaikan pada saat reviu masih dalam bahan paparan capaian kinerja tahun 2023 dan draft dokumen LKIP masih proses penyusunan yang dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 11) Pada rasio konektivitas perlu diuraikan kegiatan pendukung (apabila ada) dan rencana kedepanya apa yang akan di lakukan.
- 12) Pada kualitas pelaksanaan anggaran Pada nilai SMART, nilai CRO sudah diatas dari nilai penyerapan, namun dalam penentuan target masih belum maksimal sehingga capaian lebih dari 100% (112,12%).

**l. Balai Pengujian Perkeretaapian**

- 1) IKK Pemenuhan Pengujian kelaikan sarana perkeretaapian telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 79,73% dari target 77,35% (capaian 103,08%)
- 2) IKK Pemenuhan pengujian kompetensi SDM Perkeretaapian telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 44,83 % dari target 44,63% (capaian 100,45%)
- 3) IKK Pemenuhan pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 85,21% dari target 80,83% (capaian 105,42%)
- 4) IKK IKM terhadap pelayanan public yang diselenggarakan BPP telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 3,65% dari target 3,20% (capaian 114,06%)

- 5) IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 96,46% dari target 90% (capaian 107,18%)
- 6) IKK Persentase realisasi PNPB telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 98,43% dari target 100% (capaian 98,43%)
- 7) IKK Nilai AKIP telah terealisasi pada triwulan IV sebesar 81,85% dari target 81% (capaian 101,05%)
- 8) IKK Tingkat maturitas SPIP telah terealisasi pada level 3
- 9) Terhadap hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 akan diakomodir pada LMCK triwulanan dan LKIP tahun 2023
- 10) Kelengkapan format laporan kinerja masih dalam proses penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP
- 11) Analisis dan Upaya peningkatan kinerja agar didetailkan kembali

**m. Balai Perawatan Perkeretaapian**

- 1) IKK Meningkatnya kehandalan sarana perkeretaapian telah terealisasi sebesar 97,86% pada Triwulan IV dari target 100% (capaian 97,86%).
- 2) IKK Persentase kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi sebesar 70,86% pada triwulan IV dari target sebesar 91%.
- 3) IKK Persentase realisasi PNPB telah terealisasi sebesar 41,28% dari target pada triwulan IV sebesar 100% (capaian kinerja 41,28%)
- 4) IKK Nilai AKIP berdasarkan hasil penilaian telah terealisasi sebesar 82,45% pada triwulan IV dari target 80% (capaian 103,06%)
- 5) IKK Tingkat maturitas SPIP realisasi pada triwulan IV dengan level 3
- 6) Dari hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 rekomendasi akan ditindaklanjuti pada laporan triwulan III dan LKIP 2023.
- 7) Terhadap IKK Persentase sarana perkeretaapian milik negara yang siap operasi perlu Uraikan secara detil Analisis Kegagalan yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja, serta jelaskan secara detil Upaya peningkatan kinerja yang akan datang.
- 8) Terhadap IKK Kualitas pelaksanaan anggaran Perlu dicek dan diupdate terkait pengisian aplikasi SMART dan berkoordinasi dengan Bagian Perencanaan terkait CRO.
- 9) Terhadap IKK PNPB Perlu analisis lebih lanjut mengapa target tidak tercapai (target terlalu tinggi)
- 10) Terhadap IKK AKIP Rekomendasi/Upaya peningkatan kinerja yang akan datang dapat mengacu pada Surat Sesditjen tentang Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Balai Perawatan Perkeretaapian
- 11) Terhadap IKK SPPIP Uraikan secara detil Analisis Keberhasilan yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya kinerja, serta jelaskan secara detil Upaya peningkatan kinerja yang akan datang (dapat mengacu pada Surat Sesditjen tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Tahun 2023)

**n. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan**

- 1) IKK 1 Pemenuhan target angkutan kereta api ringan Sumsel dengan target 2023 sebesar 53,02% dengan realisasi 60,14%



- 2) IKK 2 Persentase kedatangan KA target sebesar 98,9% dengan realisasi 99,84%
- 3) IKK 3 IKM target sebesar 3,52% dengan realisasi 3,56%
- 4) IKK 4 Persentasi gangguan operasional target sebesar 100% dengan realisasi 100%
- 5) IKK 5 Tingkat keselamatan transportasi target sebesar 100% dengan realisasi 100%
- 6) IKK 6 Realisasi PNBPN target sebesar 100% dengan realisasi 88,59%
- 7) IKK 7 Pelaksanaan anggaran target sebesar 93,11% dengan realisasi 81,68%
- 8) IKK 8 Nilai AKIP target sebesar 78% dengan realisasi 78,55%
- 9) IKK 9 SPIP target 3 dengan realisasi 3
- 10) Rekomendasi hasil evaluasi dokumen LKIP tahun 2022 akan diakomodir pada laporan monitoring capaian kinerja triwulan dan LKIP tahun 2023.
- 11) Dokumen yang disampaikan dalam reviu berupa bahan paparan capaian kinerja tahun 2023 dan draft dokumen LKIP masih tahap penyusunan dan dikoordinasikan dengan tim SAKIP.
- 12) Analisa keberhasilan agar dilengkapi/diperkaya terkait data (kendala, tindak lanjut, Upaya peningkatan, dokumentasi dll)
- 13) SMART, Pengisian pada CRO agar dicek kembali dan disamakan dengan target dikarenakan semua kegiatan telah dilaksanakan.
- 14) PNBPN, agar dicek kembali data yang ditampilkan masih berbeda dengan aplikasi SPAN. Jika ada perbedaan agar dikoordinasikan dengan Bag. Keu
- 15) Capaian IKM telah disepakati dengan unit kerja lain bahwa menggunakan rata - rata nilai IKM perbulan.

**o. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan**

- 1) IKK Pemenuhan target angkutan kereta api ringan Sumsel dengan target 2023 sebesar 0,24% dengan realisasi 0,24% (capaian 100%)
- 2) Pada IKK terkait dengan fasilitas operasi dengan teknologi handal terealisasi sebesar 100 dari target 92,8 (capaian 108%)
- 3) Pada IKK target angkutan KA telah terealisasi 43,1% dari target 41% (capaian 105%)
- 4) Pada IKK Persentase kedatangan dan keberangkatan kereta api telah terealisasi sebesar 92,71% dari target 90% (capaian 103%)
- 5) Pada IKK tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian telah terealisasi 100 dari target 100 (capaian 100%)
- 6) Pada IKK terkait dengan kualitas pelaksanaan anggaran telah terealisasi 89,37% dari target 90,11% (capaian 99,17%)
- 7) Pada IKK terkait dengan nilai AKIP telah terealisasi 79,75% dari target 78 (capaian 102,2%)
- 8) Pada IKK terkait dengan tingkat maturitas SPIP telah mendapat penilaian dan terealisasi di level 3 sehingga capaian telah 100%

- 9) Pada IKK Realisasi PNBPN telah terealisasi sebesar 100% dari target 100% (capaian 100%)
- 10) Pada IKK PNBPN Perlu dilakukan pengecekan dokumen Revisi PK II terkait penambahan PNBPN Umum dari pembagian keuntungan PJKP dengan PT. CRI, karena seharusnya penambahan PNBPN sudah termasuk dalam Revisi PK II.

#### **D. Kesimpulan dan Tindak Lanjut**

- a. Tujuan LKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (atasan), sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan sebagai bentuk manajemen internal (bentuk usaha menemukan Room of Improvement pada struktur anggaran dan struktur perencanaan).
- b. Unit kerja perlu berperan aktif untuk mengecek kelengkapan dan validitas pengisian data capaian kinerja pada aplikasi kinerja secara berkala.
- c. Diperlukan peningkatan kepatuhan dan substansi pelaporan kinerja pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV sesuai catatan hasil implementasi SAKIP Itjen Kementerian Perhubungan.
- d. Perwakilan KemenPANRB menyarankan untuk menambahkan analisis dampak/outcome yang muncul dari pelaksanaan program (*subject* dampak bisa berupa masyarakat/*stakeholder*/lainnya);
- e. Terkait mekanisme revidu dokumen pelaporan kinerja diserahkan ke APIP, sehingga akan dilakukan revidu dokumen menggunakan referensi format terkait.
- f. Direktorat LLKA perlu melakukan sinkronisasi data angkutan penumpang kereta api khusus terkait dengan adanya isu penghitungan angkutan penumpang pada Kereta Cepat Jakarta – Bandung.
- g. Data Kinerja PNBPN periode Triwulan IV 2023 agar mengacu pada aplikasi SPAN Kementerian Keuangan serta dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan Setditjen Perkeretaapian untuk sinkronisasi.
- h. Masing – masing unit kerja agar menindaklanjuti hasil revidu terhadap dokumen/draft sementara LKIP 2023, sesuai dengan catatan pada capaian kinerja tahunan (triwulan IV).

#### **D. PENUTUP**

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Januari 2024

NOTULENSI

(Kelompok Evaluasi dan Pelaporan)

## Dokumentasi



